

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka Perubahan RPJMD ini diikuti dengan perubahan seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022.

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen ini menjadi tolok ukur bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Cimahi periode 2017-2022. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan tidak hanya kinerja keluaran (output), namun berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh pihak, kami mengharapkan target-target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD ini dapat tercapai sehingga visi Cimahi 2017-2022 **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"** dapat terwujud.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. LATAR BELAKANG I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-10
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-16
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-16
1.3.2. Hubungan RPJMD Dengan RTRW I-18
1.3.3. Hubungan RPJMD Dengan KLHS RPJMD Kota Cimahi I-19
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN I-20
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN I-21

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-15
2.1.4. Kondisi Demografi II-17
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-20
2.2.1. Pertumbuhan PDRB II-20
2.2.2. PDRB Per Kapita II-27
2.2.3. Laju Inflasi II-27
2.2.4. Indeks Gini II-28
2.2.5. Kemiskinan II-30
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-34

	2.2.7. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-36
	2.2.8. Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-38
	2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)	II-39
	2.2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..	II-41
2.3.	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-44
	2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib	II-44
	2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-177
	2.3.3. Fungsi Pendukung	II-193
	2.3.4. Fungsi Penunjang	II-197
	2.3.5. Pengawasan	II-201
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-202
2.5.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2019	II-224
2.6.	PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA	II-226
2.7.	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	II-228
BAB III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....**	**III-1**
3.1.	KINERJA KEUANGAN TAHUN 2012-2016	III-1
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
	3.1.2. Neraca Daerah	III-11
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-18
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-18
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-28
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	III-31
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-31
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-44
BAB IV	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....**	**IV-1**
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1

4.1.1.	Upaya Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal	IV-1
4.1.2.	Masih Terjadi Ketimpangan Pendapatan ...	IV-2
4.1.3.	Kurangnya Penyerapan Tenaga Kerja	IV-2
4.1.4.	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka	IV-3
4.1.5.	Menurunnya Kondisi Kemantapan Jalan ..	IV-3
4.1.6.	Masih Rendahnya Tingkat Pelayanan Jalan dan Transportasi di Kota Cimahi	IV-4
4.1.7.	Masih Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV-5
4.1.8.	Belum Optimalnya Akses Terhadap Air Bersih	IV-6
4.1.9.	Belum Optimalnya Pengelolaan Air Limbah Domestik	IV-7
4.1.10.	Belum Optimalnya Penanganan Genangan dan Banjir di Kota Cimahi	IV-8
4.1.11.	Belum Optimalnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-9
4.1.12.	Tingginya Potensi Bencana	IV-9
4.1.13.	Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	IV-10
4.1.14.	Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	IV-11
4.1.15.	Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan	IV-12
4.1.16.	Belum Optimalnya Penanganan PMKS	IV-14
4.1.17.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat	IV-14
4.1.18.	Belum Optimalnya Pengendalian Kependudukan	IV-15

4.1.19.	Belum Optimalnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK)	IV-16
4.1.20.	Belum Optimalnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Sarana Prasarana Olahraga	IV-17
4.1.21.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	IV-18
4.2.	ISU STRATEGIS	IV-18
4.2.1.	Telaahan Isu Internasional	IV-18
4.2.2.	Telaahan Isu/Kebijakan Nasional	IV-19
4.2.3.	Telaahan Isu/Kebijakan Regional	IV-71
4.2.4.	Telaahan Isu/Kebijakan Daerah	IV-80
4.2.5.	Penetapan Isu Strategis Kota Cimahi	IV-127
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....**	**V-1**
5.1.	VISI DAN MISI KOTA CIMAHI	V-1
5.2.	TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI	V-9
5.3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022	V-16
BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....**	**VI-1**
6.1.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.2.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI	VI-8
BAB VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....**	**VII-1**
BAB VIII	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....**	**VIII-1**
BAB IX	**PENUTUP .....**	**IX-1**
9.1	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-1

9.2 PEDOMAN TRANSISI IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kota Cimahi Berdasarkan Pembagian Kelurahan	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi	II-4
Tabel 2.3	Inventarisasi Sungai Kota Cimahi	II-5
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan di Kota Cimahi 2017	II-7
Tabel 2.5	Kawasan rawan banjir Kota Cimahi Tahun 2019 ..	II-15
Tabel 2.6	Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II-18
Tabel 2.7	Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019	II-19
Tabel 2.8	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2015-2019 .	II-21
Tabel 2.9	Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)	II-22
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi Tahun 2015-2019 .	II-24
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)	II-25
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-27
Tabel 2.13	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kota Cimahi Tahun 2015–2019	II-35
Tabel 2.14	Indeks Kesehatan dan Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-36

Tabel 2.15	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2019	II-48
Tabel 2.16	Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-43
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota Cimahi Tahun 2015–2019	II-45
Tabel 2.18	Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019	II-46
Tabel 2.19	Rasio Guru Murid di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-48
Tabel 2.20	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-48
Tabel 2.21	Rasio Guru dan Siswa tahun 2015-2019	II-49
Tabel 2.22	Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-50
Tabel 2.23	Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U Tahun 2019	II-53
Tabel 2.24	Gizi Buruk Kota Cimahi Tahun 2019	II-54
Tabel 2.25	Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-55
Tabel 2.26	Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2019 ..	II-58
Tabel 2.27	Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2019	II-64
Tabel 2.28	Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-64
Tabel 2.29	Karakteristik Tingkat Pelayanan	II-65
Tabel 2.30	Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-69
Tabel 2.31	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Tahun 2015-2019	II-69
Tabel 2.32	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-70

Tabel 2.33	Kondisi Kolam Retensi Tahun 2019 Kota Cimahi ..	II-71
Tabel 2.34	Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2017-2019	II-71
Tabel 2.35	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-74
Tabel 2.36	Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-75
Tabel 2.37	Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi	II-76
Tabel 2.38	Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-77
Tabel 2.39	Jumlah PMKS Kota Cimahi Menurut Jenis PMKS Tahun 2020	II-79
Tabel 2.40	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-80
Tabel 2.41	Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-83
Tabel 2.42	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-86
Tabel 2.43	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-86
Tabel 2.44	Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-87
Tabel 2.45	Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019 ...	II-88
Tabel 2.46	Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2019	II-89
Tabel 2.47	Pola Pangan Harapan ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-92
Tabel 2.48	*Volume Capacity Ratio* (VCR) di Kota Cimahi tahun 2017 s.d. tahun 2019	II-94
Tabel 2.49	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak di Kota Cimahi tahun 2018 s.d. tahun 2019	II-95

Tabel 2.50	Persentase Angkutan Yang Layak Jalan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-95
Tabel 2.51	Persentase penurunan titik kemacetan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-96
Tabel 2.52	Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-97
Tabel 2.53	Persentase Tersedianya Halte dan Terminal di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-98
Tabel 2.54	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-99
Tabel 2.55	Rasio Akseptor KB mandiri dan Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-100
Tabel 2.56	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-100
Tabel 2.57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-103
Tabel 2.58	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-103
Tabel 2.59	Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-104
Tabel 2.60	Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016	II-109
Tabel 2.61	Luas Wilayah Yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016	II-112
Tabel 2.62	Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Selisih Ketersediaan Energi Air Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-115
Tabel 2.63	Luas Wilayah Yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-117

Tabel 2.64	Timbulan Sampah Per Kecamatan Di Kota Cimahi 2016-2050	II-122
Tabel 2.65	Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	II-127
Tabel 2.66	Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan Di Kota Cimahi	II-133
Tabel 2.67	Nilai Potensi Beban Pencemar Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung	II-135
Tabel 2.68	Indeks Pencemaran Air Sungai	II-138
Tabel 2.69	Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi	II-144
Tabel 2.70	Cakupan Pengembangan *E-Government* Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-162
Tabel 2.71	Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-162
Tabel 2.72	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Cimahi Tahun 2018-2019	II-163
Tabel 2.73	Indikator Bidang Koperasi Tahun 2015-2019	II-164
Tabel 2.74	Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-166
Tabel 2.75	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-166
Tabel 2.76	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2017-2018 .	II-167
Tabel 2.77	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-168
Tabel 2.78	Persentase Sumberdaya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-168
Tabel 2.79	Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi	II-169
Tabel 2.80	Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi	II-169

Tabel 2.81	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah di Kota Cimahi Tahun 2018-2019	II-171
Tabel 2.82	Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-172
Tabel 2.83	Data Cagar Budaya Terverifikasi di Kota Cimahi ..	II-173
Tabel 2.84	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-178
Tabel 2.85	Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019	II-178
Tabel 2.86	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-179
Tabel 2.87	Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2015-2018	II-180
Tabel 2.88	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-181
Tabel 2.89	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-182
Tabel 2.90	Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-182
Tabel 2.91	Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-183
Tabel 2.92	Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak di Kota Cimahi Tahun 2019	II-184
Tabel 2.93	Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-184
Tabel 2.94	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019	II-188
Tabel 2.95	Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-189
Tabel 2.96	Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Tahun 2018 dan 2019	II-190

Tabel 2.97	Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITc	II-191
Tabel 2.98	Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-193
Tabel 2.99	Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-194
Tabel 2.100	Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2015-2019 ...	II-195
Tabel 2.101	Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-196
Tabel 2.102	Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-196
Tabel 2.103	Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-197
Tabel 2.104	Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-197
Tabel 2.105	Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-198
Tabel 2.106	Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-200
Tabel 2.107	Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-201
Tabel 2.108	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2015-2018	II-204
Tabel 2.109	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Kota Cimahi Tahun 2015-2018	II-205
Tabel 2.110	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Cimahi Tahun 2015-2018	II-207
Tabel 2.111	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-208
Tabel 2.112	Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-209
Tabel 2.113	Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi	II-209

Tabel 2.114	Jenis dan Macam Retribusi Daerah Kota Cimahi ..	II-210
Tabel 2.115	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-213
Tabel 2.116	Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-214
Tabel 2.117	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-214
Tabel 2.118	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-224
Tabel 2.119	Kesiapan Ruang Isolasi Rumah Sakit Kota Cimahi	II-227
Tabel 2.120	Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019	II-229
Tabel 2.121	Target dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019	II-230
Tabel 2.122	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019	II-230
Tabel 2.123	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II-232
Tabel 2.124	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2019	II-234
Tabel 2.125	Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Cimahi Tahun 2019	II-236
Tabel 2.126	Target dan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Cimahi Tahun 2019	II-237
Tabel 2.127	Target dan Realisasi Anggaran SPM Seksi Air Bersih dan UPT Air Minum Kota Cimahi Tahun 2019	II-238
Tabel 2.128	Anggaran SPM Pelayanan Air Limbah Domestik Kota Cimahi Tahun 2019	II-238
Tabel 2.129	Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2019	II-242

Tabel 2.130	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2019	II-244
Tabel 2.131	Target SPM Trantibum dan Linmas	II-245
Tabel 2.132	Realisasi Capaian SPM Trantibum dan Linmas ..	II-246
Tabel 2.133	Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Trantibum dan Linmas 2019	II-247
Tabel 2.134	Target SPM Urusan Sosial	II-250
Tabel 2.135	Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial	II-251
Tabel 2.136	Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial	II-252
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Kota Cimahi	III-6
Tabel 3.2.	Rasio Likuiditas	III-11
Tabel 3.3.	Ratio Solvabilitias	III-12
Tabel 3.4.	Debt Ratio	III-12
Tabel 3.5.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Cimahi	III-14
Tabel 3.6.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Cimahi Tahun 2012-2016	III-19
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Cimahi Tahun 2012-2016	III-24
Tabel 3.8.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Cimahi Tahun 2012-2016	III-27
Tabel 3.9.	Defisit Riil Anggaran Kota Cimahi	III-28
Tabel 3.10.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Cimahi	III-29
Tabel 3.11.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Cimahi Tahun 2014-2016	III-30
Tabel 3.12.	Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019 ...	III-34
Tabel 3.13.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020	III-39

Tabel 3.14.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	III-42
Tabel 3.15.	Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022	III-44
Tabel 3.16.	Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Cimahi Tahun 2017-2020	III-47
Tabel 3.17.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 an Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	III-50
Tabel 3.18.	Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2020	III-52
Tabel 3.19.	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022	III-53
Tabel 3.20.	Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018-2020	III-55
Tabel 3.21.	Rencana Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022	III-56
Tabel 4.1.	Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 di Kota Cimahi	IV-25
Tabel 4.2.	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota	IV-30
Tabel 4.3.	Evaluasi Indikator SDGs Kota Cimahi Tahun 2018	IV-34

Tabel 4.4.	Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*	IV-67
Tabel 4.5.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	IV-75
Tabel 4.6.	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Cimahi	IV-80
Tabel 4.7.	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah	IV-91
Tabel 4.8.	Rumusan alternatif Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kota Cimahi	IV-94
Tabel 4.9.	Arahan Kebijakan Dan Arahan Program Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kota Cimahi	IV-110
Tabel 5.1.	Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022	V-11
Tabel 5.2.	Perbandingan Indikator Makro Kota Cimahi Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dan Hasil Prediksi Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022	V-12
Tabel 5.3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022	V-12
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi Tahun 2018-2022	VI-2
Tabel 6.2.	Pelaksanaan Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2017-2022 Pada Program Pembangunan Daerah	VI-13
Tabel 6.3.	Program Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022	VI-24

Tabel 6.4.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2018	VI-30
Tabel 6.5.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2019-2020	VI-45
Tabel 6.6.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2021-2022	VI-59
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018–2022	VII-1
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2018 .	VII-4
Tabel 7.3.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2019-2020	VII-22
Tabel 7.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2021-2022	VII-41
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2018-2022	VIII-3
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Dampak *(Impact)* Tahun 2018-2020	VIII-5
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impac*t) Tahun 2021-2022	VIII-14
Tabel 8.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Hasil (*Outcome*) Tahun 2018-2022	VIII-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Diagram Alir Penyusunan Perubahan RPJMD ...	I-9
Gambar 1.2.	Bagan Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah	I-17
Gambar 1.3.	Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-19
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Cimahi	II-2
Gambar 2.2.	Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi	II-8
Gambar 2.3.	Peta Rawan Bencana Kota Cimahi	II-17
Gambar 2.4.	Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-17
Gambar 2.5.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-18
Gambar 2.6.	Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi	II-20
Gambar 2.7.	Kontribusi Sektor Dominan Terhadap Perekonomian Kota Cimahi Tahun 2019	II-23
Gambar 2.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II-26
Gambar 2.9.	Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II-28
Gambar 2.10.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019	II-29
Gambar 2.11.	Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar Tahun 2015-2018	II-30
Gambar 2.12.	Persentase Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-31
Gambar 2.13.	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	II-32
Gambar 2.14.	Garis Kemiskinan Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)	II-33

Gambar 2.15.	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 (dalam 000)	II-33
Gambar 2.16.	Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015–2019	II-35
Gambar 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019	II-37
Gambar 2.18.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019	II-38
Gambar 2.19.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-40
Gambar 2.20.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019	II-42
Gambar 2.21.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II-43
Gambar 2.22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Cimahi Tahun 2016-2020	II-44
Gambar 2.23.	Persentase Nilai Akreditasi Sekolah Jenjang SD di Kota Cimahi Tahun 2016-2019	II-47
Gambar 2.24.	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-48
Gambar 2.25.	Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-51
Gambar 2.26.	Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-52
Gambar 2.27.	Kasus Gizi Buruk Pada Balita Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-54
Gambar 2.28.	Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-56
Gambar 2.29.	Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-56

Gambar 2.30.	Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-57
Gambar 2.31.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2019	II-59
Gambar 2.32.	Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-60
Gambar 2.33.	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019	II-61
Gambar 2.34.	Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2015-2019 ..	II-62
Gambar 2.35.	Kunjungan Puskesmas Tahun 2015-2019	II-62
Gambar 2.36.	Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-63
Gambar 2.37.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi	II-67
Gambar 2.38.	Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-72
Gambar 2.39.	Persentase Rumah Sehat Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-73
Gambar 2.40.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi Tahun 2015-2019	II-85
Gambar 2.41.	Skor PPH Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2019	II-91
Gambar 2.42.	Titik Kemacetan Di Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019	II-96
Gambar 2.43.	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2019 .	II-98
Gambar 2.44.	Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-102
Gambar 2.45.	Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-102
Gambar 2.46.	Hasil Kali IJE Dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi	II-105
Gambar 2.47.	Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-107

Gambar 2.48.	Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-108
Gambar 2.49.	Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-109
Gambar 2.50.	Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-110
Gambar 2.51.	Status DDLH Penyedia Pangan Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-111
Gambar 2.52.	Kebutuhan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-112
Gambar 2.53.	Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-113
Gambar 2.54.	Selisih Ketersediaan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-114
Gambar 2.55.	Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-116
Gambar 2.56.	Status DDLH Penyedia Air Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-117
Gambar 2.57.	Model Proyeksi Penduduk Tahun : (A) 2020, (B) 2030, (C) 2040, Dan (D) 2050 Di Kota Cimahi Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-119
Gambar 2.58.	Potensi Timbulan Sampah Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”	II-121
Gambar 2.59.	Peningkatan potensi timbulan sampah pada sistem grid 5”x”5 Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050	II-124
Gambar 2.60.	Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	II-124

Gambar 2.61.	Potensi Timbulan Lumpur Tinja Di Kota Cimahi Tahun 2016 Pada Sistem Grid 5”X5”	II-126
Gambar 2.62.	Peningkatan potensi timbulan lumpur tinja pada sistem grid 5”x5” di Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050	II-128
Gambar 2.63.	Grafik Potensi Timbulan Lumpur Tinja Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050 ..	II-129
Gambar 2.64.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”x5”	II-131
Gambar 2.65.	Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016	II-132
Gambar 2.66.	Peningkatan Potensi Beban Pencemar Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2050 Di Kota Cimahi	II-134
Gambar 2.67.	Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung ...	II-135
Gambar 2.68.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung Dalam Sistem Grid 30”X30”	II-136
Gambar 2.69.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009	II-141
Gambar 2.70.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010	II-141
Gambar 2.71.	Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung ..	II-142
Gambar 2.72.	Peta Lahan Kritis Kota Cimahi	II-143
Gambar 2.73.	Pola Ruang Kota Cimahi	II-145
Gambar 2.74.	Proporsi Tutupan Lahan Pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi	II-145
Gambar 2.75.	Efisiensi Penyediaan Pangan Di Kota Cimahi	II-146

Gambar 2.76.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah Pada Pola Ruang di Kota Cimahi	II-147
Gambar 2.77.	Efisiensi Penyediaan Air Bersih Di Kota Cimahi ..	II-148
Gambar 2.78.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air Pada Pola Ruang di Kota Cimahi	II-149
Gambar 2.79.	Efisiensi Pengaturan Tata Air Dan Banjir Di Kota Cimahi	II-150
Gambar 2.80.	Proporsi Luas Tutupan Lahan Pada Pola Ruang (A) RTH Perkotaan Dan (B) Sempadan Sungai Di Kota Cimahi	II-151
Gambar 2.81.	Potensi Keanekaragaman Hayati Di Kota Cimahi Dan Sekitarnya	II-151
Gambar 2.82.	Tingkat Ketahanan Dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi	II-153
Gambar 2.83.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Banjir Di Kota Cimahi	II-155
Gambar 2.84.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Cuaca Ekstrim Di Kota Cimahi	II-157
Gambar 2.85.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Kekeringan Di Kota Cimahi	II-158
Gambar 2.86.	Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi	II-159
Gambar 2.87.	Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi	II-160
Gambar 2.88.	Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota di Kota Cimahi Tahun 2017-2019 ..	II-176
Gambar 2.89.	Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-176
Gambar 2.90.	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-185
Gambar 2.91.	Jenis Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-186
Gambar 2.92.	Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-186

Gambar 2.93.	Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan	II-187
Gambar 2.94.	IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2018	II-188
Gambar 2.95.	Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019	II-190
Gambar 2.96.	Angka Kesempatan Kerja Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-192
Gambar 2.97.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019	II-206
Gambar 2.98.	Data Kasus COVID-19 Kota Cimahi per 30 Desember 2020	II-226
Gambar 2.99.	Kapasitas Tes PCR Kota Cimahi Periode 1 Maret sd 30 Desember 2020	II-227
Gambar 4.1.	Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-24
Gambar 6.1.	Fokus/Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018-2022	VI-7
Gambar 6.2.	Keterkaitan Isu Strategi, Sasaran, Strategi, dan Prioritas Pembangunan Daerah	VI-10

WALI KOTA CIMAHI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian arah dan konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan serta untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan yang komprehensif;

b. bahwa berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 278

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi merupakan dokumen perencanaan Kota Cimahi untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Cimahi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD dituangkan dalam penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bahwa berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan kebijakan nasional mengenai perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, peluang pengembangan, dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah serta cita-cita di masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi memberikan arah pembangunan sampai dengan 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang Kota Cimahi dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang merupakan “Tahap Pencapaian”. Pada tahapan ini, ditujukan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai perwujudan dari amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mewajibkan setiap kepala daerah terpilih untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Visi dan Misi Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, M.M. selaku Wali Kota dan Letkol (Purn) Ngatiyana selaku Wakil Wali Kota menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Melalui Visi **MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA**, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pada Tahun 2019 lalu telah dilakukan evaluasi hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Adapun syarat untuk perubahan RPJMD diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, pada Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Yang dimaksud dengan Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, meliputi :

1. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi memperoleh nilai 66,00 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil tersebut, maka salah satu tindak lanjutnya adalah KemenPAN dan RB melakukan reviu terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Renstra PD untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), memperhatikan keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta telah dilakukan cascade kinerja. Hasil dari reviu tersebut menjadi masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan RPJMD dan Renstra PD;

2. Dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama beberapa tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah;
3. Terkait dengan huruf b di atas, beberapa kebijakan pemerintah pusat dimaksud, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Selain peraturan perundang-undangan di atas, sebagai respon terhadap pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap penting dan strategis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 maupun dampak yang ditimbulkannya.

   Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga lebih luas telah berdampak terhadap memburuknya kondisi sosial, ekonomi dan sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama. Sehubungan dengan kondisi yang ada, maka Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

5. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 menuntut adanya dukungan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Cimahi. Dukungan kabupaten/kota diarahkan untuk mencapai

visi, misi, target pembangunan, dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 harus dipedomani untuk sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
7. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, substansi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 belum sepenuhnya sesuai dengan substansi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, karena pada saat penyusunan masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini ditandai dengan :
   a. Belum menyajikan kinerja pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMD periode sebelumnya pada Bab II;
   b. Belum menyajikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
   c. Belum menyajikan telaahan terhadap kebijakan/isu nasional (antara lain RPJMN); kebijakan/isu regional (antara lain RPJMD Provinsi Jawa Barat, telaahan daerah sekitar); dan kebijakan/isu daerah (antara lain RPJPD Kota Cimahi, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cimahi), KLHS RPJMD Kota Cimahi, pada Sub bab 4.3 Isu Strategis;
   d. Belum mencantumkan indikator kinerja Tujuan pada Bab V;
   e. Pada Tabel 7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi di Bab VII RPJMD menyajikan program teknis (terkait urusan/fungsi) yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah. Dengan demikian tidak jelas indikator kinerja, target dan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah. Seharusnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka sudah jelas

kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu, sehingga tidak ditemui sebuah program teknis dilaksanakan oleh lebih dari 1 perangkat daerah;

f. Terdapat perbedaan target pada beberapa indikator kinerja sasaran antara yang dimuat pada Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi di Bab V dengan yang dimuat pada Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi dan Tabel 8.2 Indikator Kinerja di Bab VIII. Indikator kinerja dimaksud, antara lain :
   1) Persentase cakupan layanan air limbah domestik. Kondisi awal dan target per tahun di Bab V berbeda dengan di Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi. Target untuk Tahun 2018 di Bab V adalah 76,75%, sementara di Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi dan Tabel 8.2 Indikator Kinerja Bab VIII adalah 83,41%.
   2) Meningkatnya pelayanan air bersih. Kondisi awal dan target per tahun di Bab V berbeda dengan di Bab VIII. Target untuk Tahun 2018 di Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi adalah 70,52%, sementara di Tabel 8.2 Indikator Kinerja adalah 69,07%.

g. Belum mencantumkan indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah di Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tabel di Bab VIII memuat hanya indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 2 (dua) Aspek, yang seharusnya ada 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dengan uraian diatas, maka RPJMD Kota Cimahi memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, yaitu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan kebijakan nasional. Hal ini memenuhi Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 344. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, dan penetapan dengan Perda (hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1).

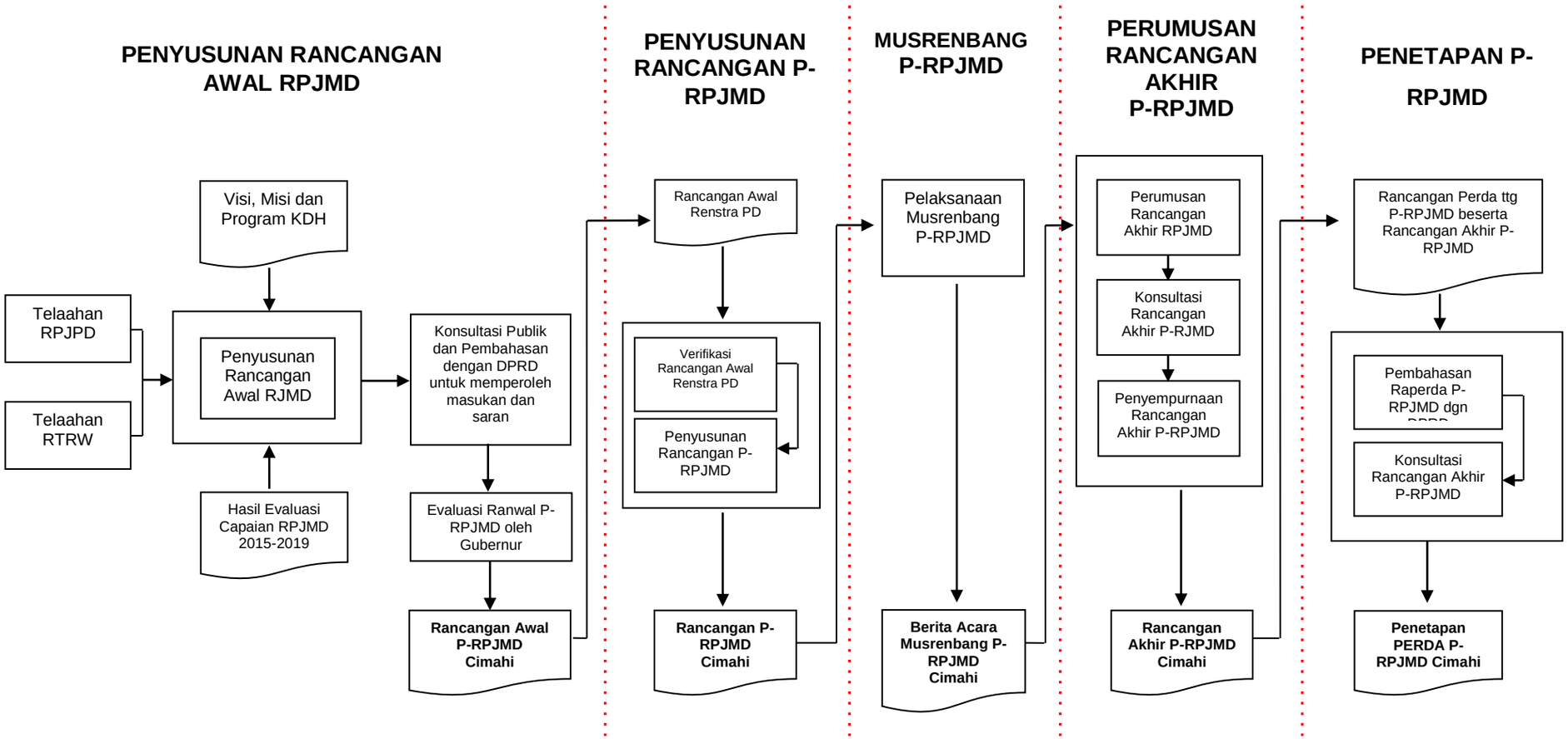
Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berorientasi pada proses berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2017-2022, sistem inovasi daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Cimahi. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari himpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktik baik/terbaik, serta proses pembelajarannya.

Gambar 1.1.

Diagram Alir Penyusunan Perubahan RPJMD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang–undangan, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Noomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian LIngkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
24. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

41. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
42. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
44. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207); dan
45. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

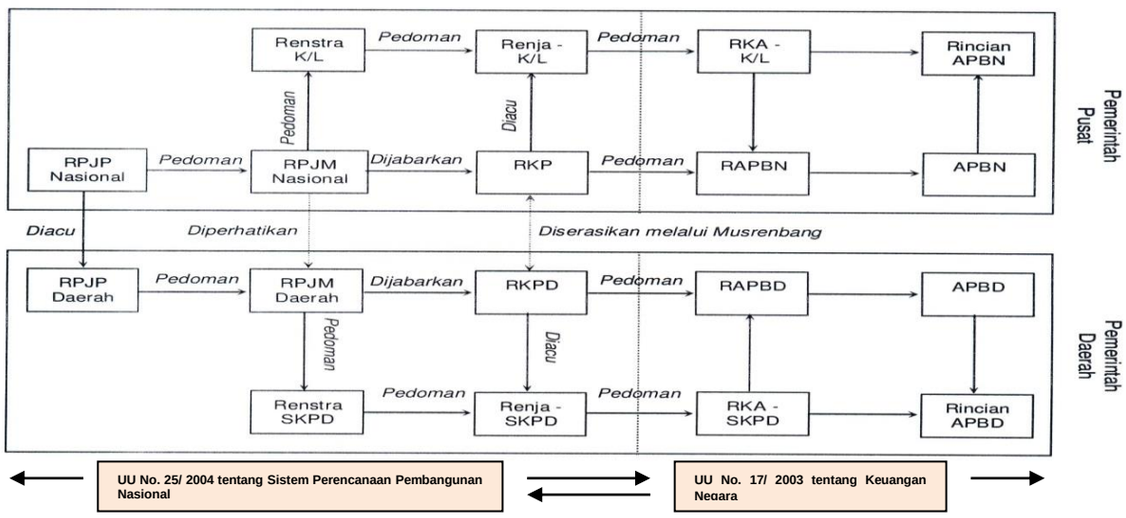
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini merupakan satu bagian yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan dan merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, telah berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi serta program pembangunan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Selanjutnya, RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Secara bersamaan, baik RPJMD Kota Cimahi maupun Renstra Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir (hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2).

Gambar 1.2.
Bagan Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah



Sumber : Bappenas

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RPJMD Kota Cimahi ke dalam RKPD Kota Cimahi untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah menerapkan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SID) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sehingga perencanaan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disisi lain merupakan perencanaan yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya saing kota.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RTRW

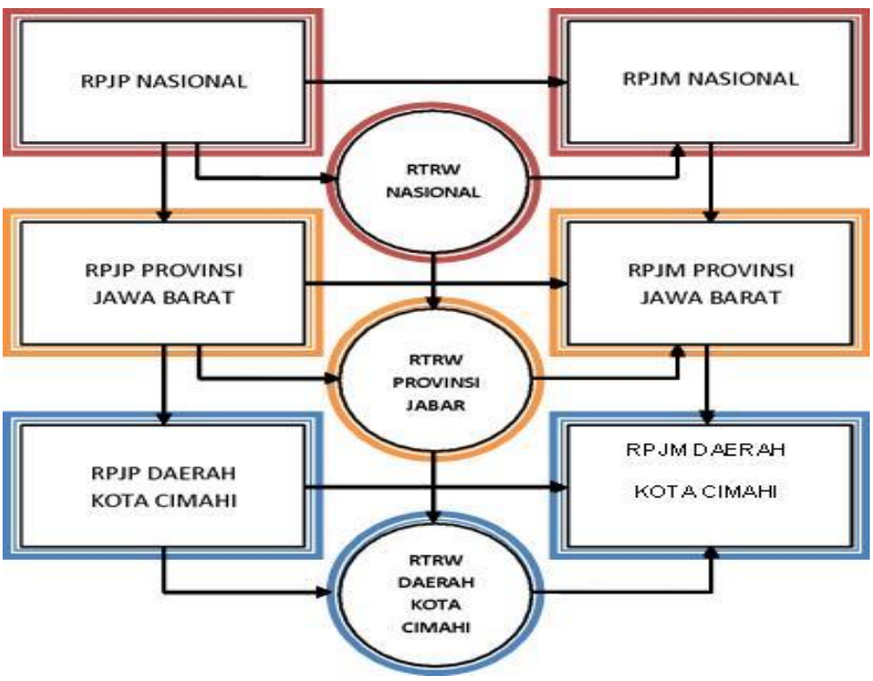
Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 4 huruf c, bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan - kegiatan sosial - ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.

RTRW Kota Cimahi yang sudah disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif. Oleh karenanya, RTRW berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan serta menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD

Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RTRW Kota Cimahi. Pada setiap tingkatan perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Cimahi, dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat dan RTRW Kota Cimahi, serta dengan RTRW Kabupaten/ Kota yang berbatasan dengan Kota Cimahi (hal ini dapat dilihat pada gambar 1.3).

Gambar 1.3.
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber : hasil analisis

1.3.3. Hubungan RPJMD Dengan KLHS RPJMD Kota Cimahi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 15, disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah suatu dokumen telaah *(assessment document)* yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJMD Kota Cimahi. Rekomendasi tersebut umumnya berupa upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan nasional.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
2. Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah pada pembangunan jangka menengah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang sinergi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan serta tahunan;

5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah serta perencanaan dan penganggaran tahunan Kota Cimahi; dan
6. Menyediakan instrumen dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas 9 (sembilan) bab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 Ayat (5), sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Cimahi.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan data-data statistik yang relevan dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan gambaran dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah masa lalu, serta kerangka pendanaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi justifikasi dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

dan indikator capaian pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang merupakan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tahun 2017-2022, yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan serta indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Diuraikan pula penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu, dimuat juga program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendukung pencapaian setiap sasaran pembangunan. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program perangkat daerah yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif setiap tahun selama periode RPJMD, dan perangkat daerah penanggung jawab.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menggambarkan kondisi daerah secara umum yang akan memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Cimahi. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis dilaksanakan menggunakan data pada periode tahun 2015-2019. Sedangkan untuk data perkembangan COVID-19 tahun 2020 akan dibahas dalam BAB IV dokumen Perubahan RPJMD 2017-2022 ini.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.248,10 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

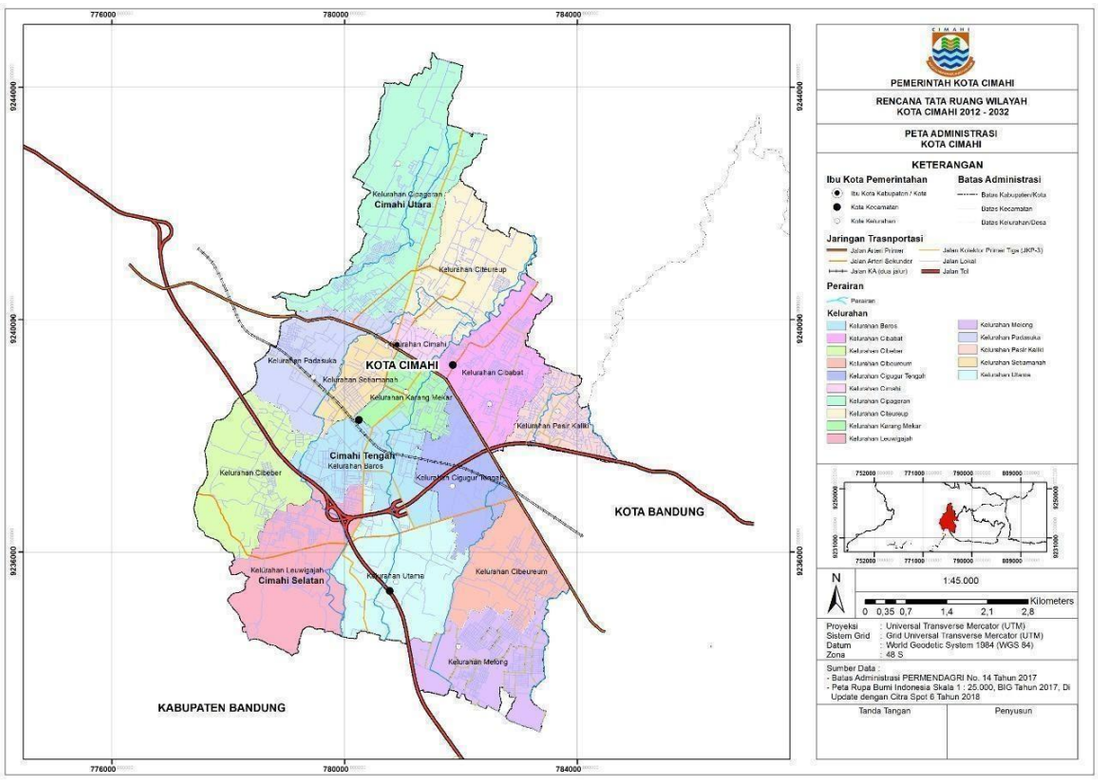
a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung; dan
d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian pembagian wilayah beserta luasnya sebagai berikut :

a. Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 83 (delapan puluh tiga) RW dan 418 (empat ratus delapan belas) RT;
b. Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 107 (seratus tujuh) RW dan 413 (empat ratus tiga belas) RT; dan
c. Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, 111 (seratus sebelas) RW dan 628 (enam ratus dua puluh delapan) RT.

Berdasarkan penegasan batas wilayah administrasi tersebut di atas, maka luas wilayah Kota Cimahi adalah 4248,10 Ha. Secara tabulasi luas wilayah Kota Cimahi berdasarkan kelurahan disajikan pada Tabel 2.1 dan secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Tabel 2.1.

Luas Kota Cimahi Berdasarkan Pembagian Kelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (HA)
1.	Cimahi Selatan	Melong	294.78
		Cibeureum	25942
		Utama	416.08
		Leuwigajah	402.3
		Cibeber	367.8
	Kecamatan Cimahi Selatan		**27422.96**
2.	Cimahi Tengah	Baros	285.79
		Cigugur Tengah	249.01
		Karang Mekar	121.63
		Setiamanah	112.23
		Padasuka	273.55
		Cimahi	57.65
	Kecamatan Cimahi Tengah		**1099.86**
3.	Cimahi Utara	Pasirkaliki	168.27
		Cibabat	286.68
		Citeureup	343.81
		Cipageran	610.02
	Kecamatan Cimahi Utara		**1408.78**

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2. Letak Geografis dan Astronomis

Letak astronomis wilayah Kota Cimahi berdasarkan penegasan batas-batas wilayah yakni berada di 107°30’37”-107°34’34” Bujur Timur dan 6°49’38” - 6°55’58” Lintang Selatan.

Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta.

Berdasarkan letak geografis Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis.

3. Kondisi Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga +1.000 m diatas permukaan laut, kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0–2 persen dengan dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15 persen dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25 persen, 25 – 40 % dan lebih besar 40% dominan di wilayah Cimahi Utara dan Selatan.

Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km²)
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48
3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (ha)	**22,69**	**15,77**	**2,01**	**1,59**	**0,43**	**42,48**

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

4. Kondisi Geologi

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, morfologi wilayah Kota Cimahi dapat digolongkan sebagai berikut :

b. Satuan Morfologi Dataran Satuan morfologi dataran ini adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar dengan kisaran kemiringan lereng antara 0-2 persen. Bentuk bentang alam ini mendominasi wilayah Kota Cimahi dengan luas sekitar 2.269 ha; dan

c. Satuan Morfologi Perbukitan Bentang alam perbukitan di wilayah Kota Cimahi terdiri atas perbukitan landai dengan kemiringan berkisar antara 2-15 persen seluas 1.577 Ha, perbukitan sedang dengan kemiringan berkisar antara 15-40 persen seluas 201 Ha, dan perbukitan terjal dengan kisaran kemiringan lebih dari 40 persen seluas 43 Ha.

5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi Kota Cimahi yang ditandai dengan air permukaan berupa sungai, merupakan sungai-sungai orde ketiga dari Sungai Citarum. Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum adalah 5 (lima) sungai utama yang mengalir melalui Kota Cimahi. Adapun kondisi sungai-sungai tersebut, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Inventarisasi Sungai Kota Cimahi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/dtk)
1.	**Cisangkan Hulu-Hilir**	16.91	**-**	**-**	**-**		0,49
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0.20	0.75	-
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0.30	1.16	-
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0.70	0.9	-
2.	**Cilember Hulu-Hilir**	35.04	-	-	-		0,20
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1.20	1.64	-
	Cibaligo Tengah	-	2.5	2.5	0.5	1.54	-
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0.65	1.14	-
3.	**Cibabat Hulu-Hilir**	35.04	-	-	-		0,20
	Cibabat Hulu	-	1.5	1.5	0.20	1,77	-
	Cibabat Tengah	-	4	4	0.60	1.12	-
	Cibabat Hilir	-	2	2	0.30	1.19	-
4.	**Cibeureum Hulu-Hilir**	24.66	-	-	-		0,20
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0.75	1.19	-

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/dtk)
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0.50	1.32	-
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0.50	1	-
5.	**Cimahi Hulu-Hilir**	18.61	-	-	-		0,38
	Cimahi Hulu	-	6	6	0.3	1.13	-
	Cimahi Tengah	-	4	4	0.5	1.21	-
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1.18	-

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

6. Kondisi Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni - September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober - Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,7℃ - 23,2℃. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6℃ setiap kenaikan elevasi 100m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan

atau rata-rata 1.572 mm per tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700 - 4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.249 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 - 162,12 juta m3 per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting Kota Cimahi berdasarkan peta tutupan lahan yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.4. Porsi penggunaan lahan terbesar adalah permukiman dan tempat kegiatan, disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Informasi ini juga ditampilkan dalam bentuk peta, seperti dibawah ini :

Tabel 2.4.
Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan di Kota Cimahi 2017

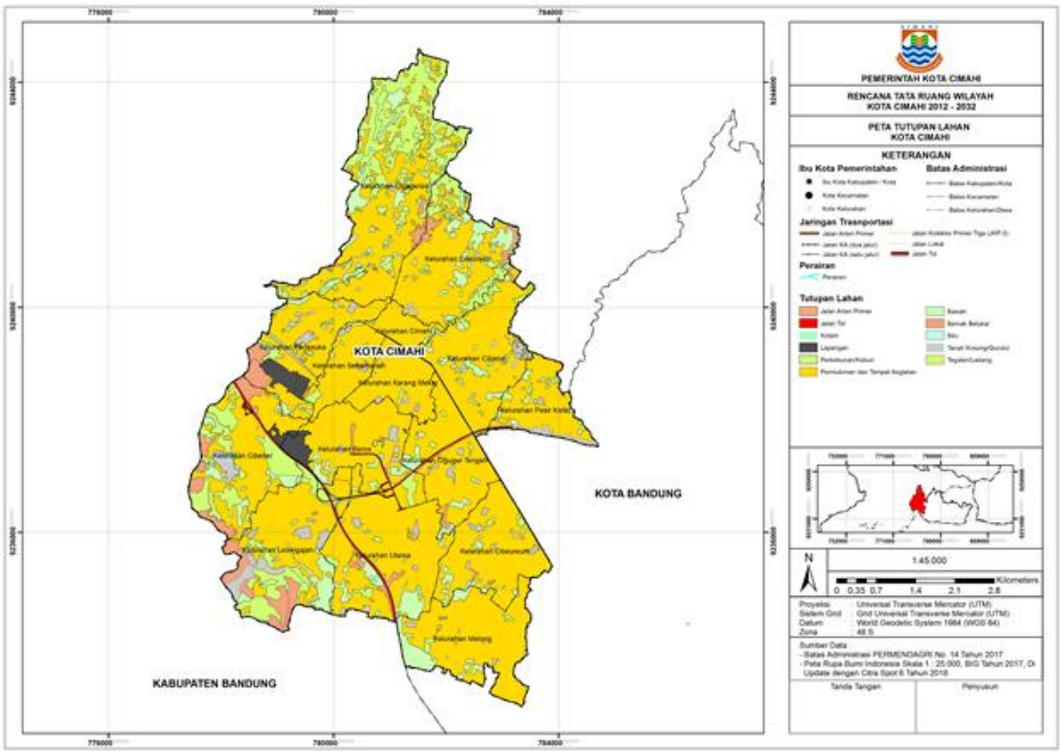
Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Jalan Arteri Primer	5.57
Jalan Tol	29.35
Kolam	5.72
Lapangan	56.27
Perkebunan/Kebun	135.83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2957.20
Sawah	323.63

Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Semak Belukar	158.50
Situ	0.63
Tanah Kosong/Gundul	129.78
Tegalan/Ladang	445.64
Total	**4248.10**

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Gambar 2.2.

Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi diarahkan pada 3 (tiga) aspek pengembangan strategis meliputi pengembangan kawasan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kota Cimahi menjadi bagian Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai Kota Inti dari kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan fungsi kegiatan utama meliputi : pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat

perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah kawasan wilayah kota yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan wilayah di Kota Cimahi diarahkan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Hal ini tertuang dalam Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 meliputi :

1. Kawasan Perumahan
    a. Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan Kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
    b. Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
    c. Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, pendidikan, kesehatan dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Cimahi Tengah, Selain itu, Wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa.

Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Untuk itu perlu adanya inovasi penataan kawasan alun-alun dan Kawasan Gandawijaya Kota Cimahi menjadi salah satu destinasi belanja dan menjadikan salah satu muka kota yang kreatif.

Untuk bisa mendukung perkembangan area *central business district* (CBD) lama di daerah alun-alun dan Jalan Gandawijaya perlu dilakukan inovasi penataan kawasan melalui penyediaan trotoar yang lebih luas bagi pejalan kaki dan ramah terhadap kaum disabilitas, tersedianya pemberhentian kendaraan umum yang kreatif, petunjuk area (*sign map*) yang kreatif, taman, jalur pesepeda dan penataan lampu kota. Diharapkan pusat kota dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi interaksi warganya untuk melakukan kegiatan – kegiatan kreatif seperti pertunjukan di jalan (*street performance*) maupun *culinary night*. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan yang tersebar di banyak SKPD menjadi unsur penting bagi berhasilnya penataan kawasan alun-alun dan Gandawijaya selain juga penegakan disiplin agar tetap rapi dan tidak menjadi kumuh. Kota yang kreatif akan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan warganya.

3. Kawasan Peruntukkan Industri
   a. Kota Cimahi tidak lagi mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri menengah dan besar, tetapi hanya menjaga kestabilan keberadaan industri menengah dan besar yang banyak tersebar di wilayah Cimahi Selatan, diantaranya di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong serta di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan Kawasan peruntukkan industri tersebut diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;
   b. Pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dipusatkan di wilayah Baros dengan dibangunnya Kawasan Cimahi Technopark. Industri kreatif yang dikembangkan adalah industri kreatif berbasis teknologi informasi diantaranya animasi dan film, serta sentra-sentra produk unggulan lainnya untuk produk kuliner, kerajinan dan fashion; dan
   c. Rencana pengembangan industri pengolahan lebih diutamakan pada pengembangan industri kecil dan rumah tangga berbasis kalster industry terutama di beberapa lokasi yang bisa dikempangkan menjadi sentra produk unggulan dengan prinsip ramah lingkungan.
4. Kawasan Peruntukkan Pariwisata
   a. Pengembangan Wisata Budaya dan Agro Eduwisata di Kelurahan Cipageran dan Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah. Cireundeu tidak lagi hanya sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan saja tetapi berkembang menjadi Desa Wisata Seni Pertunjukan dan Budaya berbasis budaya ketahanan pangan singkong;
   b. Pengembangan Wisata Heritage dan Festival Tematik di Kecamatan Cimahi Tengah.

      Di Kota Cimahi terdapat 23 objek bangunan bersejarah yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai bangunan heritage sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Diperlukan penggalian

nilai–nilai sejarah dan perencanaan pemanfaatannya termasuk upaya pengembangan kewirausahaan dalam bidang pariwisata khususnya pada 23 objek bangunan bersejarah Kota Cimahi;

c. Pengembangan kawasan wisata Cipageran yang meliputi daerah Lebak Saat (Chitos 1), Legok Awi (Pasar Legok Awi) yang terintegrasi dengan hutan kota dan sentra pertanian (peternakan). Perlu dilakukan branding tempat yang terintegrasi dalam satu kawasan wisata serta dilakukannya pengintegrasian pembinaan usaha kesenian/budaya, pariwisata, *homestay*, hilirisasi produk dan pembinaan UKM baik kuliner maupun kerajinan berbasis potensi lokal (bambu) oleh warga setempat; dan

d. Pengembangan Kampung Gambar di Kelurahan Cibabat sehingga mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial. Saat ini di Kampung Gambar Cibabat belum muncul aktivitas bisnis dan baru lebih berfokus kepada aktivitas ekspresi kreatif. Perlu dikembangkan model bisnis yang tepat (*model business canvas*) dan pemberdayaan komunitas lokal.

5. Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial

a. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi : peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, *Baros Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros; Pembangunan Kawasan Mall Pelayanan Publik dan peningkatan dan pembangunan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan; dan

b. Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa.

6. Kawasan pertahanan dan keamanan

   Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi: Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Di Kawasan ini bila dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dalam rangka pengembangan pembangunan di Kota Cimahi;

7. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

   Pengembangkan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

   Disamping itu terdapat juga lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Cimahi berupa lahan kritis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Cimahi bisa diarahkan dengan menerapkan konsep *agroforestry* sehingga kegiatan konservasi alam dan pertanian serta pariwisata bisa dikembangkan seperti di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber, di

Cimenteng dan Legok Jawa Kelurahan Cipageran maupun ex-TPA Leuwigajah di Kelurahan Leuwigajah. Direncanakan juga pemanfaatan beberapa wilayah sekitar embung sebagai sarana ruang publik untuk olahraga dan pariwisata lokal;

8. Kawasan Peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal
   Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal;
9. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana
   Kawasan Rawan Bencana di Kota Cimahi terdiri dari kawasan rawan bencana tanah, longsor, rawan banjir, rawan aliran lahar gunung berapi, dan rawan gempa bumi sehingga pengembangan kawasan ruang evakuasi diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH;
10. Pengembangan jalur evakuasi bencana
    Pengembangan jalur evakuasi bencana diarahkan melalui rencana penetapan dan penyediaan sarana prasarana pada akses jalur evakuasi menuju ruang titik kumpul tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH.
11. Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan
    Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar melalui optimalisasi produksi ikan air tawar khususnya ikan hias; dan
12. Pelindungan kawasan peruntukan pertanian
    Perlindungan kawasan pertanian diarahkan pada rencana penetapan regulasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Aspek lain pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah berkaitan dengan wilayah administrasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah minimal kecamatan untuk Kota adalah 4

(empat) kecamatan. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan Kajian Pemekaran Wilayah untuk memenuhi jumlah Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15 persen (lima belas persen) seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) ha. Bencana tanah longsor di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada korban jiwa, melainkan kerugian materi sebesar Rp. 535 Juta.

Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.

Bencana kebakaran terjadi di Tahun 2016 dengan luas total lahan terbakar adalah 0,2 Ha, dengan titik lokasi diantaranya kelurahan Cibeber dan Leuwi Gajah. Adapun kerugian materi mencapai Rp. 2,8 M. Pada Tahun 2015 kebakaran lahan terjadi lebih besar yaitu di 5 lokasi (5 kelurahan) luas total adalah 0,8 Ha, kerugian mencapai Rp. 9,45 M.

Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi terjadi di setiap Kecamatan dengan total area terendam adalah 41,959 Ha (DPKP, 2019), seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Kawasan rawan banjir Kota Cimahi Tahun 2019

No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B1	RW 03	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.3	DAS Cilember
B2	RW 12	Pasirkaliki	Cimahi Utara	0.2	DAS Cilember
B3	RW 05 (Batas Cipageran)	Padasuka	Cimahi Tengah	0.133	DAS Cimahi
B4	RW 05	Utama	Cimahi Selatan	1.44	DAS Cilember
B5	RW 07	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.54	DAS Cimahi

No	Lokasi Banjir	Wilayah Administrasi		Luas Genangan (Ha)	Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Kelurahan	Kecamatan		
B6	RW 12-08 Padasuka (batas)	Setiamanah	Cimahi Tengah	7.19	DAS Cimahi
B7	RW 14	Setiamanah	Cimahi Tengah	1.5	DAS Cimahi
B8	RW 06	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.7	DAS Cilember
B9	Jl. Amir Mahmud - *Flyover* Cimindi	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	0.1	DAS Cilember
B10	RW 08	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	5	DAS Cilember
B11	RW 18-10-13 (batas Cibeber)	Leuwigajah	Cimahi Selatan	1.4	DAS Cimahi
B12	RW 13 (Darussurur-& H. Waryat)	Utama	Cimahi Selatan	0.3	DAS Cimahi
B13	RW 09-08 (jl. Industri-Cibodas)	Utama	Cimahi Selatan	0.19	DAS Cimahi
B20	RW 12-11	Utama	Cimahi Selatan	8.33	DAS Cimahi
B14	RW 02	Melong	Cimahi Selatan	10.7	DAS CIlember
B15	RW 14 (Mancong)	Utama	Cimahi Selatan	1	DAS CImahi
B16	RW 03	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cilember
B17	RW 32	Melong	Cimahi Selatan	0.42	DAS Cibeureum
B18	RW 34	Melong	Cimahi Selatan	0.6	DAS Cibeureum
B19	RW 29	Melong	Cimahi Selatan	0.496	DAS Cilember
	TOTAL			**41.959**	

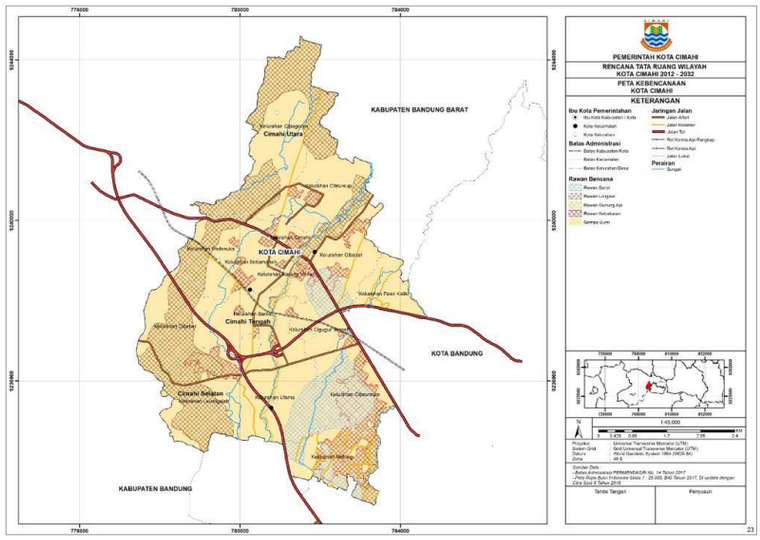
Sumber : DPKP, 2020, diolah

Wilayah yang berpotensi/rawan banjir tidak hanya di Cimahi Selatan, tetapi wilayah yang dilintasi 4 sungai (anak Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cibeureum). Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum.

Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Gambar 2.3.

Peta Rawan Bencana Kota Cimahi



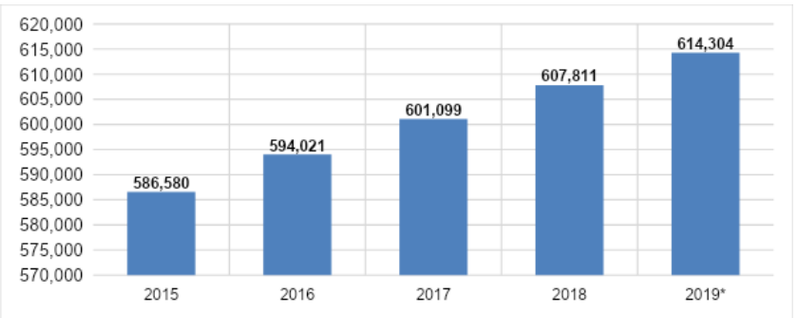
Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 adalah 614.304 jiwa (proyeksi BPS). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,07 persen atau sebanyak 6.493 jiwa.

Gambar 2.4.

Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

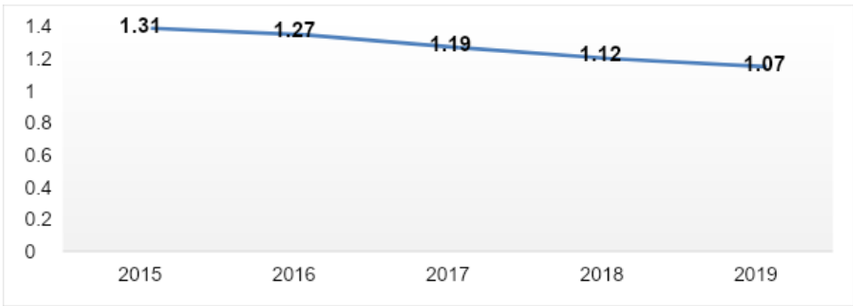


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2018 2019 dan 2020, BPS, diolah

*Keterangan : *Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 (pertengahan tahun/Juni)*

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,07 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diantisipasi supaya tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang ada di Jawa Barat maka laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tergolong sedang. Sebagai perbandingan laju penduduk, maka berikut ini disajikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan laju pertumbuhan penduduk rendah.

Tabel 2.6.
Kabupaten/Kota dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Rendah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Cianjur	0,38	0,32	0,25	0,18	0,11
Kabupaten Tasikmalaya	0,43	0,36	0,29	0,23	0,16
Kota Bandung	0,43	0,37	0,29	0,23	0,17
Kota Tasikmalaya	0,41	0,32	0,27	0,20	0,12
Kota Banjar	0,50	0,28	0,27	0,24	0,16

Sumber : BPS Jawa Barat Tahun, 2020, diolah

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 614.304 jiwa pada Tahun 2019 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 269.072 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 17.594 jiwa/km^2. Kepadatan ini bahkan berada diatas kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 15.281 jiwa/km^2.

Tabel 2.7.

Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019

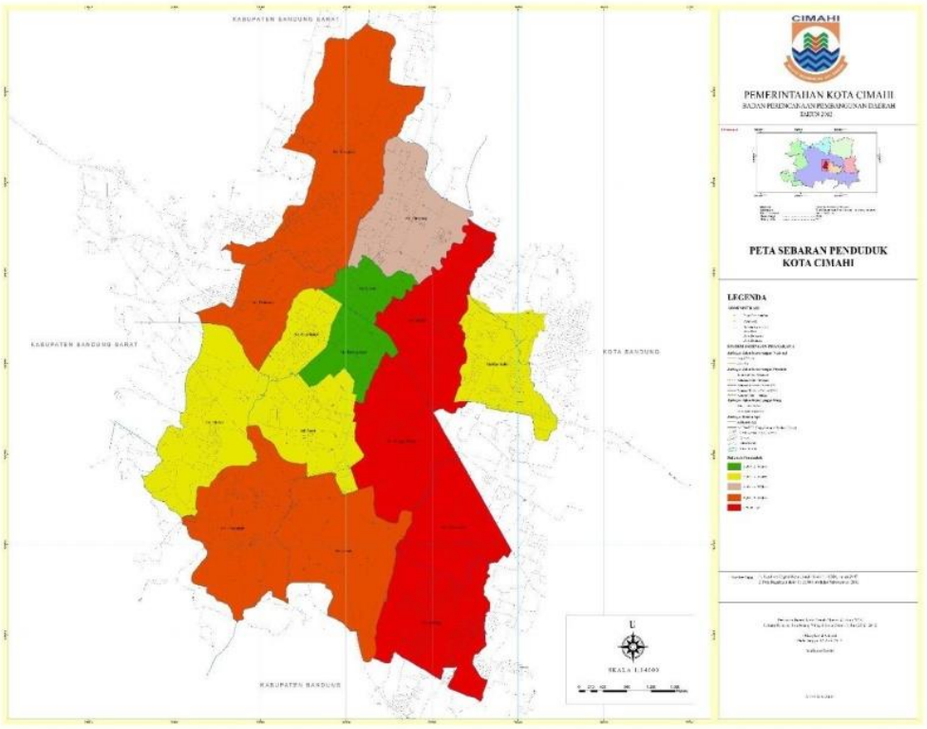
No	Kecamatan	2018		2019	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2
1.	Cimahi Selatan	265.854	15.731	269.072	15.921
2.	Cimahi Tengah	174.457	17.446	175.945	17.594
3.	Cimahi Utara	167.500	12.594	169.287	12.728
	Kota Cimahi	**607.811**	**15.120**	**614.304**	**15.281**

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2019 dan 2020, BPS, diolah

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 1,07 persen mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas.

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi



Sumber : Bappeda Kota Cimahi

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diukur dalam keberhasilan pembangunan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Cimahi secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto Nilai PDRB. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan. PDRB ADHB Cimahi Tahun 2019 mencapai Rp 32.226,02 miliar, berarti meningkat sebesar 10,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.986,02 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 29.240,00 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Lebih rinci mengenai nilai PDRB ADHB Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.8.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015 (Juta Rupiah)	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55.191,70	56.678,44	58.533,77	60,60	65,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	10.594.327,71	11.449.021,68	12.199.201,27	13.639,67	15.048,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61.433,31	73.928,13	84.634,73	96,17	106,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.009,49	13.739,10	16.093,81	18,29	17,98
F	Kontruksi	2.830.125,47	3.030.124,37	3.366.031,43	3.777,64	4.086,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.971.962,98	4.274.509,74	4.571.454,73	4.838,01	5.170,27
H	Transportasi dan Pergudangan	884.841,31	976.057,23	1.059.736,86	1.143,21	1.262,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.376,66	323.315,32	357.225,24	394,86	434,28
J	Informasi dan Komunikasi	1.008.763,07	1.153.803,45	1.312.679,70	1.429,52	1.515,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	677.229,65	752.630,51	842.443,70	922,50	962,56
L	Real Estate	204.521,30	219.146,27	238.555,29	262,20	286,18
M.N	Jasa Perusahaan	38.893,22	42.697,26	47.005,04	52,19	59,82
O	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	607.451,51	639.472,95	692.283,71	725,98	749,95
P	Jasa Pendidikan	831.806,93	931.434,60	1.053.928,40	1.122,81	1.274,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210.301,11	238.848,76	266.216,16	293,17	319,58
R,S,T,U	Jasa Lainnya	354.386,31	387.701,93	424.435,97	463,22	508,10
Produk Domestik Regional Bruto		**22.646.621,73**	**24.563.109,76**	**26.590.459,82**	**29.240,03**	**32.226,02**

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
Keterangan :
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.9.
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	46,78	46,61	45,88	45,69	47,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,30	0,32	0,33	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Kontruksi	12,50	12,34	12,66	13,10	12,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,54	17,40	17,19	16,86	16,04
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	3,97	3,99	3,94	3,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,32	1,34	1,36	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	4,45	4,70	4,94	4,93	4,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	3,06	3,17	3,18	2,99
L	Real Estate	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89
M.N	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19
O	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,60	2,60	2,56	2,33
P	Jasa Pendidikan	3,67	3,79	3,96	4,08	3,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,97	1,00	1,01	0,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,56	1,58	1,60	1,60	1,58
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

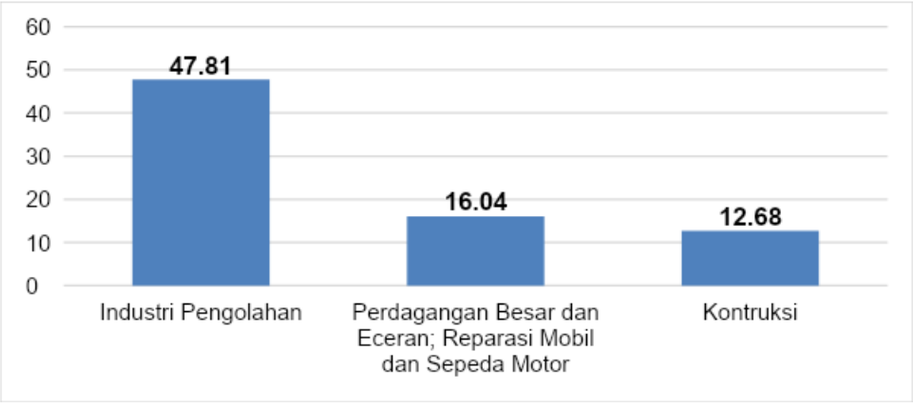
Keterangan :
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan. Lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi selama periode 2015-2019 adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Perusahaan. Sementara lapangan usaha lainnya fluktuatif cenderung menurun. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya cenderung menurun. Salah satu penyebab utama menurunnya peranan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan adalah terbatasnya luas lahan di daerah perkotaan. Ketersediaan lahan merupakan modal utama untuk pengembangan lapangan usaha tersebut.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 47,81 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,04 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,68 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Gambar 2.7.
Kontribusi Sektor Dominan Terhadap Perekonomian Kota Cimahi
Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan data tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,84 persen. Hal ini meningkat sebesar 0,38 persen dibanding tahun 2018. Percepatan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha Industri

Pengolahan, terutama industri tekstil. Meningkatnya produksi ini disebabkan oleh permintaan ekspor yang naik selama dua tahun terakhir.

Tabel 2.10.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015 (Juta Rupiah)	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018* (Miliar Rupiah)	2019** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.136,81	32.366,21	32.632,75	32,81	33,59
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	8.270.654,42	8.626.401,50	8.983.519,08	9.675,44	10.584,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47.503,24	50.785,72	52.217,88	55,20	56,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.966,48	10.542,89	11.230,07	11,81	10,87
F	Kontruksi	2.318.046,31	2.431.021,28	2.601.749,62	2.786,35	2.913,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.166.136,83	3.345.759,70	3.490.134,21	3.591,57	3.722,03
H	Transportasi dan Pergudangan	610.423,59	662.305,37	696.741,29	733,66	782,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	222.942,22	233.377,32	248.355,14	264,67	282,31
J	Informasi dan Komunikasi	1.063.886,57	1.215.106,31	1.358.466,48	1.482,69	1.587,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	534.241,26	577.640,44	616.995,05	661,02	677,72
L	Real Estate	157.799,92	166.928,07	179.072,42	194,18	210,60
M.N	Jasa Perusahaan	29.773,37	32.071,87	34.678,38	37,46	40,04
O	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.041,50	405.235,18	421.466,17	427,17	439,46
P	Jasa Pendidikan	617.436,23	668.251,23	724.215,38	754,44	785,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.634,98	154.854,14	166.574,77	178,63	190,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	257.817,33	269.006,97	289.081,60	305,51	324,71
Produk Domestik Regional Bruto		**17.876.441,07**	**18.881.654,21**	**19.893.683,43**	**21.192,60**	**22.641,83**

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
Keterangan :
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang

sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22.641,83 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.449,23 miliar dari 21.192,60 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,84 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,67 persen.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 didorong oleh pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan; Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40 persen, disusul oleh Real Estate sebesar 8,46 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,06 persen. Sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan negatif yaitu -7,93 persen.

Tabel 2.11.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

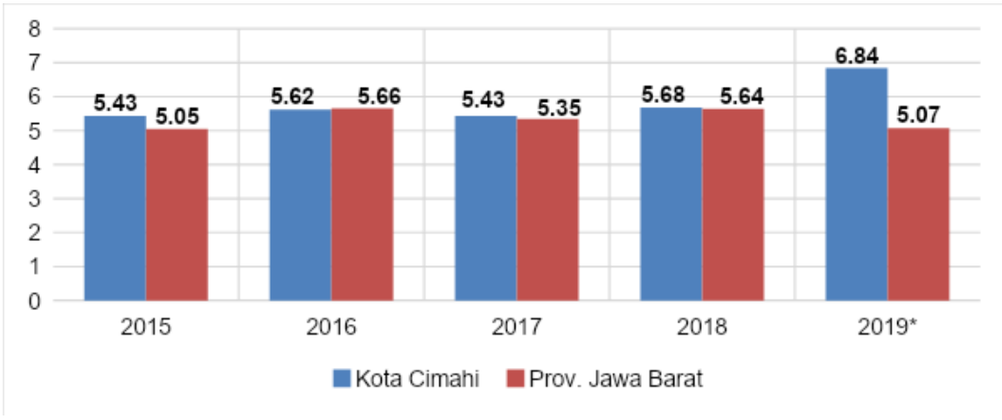
Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(4,70)	(2,23)	0,82	1,86	2,38
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,00	4,31	4,13	5,34	9,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,64	6,91	2,82	5,72	2,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	5,78	6,52	5,16	-7,93
F	Kontruksi	4,42	4,87	7,02	7,63	4,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	5,67	4,32	3,95	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,46	8,50	5,20	5,30	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	4,68	6,42	6,57	6,67
J	Informasi dan Komunikasi	17,59	14,21	11,80	9,14	7,06

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,05	8,12	6,81	7,13	2,51
L	Real Estate	4,68	5,78	7,28	8,44	8,46
M.N	Jasa Perusahaan	7,59	7,72	8,13	8,01	6,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	2,84	4,01	1,35	2,88
P	Jasa Pendidikan	8,44	8,23	8,37	5,23	4,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,52	8,57	7,57	7,24	6,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,45	4,34	7,46	5,68	6,29
Produk Domestik Regional Bruto		**5,43**	**5,63**	**5,43**	**5,68**	**6,84**

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
Keterangan :
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Dalam kurun waktu 2015-2019 LPE Kota Cimahi stabil berada pada kisaran angka 5% per tahun dan mencapai 6,84% pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat, maka LPE Kota Cimahi Tahun 2019 berada diatas nilai LPE Provinsi Jawa Barat yaitu 5,07%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.8.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 dan Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
Keterangan :
**Angka sangat sementara*

2.2.2. PDRB Per Kapita

Selanjutnya, salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,60 juta rupiah dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 52,46 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.12.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Cimahi
Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB (miliar rupiah):					
ADHB	22.646,62	24.563,81	26.590,46	29.240,03	32.226,02
ADHK	17.876,44	18.882,16	19.907,13	21.192,60	22.641,83
PDRB per Kapita (Juta Rupiah):					
ADHB	38,6	41,35	44,24	48,11	52,46
ADHK	30,48	31,79	33,12	34,87	36,86
Jumlah Penduduk	586.580	594.021	601.099	607.811	614.304
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,31	1,27	1,19	1,12	1,07

Sumber : BPS - PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
Keterangan :
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

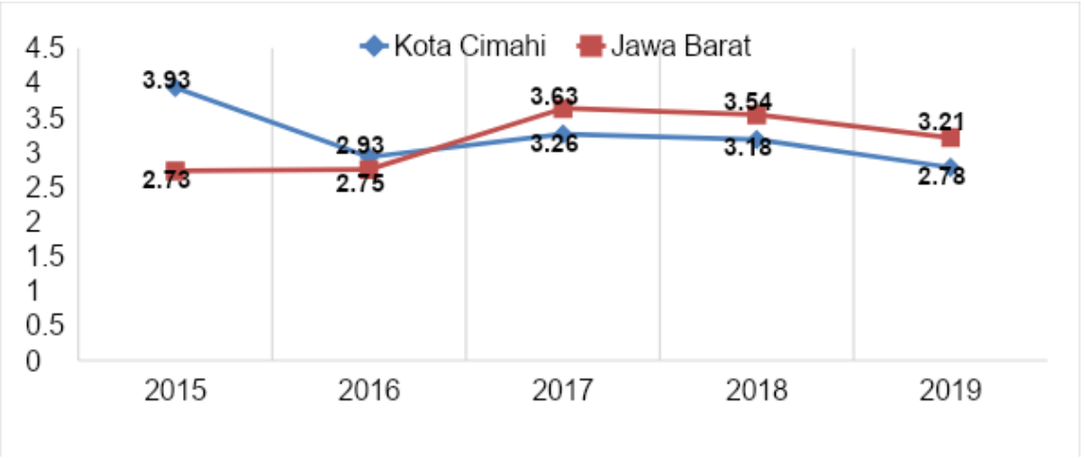
2.2.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan suatu cerminan interaksi antar *supply* dan *demand* yang dapat menggambarkan kinerja moneter pada suatu daerah. Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi

mengikuti angka inflasi Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu Kota Bandung. Perkembangan Laju inflasi Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di angka rata-rata 3,22 persen dengan rata-rata penurunan 7,30 persen/tahun seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.9.
Perkembangan Inflasi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

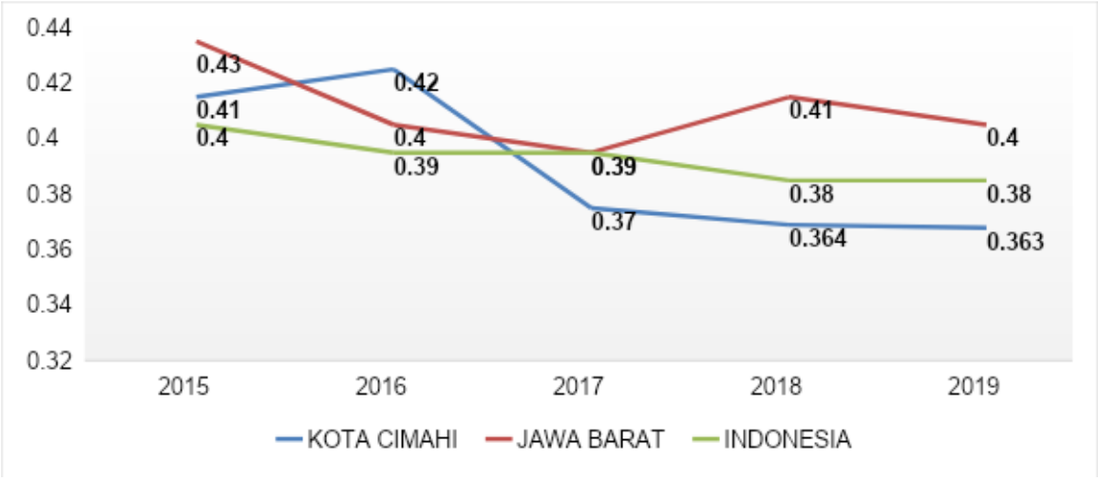


Sumber :
- *Analisis Aspek dan Indikator Kinerja Sektor Ekonomi 2020 Kota Cimahi, BPS, diolah*
- *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2020, BSP, diolah*

2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bahwa Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan dalam pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi memiliki kecenderungan menurun.

Gambar 2.10.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2015-2019

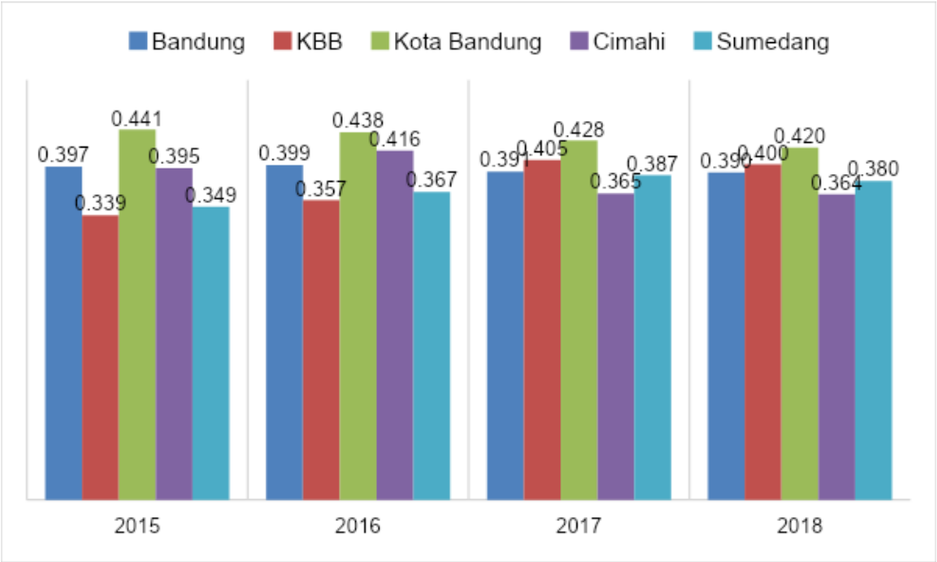


Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019, BPS, diolah

Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,363 di tahun 2019. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin di Cimahi yang beberapa tahun terakhir cenderung menurun.

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Gambar 2.11.
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/Kabupaten Sekitar Tahun 2015-2018



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2018 dan 2019, BPS

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kota Cimahi pada tahun 2017 dan 2018 selalu paling rendah bila dibandingkan dengan nilai indeks gini kabupaten/kota di sekitarnya. Kondisi ini menunjukan bahwa kesenjangan pendapatan di Cimahi relarif lebih kecil dibandingkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

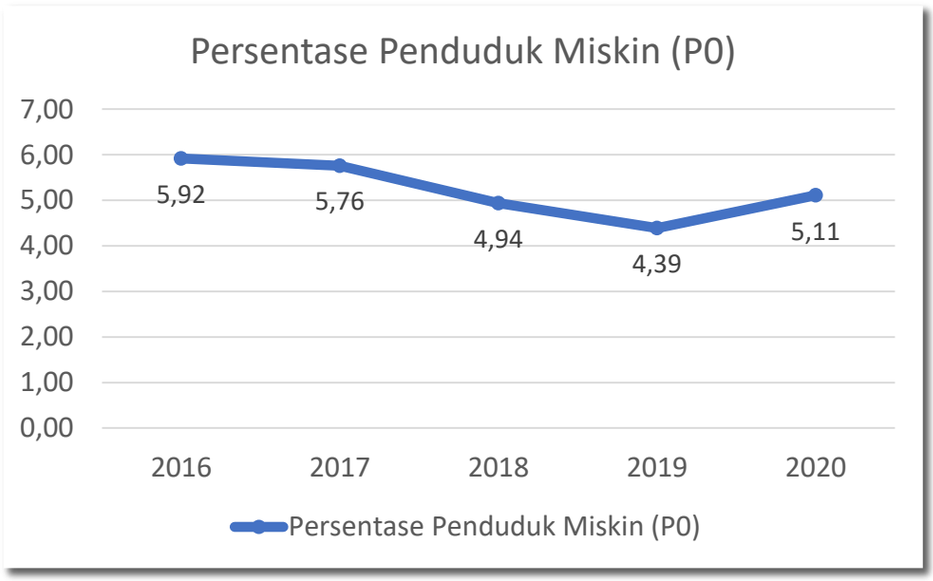
2.2.5. Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan untuk tahun 2020 sudah tersedia data berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2015-2019, tahun 2015 sebesar Rp 386.513 dan di tahun 2019 sebesar Rp 484.804.

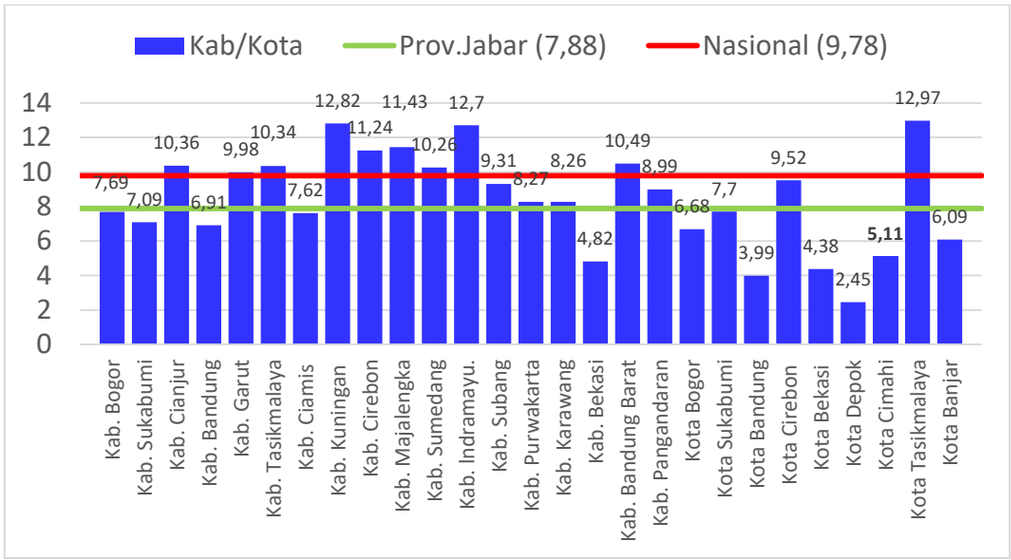
Gambar 2.12.
Persentase Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2019

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2019. Pada Tahun 2016 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,92 persen, terus mengalami penurunan menjadi 4,39 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,11 persen. Hal ini terjadi karena dampak Pandemi Covid 19 yang menurunkan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Gambar 2.13.
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020

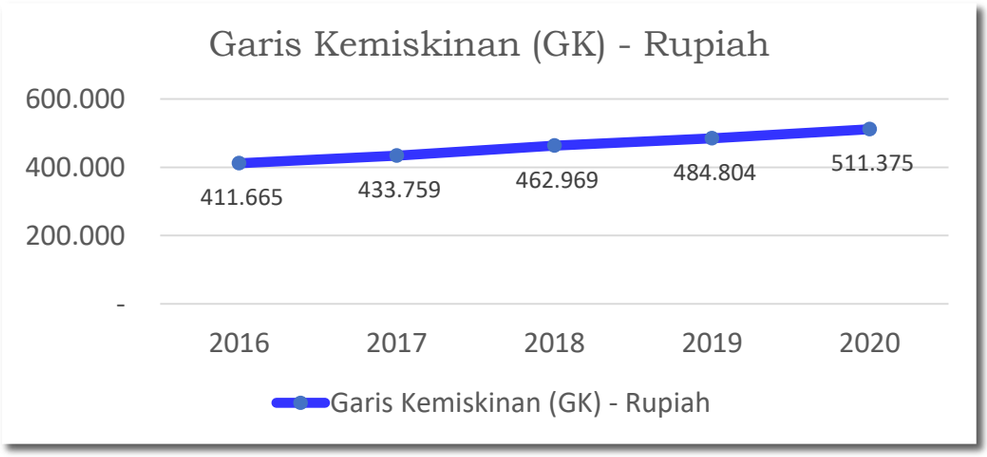


Sumber : BPS Kota Cimahi

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2020 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 5,11 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 7,88 persen.

Kondisi kemiskinan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikasi yaitu meningkatnya garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Tercatat selama periode 2015–2019 Garis kemiskinan Kota Cimahi meningkat dari 386.513 Rp/Kapita/bulan menjadi 484.804 Rp/kapita/bulan. Kenaikan garis kemiskinan yang terjadi setiap tahun di Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya inflasi, meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan.

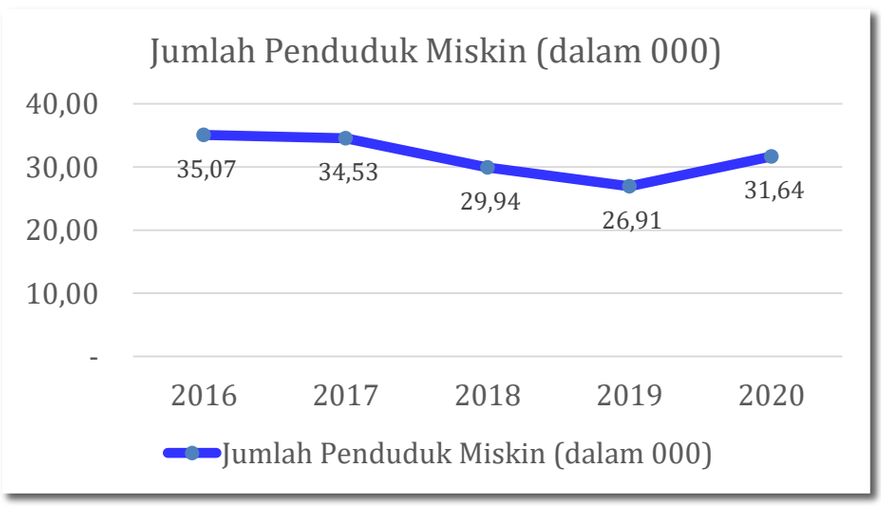
Gambar 2.14.
Garis Kemiskinan Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2020, diolah

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2019, tahun 2016 sebesar Rp 411.665 dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 511.375.

Gambar 2.15.
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 (dalam 000)



Sumber : BPS Kota Cimahi

Selama periode Tahun 2016–2020 jumlah penduduk miskin Kota Cimahi berkurang dari 35.070 jiwa pada Tahun 2016 menjadi 26.910 jiwa di tahun 2019. Namun jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 31.640 jiwa dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi mulai pada bulan Maret Tahun 2020.

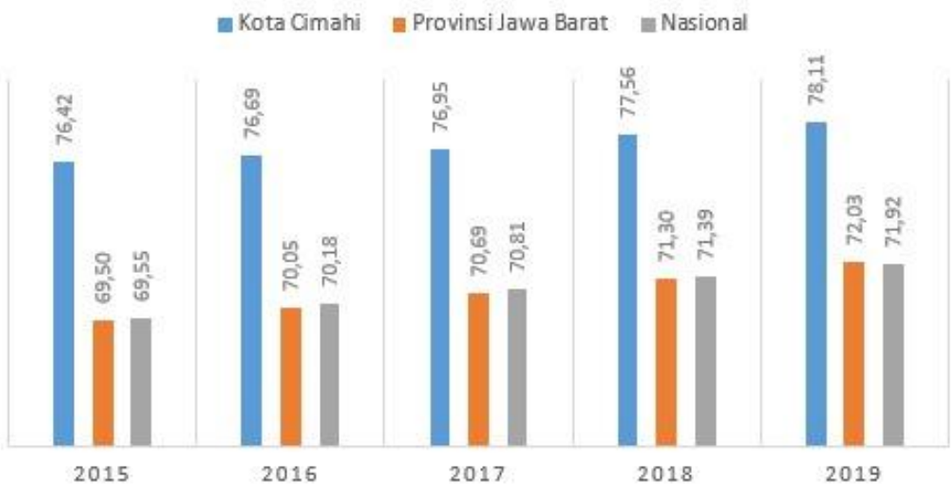
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2019, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,11 dan berada pada status “tinggi”.

Perkembangan angka IPM Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Sejalan dengan peningkatan IPM tersebut, angka kemiskinan penduduk Kota Cimahi juga semakin berkurang. Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2019 sebanyak 26.910 jiwa. Kondisi ini memberi indikasi bahwa berbagai upaya pengentasan kemiskinan memberikan hasil yang baik, meski belum optimal.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2015-2019 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2019 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2019 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 78,11 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 72,03 dan 71,92. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.16.
Capaian IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2015–2019



Sumber : BPS RI, 2020, diolah

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan komponen IPM selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu selama periode 2015-2019.

Tabel 2.13.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kota Cimahi Tahun 2015–2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	73,58	73,59	73,61	73,75	73,89
2.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	13,73	13,75	13,76	13,77	13,79
3.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	10,78	10,89	10,93	10,94	10,95
4.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.012	11.141	11.353	11.921	12.448

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Indeks pembangunan manusia Kota Cimahi selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan yang disebabkan terjadinya peningkatan indikator pembentuknya. Data lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan seluruh indikator komponen IPM, termasuk indeks kesehatan dan indeks pendidikan. Indeks kesehatan Tahun 2019 sebesar 82,91 sementara indeks pendidikan sebesar 74,81.

Tabel 2.14.
Indeks Kesehatan dan Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Indeks Kesehatan	82,45	82,69	82,91
2.	Indeks Pendidikan	74,66	74,72	74,81

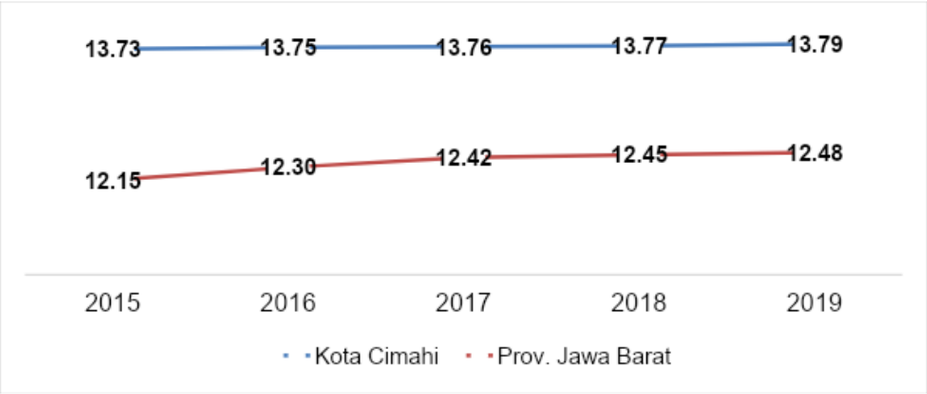
Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020, diolah

Pada tahun 2020 dimana Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, akan berpengaruh pada IPM Indonesia secara umum dan khususnya Kota Cimahi, Dampak dari pandemi ini akan memperlambat atau juga menjadi stagnan peningkatan IPM di Kota Cimahi. Hal ini disebabkan oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita akibat dari turunnya perekonomian nasional.

2.2.7. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Selama periode 2015 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,79 yang berarti naik 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian Harapan Lama Sekolah 2019 memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan data Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019.

Gambar 2.17.
Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019

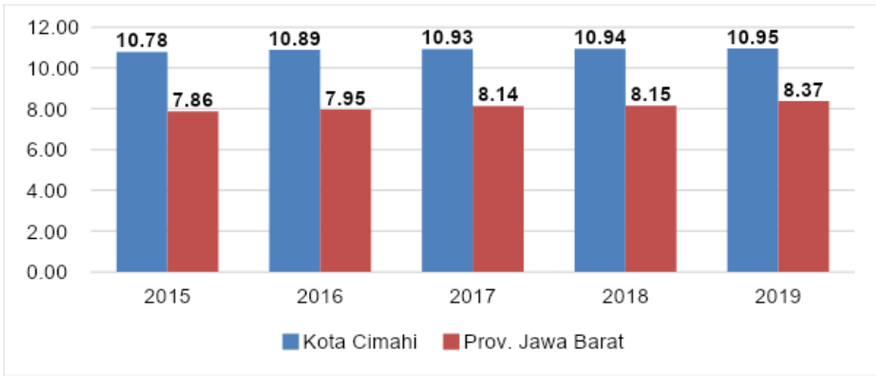


Sumber : BPS Tahun 2019

Dari gambar di atas diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah Kota Cimahi sebesar 13,79 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya hanya sebesar 12,48 tahun.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMA. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015-2019.

Gambar 2.18.
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah

Sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 juga selalu berada diatas rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi sebesar 10,95 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama sebesar 8,37 persen.

2.2.8. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pengelompokan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.15.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kota Cimahi Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2019
		PERSENTASE
1	Tidak /Tamat SD	14.11
2	SMP	16.39
3	SMA	25.39
4	SMK	21.94
5	DI, DII, DIII	5.88
6	Perguruan Tinggi	16.29

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah, selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

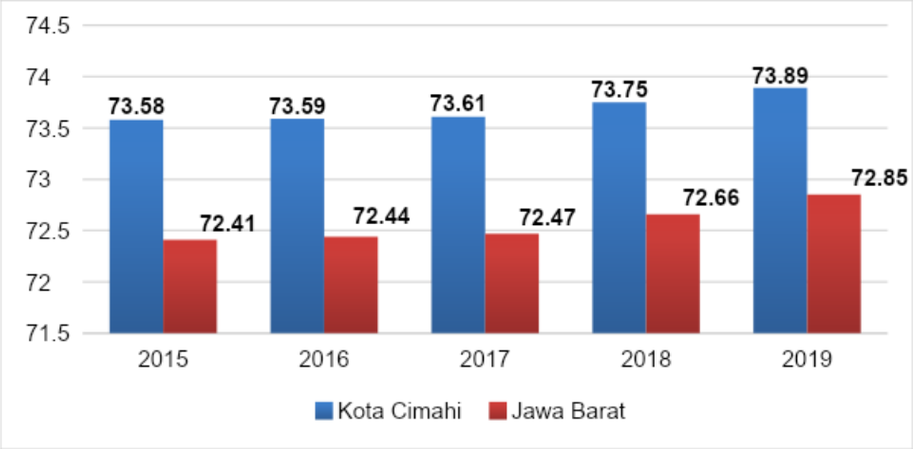
Sesuai dengan data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak atau menamatkan SD sebesar 14,11, tamat SLTP sebesar 16,39%, tamat SLTA sebesar 47,33%, dan tamat Diploma dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 22,17%. Bila dicermati hampir setengahnya dari penduduk Kota Cimahi yang berusia 15 tahun ke atas, memiliki ijazah SLTA (SMA dan SMK). Hal ini terjadi utamanya terkait dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Sementara dalam perkembangan terakhir dunia kerja lebih banyak mempersyaratkan tingkat pendidikan SLTA untuk rekruitmen pekerja.

Data APT untuk memperlihatkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan pada jenjang Diploma dan PT cukup bagus sekitar 22,17%, Mencermati kondisi tersebut, seharusnya diambil kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kota Cimahi dimana angka yang menamatkan pendidikan dasar 30,50%.

2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2019 AHH Kota Cimahi mencapai 73,89 tahun meningkat 0,31 poin dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 73,58 tahun. Ini berarti pada Tahun 2019, setiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 73,89 tahun, lebih lama 0,14 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.19.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan AHH Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Perlambatan tersebut dipengaruhi pula oleh masih tingginya jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu. Angka kematian merupakan salah satu faktor yang menghambat laju AHH. Mencermati tingginya jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu di Kota Cimahi perlu diambil kebijakan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Cimahi.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat, maka selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat. Dimana pada tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi sebesar 73,89 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat hanya 72,85 tahun.

Berkaitan dengan wabah Virus Corona dalam bidang kesehatan selain pemenuhan alat medis untuk menangani korban adalah perlunya sosialisasi mengenai *social distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

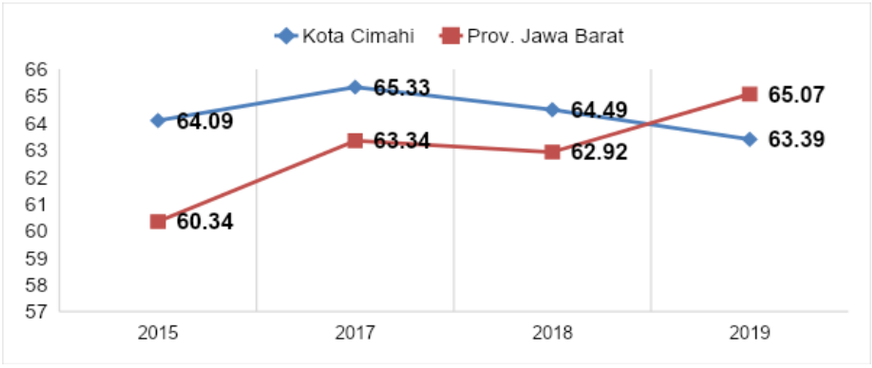
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebanyak 467.742 orang, bertambah sebanyak 26.909 orang dibandingkan Tahun 2015. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada 2019 sebanyak 296.513 orang, atau berkurang sebanyak 1.026 orang dibanding tahun 2018. Angkatan kerja sebanyak 296.513 orang terbagi menjadi bekerja sebanyak 272.553 orang dan pengangguran sejumlah 23.960 orang. Adapun pengertian bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Berdasarkan gambar dibawah, diketahui bahwa TPAK Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 64,09 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 65,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga menjadi 64,49 persen dan 63,39 persen.

Gambar 2.20.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019



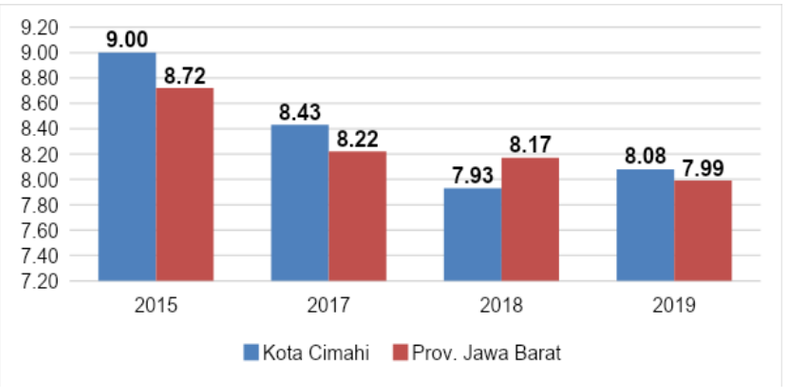
Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020, diolah

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa selama periode Tahun 2015–2018 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan tahun 2018 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 82,79 persen sedangkan TPAK perempuan 46,13 persen.

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 TPT Cimahi sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, TPT Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi 8,08 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya beberapa perusahaan yang menutup usahanya di Cimahi dan menyisakan masalah pengangguran. Sebaliknya, TPT Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 8,17 pada Tahun 2018 menjadi 7,99 di tahun berikutnya.

Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.21.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020, diolah

Lebih rinci mengenai data ketenagakerjaan di Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.16.
Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Usia Kerja	440.833	-	454.659	461.363	467.742
2	Angkatan Kerja	282.539	-	297.050	297.539	296.513
2.a	Bekerja	257.105	-	272.017	273.955	272.553
2.b	Pengangguran	25.434	-	25.033	23.584	23.960
3	Bukan Angkatan Kerja	158.294	-	157.609	163.824	171.229
3.a	Sekolah	41.847	-	41.200	45.763	51.684
3.b	Mengurus RT	96.922	-	101.707	103.225	103.340
3.c	Lainnya	19.525	-	14.702	14.836	16.205
4	TPAK (%)	64,09	-	65,33	64,49	63,39
4.a	Laki-laki	81,97	-	81,88	82,79	79,88
4.b	Perempuan	46,09	-	48,70	46,13	46,87
5	TPT (%)	9	-	8,43	7,93	8,08
6	Bekerja (%)	91	-	91,57	92,07	91,92

Sumber : 1. BPS Kota Cimahi, 2020, diolah
2. BPS Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah

Rendahnya etos kerja dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja menjadi alasan lain tidak terserapnya tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang mempunyai keahlian tetapi tidak

mempunyai sertifikat keahlian sehingga kalah dengan tenaga kerja dari daerah lain yang bersertifikat. Rendahnya angka serapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh rendahnya daya saing tenaga kerja Kota Cimahi sehingga banyak tenaga kerja berasalkan dari daerah lain. Regulasi yang ada tidak bisa mengatur prosentase minimal penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Cimahi.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

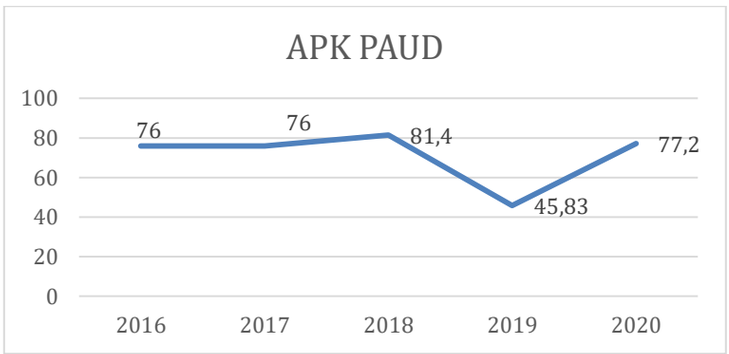
2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian APK PAUD selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif pada tahun 2016-2018 terus meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan PAUD. Namun pada tahun 2019 APK PAUD di Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 45,83%, yang dikarenakan perubahan perhitungan dari Pusat mengenai usia PAUD yang semula 3-6 Tahun menjadi 4-6 tahun, selain itu juga banyak anak yang usia 6 tahun sudah berada di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya pada tahun 2020 APK PAUD meningkat kembali menjadi 77,20%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.22.
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2020

b. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Analisa data untuk jenjang pendidikan menengah tidak dibahas dalam dokumen RPJMD Perubahan ini dikarenakan merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pelayanan pendidikan di Kota Cimahi secara lokasi pola sebarannya berkelompok (*cluster*). Hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan berkumpul ditengah Kota atau di kelurahan-kelurahan di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, sementara wilayah kelurahan di Cimahi Utara merupakan kawasan KBU (Kawasan Bandung Utara) yang membatasi pembangunan dan di wilayah selatan merupakan daerah industri. Aksesibilitas pendidikan dari sisi kewilayahan bukan merupakan masalah utama, namun terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebanyak 1.200 orang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan lingkungan serta peran orang tua.

Tabel 2.17.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Kota Cimahi Tahun 2015–2019

No	APK/ APM	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	98,92%	106,91%	101,69%	95,22%	102.54
2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	89,08%	89,28%	88,73%	79,74%	96.29
3	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,08%	77,98%	95.73%	89,67%	96.45
4	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	68,66%	73%	75.29%	77,41%	78.81

Sumber : 1. Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019
2. BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2019.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,62 poin. Untuk jenjang SMP juga demikian, dari yang semula 89,08 persen di tahun 2015, mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 96.29 persen.

Selanjutnya, untuk Angka Partisipasi Murni SD juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 sebesar 95,08 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 96,45 persen.

Jika dibandingkan antara APK dan APM jenjang pendidikan SD maupun SMP terjadi gap yang jauh, hal ini disebabkan karena siswa dari jenjang pendidikan SD ada yang masih berusia tujuh tahun kurang sudah bersekolah di SD dan ada anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih duduk di jenjang SD serta kondisi ini disebabkan pula oleh letak geografis Kota Cimahi yang berdekatan dengan Kota/Kabupaten sekitar, sehingga banyak dari kota dan kabupaten sekitar yang bersekolah di Cimahi maupun sebaliknya, sehingga kondisi ini berpengaruh pada pencapaian APK dan APM dari Kota Cimahi.

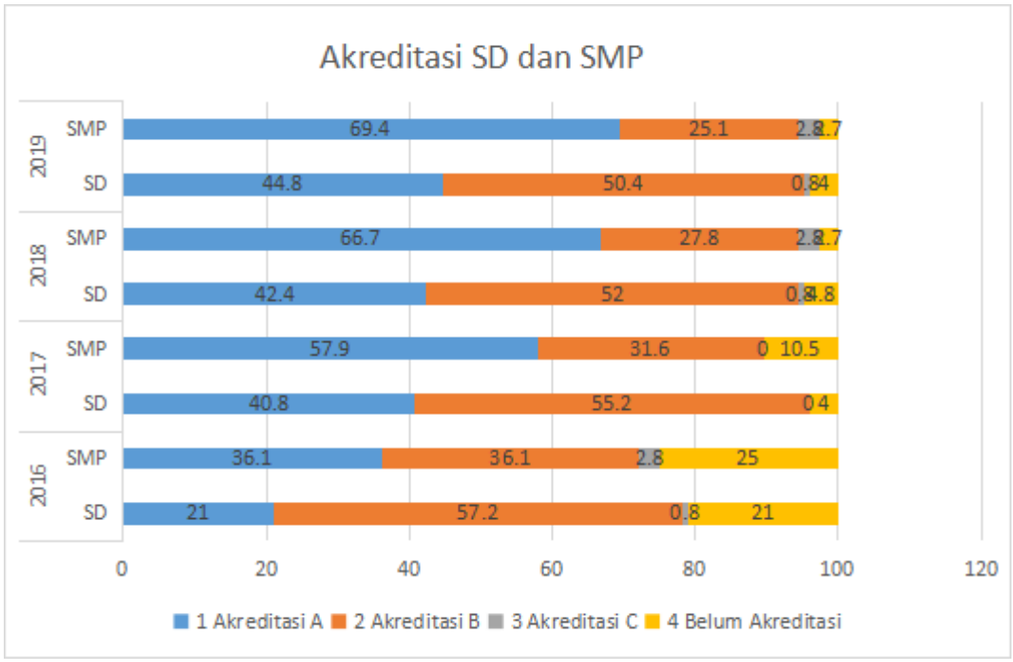
Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap pendidikan di Kota Cimahi. Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019.

Tabel 2.18.
Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019

No	Putus Sekolah Jenjang	Tahun		
		2017	2018	2019
1	SD	39	44	8
2	SMP	59	67	4

Selain partisipasi, yang perlu diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mutu dan daya saing baik murid, guru maupun lembaga sekolah. Berikut ini mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah di Kota Cimahi.

Gambar 2.23.
Persentase Nilai Akreditasi Sekolah Jenjang SD di Kota Cimahi
Tahun 2016-2019



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

Mutu sekolah yang tercermin dari nilai akreditasi sekolah masih belum optimal, pada jenjang SD mayoritas masih terakreditasi B sedangkan pada jenjang SMP mayoritas sudah terakreditasi A. meskipun demikian, masih ada sekolah pada jenjang SD, SMP yang masih terakreditasi C bahkan belum terakreditasi.

Data Rasio Guru terhadap Murid pada Tahun 2016-2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Rasio guru-murid untuk jenjang SD pada tahun 2019 yaitu 1:25 dan SMP 1:21.

Tabel 2.19.

Rasio Guru Murid di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

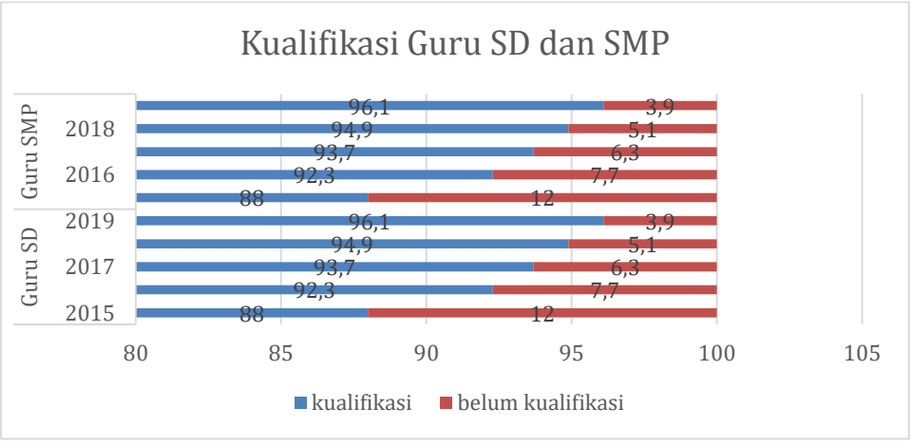
TAHUN	SD	SMP
2015	1:22	1:19
2016	1:26	1:23
2017	1:24	1:21
2018	1:28	1:22
2019	1:25	1:21

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016,2017,2018 dan 2019.

Pada jenjang SD, persebaran kualifikasi guru disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.24.

Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Neraca Pendidikan Tahun 2015-2019

Tabel 2.20.

Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Tahun	Guru SD		Guru SMP	
	S1	<S1	S1	<S1
2015	87	13	88	12
2016	89,5	10,5	92,3	7,7
2017	89	11	93,7	6,3
2018	92,2	7,8	94,9	5,1
2019	93,7	6,3	96,1	3,9

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 93 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 89 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 92,2 persen dan 93,7 persen.

Pada jenjang pendidikan SMP, kualifikasi guru menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Setiap guru di SMP dituntut fokus memberi pengajaran untuk satu mata pelajaran kepada siswa.

Kualifikasi guru SMP di Kota Cimahi dengan lulusan sarjana strata 1 (S1) pada tahun 2015 sebesar 93 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 92,3 persen. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 96,1 persen. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan kualifikasi, mutu guru di Kota Cimahi sudah baik dimana mayoritas guru pada setiap jenjang sudah memiliki pendidikan di atas D4 atau sarjana. Oleh karena itu diharapkan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Data Rasio Guru terhadap Murid pada Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Rasio guru-murid untuk jenjang SD pada tahun 2019 yaitu 1:25 dan SMP 1:21.

Tabel 2.21.

Rasio Guru dan Siswa tahun 2015-2019

Rasio Guru dan Siswa	2015	2016	2017	2018	2019
SD	1:22	1:26	1:24	1:28	1:25
SMP	1:19	1:23	1:21	1:22	1:21

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah baik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir fokus terhadap pendidikan di Kota Cimahi. Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019.

Tabel 2.22.
Angka Putus Sekolah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

TAHUN	SD	SMP	SMA	SMK
2017	39	59	39	244
2018	44	67	19	230
2019	8	4	1	7

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2019.

2. Kesehatan

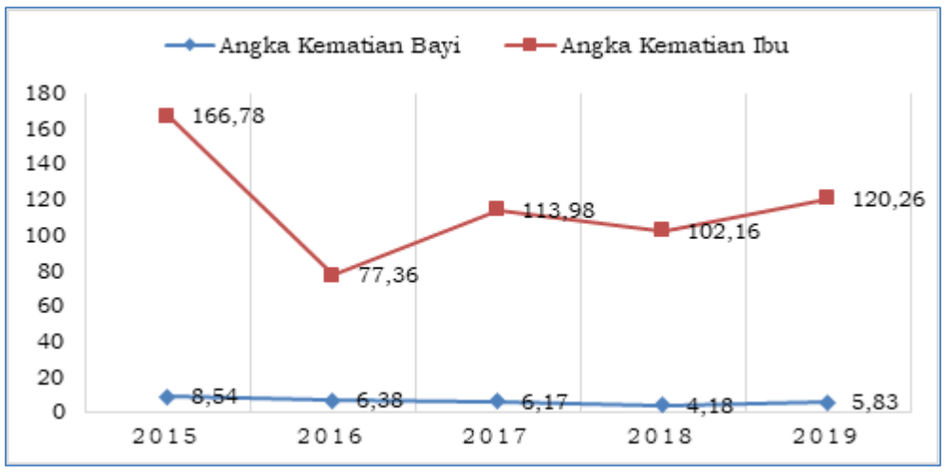
Nilai Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi pula oleh kondisi Kesehatan Ibu dan anak khususnya oleh jumlah kematian Ibu dan anak yang direpresentasikan melalui AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). AKI dan AKB yang dimaksud merupakan perhitungan rasio jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan rasio jumlah kematian bayi per 1000 KH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2015-2019, AKI di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 166,78, dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 hingga angkanya menjadi 120,26. Sementara untuk AKB Kota Cimahi pada tahun 2015 angkanya sebesar 8,54. Selanjutnya pada tahun berikutnya hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga menjadi 5.83.

Inovasi yang dilakukan dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi adalah dengan menyediakan unit transfusi darah mandiri di RS Umum Cibabat serta gerakan menyusui 1000 hari masa emas.

Gerakan ini telah dipelopori oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmadyani (UNJANI).

Gambar 2.25.
Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2015-2019



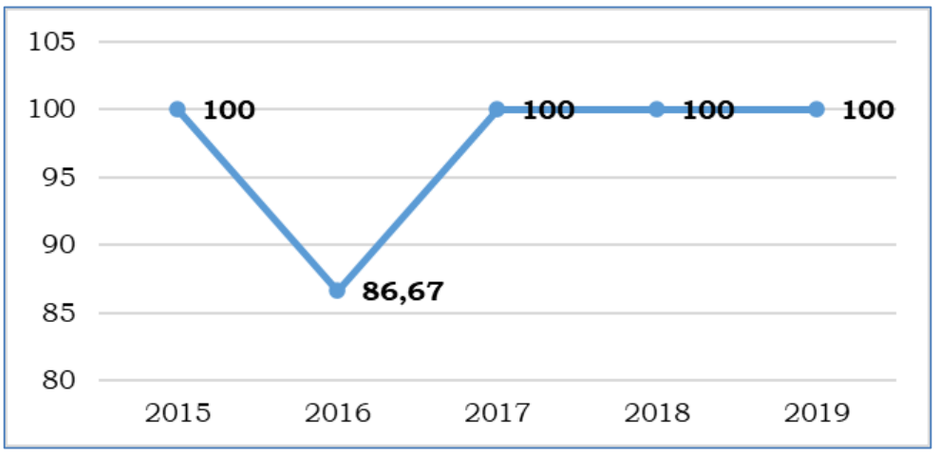
Sumber : 1. Profil Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2013-2017
2. Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan AKB di Kota Cimahi mengalami tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kesehatan di Kota Cimahi sudah cukup baik. Berbanding terbalik dengan AKB, meskipun cenderung mengalami penurunan, AKI Kota Cimahi masih terbilang tinggi dimana AKI Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 120,26. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, serangan jantung, dan faktor gizi buruk pada perkembangan ibu saat mengandung.

Indikator lain yang menggambarkan kondisi kesehatan di sebuah daerah yaitu Cakupan kelurahan UCI. Cakupan kelurahan UCI merupakan indikator yang berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *Universal Child Immunization*. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan UCI,

maka akan berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah.

Gambar 2.26.
Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Pencapaian UCI di Kota Cimahi mengalami penurunan di tahun 2016. Lalu meningkat kembali pada tahun 2019 mencapai 100%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa imunisasi di Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2019 melaksanakan Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB), dalam upaya pencegahan dan penurunan Balita *Stunting*. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun hasil rekapitulasi kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U Tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) Berdasarkan TB/U Tahun 2019

PUSKESMAS	KELURAHAN	S RIIL	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	% STUNTING
CIMAHI UTARA	Cibabat	3259	12	241	253	7.76%
CIPAGERAN	Cipageran	3191	12	260	272	8.52%
CITEUREUP	Citeureup	2494	63	423	486	19.49%
PASIRKALIKI	Pasirkaliki	1110	1	50	51	4.59%
KEC. CIMAHI UTARA		**10054**	**88**	**974**	**1062**	**10.56%**
CIMAHI TENGAH	Cimahi	655	9	76	85	12.98%
	Karang Mekar	781	8	83	91	11.65%
PADASUKA	Padasuka	2543	4	128	132	5.19%
	Setiamanah	1402	0	50	50	3.57%
CIGUGUR	Cigugur	3474	111	418	529	15.23%
	Baros	1259	18	98	116	9.21%
KEC. CIMAHI TENGAH		**10114**	**150**	**853**	**1003**	**9.92%**
CIMAHI SELATAN	Utama	2518	30	112	142	5.64%
LEUWIGAJAH	Leuwi gajah	3032	56	224	280	9.23%
CIBEBER	Cibeber	1728	45	250	295	17.07%
CIBEUREUM	Cibeureum	4307	8	292	300	6.97%
MELONG ASIH	Melong	2446	11	22	33	1.35%
MELONG TENGAH		1881	12	145	157	8.35%
KEC. CIMAHI SELATAN		**15912**	**162**	**1045**	**1207**	**7.59%**
KOTA CIMAHI		**36080**	**400**	**2872**	**3272**	**9.07%**

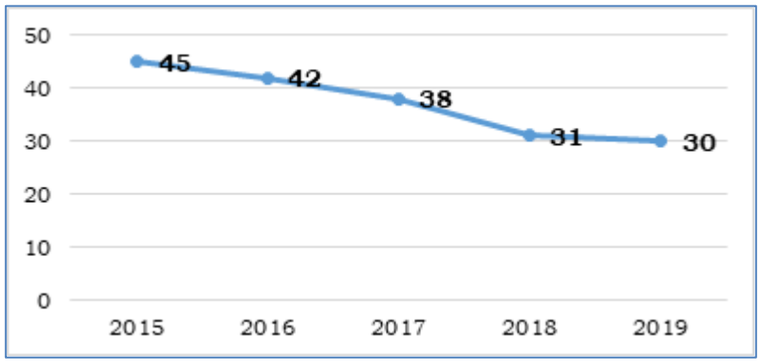
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2019 mencapai 9,07 persen. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebesar 7,59 persen, dan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 10,56 persen.

Kasus gizi buruk di Kota Cimahi pada tahun 2015 sebanyak 45 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 42 di tahun 2016 sampai menjadi 30 kasus pada tahun 2019. Walaupun kecenderungannya memang menurun, tapi kasus gizi buruk di Kota Cimahi masih cukup tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya faktor ekonomi dari keluarga miskin, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi pada balita. Selain itu dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi yang baik

bagi anak-anak. Gambaran kasus gizi buruk pada balita di Kota Cimahi Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.27.
Kasus Gizi Buruk Pada Balita Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Masih tingginya kasus gizi kurang di Kota Cimahi dimana pada tahun 2019 sebanyak 5,6%, disebabkan oleh rendahnya faktor ekonomi dari keluarga miskin, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi pada balita. Selain itu dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi yang baik bagi anak-anak.

Tabel 2.24.
Gizi Buruk Kota Cimahi Tahun 2019

PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)	
		JUMLAH	%
CIMAHI UTARA	**3,259**	**267**	**8.2**
PASIRKALIKI	1,110	69	6.2
CIPAGERAN	3,191	163	5.1
CITEUREUP	2,494	230	9.2
CIMAHI TENGAH	**1,436**	**140**	**9.7**
CIGUGUR TENGAH	4,733	106	2.2
PADASUKA	3,945	221	5.6
CIMAHI SELATAN	**2,518**	**179**	**7.1**
CIBEUREUM	4,307	180	4.2
MELONG ASIH	2,446	61	2.5
CIBEBER	1,728	130	7.5

PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)	
		JUMLAH	%
LEUWIGAJAH	3,032	147	4.8
MELONG TENGAH	1,881	121	6.4
	36,080	**2,014**	**5.6**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Selanjutnya untuk angka prevalensi kurang gizi di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sebesar 6,91 persen dan mengalami penurunan di Tahun 2018 menjadi 6,29 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,58 persen.

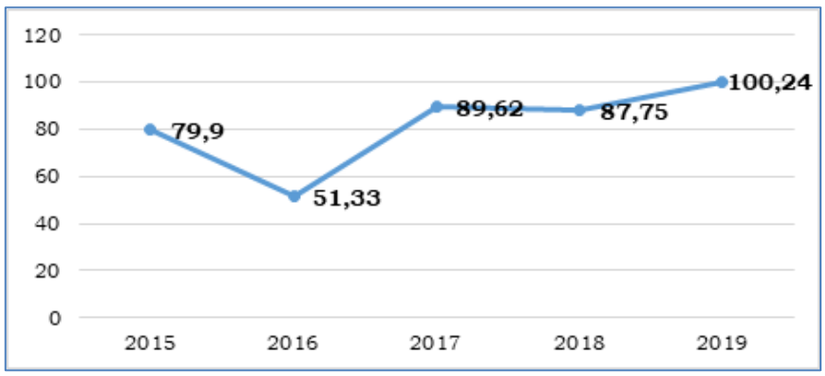
Tabel 2.25.
Prevalensi Kurang Gizi di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019
Prevalensi kurang gizi	6,91	6,29	5,58

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020, diolah

Selain itu, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari aspek angka kesakitan menurut penyakit tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat kemungkinan menderita penyakit tertentu per 100 penduduk sehingga dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan penduduk di suatu daerah. Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit tertentu berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Pada konteks Kota Cimahi, angka kesakitan dapat dilihat dari prevalensi hipertensi, prevalensi Diabetes Melitus (DM), prevalensi kanker, jumlah kasus Tuberkulosis (TB), persentase penemuan kasus TB Basil Tahan Asam (BTA) positif, total kumulatif kasus HIV/AIDS, cakupan penemuan penderita Demam Berdarah *Dengue* (DBD).

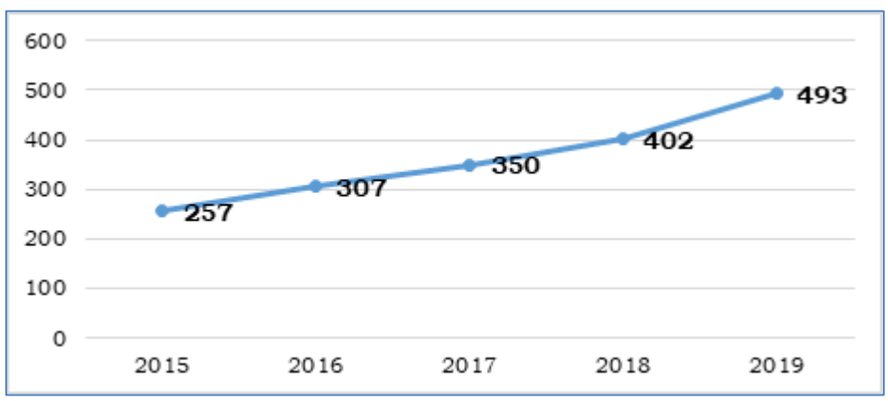
Gambar 2.28.
Grafik Penemuan Pasien TB BTA Positif Kota Cimahi
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Penemuan kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 TB BTA Positif sebesar 79,9 sempat turun menjadi 51,33 di tahun 2016, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 89,62. Selanjutnya pada tahun 2018 turun menjadi 87,75, namun pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 100,24. Hal ini menandakan kualitas kesehatan masyarakat Kota Cimahi yang masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.29.
Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2015-2019

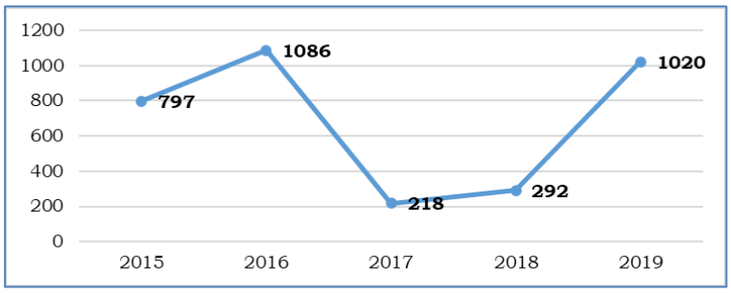


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 257 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 493 kasus. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi. Sebab yang mengindikasikan terjadinya kondisi tersebut adalah tingginya kesulitan yang dihadapi oleh penderita HIV/AIDS dari keluarga pra sejahtera dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue* (DBD) juga merupakan penyakit yang berbagai masyarakat. DBD merupakan salah satu penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah.

Gambar 2.30.
Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2016 dan 2020, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2015 sebanyak 797 kasus, meningkat menjadi 1086 kasus pada tahun 2016. Sempat turun drastis menjadi hanya 218 kasus pada tahun 2017, namun meningkat kembali menjadi 292 kasus pada tahun 2018, dan akhirnya melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih bahwa upaya untuk mencegah mewabahnya DBD di tengah masyarakat menjadi sangat krusial. Kerja keras perlu dilakukan

dalam memberikan kesadaran pada masyarakat dalam melakukan upaya-upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungannya masing-masing.

Pada tahun 2019, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit TNI-AD, dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berjumlah 13 Puskesmas yang terdiri dari 1 Puskesmas rawat inap dan 12 Puskesmas non rawat inap, sedangkan Puskesmas pembantu berjumlah 2 unit. Selain itu terdapat pula pelayanan klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Tabel 2.26.

Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2019

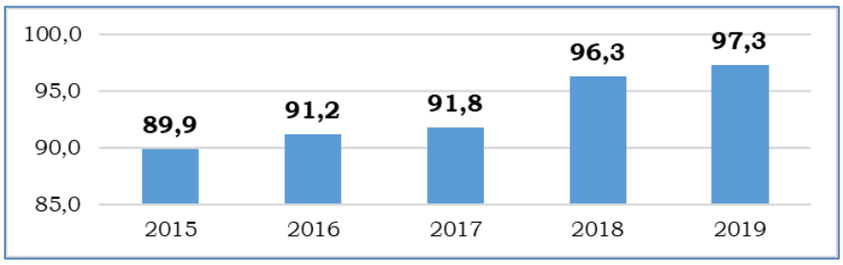
NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
RUMAH SAKIT		
1	RUMAH SAKIT UMUM	6
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	1
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	1
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	12
3	PUSKESMAS KELILING	-
4	PUSKESMAS PEMBANTU	2
SARANA PELAYANAN LAIN		
1	KLINIK PRATAMA	39
2	KLINIK UTAMA	6
3	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	1
4	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	111
5	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	53
6	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	28
7	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	257
8	LABORATORIUM KESEHATAN	9
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN		
1	INDUSTRI FARMASI	3
2	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	1
3	PEDAGANG BESAR FARMASI	5
4	APOTEK	71
5	TOKO OBAT	9
6	TOKO ALKES	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung kesehatan di Kota Cimahi berdampak pada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan neonatal pertama ibu hamil, dan cakupan kunjungan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi merupakan salah satu bagian deskripsi perkembangan layanan kesehatan dari pemerintah Kota Cimahi bagi ibu hamil.

Gambar 2.31.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Tahun 2015-2019



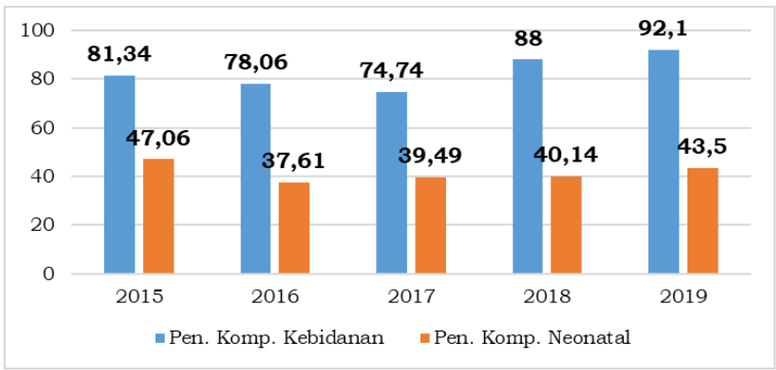
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2020

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 89,9 persen dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 97,3 persen pada tahun 2019.

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/ penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal dari tahun 2015 hingga 2017 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.32.
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal
Kota Cimahi Tahun 2015-2019



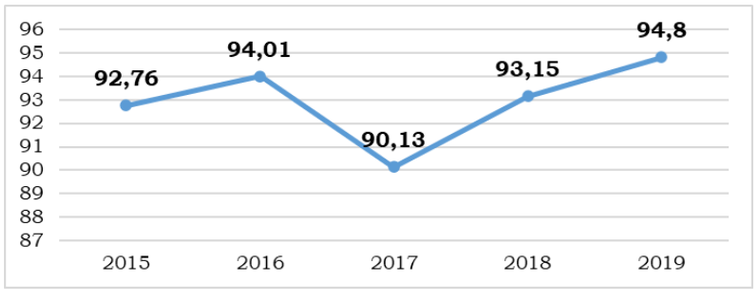
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Cimahi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sampai tahun 2017, kemudian meningkat lagi sampai tahun 2019. Capaian pada tahun 2015 sebesar 108,5 menurun menjadi 74,7 pada tahun 2017, kemudian meningkat kembali menjadi 88 di tahun 2018 dan 92,1 pada tahun 2019. Sedangkan pada penanganan komplikasi neonatal juga mengalami fluktuasi dari angka 46,9 di tahun 2015 menurun menjadi 37,6 di tahun 2016. Selanjutnya, sejak tahun 2017 mengalami tren peningkatan hingga mencapai 43,5 pada tahun 2019.

Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga berdampak pada cakupan pelayanan kesehatan bayi. Capaian cakupan kunjungan bayi dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bayi di

Kota Cimahi yang mendapat pelayanan kesehatan. Apabila jumlah kunjungan bayi semakin meningkat, maka kualitas kesehatan bayi di Kota Cimahi dapat ditingkatkan. Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung berfluktuasi bila ditinjau 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 cakupan kunjungan bayi sebesar 92,76 dan mengalami peningkatan pada berikutnya menjadi 94,01. Namun pada tahun 2017 mengalami perlambatan menjadi 90,13. Kondisi tidak bertahan lama sebab mulai Tahun 2018 meningkat menjadi 92,15 dan kembali meningkat menjadi 94,8 pada tahun 2019.

Gambar 2.33.
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019



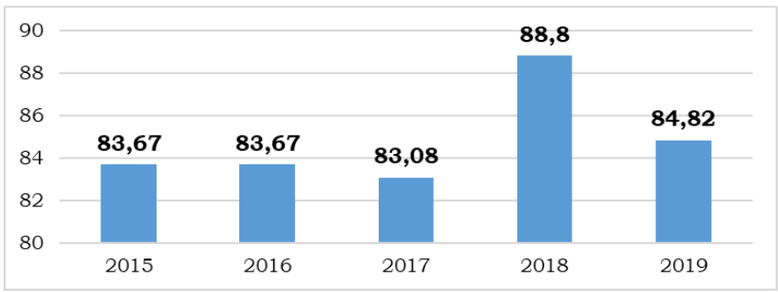
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk menangani kunjungan bayi yang cenderung mengalami peningkatan dimaksud, maka pemerintah Kota Cimahi melakukan penambahan Posyandu yaitu Posyandu Aktif. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri, dimana posyandu madya yang cakupan kelima kegiatan pokoknya lebih dari 50%, mampu melaksanakan program tambahan dan sudah memperoleh sumber pembiayaan dari dana Sehat yang dikelola masyarakat yang jumlah peserta masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga (KK) di wilayah kerja posyandu. Sedangkan Posyandu Mandiri merupakan posyandu purnama yang sumber pembiayaannya diperoleh dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat dengan jumlah peserta lebih dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa jumlah posyandu aktif di Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 83,67 persen dari total

posyandu yang terdaftar. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 83,08. Namun pada tahun berikutnya persentase posyandu aktif kembali meningkat menjadi 88,8 persen, walaupun sangat disayangkan kembali turun ke 84,82 persen pada tahun 2019. Hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Cimahi terutama dalam upaya peningkatan kesehatan anak di Kota Cimahi.

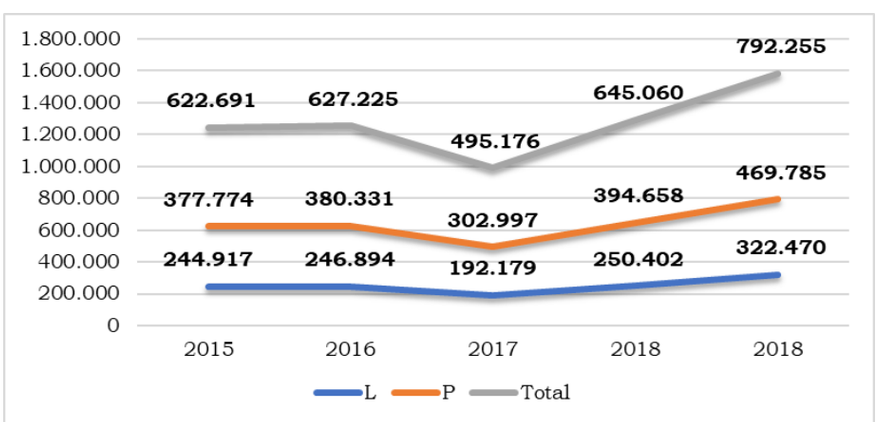
Gambar 2.34.
Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dalam memberikan pelayanan kuratif kepada Masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai 792.255 kunjungan. Pada tahun 2019 apabila dilihat dari trend tahun sebelumnya kunjungan mengalami peningkatan.

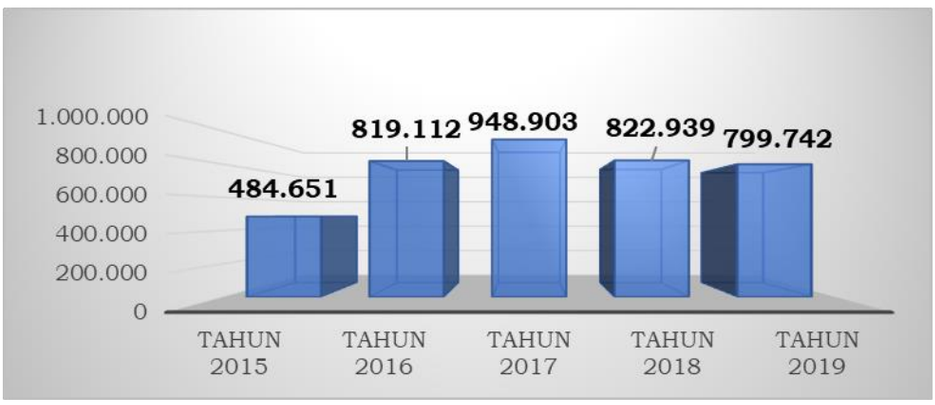
Gambar 2.35.
Kunjungan Puskesmas Tahun 2015-2019



Sumber : Profil Kesehatan Kota Cimahi 2019, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa kunjungan Puskesmas pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung menurun, dimana pada tahun 2015 jumlah kunjungan Puskesmas sebesar 622.691 orang, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga menjadi 495.176 orang, namun kondisi ini membaik di tahun 2018 dimana jumlah kunjungan Puskesmas kembali meningkat cukup signifikan menjadi 645.060 kunjungan yang kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 menjadi 792.255 kunjungan.

Gambar 2.36.
Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Profil Kesehatan 2019, diolah

Kunjungan rawat jalan Rumah Sakit pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Data pada tahun 2015 menunjukkan jumlah kunjungan sebesar 484.651 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 948.903 orang, turun pada tahun 2018 menjadi 822.939 kunjungan, kemudian turun kembali menjadi 799.742 kunjungan pada tahun 2019.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2019 adalah 118,873 km. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,74 persen dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 persen merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,39 persen

merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,193 km menurut kondisi jalan terdiri dari 56,057 km atau 53,29 persen dalam kondisi baik, 42,778 km atau 40,67 persen kondisi sedang, atau 6,058 km atau 5,76 persen kondisi rusak. Pada tahun 2019 persentase jalan kota dengan kondisi rusak berat sebesar 0,300 km atau 0,29 persen. Artinya tahun 2019 masih terdapat jalan kota di Kota Cimahi yang mengalami rusak berat.

Tabel 2.27.

Statistik Transportasi Kota Cimahi Tahun 2016–2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Jalan Raya				
Panjang Jalan (km)	118.873	119.000	118.873	118.873
Panjang Jalan (%)				
Nasional	3,63*	3,74*	3,63*	3,63*
Provinsi	7,87*	7,87*	7,87*	7,87*
Kota	88,49*	88,39*	88,49*	88,49*
Kondisi Jalan Kota (%)				
Baik	74,06*	53,32*	50,28*	53,29*
Sedang	22,88*	45,18*	42,60*	40,67*
Rusak	3,06*	1,50*	7,12*	5,76*
Rusak Berat	0	0	0	0,29*

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2020, diolah
**) Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020, diolah*

b. Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS)

Di bidang bina marga, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2017 berada di Kategori D dan pada tahun 2018 serta tahun 2019 berada di Kategori C. Hal Tersebut sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.28.

Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS)	D	C	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan hasil *Traffic Counting* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di tahun 2019, terhadap tingkat pelayanan jalan (*Level of Services*/ LOS) di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil rata-rata yaitu nilai C (LOS C) dan nilai rata-rata *Volume Capacity Ratio* (VCR) = 0,64 (Arus stabil; kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan; Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan).

Tabel 2.29.
Karakteristik Tingkat Pelayanan

TINGKAT PELAYANAN	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C) Ratio
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

Pada awal tahun perencanaan yaitu pada tahun 2017 kondisi LOS di Kota Cimahi dengan nilai D, namun pada tahun 2019 meskipun capaian tingkat pelayanan pada tahun 2019 sama dengan capaian pada tahun 2018 yaitu nilai C, namun batas lingkup VCR mengalami penurunan dari 0,59 pada tahun 2018 menjadi 0,64 pada tahun 2019, dikarenakan ada titik-titik kemacetan dimana kapasitas jalan di Kota Cimahi tidak bertambah sejak tahun 2017, serta akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Walapun, target RPJMD 2017-2022 yaitu LOS C di Kota Cimahi telah tercapai di

tahun 2019, tetapi masih ada beberapa titik kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Cimahi yang harus diatasi dan terus diupayakan untuk lancar.

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Adapun saat ini dibeberapa ruas jalan di Kota Cimahi belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat.

c. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam aspek pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis. Kondisi ketidaksesuaian tata ruang umumnya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

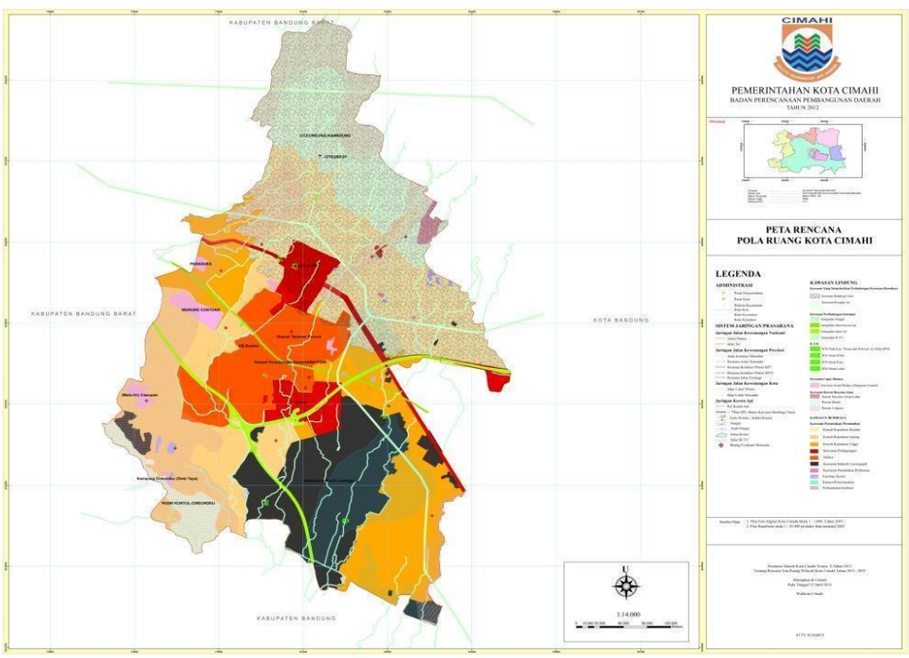
Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30 persen yang terdiri dari RTH publik sebesar 20 persen dan RTR Privat sebesar 10 persen dari luas wilayah kota. Sampai saat ini, RTH yang dimiliki seluas 40,89 ha atau 0,96 persen dari luas kota, lebih kecil dari hitungan sebelumnya yaitu sebesar 11,16 persen. Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH (*Sumber: DLH dan DPKP Kota Cimahi, 2019*).

Terbitnya kebijakan baru menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap penataan ruang wilayah seperti

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yakni pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang melewati wilayah Kota Cimahi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun yakni penetapan luas lahan pertanian berkelanjutan di Kota Cimahi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi.

Adapun Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 2.37.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni. Kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari 7 aspek dan 16 kriteria berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ PRT/M/ 2018, yaitu keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer, yang diharapkan dapat memenuhi salah satu dari 7 aspek dalam penilaian kekumuhan dan ditetapkan sebagai kawasan tidak kumuh.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 3,64 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,68 persen dan pada tahun 2019 menjadi 0,65 persen. Total luas kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2017 s.d 2019 sebesar 150,52 Ha, sehingga luas kawasan kumuh kota dapat menjadi berkurang.

Tabel 2.30.

Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Rasio Luas Kawasan Kumuh	3,64	1,68	0,65

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, 2020, diolah

a. Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sebesar 68,17 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 76,50 sedangkan Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 72,70 persen. Namun pada tahun 2019 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 75,98 persen, hal ini disebabkan Tahun 2018 terkendala ketersediaan lahan, sehingga jumlah unit IPAL yang di bangun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Untuk meningkatan layanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat, selain penyediaan IPAL komunal juga dengan adanya UPTD Air Limbah penyedotan lumpur tinja dapat terlayani.

Tabel 2.31.

Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	68,17	n/a	76,50	72,70	75,98

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020

b. Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pelayanan dasar lain yang juga berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah pelayanan air bersih/minum. akses air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja

yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri.

Persentase cakupan pelayanan air bersih di Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 62,73 persen dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 70,35 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.32.
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase cakupan pelayanan air bersih	62,73	68,83	69,17	69,34	70,35

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020, diolah

Karena adanya keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi, sumber daya air yang di manfaatkan sebagai air baku selain sungai adalah kolam retensi. Di Kota Cimahi terdapat 7 (tujuh) buah kolam retensi yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan di Kelurahan Setiamanah. Kolam retensi terbesar dengan luas 1.080 m^2 dan kedalaman 6 m terletak di Kelurahan Leuwigajah.

Kedepannya diupayakan dilakukan inovasi berupa peningkatan nilai tambah kolam retensi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana publik untuk rekreasi, kegiatan olahraga masyarakat bahkan budidaya ikan khususnya ikan hias/konsumsi.

Tabel 2.33.

Kondisi Kolam Retensi Tahun 2019 Kota Cimahi

No	Nama	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1	Kolam Retensi (Kel Cibabat)	0,06	3.040
2	Kolam Retensi (Kel. Citeureup 1)	0,019	798
3	Kolam Retensi (Kel. Citeureup 2)	0,017	535,5
4	Kolam Retensi (Kel. Leuwigajah 1)	0,108	6.480
5	Kolam Retensi (Kel. Leuwigajah 2)	0,08	4.020
6	Kolam Retensi (Kel. Setiamanah)	0,04	1204,5
7	Kolam Retensi Cibeber	0,02	742,5
8	Kolam Retensi Melong	0,1	6.336
9	Danau Ciseupan	2	130.000

Sumber : *DPKP Kota Cimahi 2019*

c. Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya adalah kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Persentase luasan genangan terhadap luas kota di Kota Cimahi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase luasan genangan terhadap luas kota mencapai 0,38 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 masing-masing 0,14 persen dan 0,07 persen.

Tabel 2.34.

Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38	0,14	0,07

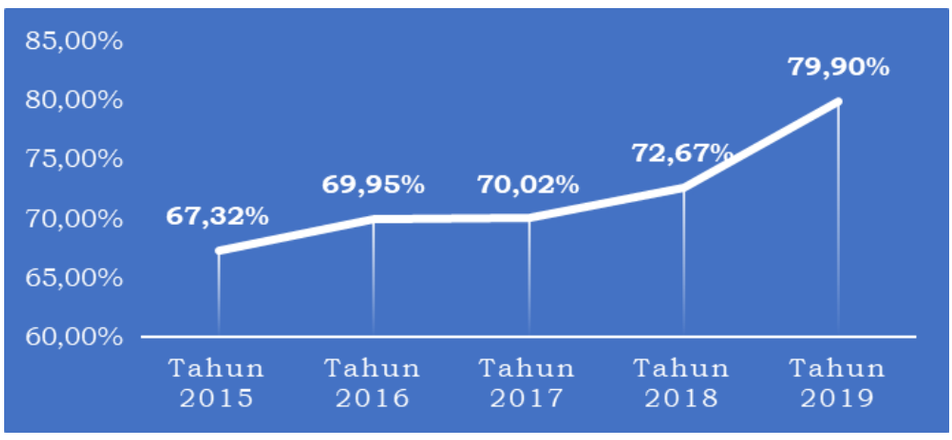
Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2020, diolah

d. Akses Sanitasi Layak

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Akses KK menggunakan sanitasi layak (jamban sehat) di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 persentase askes tersebut berada pada angka 67,32, naik menjadi 69,95 pada tahun 2016, 70.02 pada tahun 2017, 72,67 pada tahun 2018, dan terakhir kembali menangani peningkatan di tahun 2019 menjadi 79,9. Akses KK menggunakan Jamban tidak sehat (20,1%) disebabkan oleh dua hal yang pertama ada yang tidak punya jamban sekali sehingga BAB nya langsung ke selokan (BAB sembarang), dan sebagian besarnya sudah memiliki jamban tetapi tidak memiliki *septic tank*.

Gambar 2.38.
Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

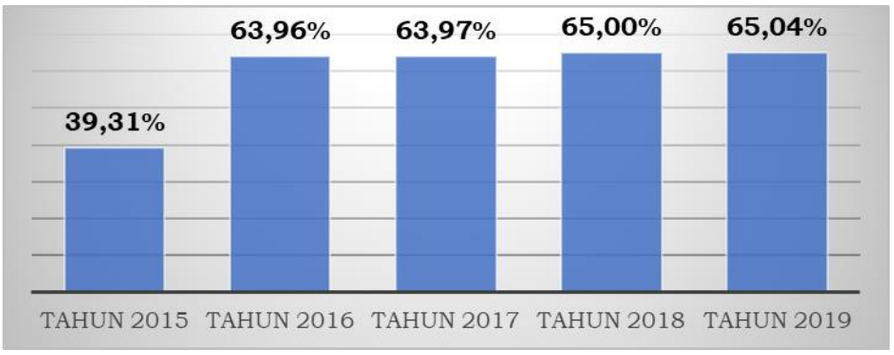


Sumber : Profil Kesehatan 2019 diolah

e. Rumah Sehat

Rumah sehat di Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 65,04%, dimana angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai hasil dari sering dilakukannya sosialisasi secara berkala sehingga masyarakat sudah mulai memahami kriteria rumah sehat.

Gambar 2.39.
Persentase Rumah Sehat Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data Tahun 2016 dari kepolisian resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu : Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam

pengelolaan, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu 100 persen.

Tabel 2.35.
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2020, diolah

b. Kebencanaan

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta rawan bencana Kota Cimahi sebagaimana dimuat pada bagian awal bab ini, menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kelerengan diatas 15 persen. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data, diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang.

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 2.36.
Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	KEJADIAN KEBAKARAN	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERI (Rp)
1	2015	50 Kejadian	2 meninggal, 2 luka bakar	9.805.000.000
2	2016	38 Kejadian	-	5.795.100.000
3	2017	5 Kejadian	-	210.000.000
4	2018	90 Kejadian	-	11.656.050.000
5	2019	68 Kejadian	1 meninggal, 2 luka sedang	433.200.000

Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran sehingga bencana yang muncul tidak mendapat penanganan yang cepat karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota karena selama ini masyarakat belum disiapkan dalam menghadapi bencana paling tidak untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana.

Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.37.
Daerah Evakuasi Bencana Kota Cimahi

No	Kelurahan	Kecamatan	Daerah Evakuasi Bencana
1	Cipageran	Cimahi Utara	Stadion Sangkuriang, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
2	Citeureup	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
3	Cibabat	Cimahi Utara	Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
4	Pasirkaliki	Cimahi Utara	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
5	Padasuka	Cimahi Tengah	Volodrome, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
6	Setiamanah	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
7	Cimahi	Cimahi Tengah	Alun-alun Kota, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
8	Karangmekar	Cimahi Tengah	Kawasan Militer, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
9	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah	Rusunawa Cigugur Tengah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
10	Baros	Cimahi Tengah	KawasanMiliter, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
11	Cibeber	Cimahi Selatan	Kawasan ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
12	Leuwigajah	Cimahi Selatan	Rusunawa Leuwigajah, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
13	Utama	Cimahi Selatan	SMK Negeri 1 Kota Cimahi, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan
14	Cibeureum	Cimahi Selatan	ruang terbuka, dan gedung atau bangunan terdekat
15	Melong	Cimahi Selatan	Rusunawa Melong, ruang terbuka, dan gedung atau bangunan

Sumber : RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki daerah evakuasi bencana di semua kelurahan dan kecamatan. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.

Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan longsor, yaitu : menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Untuk Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup banjir, gempa, longsor, puting beliung, kekeringan, vulkanologi, dan kebakaran.

Beberapa indikator kebencanaan di Kota Cimahi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun rinciannya disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.38.
Indikator Kebencanaan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019
1	Indeks resiko bencana	Kategori	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
2	Waktu tanggap bencana	Menit	15	15	15
3	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Persen	100	100	100
4	Persentase luasan banjir terhadap luas kota	Persen	0,38	0,14	0,07
5	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	Kejadian	130	151	222

Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2020, diolah

6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan dalam memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penangan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS memiliki 26 kriteria mulai dari anak terlantar, difabel, hingga pada keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Adapun kondisi PMKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.39.

Jumlah PMKS Kota Cimahi Menurut Jenis PMKS Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Total
1	Anak Bayi Terlantar	38
2	Anak Terlantar	570
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	5
4	Anak Jalanan	66
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	278
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5
8	Lanjut usia terlantar	2614
9	Penyandang disabilitas	1144
10	Tuna susila	0
11	Gelandangan	29
12	Pengemis	2
13	Pemulung	70
14	Kelompok Minoritas	38
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	18
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	74
17	Korban *Trafficking*	4
18	Korban tindak kekerasan	7
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	3
20	Fakir Miskin	10214
21	Keluarga bermasalah sosial psikologis	129

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Cimahi, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa variasi PMKS didominasi oleh fakir miskin dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari adanya 128.792 penduduk Kota Cimahi yang berpenghasilan rendah (Dinas Sosial Kota Cimahi). Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga masih menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Adapun untuk data tuna susila di Kota Cimahi tidak ada baik secara realita kondisi aktual maupun juga secara data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi telah meningkatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.40.
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76	23,59	37,93

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 0,76 persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018 hingga menjadi 23,59 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 37,93 persen.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PMKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial

melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana social dan kebijakan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Perlu dicermati khusus bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak telantar termasuk anak jalanan, lanjut usia (lansia) telantar, penyandang cacat telantar, korban bencana alam dan sosial (pengungsi), dan kelompok rentan lainnya dapat dicapai. Upaya pemberdayaan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun didorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi Kota Cimahi perlu kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan SLRT dan PUSKESOS yang ada di setiap kelurahan serta kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi, sehingga PMKS memiliki kemampuan untuk

mengatasi masalah yang dihadapinya dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri.

7. Tenaga kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah pada urusan tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas melalui peningkatan kompetensi pencari kerja dan peningkatan hubungan industrial.

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan secara swakelola bekerja sama dengan beberapa LPK di Kota Cimahi yang telah bersertifikat. Meskipun secara kuantitas perkembangan jumlah peserta pelatihan ada pengurangan tetapi secara kualitas ditingkatkan dengan menambah jam pelatihan sesuai standar dan pemberian sertifikat. Pelaksanaan sertifikat kerja bagi pencari kerja yang telah memiliki keterampilan kerja dilakukan dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional. sedangkan pemagangan diberikan kuota oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan peserta magang. Selain dari APBD, Kota Cimahi juga mendapatkan kuota peserta pelatihan dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BBLK.

Hubungan Industrial berkaitan erat dengan hubungan tenaga kerja yang dapat diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Peningkatan Hubungan Industrial dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dengan berkurangnya angka perselisihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta perlindungan kerja melalui adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.41.
Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial
Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
I	**Pendidikan dan Pelatihan Kerja**			
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD)	52	500	160
2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD Provinsi/APBN)	-	-	142
3	Jumlah Peserta Pelatihan Yang ditempatkan/Bekerja	-	110	92
4	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pemagangan (APBN)	20	40	20
5	Jumlah Peserta Pemagangan Yang ditempatkan (APBN)	10	20	7
6	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP)	-	-	81
7	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP) Yang ditempatkan	-	-	3
II	**Hubungan Industrial**			
1	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	43	36	16
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6	11	73
3	Jumlah SP / SB	6	6	6
4	Jumlah Lembaga Bipartit	7	10	11
5	Perusahaan peserta jamsostek aktif	120	120	241
6	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	62.686	56.286	85.208

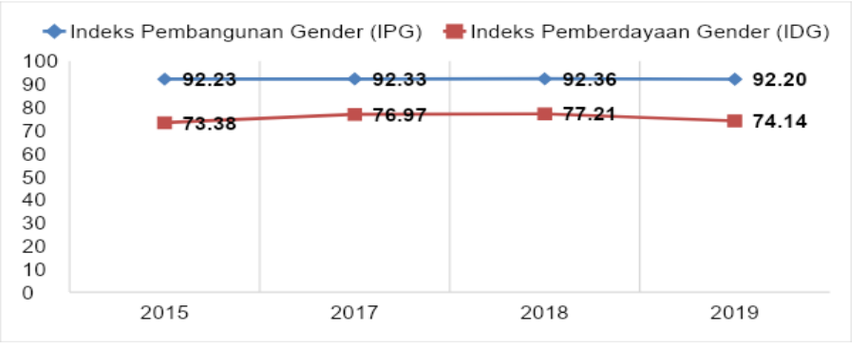
NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
7	Jumlah Perusahaan	593	593	619
8	Jumlah Perusahaan Tata Kelola Layak	-	-	233 /264
9	Jumlah Tenaga Kerja	-	42.477	59.007
10	Perselisihan			
	- Jumlah Kasus Didaftarkan	19	25	23
	- Jumlah Kasus Selesai dengan PB	16	20	17
11	Upah Minimum Kota (UMK)	2,463,461	2,678,028	2,893,074

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada Kader PKK.

Berbicara terkait pemberdayaan, isu gender pun kerap muncul sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat di suatu daerah, tingkat keberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat melaui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2.40.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Cimahi Tahun 2015-2019



Sumber : 1. BPS Jawa Barat, 2020, diolah
2. BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 92,23 dan pada tahun 2018 naik menjadi 92,36. Namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 92,20.

Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 73,38 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi 77,21. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 74,14.

Selanjutnya, untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 24 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 29,87 persen.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Pemilahan antara laki-laki dan perempuan ini untuk mengetahui kondisi pembangunan antara laki-laki dan perempuan, mengingat perempuan merupakan sumberdaya

potensial dalam proses pembangunan yang juga berperan dalam pembangunan secara keseluruhan akan tetapi justru perempuanlah yang dirugikan dalam pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Perhitungan IDG memiliki kesamaan dengan perhitungan IPG.

Tabel 2.42.
Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	24	26	29,87

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Selain itu, untuk Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG di Kota Cimahi juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 70 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 96,43 persen.

Tabel 2.43.
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG
Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	70	79	96,43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Berdasarkan data presentasi capaian IPG dan IDG di atas, dapat di analisa bahwa peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan (gambar 2.40 dan tabel.2.40 dan tabel 2.41), hal ini sempat mengalami fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu. Hanya pada tahun 2019, kesadaran perangkat dinas pada

Pemerintah Kota Cimahi yang telah mengimplementasikan PPRG meningkat dari 79% pada tahun 2018 menjadi 96,43% pada tahun 2019. Hal ini cukup signifikan dalam capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi.

Tabel 2.44.
Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17

Sumber : Dinsosp2kbp3a 2020

Berdasarkan data di atas, untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 hingga 2019 setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019.

9. Pangan

a. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (UU No. 18 Tahun 2012).

Ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan 2 (dua) komponen utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Adapun situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan data Susenas BPS (2018) yang diolah Dispangtan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45.
Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019

Kelompok Pangan	Gram/Kap /hari	Energi			Protein		Skor PPH	
		kkl/kap/hari		%AKE	gram/kap/ hari	%AKP**)		
		Aktual	Ideal				Aktual	Ideal
Padi-padian	413.8	1450	1200	60.4	36.6	58.1	25.0	25.0
Umbi-umbian	38	38	144	1.6	0.00	0.40	0.8	2.5
Pangan Hewani	284	284	288	11.9	19.00	30.70	23.7	24.0
Minyak dan Lemak	280	240	240	11.7	0.20	0.40	5.0	5.0
Buah/biji berminyak	1.4	3	72	0.1	0.00	0.00	0.1	1.0
Kacang-kacangan	86	86	120	3.6	8.90	14.10	7.2	10.0
Gula	15.4	57	120	2.4	0.10	0.10	1.2	2.5
Sayur dan Buah	145	145	144	6.0	65.20	103.50	30.0	30.0
Lain-lain	0	0	72	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
Total		**2342**	**2400**	**97.6**	**130.6**	**207.3**	**92.9**	**100**

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2019
*Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari*
***) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari*

Berdasarkan data tersebut skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2018 yaitu sebesar 92,9 poin, sedangkan target PPH Ketersediaan Kota Cimahi untuk tahun 2018 yaitu sebesar 96,4 point (tidak tercapai). Berdasarkan data tersebut juga dapat dijelaskan bahwa ketersediaan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, dan gula masih belum ideal di Kota Cimahi. Oleh karena itu Program Lintas sektoral terkait produksi pangan, perdagangan pangan, cadangan pangan, dan Program Penanggulangan Bencana perlu menjadi

perhatian lebih dalam penyusunan Revisi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2018 dan diolah oleh Dispangtan Kota Cimahi digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.46.
Konsumsi Pangan Rata-Rata di Kota Cimahi Tahun 2019

No	Kelompok Pangan	Gram /Kap /hari	Energi (kkl/kap /hr)	%AKE Aktual	Protein (g/kap/ hr)	%AKP Aktual	Skor PPH Ideal	Skor PPH Aktual
1	Padi-padian	301.5	1,288	59.9	29.4	51.7	25	25.0
2	Umbi-umbian	35.2	35	16	0.4	0.7	2.5	0.8
3	Pangan Hewani	121.4	266	12.4	21.1	37.1	24	24.0
4	Minyak dan Lemak	28.2	250	11.6	0.1	0.2	5	5.0
5	Buah/biji berminyak	1.8	11	0.5	0.3	0.4	1	0.2
6	Kacang-kacangan	27.3	59	2.8	6.3	11.1	10	5.5
7	Gula	12.8	51	2.4	0.2	0.3	2.5	1.2
8	Sayur dan Buah	216.3	95	4.4	3	5.3	30	22.0
9	Lain-lain	100.8	67	3.1	1.2	2.2	0	0.0
	Total		**2.123**	**98.80**	**62.1**	**109.0**	**100.0**	**83.8**

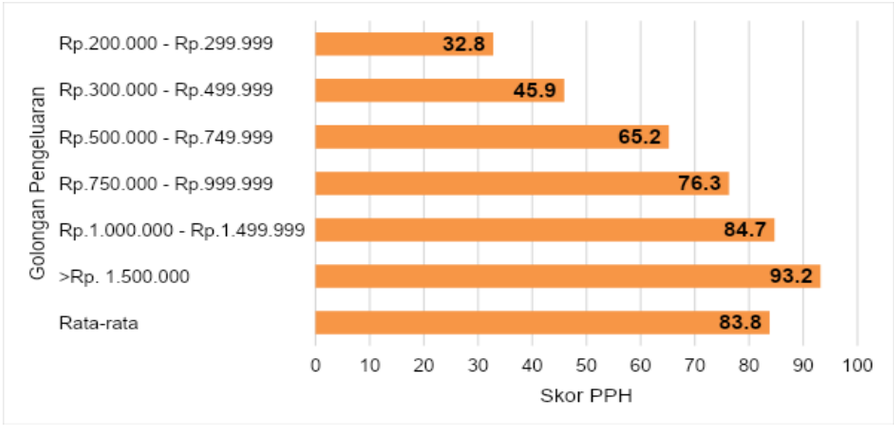
Sumber : BPS dan Dispangtan, 2020, diolah
*Ket : *) Angka Kecukupan Energi (AKE):2400 kkal/kap/hari*
***) Angka Kecukupan Protein (AKP):63gr/kap/hari*

Berdasarkan tabel diatas konsumsi kelompok pangan masyarakat Kota Cimahi secara kuantitas sudah cukup, namun kualitas/keragaman konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi masih belum optimal. Pencapaian skor PPH Konsumsi

Kota Cimahi baru sebesar 83,8 poin. Capaian tersebut terpaut 16,2 poin dari skor PPH ideal yaitu 100. Adapun kelompok pangan yang skor PPH nya masih kurang yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah; karena skor PPH untuk komoditi pangan tersebut berada dibawah angka ideal. Sementara itu, kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak sudah mencapai skor maksimal.

Skor PPH penduduk akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya pengeluaran pangan. Berdasarkan gambar dibawah ini, terdapat kesenjangan PPH Konsumsi yang cukup tinggi antara golongan penduduk dengan pengeluaran rendah dengan penduduk berpengeluaran tinggi. Penduduk yang tergolong pengeluaran pangan kurang dari Rp. 1,500,000 memiliki skor PPH 93,2 sedangkan penduduk yang tergolong pengeluaran pangan Rp. 200,000-Rp. 299,999 memiliki skor PPH 32,8. Penduduk dengan pengeluaran pangan kurang dari Rp. 500,000 bahkan masih belum cukup konsumsi padi-padiannya. Akan tetapi, konsumsi umbi-umbian pada kelompok pendapatan Rp. 200.000 – Rp. 299.999 merupakan yang tertinggi di antara kelompok pendapatan lainnya, meskipun tetap tergolong rendah jika dibandingkan standar ideal. Konsumsi umbi tersebut terutama pada singkong dan talas. Konsumsi protein hewani, protein nabati (kacang-kacangan), minyak dan lemak serta sayur dan buah cenderung meningkat seiring peningkatan pengeluaran pangan. Jika dibandingkan dengan konsumsi ideal, konsumsi protein hewani serta sayur dan buah hanya ideal pada kelompok pendapatan > Rp. 1.500.000. Sementara itu, konsumsi protein nabati di semua golongan pengeluaran masih kurang. Adapun konsumsi buah/biji berminyak tetap rendah di semua golongan pengeluaran.

Gambar 2.41.
Skor PPH Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi Tahun 2019



Sumber : Dispangtan, 2020, diolah

Jika akan dicoret di bagian ketahanan pangan sebaiknya dipindah ke bagian pertanian (perkebunan) karena termasuk tanaman keras dan musiman.

Keberadaan rasi tidak berkaitan dengan ketahanan pangan karena tidak dapat diproduksi secara masal sebagai bahan pangan alternatif bagi daerah karena adanya aturan adat.

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pencapaian skor PPH merupakan salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan rakyat yang diukur untuk untuk menghitung keberhasilan penyelenggaraan pangan di suatu daerah. Berdasarkan data pada tabel dibawah ini, skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi belum memenuhi target baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019, bahkan realisasi di tahun 2018 berada dibawah capaian Tahun 2017. Oleh karenanya pada penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Cimahi (2018) direkomendasikan untuk ditetapkan sasaran baru. Dengan adanya kesenjangan antara angka target dan realisasi PPH Ketersediaan tersebut maka diperlukan perencanan ketersediaan pangan yang baik di Kota Cimahi.

Disisi lain, indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa skor PPH Konsumsi Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 PPH Ketersediaan sebesar 96,2, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 93,4 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 92,9.

Tabel 2.47.
Pola Pangan Harapan ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	93,4	92,9
Pola Pangan Harapan Konsumsi	82,1	79,1	83,8

Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan evaluasi pencapaian skor PPH Konsumsi Kota Cimahi, berdasarkan data 2019 didapatkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,7 poin. Pencapaian target ini perlu dipertahankan dan dioptimalkan hingga tahun 2022 (akhir periode RPJMD) mendatang melalui sinergitas program dan kegiatan pangan dan gizi lintas perangkat daerah mulai dari sektor hulu hingga hilir. Untuk meningkatkan skor PPH Konsumsi maka sasaran program lintas sektoral dengan tujuan akhir perbaikan konsumsi pangan harus diutamakan pada penduduk dengan golongan pengeluaran <Rp 750.000/bulan karena merupakan kelompok rentan dengan jumlah dan mutu konsumsi yang masih rendah.

10. Pertanahan

Tahun 2015 Kota Cimahi memiliki aset tanah sebanyak 259 bidang tanah dimana 137 bidang telah tersertifikasi sedangkan sisanya

sejumlah 122 bidang tanah masih dalam proses. Mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, direncanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah daerah melalui OPD BPKAD Kota Cimahi memiliki salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah yaitu kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari Pensertifikatan tanah, Penyusunan Laporan *Stock Opname* Persediaan dan Pemasangan Plang pada Aset Tanah/Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada Tahun 2019 BPKAD telah berhasil membuat 18 sertifikat tanah sehingga total sertifikat yang dimiliki menjadi 236 sertifikat dengan luas tanah 603.257m² dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.447.501m². Sedangkan pemasangan plang kepemilikan aset pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 20 plang.

Kondisi pertanahan di Kota CImahi mengalami keterbatasan lahan sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Pemerintah Kota Cimahi sangat *concern* dalam mengatasi konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data diketahui bahwa Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 yaitu 100%.

11. Perhubungan

a. Tingkat Pelayanan Jalan/*Level Of Services* (LOS);

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, dimana semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi maka akan semakin menambah beban kapasitas jalan, sehingga apabila nilai VCR rendah pada setiap ruas jalan yang ada di Kota Cimahi,

tentu akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Adapun, kondisi VCR di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48.
***Volume Capacity Ratio* (VCR) di Kota Cimahi tahun 2017 s.d. tahun 2019**

INDIKATOR	2017	2018	2019
Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan (VCR)	0,79	0,59	0,64

**sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020.*

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (*Urban Mobility Plan*) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

b. Persentase Fasilitas Lalu Lintas Yang Layak

Melalui strategi meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan penyediaan fasilitas lalu lintas yang layak, seperti : Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, adalah dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak dan melalui pengadaan/ pembangunan baru. melalui kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas lalu lintas yang layak dapat menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas lalu lintas tersebut masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah. Kondisi fasilitas lalu lintas di Kota Cimahi, masih

belum mencapai target pada tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.49.
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak di Kota Cimahi tahun 2018 s.d. tahun 2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65	65	32,32

**sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2020.*

c. Persentase Angkutan yang Layak Jalan

Dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi B, dan menerima pelayanan kendaraan yang wajib baik kendaraan berdomisili di Kota Cimahi dan domisili di luar wilayah Kota Cimahi. Adapun kondisi Persentase Angkutan yang Layak jalan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 65 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 61,2 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 37 persen. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.50.
Persentase Angkutan Yang Layak Jalan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Angkutan Yang Layak Jalan	65	61,2	37

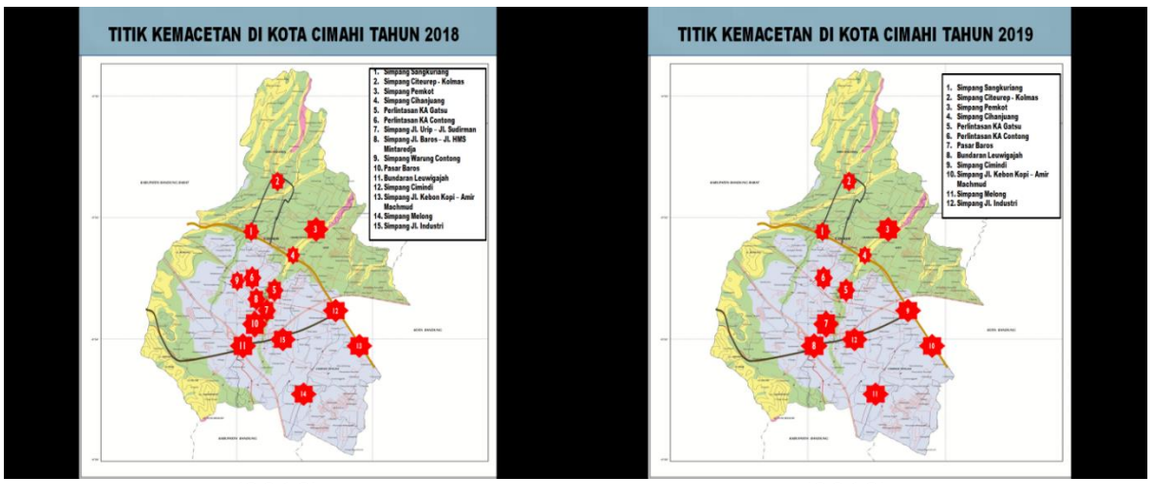
Sumber : DinasPerhubungan Kota Cimahi Tahun 2020

d. Persentase penurunan titik kemacetan

Adapun penurunan titik kemacetan yang ada di Kota Cimahi dari tahun 2017 sebanyak 15 titik kemacetan, sampai dengan tahun 2019 telah tertangani 12 titik kemacetan, dan kini menjadi 3 titik kemacetan, sebagaimana dijelaskan dalam gambar dan tabel berikut ini :

Gambar 2.42.

Titik Kemacetan Di Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019



(2018) (2019)

Tabel 2.51.

Persentase penurunan titik kemacetan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase penurunan titik kemacetan	90	55	20

Sumber : DinasPerhubungan Kota Cimahi Tahun 2020

e. Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum

Saat ini, terdapat 3 (tiga) trayek di Kota Cimahi, yaitu terdiri dari trayek AKDP, trayek perbatasan, dan trayek lokal. Rencana pengembangan trayek yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, adalah penambahan trayek baru guna mengakomodir wilayah yang belum terlalui oleh angkutan umum.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menambahkan trayek baru dengan rute yang dilalui yakni Citereup - Jalan Sangkuriang - Encep Kartawiria - Kamarung - Permana Barat - Permana Timur, Sukarasa, Ciawitali - Demang Hardjakusuma - Daeng Ardiwinata - Jati - Pesantren - Amir Mahmud -Mahar Martanegara - dan Terminal Cimindi. Penambahan rute ini akan diperlukan pengadaan armada, namun tanpa menambah jumlah armada

yang sudah ada di Kota Cimahi. Armada yang didistribusikan guna mengakomodir rute baru terdiri dari 3 (tiga) trayek yang sudah ada yaitu trayek Cimindi-Pasar Antri, Cibeber-Pasar Antri via Cotong dan Cibeber-Pasar Antri via Leuwigajah. Trayek baru selanjutnya adalah trayek yang menghubungkan Terminal Pasar Antri ke Pasar Atas melalui Padasuka dengan rute jalan Amir Mahmud berdasarkan *flyove*r Padasuka.

Berdasarkan data, diketahui bahwa persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 56 persen, tahun 2018 mencapai 46,92 % dan pada tahun 2019 naik menjadi 78,09 persen, seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.52.
Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Jaringan Jalan Yang Terlayani Angkutan Umum	56	46,92	78,09

Sumber : DinasPerhubungan Kota Cimahi Tahun 2020

f. Persentase Tersedianya Halte Dan Terminal

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase tersedianya halte dan terminal di Kota Cimahi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase tersedianya halte dan terminal mencapai 64 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 76,13 persen. Ini menunjukkan cukup baiknya pelayanan transportasi di Kota Cimahi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.53.
Persentase Tersedianya Halte dan Terminal di Kota Cimahi
Tahun 2016-2019

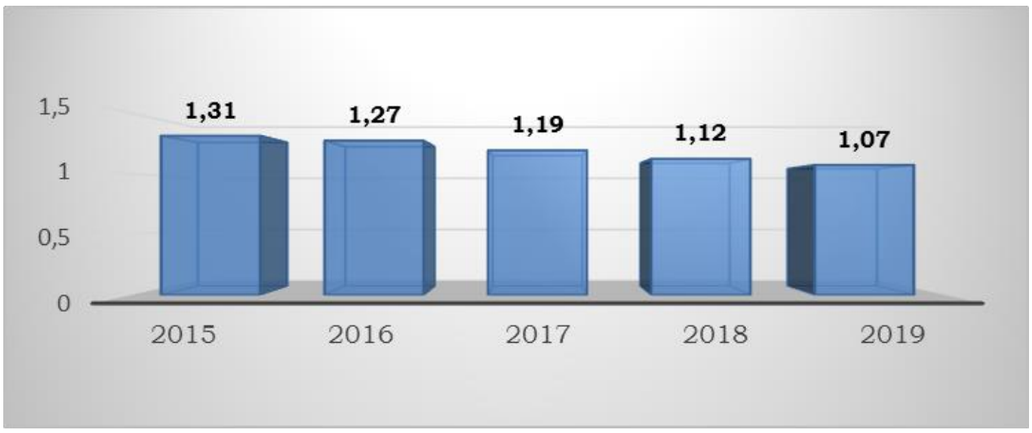
INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase tersedianya halte dan terminal	64	70,37	76,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2020

12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,07 persen, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yang angkanya sebesar 1.31. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.43.
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020, diolah

Tren penurunan laju pertumbuhan pendudukan dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai

dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Tabel 2.54.
Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2019

Capaian Peserta KB	2017	2018	2019
KB Baru	5434 / 63,53%	4328 / 47,02%	3123/35,57%
KB Aktif	73.209/78,51%	72.491/78,98%	72.897/78,89%

Sumber : Profil Kesehatan 2017, diolah

Jumlah Peserta KB baru dan KB aktif tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB Baru mencapai 9,7% dan mengalami kenaikan pada pada tahun 2016 menjadi 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,8%. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2015 mencapai 77,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 78,2, namun pada tahun 2017 turun kembali hingga menjadi 75,9%.

Sebagian besar peserta KB baru maupun KB aktif memilih suntikan dan IUD sebagai alat kontrasepsi. Kedua jenis alat kontrasepsi ini dianggap mudah diperoleh dan digunakan oleh pasangan usia subur. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat efektivitas suntikan dan IUD dalam pengendalian kehamilan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

Untuk Rasio Akseptor KB Mandiri dan Rasio Akseptor KB pada tahun 2017-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.55.
Rasio Akseptor KB mandiri dan Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Rasio Akseptor KB mandiri	80	82	79,92
Rasio Akseptor KB	78,51	78,99	78,89

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB mandiri di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 82 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 79,92 persen.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan didorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan.

Adapun Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 hingga mencapai 100 persen.

Tabel 2.56.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80	95,1	100

Sumber : Bag. Pemerintahan-Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

Dengan kompleksitas masalah perkotaan maka pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan melalui pendekatan kewirausahaan sosial (*sosio entrepreneurship*) yang memadukan usaha (bisnis) untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini dinilai lebih *sustainable* karena menjadi lebih mandiri, memiliki strategi yang jelas menitikberatkan kepada tujuan utama menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan bukan untuk akumulasi modal/kekayaan/ keuntungan. Strategi penumbuh kembangan iklim kewirausahaan sosial akan menjadi salah satu inovasi bagi pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi dan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.

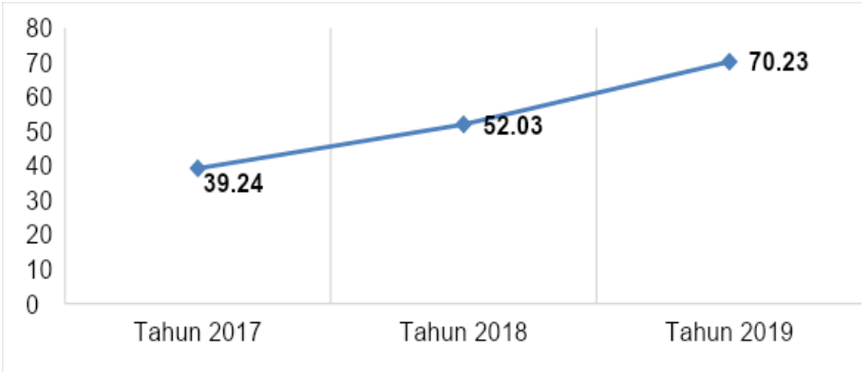
14. Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan di Kota Cimahi terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang dikategorikan ke zona merah oleh Provinsi, disini dibutuhkan program pemulihan air baku dengan salah satunya adalah program biopori dan sumur resapan.

a. Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai 39,24 poin dan pada tahun 2019 naik menjadi 70,23 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.44.
Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

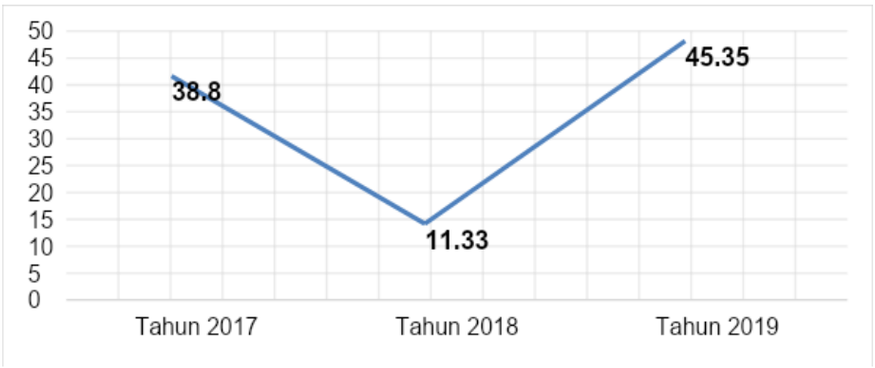


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2020, diolah

b. Indeks Kualitas Air

Untuk Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 38,8 poin dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 11,33 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 45,35 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.45.
Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2020

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 31,83 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 46,80. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	31,83	32,67	46,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020, diolah

IKLH dapat dihitung dengan menggabungkan beberapa indeks yaitu 30% dari indeks kualitas air, 40% dari indeks kualitas udara, serta 30% dari indeks tutupan lahan.

d. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 11,65 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 11,16 persen, hal ini di sebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang semula terbuka menjadi bangunan maupun areal tertutup lainnya.

Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 20 persen RTH publik dari luas wilayah kota. Hasil identifikasi RTH tahun 2020 RTH yang dimiliki seluas 40,89 ha atau 0,96 persen dari luas kota, lebih kecil dari hitungan tahun 2019 yaitu sebesar 11,16 persen. Hal ini disebabkan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW bahwa sempadan sungai dan sempadan jalan yang semula dihitung sebagai RTH menjadi tidak masuk dalam hitungan RTH.

Tabel 2.58.
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15	11,65	11,16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020, diolah

e. Persentase Pengelolaan Sampah

Untuk pengelolaan sampah di Kota Cimahi secara umum sudah dikategorikan baik, melalui program pengurangan dan penanganan sampah, karena sistem pengelolaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pembuangan ke TPA, namun pengelolaan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan biogas. Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 87 persen, dan mengalami peningkatan di Tahun 2018 dan 2019 masing-masing 95 persen dan 96,06 persen.

Tabel 2.59.
Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Pengelolaan Sampah	87	95	96,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020, diolah

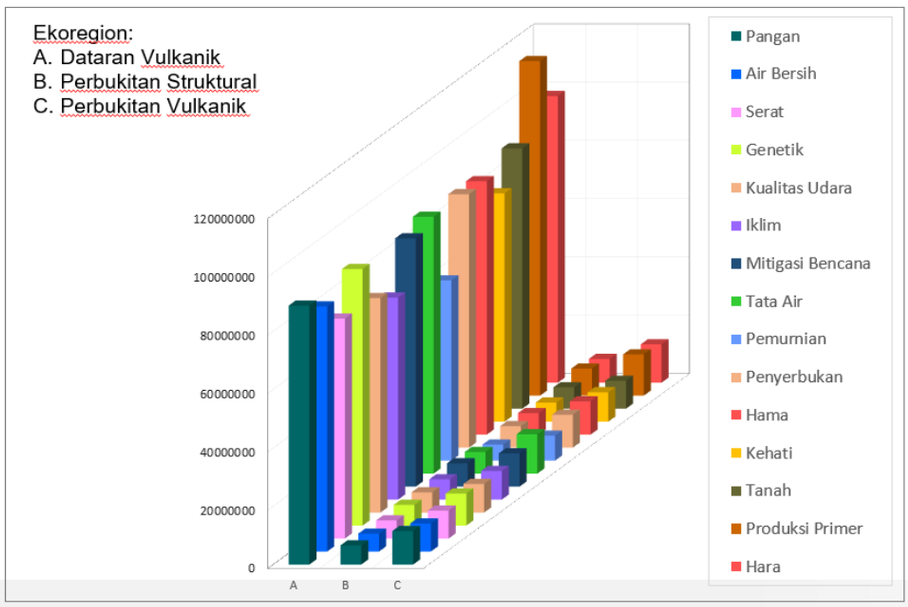
Selain beberapa indikator kinerja bidang lingkungan hidup yang telah disajikan diatas, kinerja bidang ini juga dilengkapi dengan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023. Beberapa informasi kondisi lingkungan hidup Kota Cimahi berdasarkan KLHS disajikan sebagai berikut :

1) Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Nilai setiap jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Setiap satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan yang dominan. Jasa lingkungan dominan dapat dilihat dengan melakukan pemetaan jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum dihasilkan dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di dalam wilayah ekoregion tersebut. Nilai yang maksimum dari hasil perkalian tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem dominan untuk satu unit wilayah ekoregion (BPLHD Provinsi Jawa Barat,

2017). Hasil kali IJE dengan luas setiap ekoregion di Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah :

Gambar 2.46.
Hasil Kali IJE Dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung memiliki nilai jasa lingkungan sangat tinggi karena wilayahnya yang sangat luas sekitar 85% dari Kota Cimahi. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, dan regenerasi tanah. Sedangkan jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, pengaturan air dan banjir, siklus hara, penyedia pangan, dan pengendalian hama.

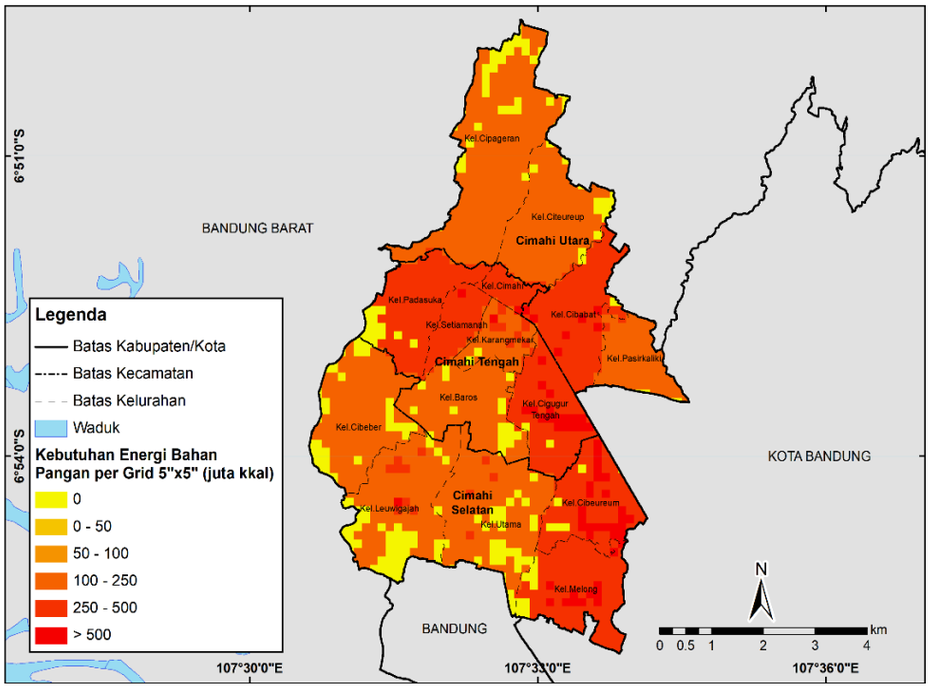
2) Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

a) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Ambang batas dan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Dari ketiga hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan.

Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Gambar di bawah menunjukkan sebaran kebutuhan energi bahan pangan di Kota Cimahi tahun 2016. Berdasarkan peta sebaran kebutuhan tersebut, Kota Cimahi memiliki kebutuhan pangan yang cukup tinggi dan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Kawasan dengan nilai kebutuhan nol adalah kawasan dengan tutupan lahan berupa perkebunan atau sawah/ladang. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi berada di sekitar pusat Kota Cimahi dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, diantaranya adalah Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

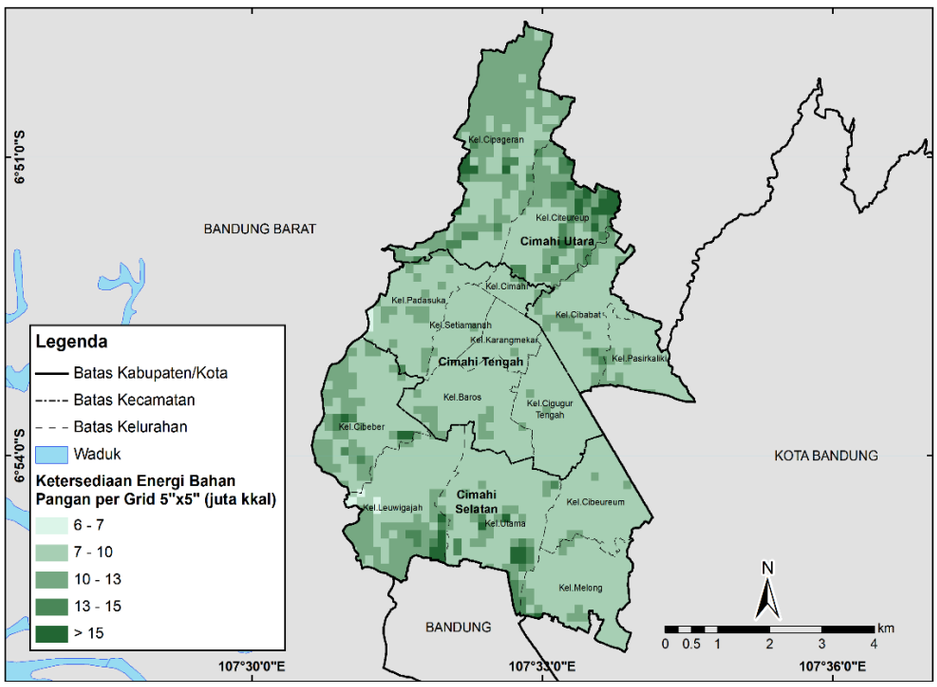
Gambar 2.47.
Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan. Peta sebaran ketersediaan pangan pada Kota Cimahi ditunjukkan pada gambar di bawah. Hampir seluruh wilayah di Kota Cimahi memiliki nilai ketersediaan rendah, terutama pada Kecamatan Cimahi Tengah sebagai pusat Kota. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi berada bagian utara dan selatan Kota Cimahi. Wilayah ini didominasi oleh tutupan lahan berupa sawah, ladang, dan perkebunan, dengan nilai ketersediaan pangan tertinggi berada pada kawasan sawah. Ketersediaan pangan cukup tinggi berada di Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

Gambar 2.48.
Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Pada gambar di atas menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, Kota Cimahi didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai negatif, terutama pada Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan bahan pangan juga dihitung pada setiap kecamatan di Kota Cimahi yang ditunjukkan oleh tabel di bawah. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi bernilai negatif di setiap kecamatan. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak

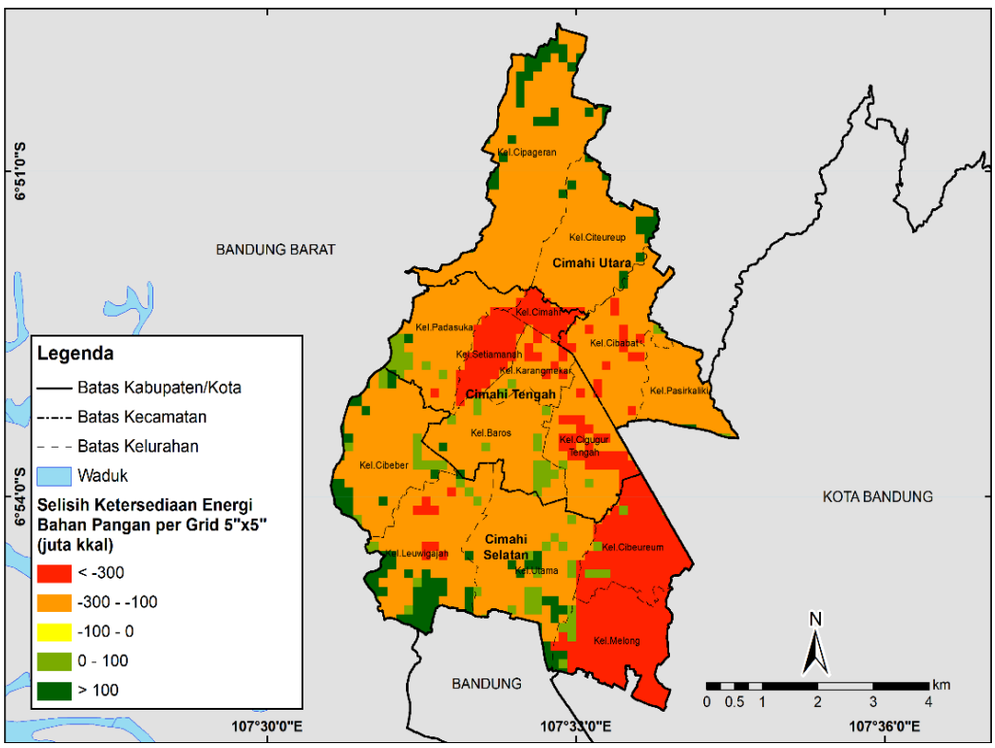
dapat menunjang kebutuhan pangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep insitu, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Tabel 2.60.
Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Energi Bahan Pangan (juta kkal)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Kecamatan Cimahi Selatan	7.776,54	176.579,74	-168.803,20
Kecamatan Cimahi Tengah	4.244,33	121.506,77	-117.262,43
Kecamatan Cimahi Utara	7.190,34	119.114,85	-111.924,50

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023

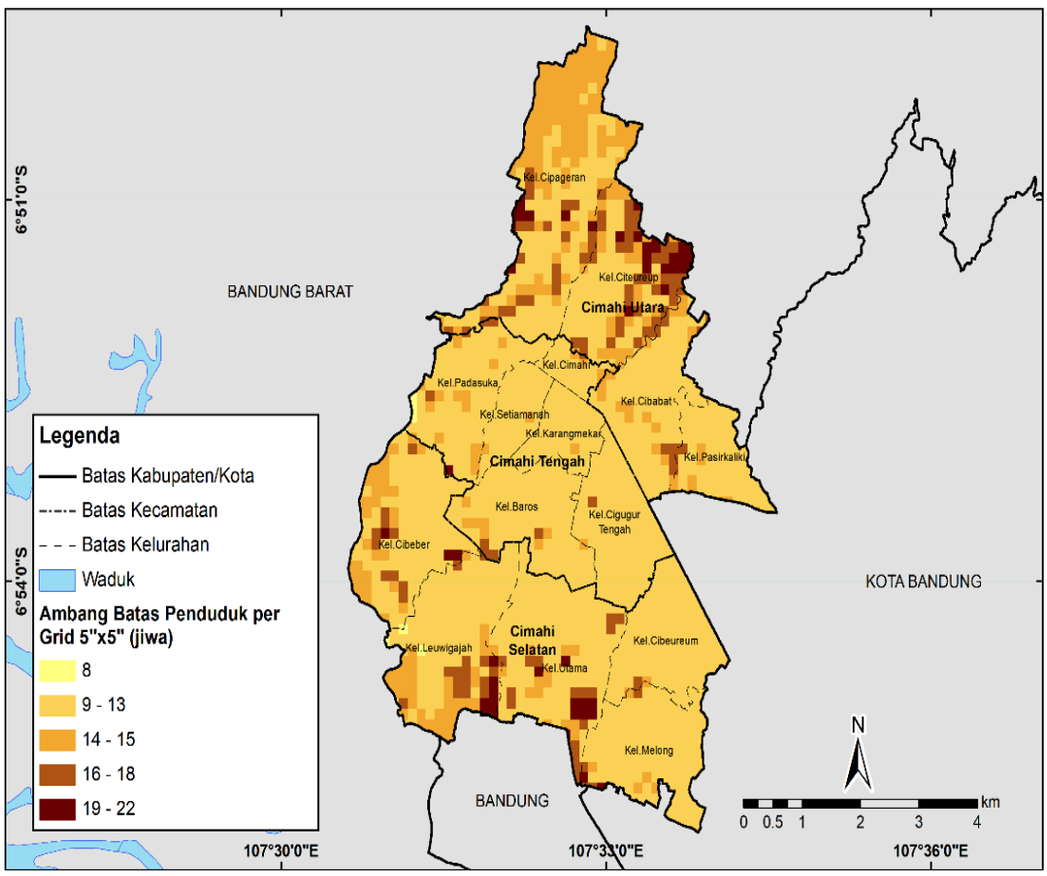
Gambar 2.49.
Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kota Cimahi. Sebaran nilai ambang batas penduduk untuk bahan pangan terdapat pada gambar di bawah. Sebagian besar Kota Cimahi memiliki nilai ambang batas rendah, yaitu pada angka 8 hingga 13 jiwa. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan bahan pangan, namun terdapat kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan di Kota Cimahi.

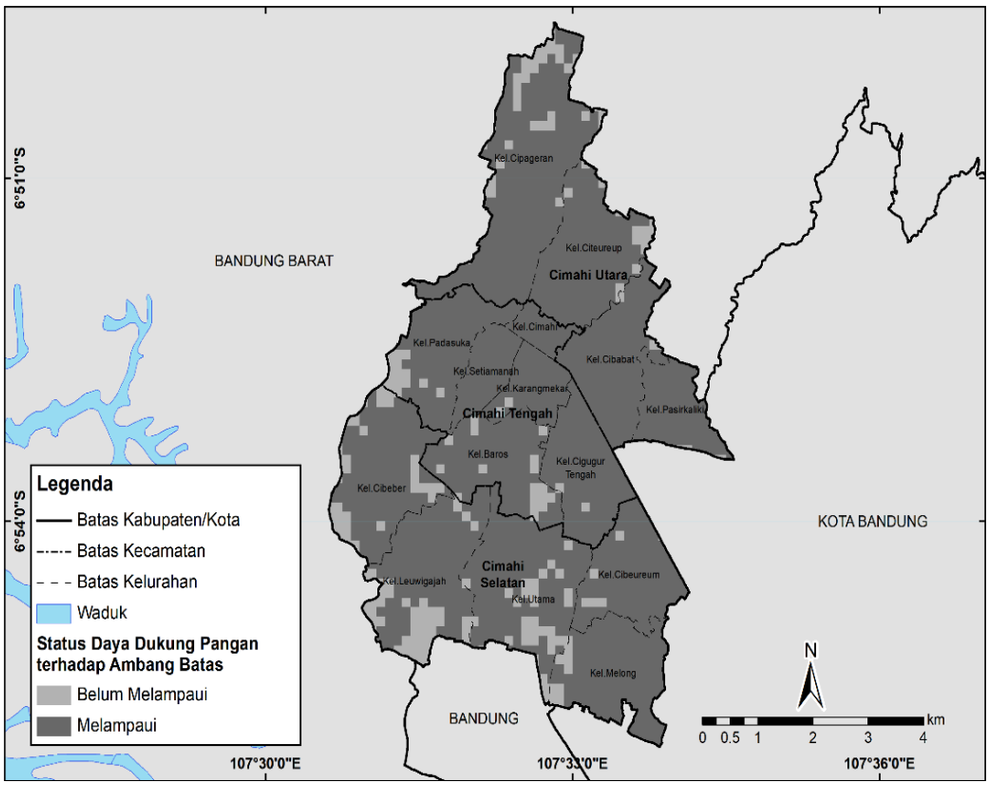
Gambar 2.50.
Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan status daya dukung Kota Cimahi terhadap penyediaan bahan pangan. Status ini ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk yang terdapat pada lokasi tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, status daya dukung penyedia pangan sebagian besar telah melampaui ambang batas.

Gambar 2.51.
Status DDLH Penyedia Pangan Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Tabel 2.61.
Luas Wilayah Yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016

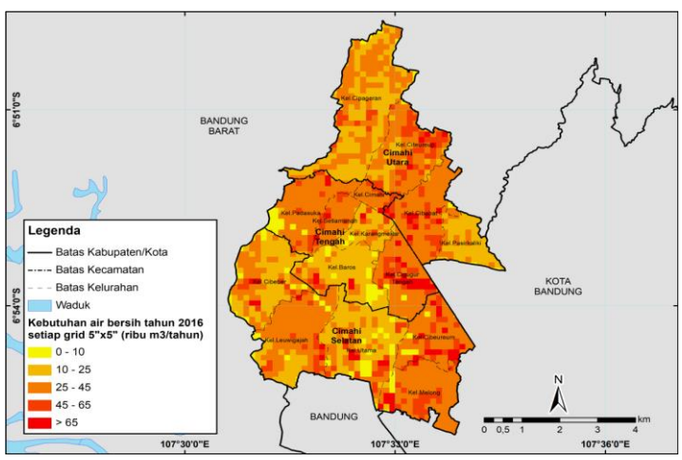
KECAMATAN	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	268,57	15,43%
Kecamatan Cimahi Tengah	1.099,48	81,01	7,36%
Kecamatan Cimahi Utara	1.404,69	105,31	7,49%
KOTA CIMAHI	**4.244,11**	**454,89**	**10,71%**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

b) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Perhitungan didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan air bersih yang tinggi tersebar di tiga kecamatan dimana sebagian besar terdapat di Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibabat.

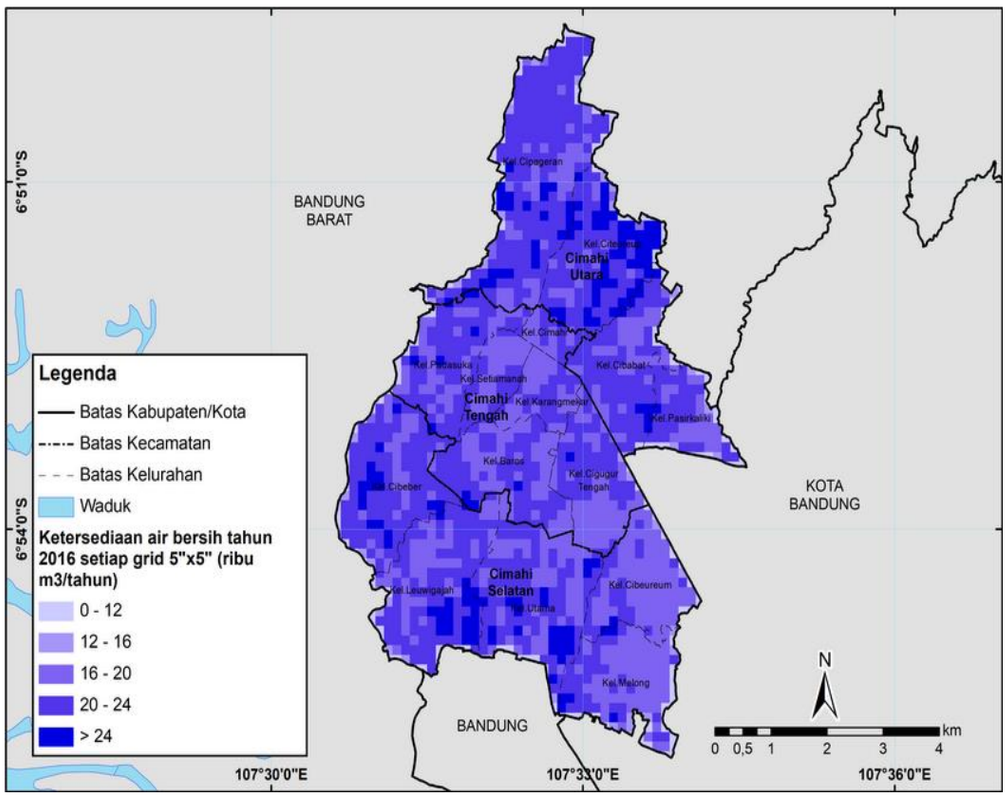
Gambar 2.52.
Kebutuhan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketersedian air bersih Kota Cimahi memiliki pola distribusi yang hampir berkebalikan dengan pola kebutuhan air bersih. Wilayah dengan ketersediaan air bersih tinggi sebagian besar terletak di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara tepatnya di Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar dibanding wilayah kelurahan lainnya. Sementara wilayah dengan ketersedian air bersih rendah didominasi oleh tutupan lahan terbangun.

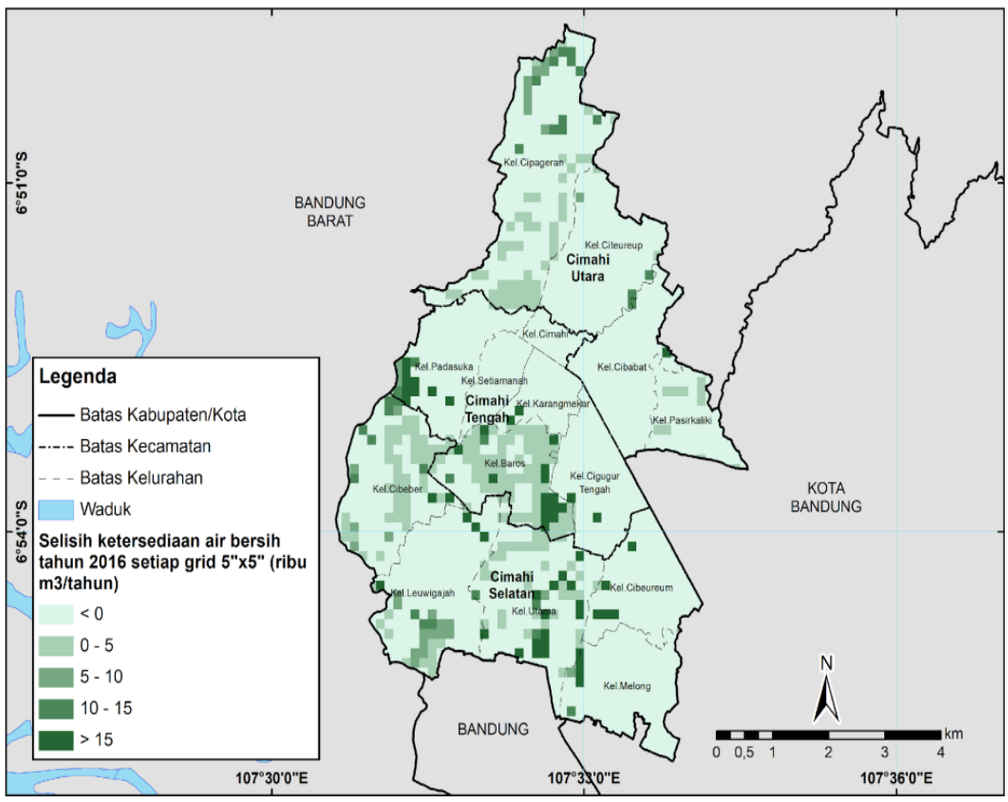
Gambar 2.53.
Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih selanjutnya dapat diperoleh nilai selisih ketersediaan air bersih. Sebagian besar selisih ketersediaan air bersih di wilayah Kota Cimahi bernilai negatif. Sedangkan selisih ketersediaan air bersih positif paling banyak tersebar wilayah bagian selatan seperti di kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeber, dan Kelurahan Leuwigajah.

Gambar 2.54.
Selisih Ketersediaan Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulasi air bersih di setiap kecamatan Kota Cimahi ditunjukkan pada table di bawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kota Cimahi memiliki selisih ketersediaan negatif. Hal ini menunjukkan

bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kota Cimahi sudah defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air bersih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan air bersih sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjang kebutuhan air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.

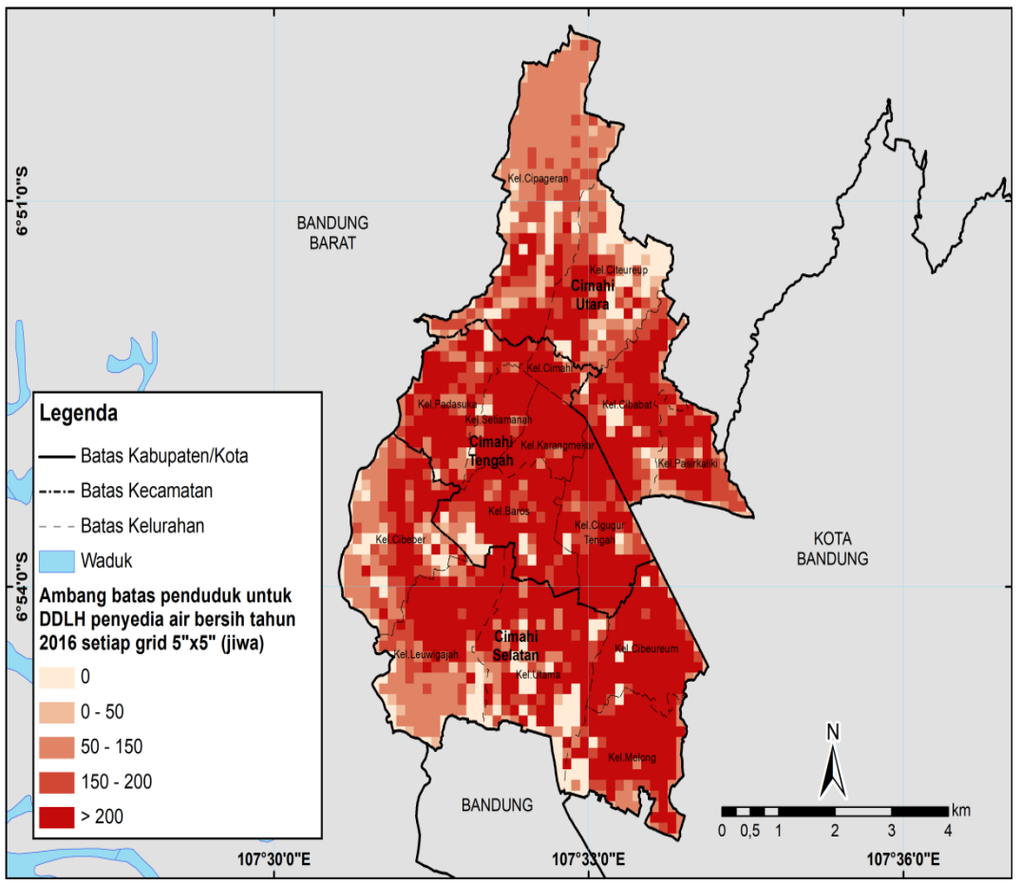
Tabel 2.62.
Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Selisih Ketersediaan Energi Air Di Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Air Bersih (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan
Kec. Cimahi Selatan	15.235.680,03	26.018.843,65	-10.783.163,61
Kec. Cimahi Tengah	9.523.542,07	15.643.863,00	-6.120.320,93
Kec. Cimahi Utara	12.579.185,59	19.380.280,08	-6.801.094,49

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari nilai kebutuhan dan ketersedian air bersih, selanjutnya dapat dihitung nilai ambang batas dan status DDLH penyedia air bersih Kota Cimahi. Ambang batas dihitung melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air lahan. Peta ambang batas ditunjukkan pada gambar di bawah. Peta ambang batas menunjukkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air dari ketersediaan yang ada di wilayah itu sendiri (*closed system*).

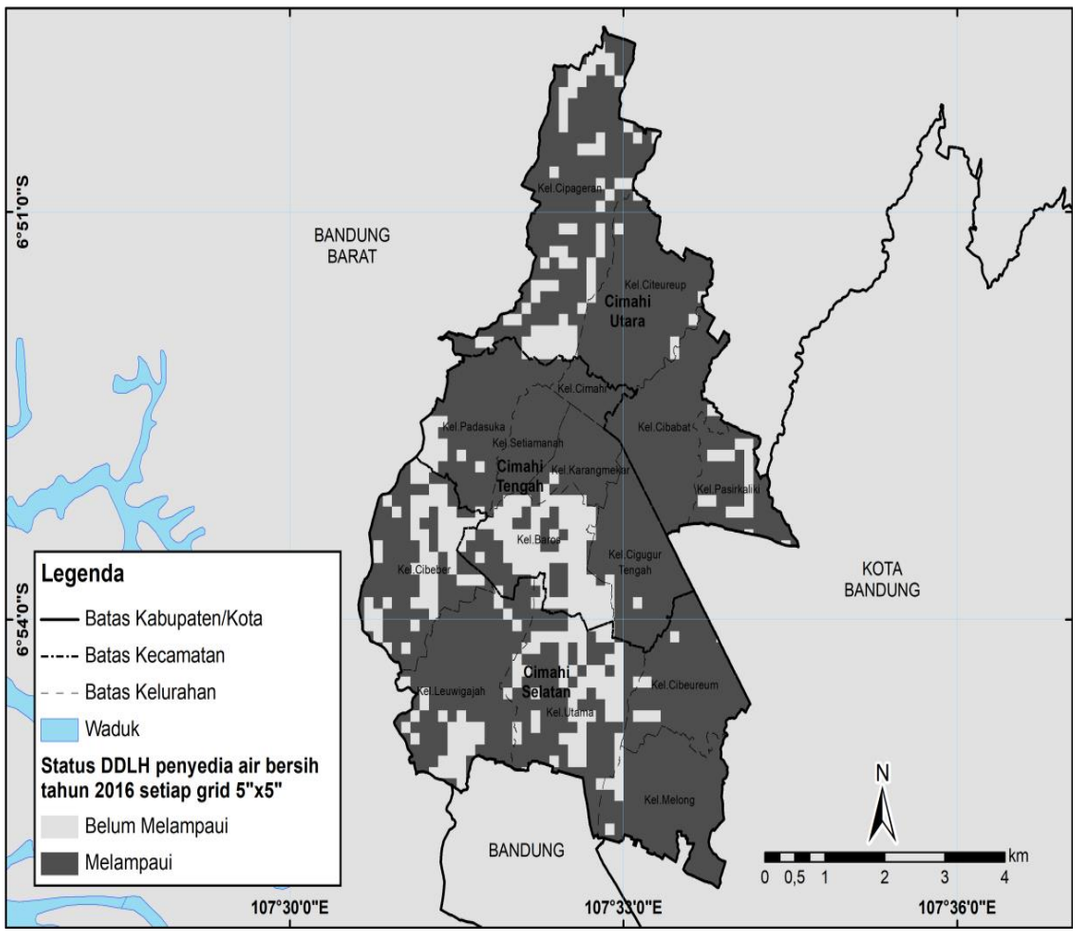
Gambar 2.55.
Ambang Batas Penduduk Untuk DDLH Penyedia Air Bersih
Di Kota Cimahi Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Status daya dukung DDLH penyedia air bersih dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif menunjukkan ambang batas air bersih dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 2.56.
Status DDLH Penyedia Air Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Tabel 2.63.
Luas Wilayah Yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih Di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas Belum Melampaui	
	(Ha)	(Ha)	(%)
Kec. Cimahi Selatan	1.739,95	405,50	23,31%
Kec. Cimahi Tengah	1.099,48	240,18	21,84%
Kec. Cimahi Utara	1.404,69	217,64	15,49%
KOTA CIMAHI	**4.244,11**	**863,32**	**20,34%**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023

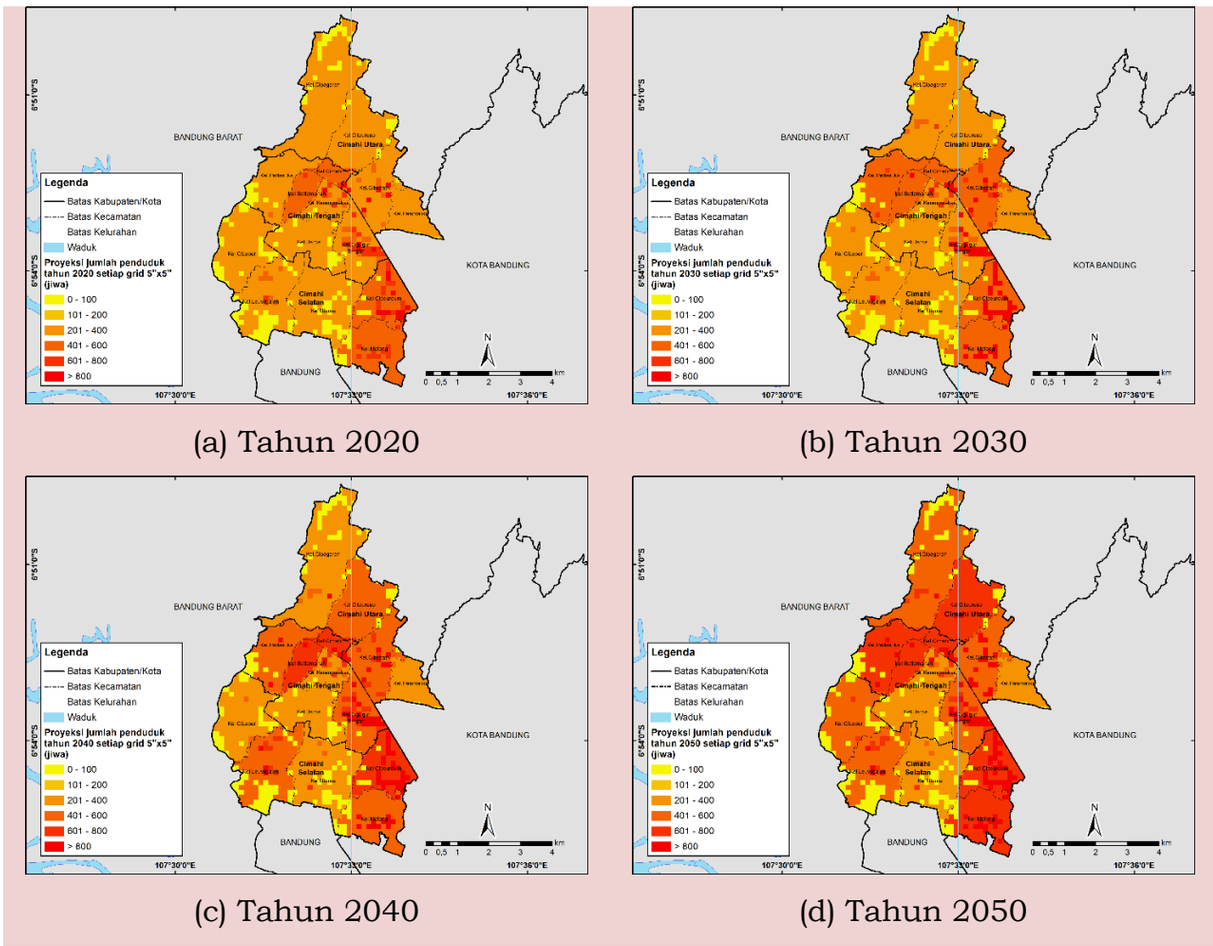
Berdasarkan peta status daya dukung air diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi. Wilayah belum melampaui sebagian besar terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Wilayah dengan status daya dukung telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

3) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

a) Tekanan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis tekanan terhadap lingkungan hidup diawali dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu, yaitu berupa model spasial proyeksi penduduk tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050. Model proyeksi penduduk ini diturunkan dari model distribusi penduduk tahun 2016 sebagai tahun dasar, dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kelurahan di Kota Cimahi.

Gambar 2.57.
Model Proyeksi Penduduk Tahun : (A) 2020, (B) 2030, (C) 2040, Dan (D) 2050 Di Kota Cimahi Dalam Sistem Grid 5”X5”



(a) Tahun 2020 (b) Tahun 2030

(c) Tahun 2040 (d) Tahun 2050

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi penduduk dari tahun 2016 ke 2020 hingga 2050, peningkatan jumlah penduduk banyak terjadi di sekitar pusat Kota Cimahi, yaitu di sekitar Kelurahan Cimahi (Kec. Cimahi Tengah) serta di sekitar wilayah tenggara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong (Kec. Cimahi Selatan). Kondisi ini dapat merepresentasikan pola tekanan penduduk yang menyebar dari wilayah pusat kota dan dari wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung sebagai kawasan penyangga dari Kota Bandung. Dengan kata lain,

pola tekanan penduduk ini menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Tekanan penduduk di Kota Cimahi ini memberikan dampak tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup di waktu mendatang. Berikut ini, diuraikan beberapa proyeksi dampak tekanan penduduk terhadap kondisi lingkungan, yaitu dalam hal timbulan sampah, timbulan lumpur tinja, dan potensi beban pencemar di Kota Cimahi; serta analisis mengenai status daya tampung beban pencemar sungai dan analisis penurunan muka air tanah di Kota Cimahi.

b) Potensi Timbulan Sampah

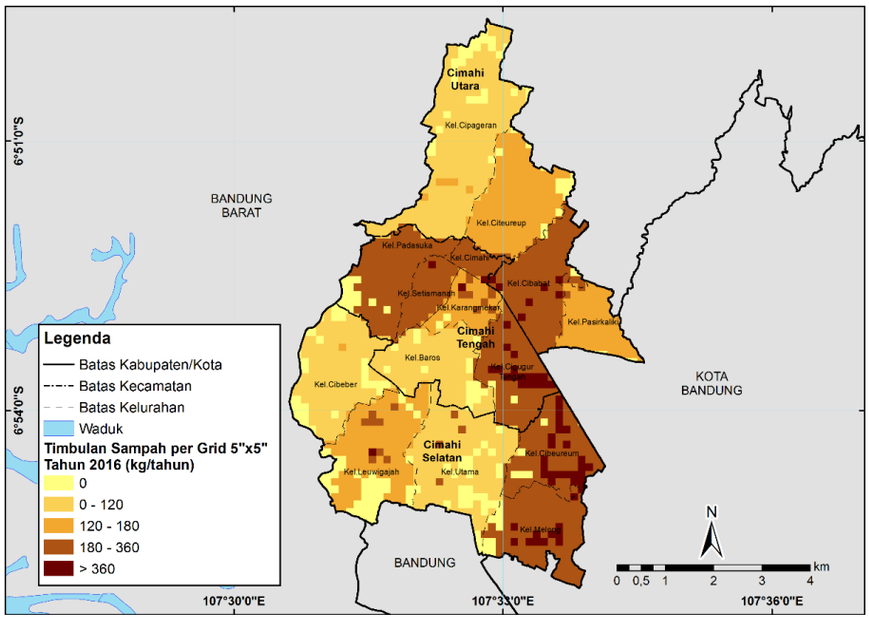
Dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan, seperti masalah kesehatan, bahaya banjir, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, dan permasalahan lingkungan lainnya. Kota Cimahi menghasilkan sampah hingga 300 ribu ton setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi tahun 2019, angka timbulan sampah per kapita untuk kawasan permukiman Kota Cimahi dari hasil sampling ditetapkan sebesar 2,49 liter/org/hari atau 0,48 kg/org/hari dengan berat jenis sampah sebesar 195,57 kg/m3. Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non permukiman hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar di karenakan pola konsumsi dan pertumbuhan

penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya.

Sebaran potensi timbulan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah Kota Cimahi, yaitu 0,544 kg/orang/hari.

Gambar 2.58.
Potensi Timbulan Sampah Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5"X5"



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Pola sebaran dari potensi timbulan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbulan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik. Secara spasial, timbulan sampah yang cukup tinggi di Kota Cimahi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum. Terdapat pula timbulan sampah yang cukup tinggi di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Padasuka; serta di Kecamatan Cimahi Utara

yaitu seluruh Kelurahan Cibabat, khususnya di Kelurahan Cibabat yang lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cimahi Tengah. Jika dilihat dari tutupan lahan, timbulan sampah yang tinggi berada pada wilayah permukiman. Sementara itu, dihasilkan bahwa pada Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki timbulan sampah yang kecil.

Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbulan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Pemodelan potensi timbulan sampah juga dapat diproyeksikan ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050, dengan nilai yang terlihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi timbulan sampah paling besar. Meskipun secara spasial terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan sampah yang tinggi, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan sampah di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar.

Tabel 2.64.
Timbulan Sampah Per Kecamatan Di Kota Cimahi 2016-2050

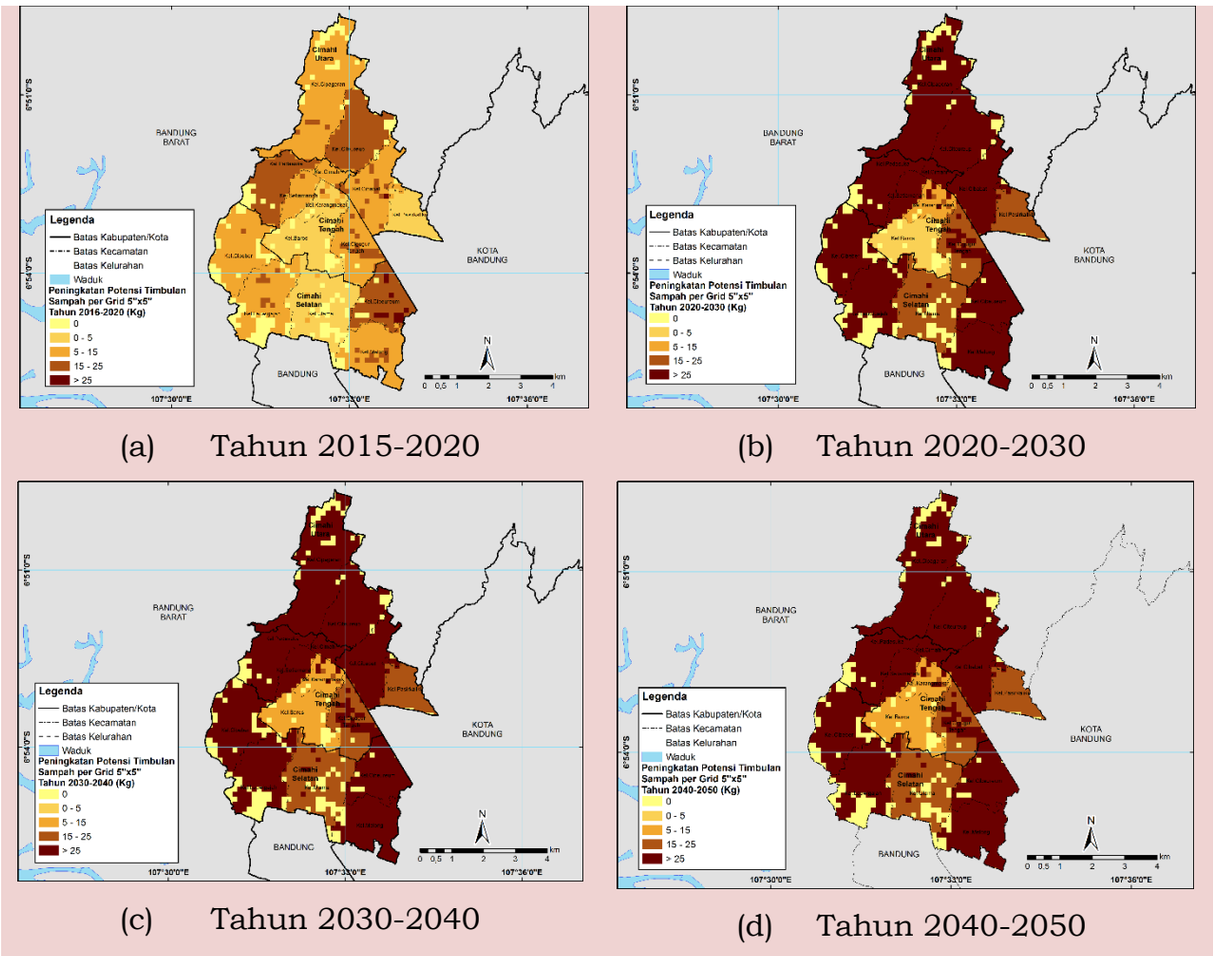
Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	14374,66	15854,88	20364,64	26109,28	33556
	Cibeureum	32161,28	34212,16	39923,07	46572,38	54287
	Leuwigajah	23514,94	24941,86	28789,02	33254,18	38430
	Melong	34030,46	35610,24	39827,33	44525,86	49809
	Utama	18326,27	19177,63	21659,9	24443,55	27635
	Total	**122407,6**	**129796,8**	**150564**	**174905,2**	**203717**
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	11038,3	11264,06	11763,46	12318,34	12954
	Cigugur Tengah	24984,83	26023,87	28857,02	31994,82	35464

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
	Cimahi	6870,72	7245,536	8256,288	9409,024	10735
	Karangmekar	8589,76	8888,96	9681,024	10540,54	11502
	Padasuka	20438,62	22160,38	27119,49	33176,93	40569
	Setiamanah	12308	12903,14	14532,42	16368,42	18443
	Total	**84230,24**	**88485,95**	**100209,7**	**113808,1**	**129667**
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	28279,3	29709,47	33810,14	38392,8	43706
	Cipageran	24718,82	27707,55	36718,37	48597,15	64489
	Citeureup	19827,71	22047,23	28853,76	37805,82	49606
	Pasirkaliki	9746,304	10231,55	11599,17	13143,04	14916
	Total	**82572,13**	**89695,81**	**110981,4**	**137938,8**	**172717**
Total		**289210**	**307978,5**	**361755,1**	**426652,1**	**506101**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2023 (Konfirmasi sumber data)

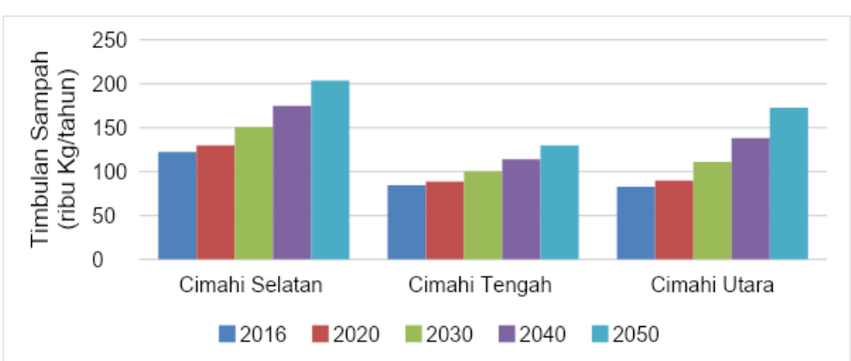
Dari tahun 2016 ke tahun 2020, timbulan sampah di Kota Cimahi mengalami peningkatan sebesar 6,48%. Sementara itu, secara rata-rata, peningkatan timbulan sampah dari tahun 2020 ke tahun 2050 yang dihitung dengan periode per 10 tahun adalah sebesar 17,87%. Secara spasial, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Utara mengalami peningkatan timbulan sampah yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jika dilihat dari nilai potensi timbulan sampah per kecamatan, peningkatan potensi timbulan sampah paling tinggi terjadi pada tahun 2040 ke tahun 2050 (18,62%). Secara lebih detail, sebaran dari peningkatan timbulan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2.59**, serta statistik nilai potensi timbulan sampah dari tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2040 pada setiap kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2.60**.

Gambar 2.59.
Peningkatan potensi timbulan sampah pada sistem grid 5”x”5 Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.60.
Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050



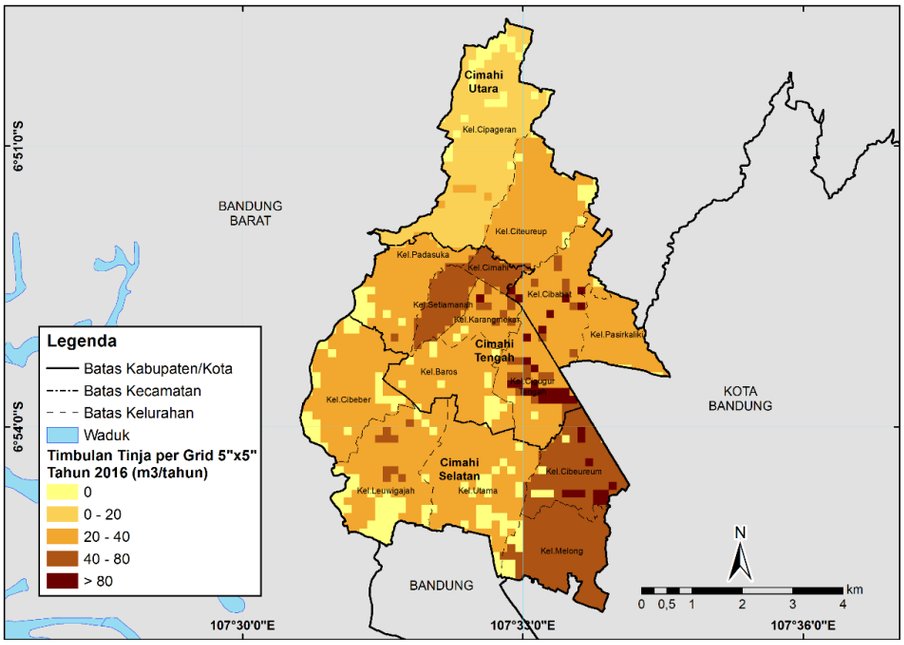
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Inovasi pengembangan kewirausahaan sosial untuk mengolah sampah organik dan anorganik telah dilakukan di Kota Cimahi melalui pembinaan bank sampah kota (Bank Sampah Samici) dan juga pengolah sampah organik menggunakan metode *black soldier flies* (BSF). Perlu terus didorong hilirisasi produk yang memberi nilai tambah ekonomi, sosial (pemberdayaan) dan lingkungan hidup dalam upaya penanganan sampah.

c) Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m^3/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk. Dengan menggunakan hasil pemodelan distribusi penduduk dan tekanan penduduk, maka timbulan lumpur tinja beserta nilai proyeksinya dapat dimodelkan. Gambar di halaman selanjutnya merupakan sebaran dari potensi timbulan lumpur tinja di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2016.

Gambar 2.61.
Potensi Timbulan Lumpur Tinja Di Kota Cimahi Tahun 2016
Pada Sistem Grid 5”X5”



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Cibeureum; serta Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur, Karangmekar, Setiamanah, dan Cimahi memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil pada Kelurahan Cimahi Utara terdapat juga potensi timbulan lumpur tinja pada Kelurahan Cibabat.

Dengan menggunakan tekanan penduduk, potensi timbulan lumpur tinja diproyeksikan ke tahun 2020 hingga 2050 dengan periode per 10 tahun. Tabel di bawah menunjukkan nilai dari potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan. Walaupun secara

spasial sebagian besar wilayah di Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan lumpur tinja yang besar, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan tinja di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Cimahi.

Tabel 2.65.

Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m3/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	2893,428	3191,377	4099,133	5255,452	6750,894
	Cibeureum	6473,64	6886,455	8035,986	9374,404	10934,12
	Leuwigajah	4733,247	5020,465	5794,85	6693,625	7732,452
	Melong	6849,882	7167,87	8016,714	8962,466	10032,72
	Utama	3688,836	3860,204	4359,852	4920,164	5561,943
	Total	**24639,03**	**26126,37**	**30306,53**	**35206,11**	**41012,13**
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	2221,865	2267,307	2367,828	2479,518	2602,377
	Cigugur Tengah	5029,116	5238,261	5808,537	6440,133	7145,423
	Cimahi	1382,985	1458,431	1661,882	1893,912	2160,764
	Karangmekar	1729,005	1789,23	1948,662	2121,672	2312,859
	Padasuka	4114,025	4460,592	5458,794	6678,076	8156,655
	Setiamanah	2477,438	2597,231	2925,183	3294,746	3711,174
	Total	**16954,43**	**17811,05**	**20170,89**	**22908,06**	**26089,25**
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	5692,248	5980,124	6805,534	7727,963	8790,879
	Cipageran	4975,571	5577,164	7390,922	9781,963	12969,29
	Citeureup	3991,056	4437,816	5807,88	7609,812	9973,807
	Pasirkaliki	1961,802	2059,476	2334,759	2645,52	3000,519
	Total	**16620,68**	**18054,58**	**22339,1**	**27765,26**	**34734,49**
Total		**58214,14**	**61992**	**72816,51**	**85879,43**	**101835,9**

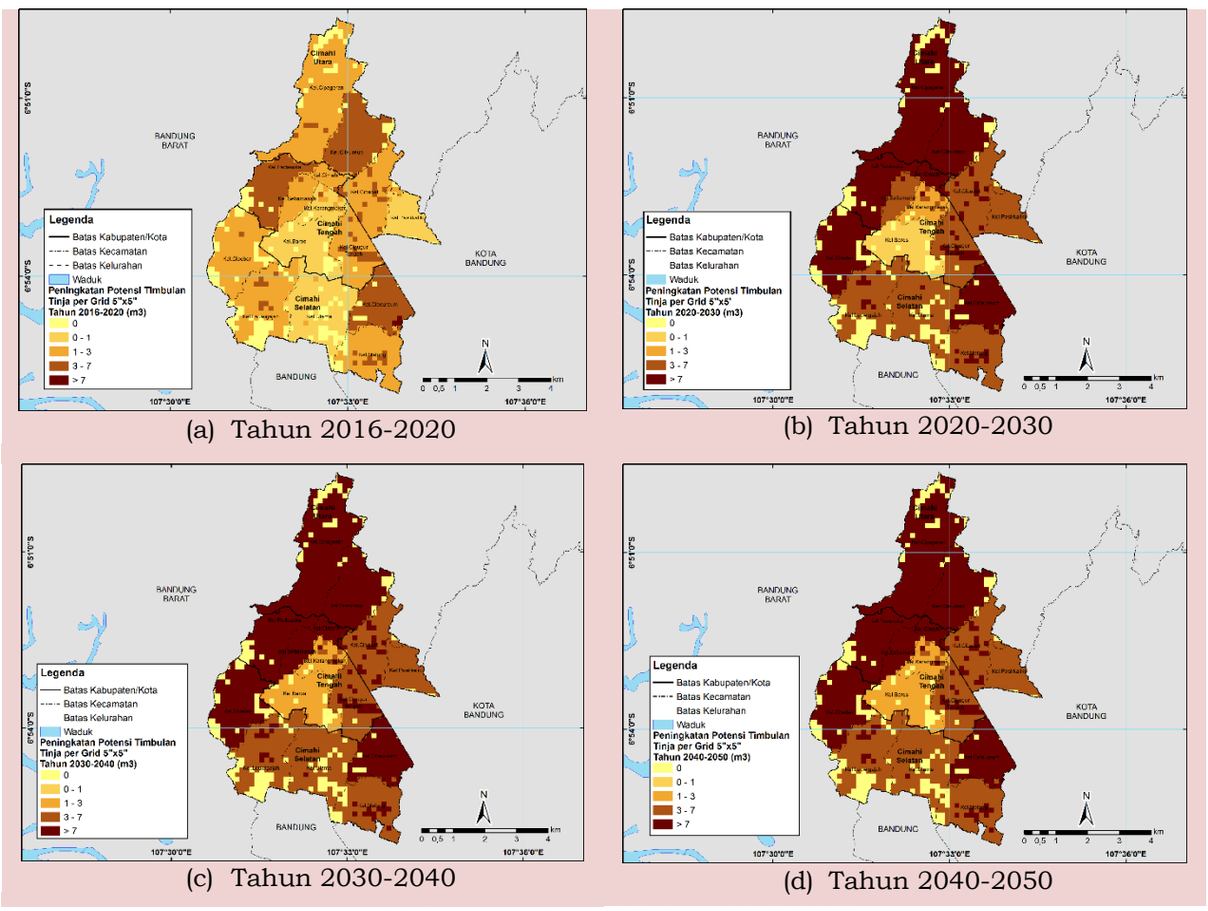
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi mengalami peningkatan timbulan lumpur tinja sebesar 6,48% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2050, rata-rata besarnya peningkatan timbulan lumpur tinja dengan periode waktu per 10 tahun adalah 17,87%. Peningkatan timbunan lumpur tinja paling tinggi terjadi antara tahun 2040 dan 2050, yaitu sebesar 18,62%. Peningkatan

potensi lumpur tinja ini tersebar dengan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.63.

Peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja terlihat signifikan terjadi di Kecamatan Cimahi Utara. Dari tahun 2016 ke tahun 2020, peningkatan timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Utara adalah 8,62%, sedangkan dari peningkatan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun adalah 24,37%. Grafik nilai timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi di tahun 2015, 2020, 2030, 2040, dan 2050 ditunjukkan pada Gambar 2.64.

Gambar 2.62.
Peningkatan potensi timbulan lumpur tinja pada sistem grid 5”x5” di Kota Cimahi tahun : (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050

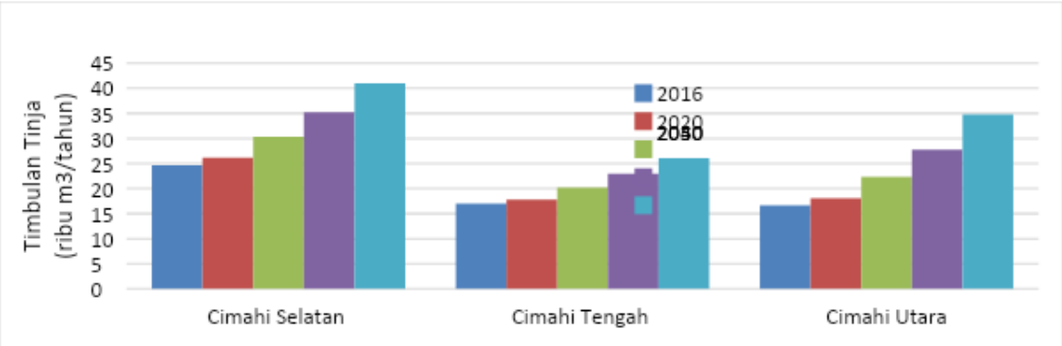


(a) Tahun 2016-2020 (b) Tahun 2020-2030

(c) Tahun 2030-2040 (d) Tahun 2040-2050

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.63.
Grafik Potensi Timbulan Lumpur Tinja Setiap Kecamatan
Di Kota Cimahi Tahun 2016-2050



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

d) Potensi Beban Pencemar Air Sungai

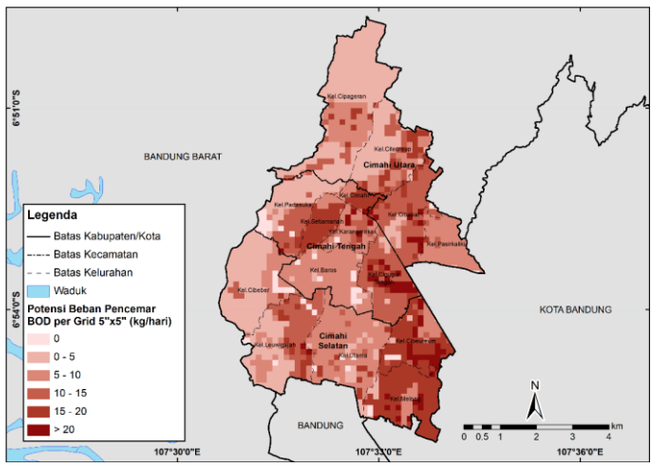
Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, sebanyak 100.029 rumah tangga dari 164.903 rumah tangga di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (60,65%), sementara 4.874 rumah tangga (39,34%) tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Hal ini dapat memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat. tahun 2017 mengalami peningkatan fasilitas tempat buang air besar sendiri yang sebelumnya adalah 41% meningkat menjadi 61%.

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan. Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan

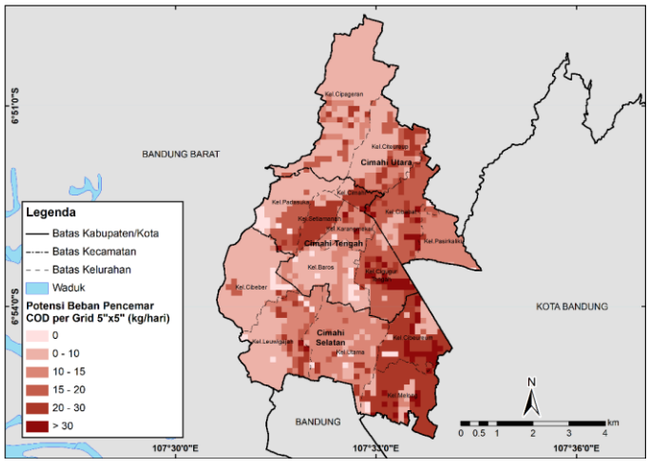
distribusi penduduk di setiap grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) dianalisis berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan. Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa zat pencemar BOD dan COD memiliki pola sebaran yang serupa, dan sedikit berbeda dengan pola sebaran zat pencemar TSS. Zat BOD dan COD dengan potensi tinggi berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, sebagian wilayah Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat dan sebagian wilayah Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan sebagian wilayah Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan. Sedangkan untuk zat pencemar TSS, nilai tinggi hampir tersebar merata di seluruh kelurahan kecuali pada sebagian besar wilayah Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi utara dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.

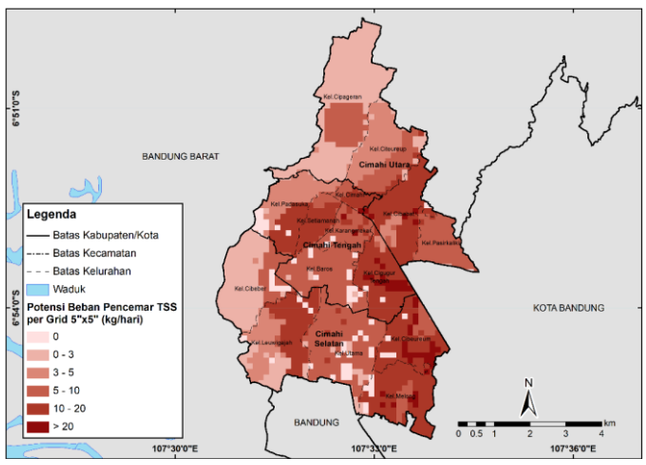
Gambar 2.64.
Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di Kota Cimahi Tahun 2016
Dalam Sistem Grid 5”x5”



(a) Parameter BOD



(b) Parameter COD

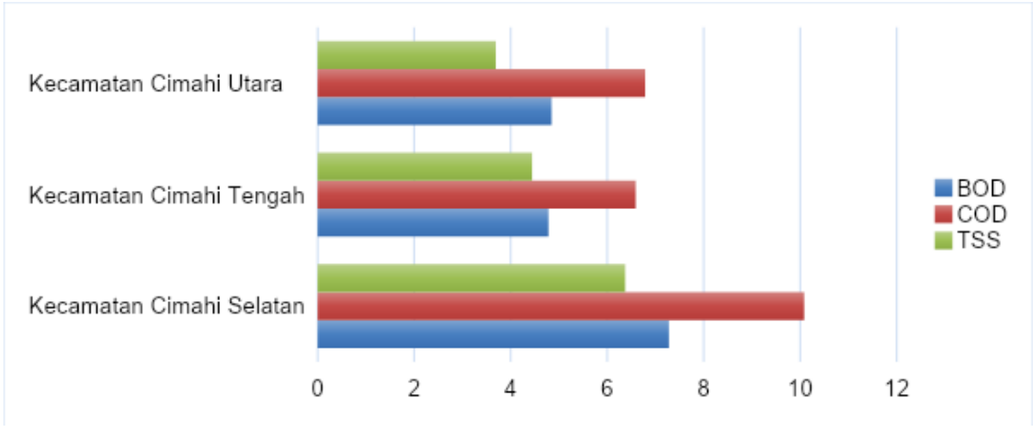


(c) Parameter TSS

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar di bawah menunjukkan nilai akumulasi setiap zat pencemar di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan memiliki nilai potensi beban pencemar paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk zat pencemar, COD merupakan zat pencemar yang berpotensi memiliki nilai paling tinggi dibandingkan zat pencemar lainnya untuk setiap kecamatan di Kota Cimahi.

Gambar 2.65.
Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Setiap Kecamatan
Di Kota Cimahi Tahun 2016



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi beban pencemar Kota Cimahi juga berpotensi mengalami peningkatan, terumata beban pencemar yang bersumber dari domestik. Peningkatan potensi beban pencemar di Kota Cimahi dimodelkan untuk tahun 2016 hingga 2050, yaitu dari 2016 ke 2020 dan 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun. Dari tiga kecamatan yang terdapat di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi beban pencemar yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara untuk jenis zat pencemar,

zat COD merupakan zat pencemar dengan angka tertinggi pada ketiga kecamatan yang ada.

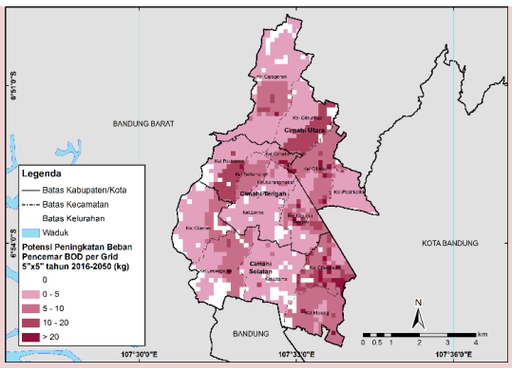
Tabel 2.66.
Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan Di Kota Cimahi

Kecamatan	Zat Pencemar (kg/hari)	Tahun		
		2016	2020	2050
Cimahi Selatan	BOD	7279,37	7663,34	11422,06
	COD	10081,89	10609,83	15778,07
	TSS	6372,07	6736,93	10307,72
Cimahi Tengah	BOD	4783,05	4999,59	7066,12
	COD	6590,25	6887,93	9729,41
	TSS	4442,48	4648,68	6611,87
Cimahi Utara	BOD	4847,30	5144,92	8502,30
	COD	6787,25	7196,48	11812,88
	TSS	3690,05	3972,78	7162,30

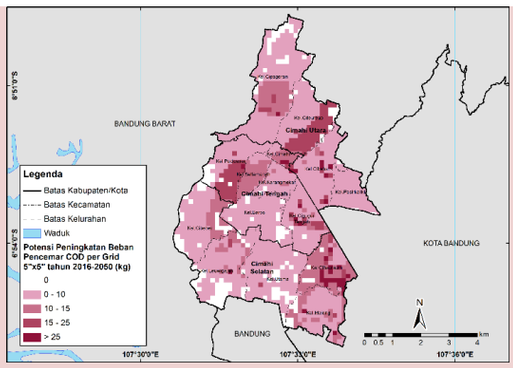
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Walaupun memiliki nilai tertinggi, pada perhitungan rata-rata peningkatan potensi beban pencemar dari tahun 2020 hingga 2025 dengan periode per 10 tahun, zat COD justru memiliki nilai persentase peningkatan paling kecil dibandingkan zat yang lain. Zat yang mengalami presentasi peningkatan tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi adalah zat pencemar TSS. Peningkatan zat pencemar TSS tertinggi terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentase sebesar 14,84%. Pada Kecamatan Cimahi Selatan, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS masing-masing secara berurutan adalah 10,97%; 10,92%; dan 11,55%. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 9,75%; 9,73%; dan 9,90%. Sementara di Kecamatan Cimahi Utara, nilai persentase peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 13,16%; 13,03%; dan 14,84%.

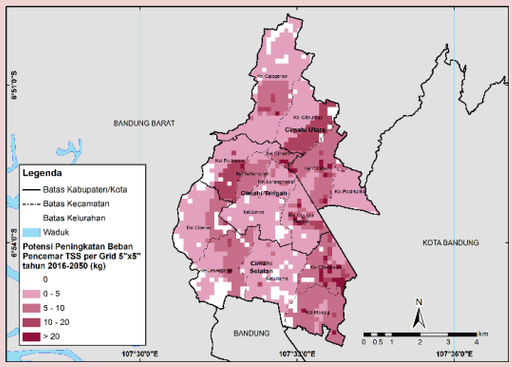
Gambar 2.66.
Peningkatan Potensi Beban Pencemar Dari Tahun 2016 Ke Tahun 2050 Di Kota Cimahi



(a) Zat BOD



(b) Zat TSS



(c) Zat TSS

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Dari seluruh luasan Kota Cimahi, luasan WD Citarum Tengah lebih mendominasi yaitu sekitar 99% dengan hanya 1% dari luasan Kota Cimahi merupakan bagian dari WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini juga mencakup beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang untuk WD Cekungan Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, dan sebagian Kabupaten Purwakarta untuk WD Citarum

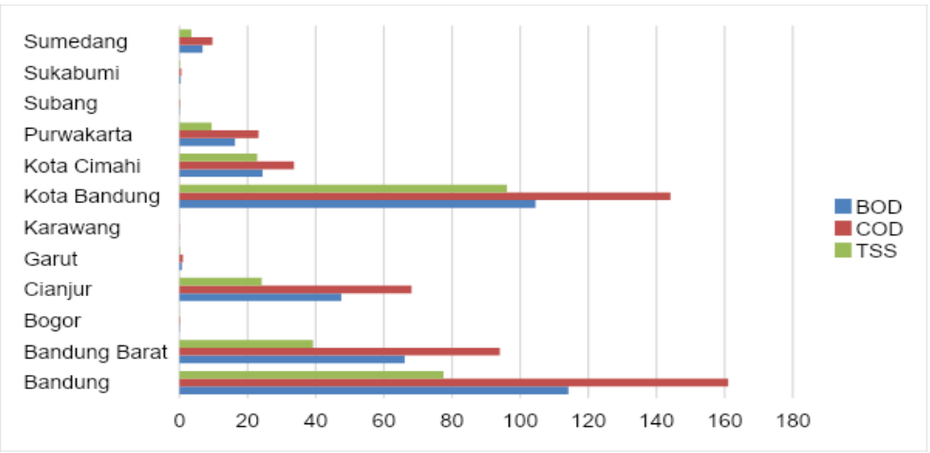
Tengah. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut. Tabel di bawah menunjukkan nilai akumulasi dari potensi beban pencemar dari beberapa kabupaten/kota yang wilayahnya tercakup oleh WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung.

Tabel 2.67.
Nilai Potensi Beban Pencemar Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung

KABUPATEN	Zat Pencemar (kg/hari)		
	BOD	COD	TSS
Bandung	114.150	161.055	77.477
Bandung Barat	66.106	94.025	39.200
Bogor	128	186	45
Cianjur	47.503	68.100	24.127
Garut	688	1.003	223
Karawang	51	76	-
Kota Bandung	104.500	144.108	96.099
Kota Cimahi	24.403	33.604	22.810
Purwakarta	16.299	23.212	9.433
Subang	128	188	26
Sukabumi	382	543	228
Sumedang	6.762	9.686	3.490
TOTAL	**381.101**	**535.787**	**273.158**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

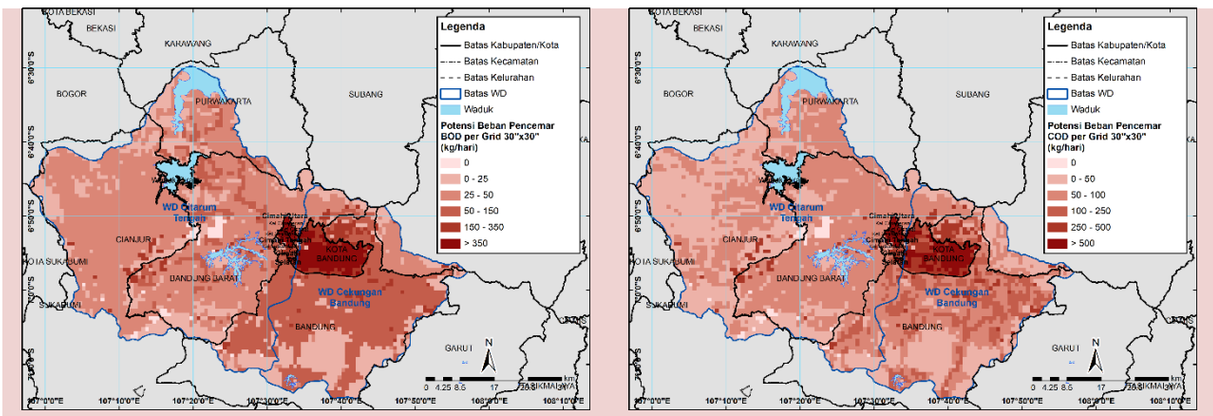
Gambar 2.67.
Potensi Beban Pencemar Setiap Zat Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung



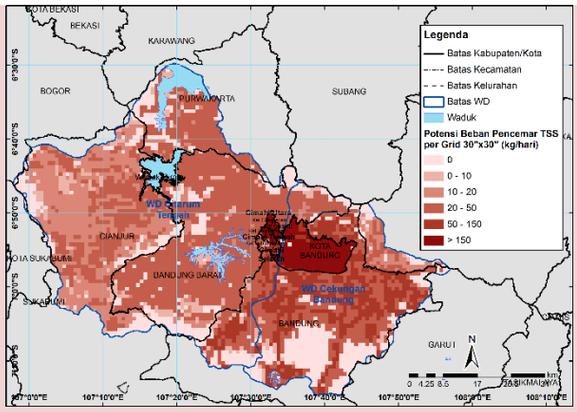
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dari hasil rekapitulasi nilai potensi beban pencemar berserta grafiknya, terlihat bahwa nilai potensi beban pencemar tertinggi bersumber dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kedua wilayah ini berada dalam cakupan WD Cekungan Bandung. Sementara dalam cakupan WD Citarum Tengah yang mendominasi wilayah di Kota Cimahi, potensi beban pencemar dengan nilai tinggi berada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Kota Cimahi. Gambar di bawah menunjukkan sebaran dari potensi beban pencemar yang ada di masing-masing WD. Apabila dilihat dari sebarannya, nilai potensi beban pencemar tinggi untuk setiap gridnya justru berada di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namun, apabila diakumulasikan, karena luasan kedua kota ini tergolong kecil, total nilai potensi beban pencemarnya menjadi kecil pula.

Gambar 2.68.
Potensi Beban Pencemar Air Sungai Di WD Citarum Tengah Dan WD Cekungan Bandung Dalam Sistem Grid 30”X30”



(a) Parameter BOD (b) Parameter COD



(c) Parameter TSS

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

e) Kualitas Air Sungai

Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, dilakukan pengukuran lapangan pada lima sungai di Kota Cimahi untuk dilakukan analisis kualitas air sungai pada musim pancaroba dan kemarau. Pengambilan sampling untuk musim pancaroba dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2019 dan untuk musim kemarau dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019.

Daya Tampung beban Pencemaran Air (DTBPA) dihitung dengan menggunakan selisih antara beban pencemaran aktual dengan beban pencemaran maksimum. Beban pencemar aktual Sungai Citarum dari Kota Cimahi dihitung berdasarkan konsentrasi pencemar dari anak-anak sungai yang masuk ke dalam DAS Citarum. Berdasarkan hasil perhitungan tidak semua parameter dapat ditentukan nilai DTBPA karena ada beberapa parameter yang tidak memiliki baku mutu atau nilai hasil analisis di lapangan konsentrasinya nol. Angka DTBPA yang negatif menunjukan bahwa daya tampung beban pencemaran di sungai sudah melebihi untuk parameter tersebut.

Pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, disampaikan hasil pemantauan

di Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum pada musim kemarau dan pancaroba di bagian hulu, tengah, dan hilir terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu diantaranya yaitu TDS, TSS, NO_2, Zn, BOD_5, COD, DO, Total P, dan Fecal coli dll. Mutu air berdasarkan hasil perhitungan pada musim pancaroba dan kemarau dengan menggunakan nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk kategori cemar sedang berat.

Tabel 2.68.
Indeks Pencemaran Air Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Cimahi	Hulu	1.101	Cemar Berat	341,72	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.128,16	Cemar Berat
		Hilir	1.102	Cemar Berat	21.455,38	Cemar Berat
2	Cisangkan	Tengah	461	Cemar Berat	24.217,17	Cemar Berat
		Hulu	1.102	Cemar Berat	23.612,94	Cemar Berat
		Hilir	119	Cemar Berat	17.349,97	Cemar Berat
3	Cibaligo	Hulu	1.102	Cemar Berat	21.450,97	Cemar Berat
		Tengah	1.102	Cemar Berat	13.015,45	Cemar Berat
		Hilir	1.103	Cemar Berat	72.770,91	Cemar Berat
4	Cibeureum	Hulu	461	Cemar Berat	11.884,16	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.710,91	Cemar Berat
		Hilir	461	Cemar Berat	24.217,92	Cemar Berat
5	Cibabat	Hulu	1.102	Cemar Berat	1.170,08	Cemar Berat
		Tengah	1.102	Cemar Berat	20.997,65	Cemar Berat
		Hilir	1.101	Cemar Berat	77.091,97	Cemar Berat

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Hasil perhitungan DTBPA pada Sungai Cimahi menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD_5, COD, TSS, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cimahi terdiri dari: TDS, TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Klorin bebas, Zink, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cisangkan menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD_5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung terdiri dari : TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Zink, Sulfat, Klorin bebas, Barium, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

DTBPA pada Sungai Cibeureum menunjukkan bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, minyak dan lemak, dan fenol. Pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibeureum terdiri dari : TSS, BOD5, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Klorin bebas, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cibabat menunjukkan bahwa pada musim pancaroba, parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu : BOD_5, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibabat terdiri dari: TDS, TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Nitrat, Flourida, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Pada Sungai Cibaligo, parameter yang telah melebihi daya tampungnya pAda musim pancaroba yaitu : TDS, TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Tembaga, Timbal, Zink, Sulfida, Sianida, Nitrit, Flourida, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibaligo terdiri dari: TSS, BOD_5, COD, Fosfat, Timbal,

Zink, Sulfida, Nitrit, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

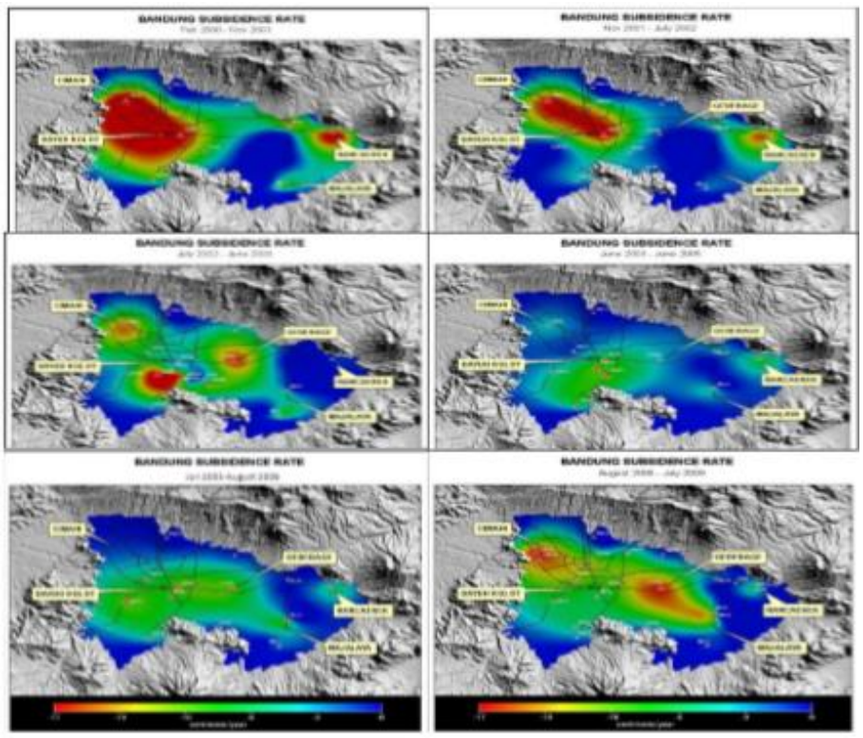
f) Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Penurunan muka tanah atau *land subsidence* adalah fenomena penurunan dari permukaan atau topografi tanah. Turunnya permukaan tanah biasanya terjadi disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Wilayah Cekungan Bandung cukup rentan terhadap penurunan muka tanah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Kota Cimahi masuk dalam wilayah cekungan ini. Penurunan muka tanah di wilayah Cekungan Bandung diduga diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan (Abidin, et al., 2008). Tercatat hampir semua industri di wilayah Cekungan Bandung menggunakan bahan baku berupa air tanah (Gumilar, et al., 2012). Terdapat beberapa penelitian terkait penurunan muka tanah di Cekungan Bandung. Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kota Cimahi memiliki laju penurunan muka tanah yang signifikan.

Gumilar et al., (2012) meneliti penurunan muka tanah di Cekungan Bandung dengan menggunakan metode survei GPS dan InSAR. Berdasarkan hasil pengolahan data GPS dari tahun 2000-2009, wilayah Kota Cimahi khususnya wilayah Leuwigajah mengalami penurunan cukup besar hingga mencapai 14 cm per tahun. Wilayah tersebut merupakan kawasan industri yang diduga mengambil banyak air tanah (artesis). Sedangkan berdasarkan pengolahan data InSAR pada kurun waktu Januari 2009-Desember 2010, wilayah Kota Cimahi juga mengalami penurunan muka tanah yang sangat besar sekitar 12 cm. Pengolahan data InSAR masih memiliki ketelitian dibawah GPS. Berdasarkan penelitian dari Heri Andreas

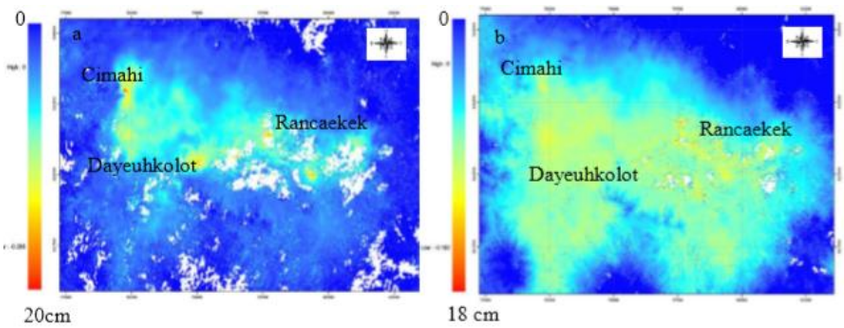
tahun 2018, laju penurunan muka tanah di wilayah Kota Cimahi sangat besar sekitar 15-20 cm per tahun (Andreas, et al., 2018).

Gambar 2.69.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009



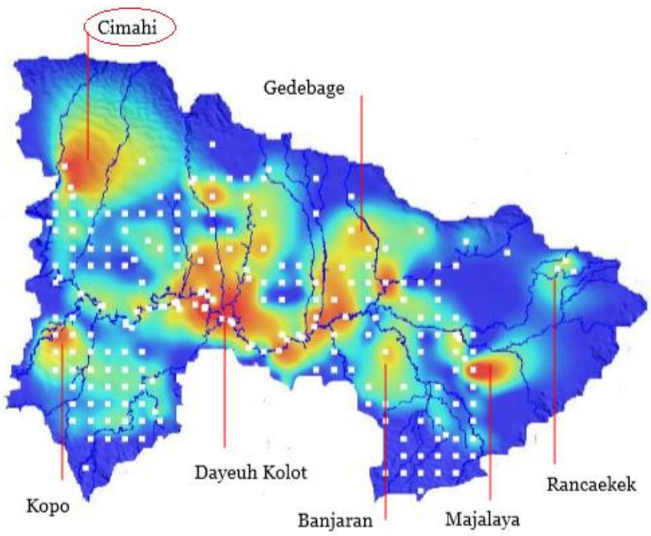
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.70.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung Berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.71.
Penurunan Muka Tanah Di Cekungan Bandung



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Dikutip dalam *tempo.co* pada 2 Desember 2019, menurut Irwan Gumilar (ketua Tim Riset ITB terkait penurunan muka tanah di Bandung), penurunan muka tanah per 1 meter akan berdampak pada penurunan air tanah dalam atau minus 20 meter. Total penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Bandung termasuk Leuwigajah Kota Cimahi ada yang mencapai 3-4 meter, yang artinya penurunan air tanah berkisar 60-80 meter. Dengan batas minimal minus 45 meter, maka kondisi air tanah dalam daerah tersebut sudah tergolong rusak. Kerusakan air tanah dalam waktu yang lama akan menyebabkan air tanah menjadi krisis dan habis.

g) Lahan Kritis

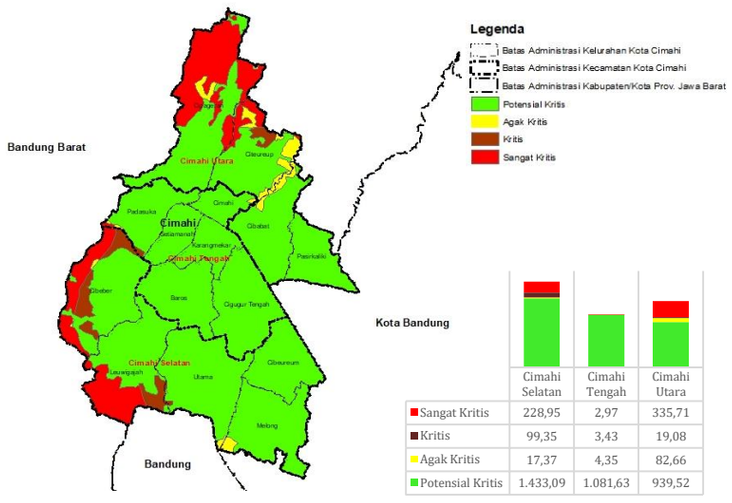
Terbentuknya lahan kritis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, jenis tanah, tingkatan erosi, dan tutupan vegetasi. Unsur-unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap timbulnya lahan kritis adalah kemiringan lereng. Selain itu, panjang lereng, dan bentuk lereng akan mempengaruhi besarnya erosi dan

aliran lahan, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya lahan kritis, yaitu lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Kemiringan lereng terutama akan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar persentase kemiringan lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, sehingga mempengaruhi material kesuburan dan sifat fisika tanah melalui pelepasan yang terjadi di permukaannya.

Luas lahan kritis di Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional terdiri atas empat kriteria, dengan luas lahan sangat kritis sebesar 567,62 Ha atau 13,36% dari luas wilayah, dan luas lahan kritis sebesar 121,86 Ha atau 2,87% dari luas wilayah Kota Cimahi.

Gambar 2.72.
Peta Lahan Kritis Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

4) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Penilaian efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa optimal suatu sumber daya alam telah dimanfaatkan. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan pola ruang yang direncanakan dengan kondisi tutupan lahan eksisting yang direpresentasikan melalui indeks jasa ekosistem (IJE). Terdapat tiga jenis efisiensi yang dinilai pada kajian ini, yaitu efisiensi penyedia pangan, efisiensi penyedia air dan efisiensi pengaturan tata air.

Nilai efisiensi yang tinggi akan diperoleh pada pola ruang yang memiliki kesesuaian dengan kondisi tutupan lahan eksisting. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai efisiensi tinggi bukanlah suatu indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki nilai IJE penyedia pangan, air, atau pengaturan tata air dan banjir yang tinggi, namun nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pola ruang di wilayah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

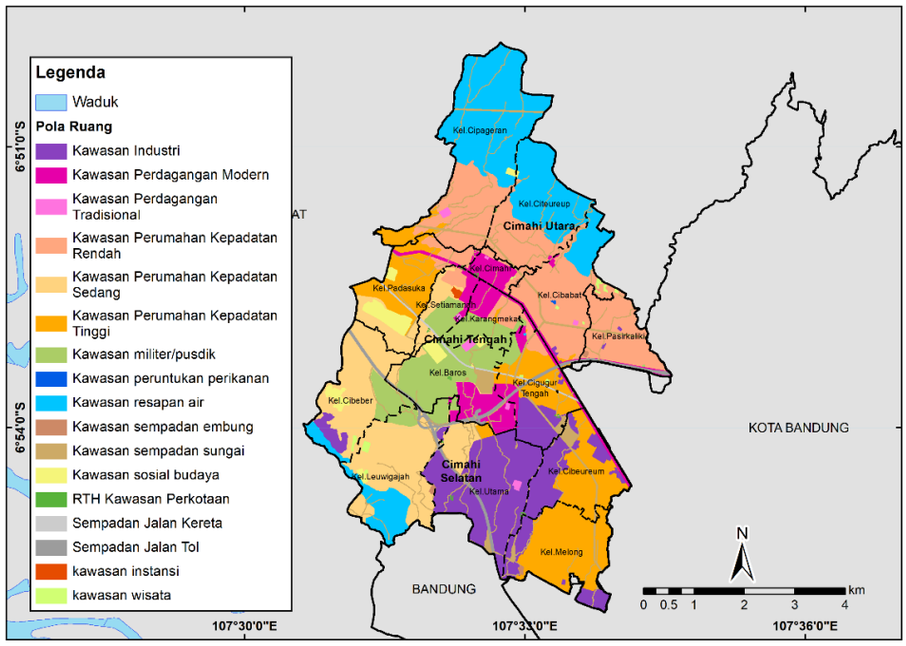
Tabel 2.69.
Efisiensi Pemanfaatan SDA Pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi

Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Kawasan Industri	53,17%	50,54%	51,38%
Kawasan Instansi	100,00%	100,00%	90,61%
Kawasan militer/pusdik	51,37%	49,68%	53,76%
Kawasan Perdagangan Modern	49,32%	48,59%	51,53%
Kawasan Perdagangan Tradisional	51,91%	50,00%	54,54%
Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	53,31%	50,58%	52,56%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	53,92%	50,88%	54,35%
Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	50,80%	49,33%	51,26%
Kawasan peruntukan perikanan	89,88%	93,15%	80,82%
Kawasan resapan air	61,52%	53,15%	66,03%
Kawasan sempadan embung	65,56%	57,62%	60,93%
Kawasan sempadan sungai	58,17%	54,12%	58,77%
Kawasan sosial budaya	54,06%	51,77%	59,86%
Kawasan Wisata	49,40%	65,77%	71,23%
RTH Kawasan Perkotaan	55,39%	48,04%	49,03%
Sempadan Jalan Kereta Api	48,53%	65,19%	70,73%
Sempadan Jalan Tol	53,49%	50,67%	61,70%

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.73.

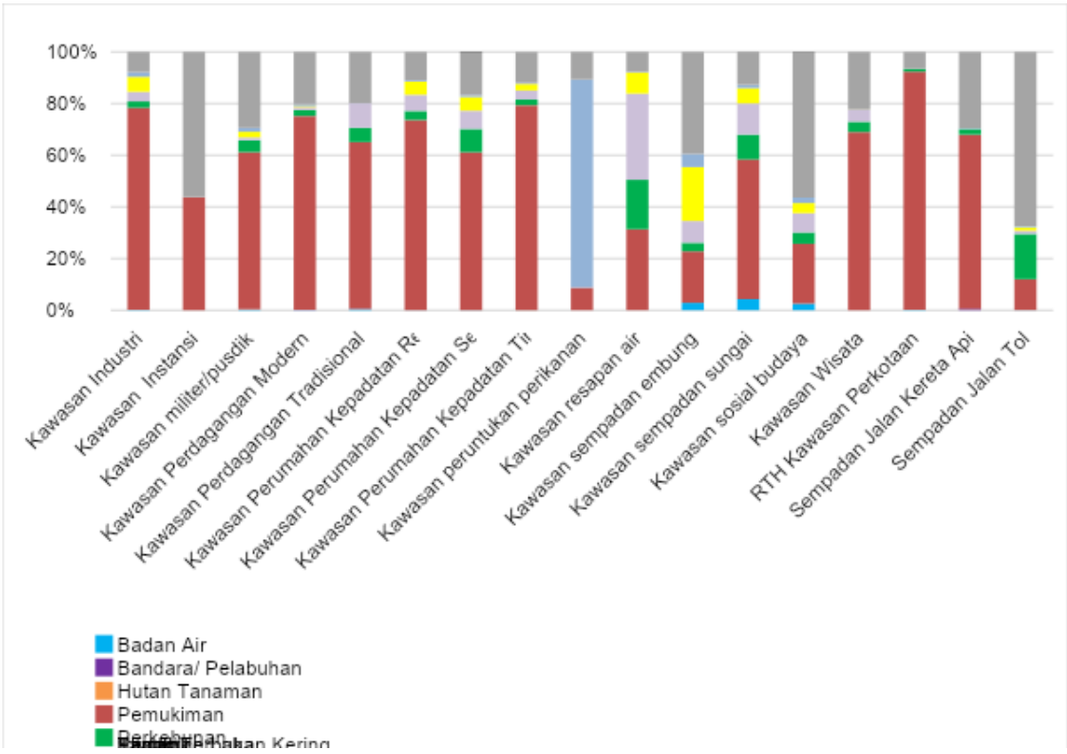
Pola Ruang Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Gambar 2.74.

Proporsi Tutupan Lahan Pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi

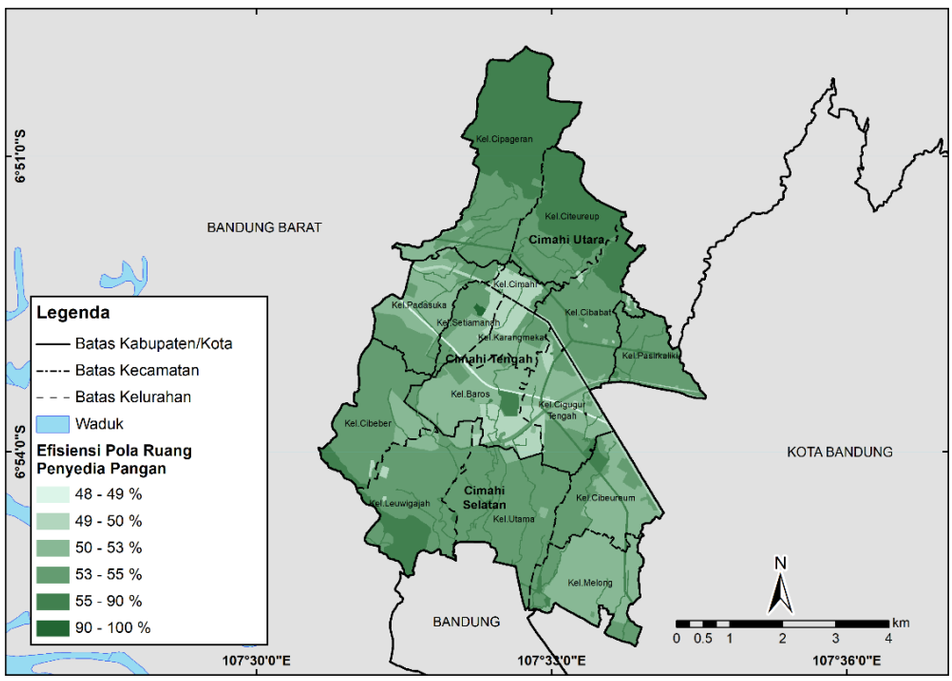


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

5) Efisiensi Penyediaan Pangan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi berada pada kisaran nilai antara 49% hingga 55%, yang tersebar merata hampir pada semua wilayah di Kota Cimahi. Sementara untuk nilai efisiensi tinggi yang lebih dari 60% tersebar pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu Kelurahan Baros dan Kelurahan Setiamanah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber. Gambar di bawah menunjukkan sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

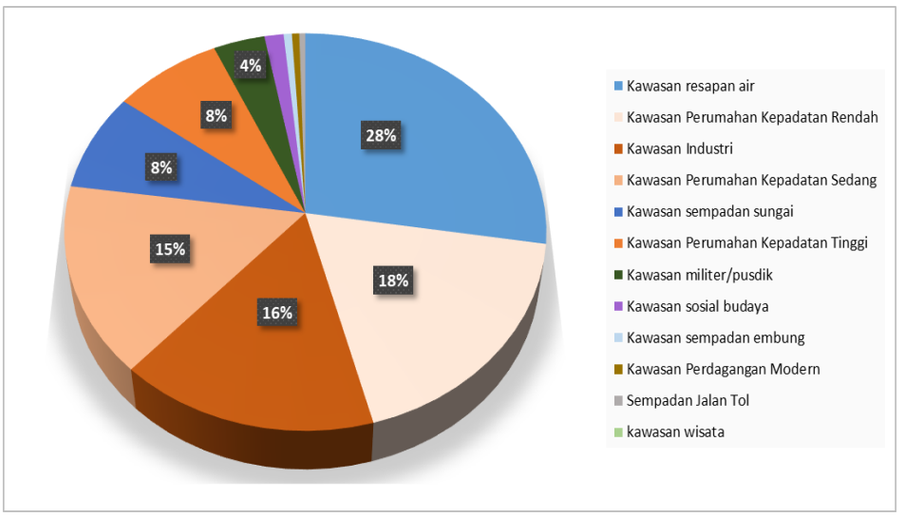
Gambar 2.75.
Efisiensi Penyediaan Pangan Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Sawah merupakan salah satu tutupan lahan yang memiliki potensi tinggi dalam hal penyediaan pangan di Kota Cimahi. Namun, apabila dilihat dari pola ruangnya, tutupan lahan sawah ini tersebar dalam beberapa pola ruang seperti kawasan resapan air, kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan industri, dan beberapa kawasan lain. Nilai efisiensi penyediaan pangan pada kawasan resapan air yang memiliki proporsi luasan sawah terbesar diantara kawasan lainnya adalah 61,52%. Sementara untuk kawasan lain yang juga memiliki luasan sawah cukup besar seperti kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan industri, memiliki nilai efisiensi penyediaan pangan sebesar 53,31% dan 53,17%. Walaupun terbilang cukup tinggi, namun nilai efisiensi ini belum optimum. Sehingga jenis tutupan lahan pada setiap pola ruang perlu diperhatikan kembali, misalnya sawah yang memiliki proporsi luasan cukup besar pada kawasan industri.

Gambar 2.76.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah Pada Pola Ruang di Kota Cimahi



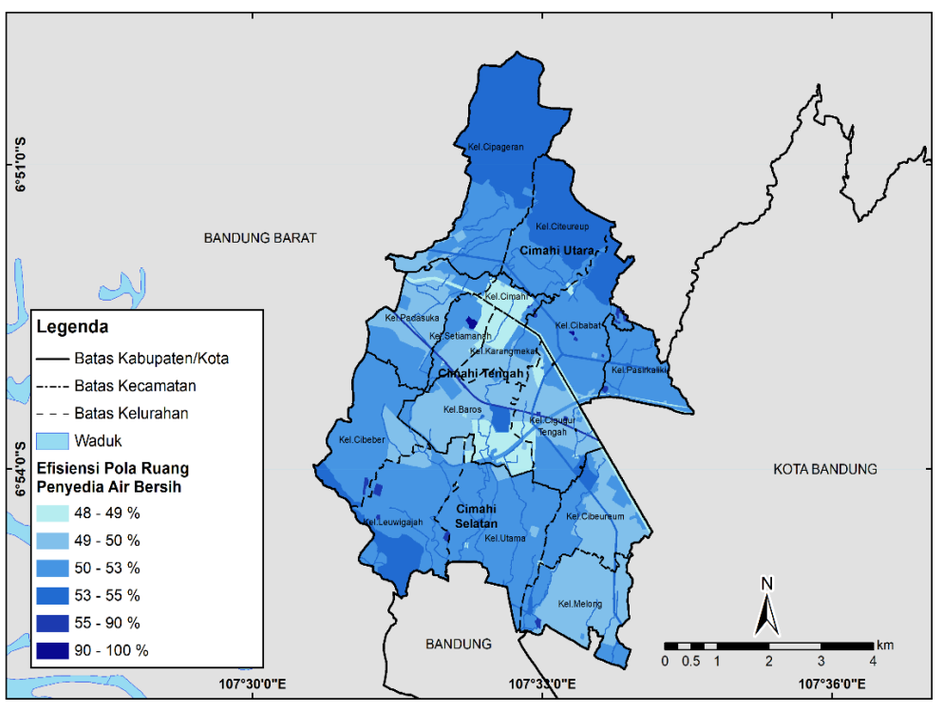
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

6) Efisiensi Penyediaan Air

Sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan air bersih di Kota Cimahi memiliki pola yang sama

dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan. Nilai rata-rata yang mendominasi efisiensi penyediaan air bersih juga berkisar antara 49% hingga 55%, dengan nilai efisiensi tertinggi yaitu 100% yang dimiliki oleh pola ruang kawasan Instansi dan 93,15% untuk kawasan peruntukan perikanan. Pada peta sebaran juga masih terlihat nilai efisiensi tinggi di bagian utara dan barat daya Kota Cimahi yang berada pada pola ruang resapan air. Sementara untuk nilai efisiensi rendah di Kecamatan Cimahi Tengah yang dimiliki oleh pola ruang Kawasan perdagangan modern. Pola ruang dengan nilai efisiensi penyedia air yang tinggi bukan merupakan indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi pula dalam hal penyediaan air di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.

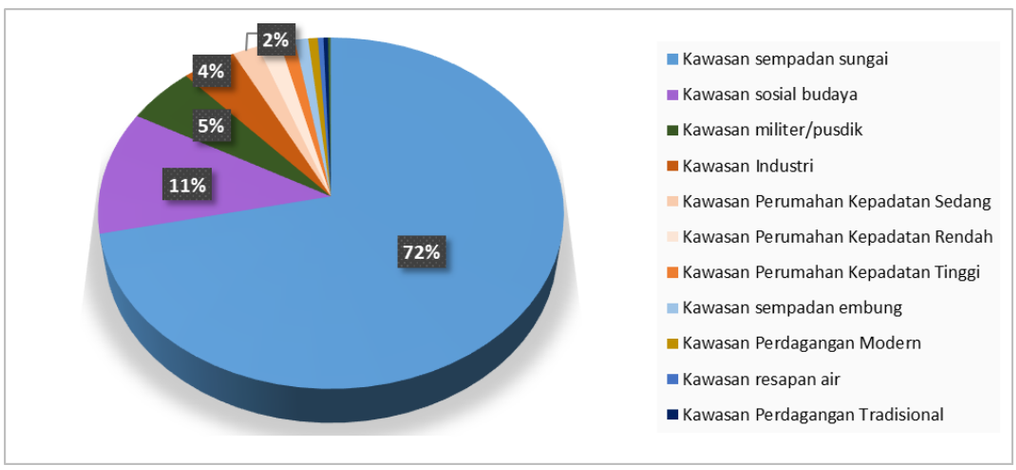
Gambar 2.77.
Efisiensi Penyediaan Air Bersih Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Potensi penyediaan air yang tinggi terdapat pada tutupan lahan berupa badan air. Seperti halnya efisiensi penyediaan pangan, luasan tutupan lahan badan air tersebar pada beberapa pola, dengan kawasan sempadan sungai yang paling mendominasi dengan proporsi luas 72%. Namun, kawasan sempadan sungai memiliki nilai efisiensi penyediaan air sebesar 54,12%. Untuk kawasan peruntukan perikanan, pemanfaatan dari tutupan lahannya telah sesuai dengan adanya badan air yang mendominasi kawasan ini.

Gambar 2.78.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air Pada Pola Ruang di Kota Cimahi



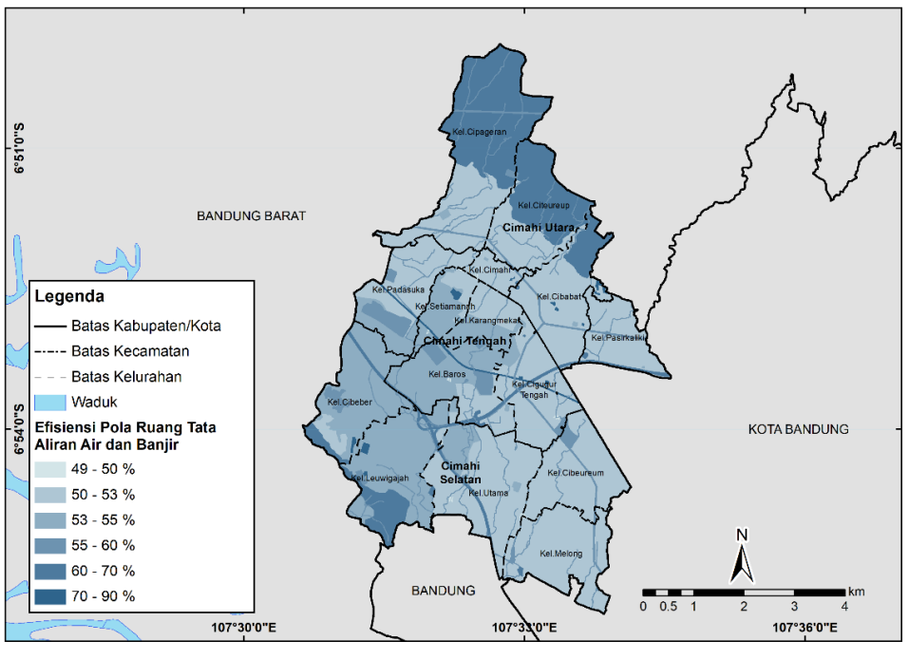
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

7) Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan tata air dan banjir di Kota Cimahi juga memiliki nilai yang tersebar hampir merata, yaitu 49% hingga 55% hampir di semua wilayah, serta lebih dari 60% di sebagian kecil Kelurahan Setiamanah pada Kecamatan Cimahi Tengah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan

Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber.

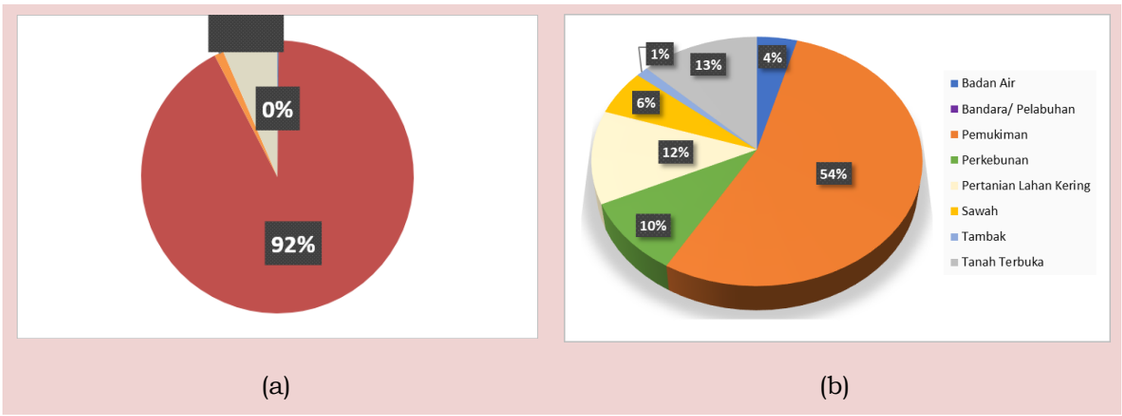
Gambar 2.79.
Efisiensi Pengaturan Tata Air Dan Banjir Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Pada efisiensi pengaturan tata air dan banjir, rencana pola ruang yang harus diperhatikan efisiensinya terutama adalah kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan. Pada kawasan tersebut, masing-masing memiliki nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir sebesar 66,03%, 58,77%, 60,93%, dan 49,03%. Proporsi tutupan lahan pada kawasan tersebut harus diperhatikan. Pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan, tutupan lahan yang mendominasi adalah permukiman. Sebagai contoh, gambar di bawah menunjukkan proporsi luasan tutupan lahan pada pola ruang RTH perkotaan dan sempadan sungai.

Gambar 2.80.
Proporsi Luas Tutupan Lahan Pada Pola Ruang (A) RTH Perkotaan Dan (B) Sempadan Sungai Di Kota Cimahi



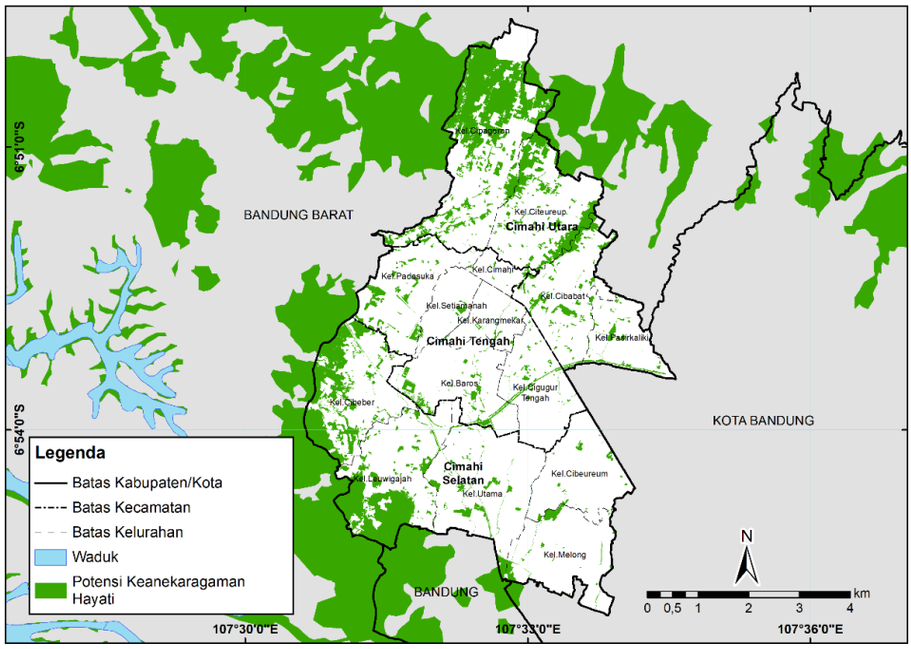
(a) (b)

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

8) Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Gambar di bawah menunjukkan bahwa seluruh Kota Cimahi mempunyai potensi keanekaragaman hayati. Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibeber dan Leuwigajah memiliki potensi keanekaragaman hayati paling banyak.

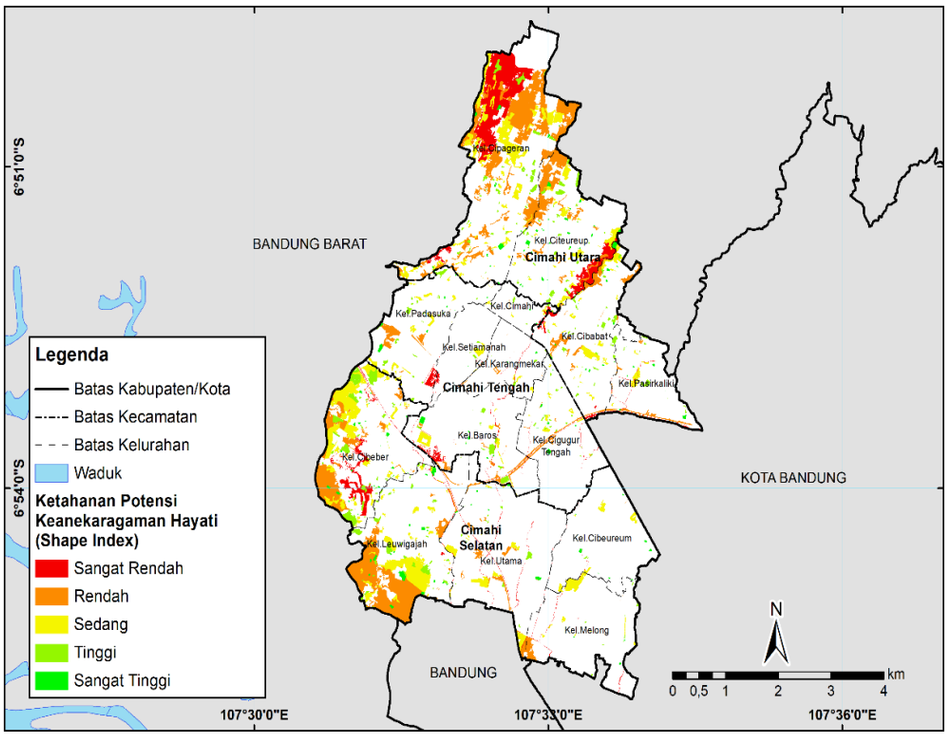
Gambar 2.81.
Potensi Keanekaragaman Hayati Di Kota Cimahi Dan Sekitarnya



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati didapat dari melihat bentuk geometris wilayah dengan melihat nilai shape index dari sebuah kawasan yang memiliki nilai jasa ekosistem yang tinggi. Secara umum Kota Cimahi memiliki ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang mayoritas sangat rendah dan rendah, selain itu terdapat potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang memiliki ketahanan sedang hingga tinggi. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang sangat tinggi hingga rendah ini terutama tersebar di wilayah Ekoregion Perbukitan Vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara, bagian utara wilayah Ekoregion Dataran Vulkanik yang berhubungan dengan Perbukitan Vulkanik, dan sisi barat Cimahi yang merupakan perpaduan wilayah Ekoregion Perbukitan Struktural dan Dataran Vulkanik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perbukitan vulkanik di sisi utara Kota Cimahi masih sedikit-banyak terhubung dengan ekosistem alami di kawasan hutan lindung dan cagar alam Gunung Burangrang dan Tangkuban Parahu. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di bagian utara wilayah ekoregion perbukitan vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara bukan merupakan kawasan yang terpisah batas administrasi namun sebagai kesatuan kawasan dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi/kerja sama antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolan wilayah yang berpotensi sebagai pendukung keanekaragaman hayati tersebut.

Gambar 2.82.
Tingkat Ketahanan Dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Nilai yang sangat rendah tersebut didapat pada wilayah yang memiliki bentuk yang memanjang ataupun menjari (bentuk yang tidak compact) sehingga mudah terganggu. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena di Kota Cimahi tercatat ditemukan jenis-jenis burung yang memiliki status dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 (Noerdjito & Maryanto, 2001), namun dengan status *Least Concerned* berdasarkan data IUCN. Adapun jenis burung yang dilindungi tersebut adalah Burung Manintin (*Enicurus* spp), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Cekakak (*Halycon* spp.; burung-burung dari suku Alcedinidae), dan Sriganti (*Nectarinia jugularis*) (DLH Kota Cimahi, 2015). Dari jenis-jenis burung tersebut, sebagian besar memiliki sebaran habitat di daerah pegunungan dan dataran tinggi, khususnya di daerah riparian, dengan pakan utama serangga (manintin), fauna darat dan air (cekakak), dan nektar bunga (sriganti). Kuntul

kerbau, di sisi lain, hidup di daerah persawahan dan lahan basah, serta mengkonsumsi serangga di area tersebut. Oleh karena itu, jenis-jenis burung ini memiliki peran penting di dalam pengendalian populasi hama dan penyerbukan alami.

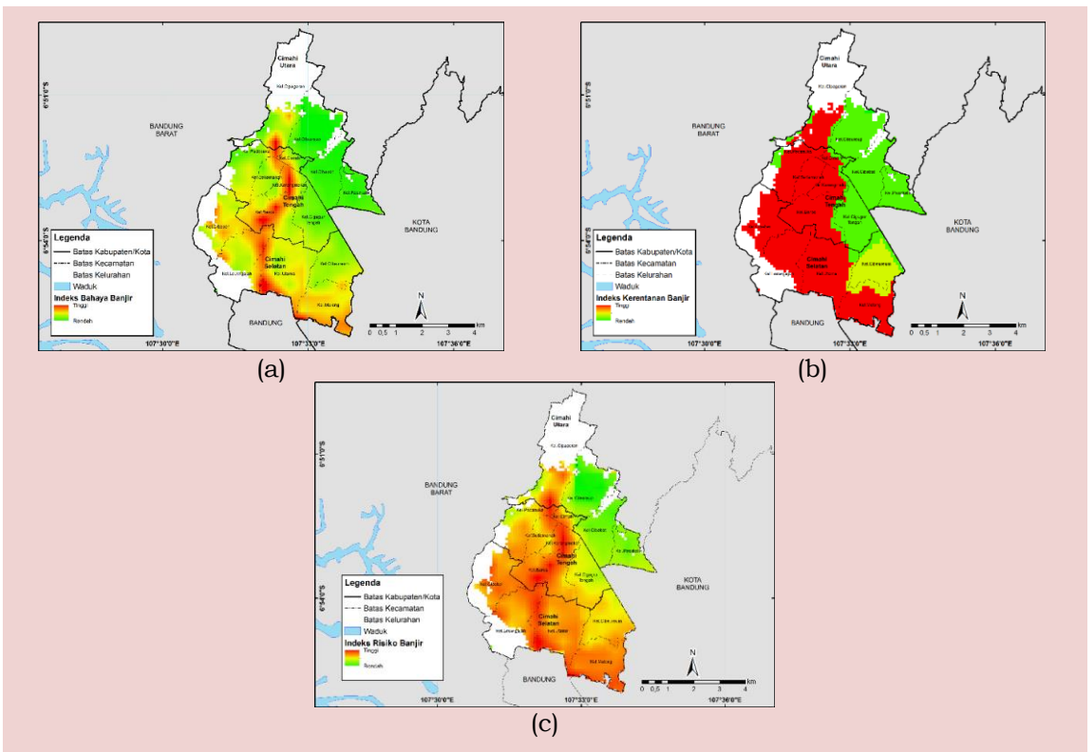
Di hutan pada area Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi masih terdapat hewan endemik yang dilindungi seperti kucing hutan, luwak, dan juga landak. Sayangnya hewan - hewan ini masih sering diburu oleh warga sekitar. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan konservasi hewan - hewan endemik kota Cimahi tersebut. Selain itu Kota Cimahi pun telah memiliki durian endemik dataran tinggi asli Kota Cimahi yang diberi nama Durian Kamajaya. Diharapkan durian ini dapat dikembangbiakan dan ditanam pada lahan-lahan kritis (hutan kota) yang bermanfaat bagi konservasi dan juga memberikan nilai tambah ekonomi.

9) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

a) Banjir

Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2012, didefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Tercatat 22 kejadian banjir yang terjadi di Kota Cimahi pada tahun 2016. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 33 kali. BNPB melakukan penilaian terhadap indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak lokasi rawan banjir terhadap sungai (RBI, 2016). Peta indeks bahaya banjir untuk Kota Cimahi terdapat pada gambar di bawah.

Gambar 2.83.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Banjir Di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kota Cimahi memiliki indeks bahaya banjir mulai dari kelas tinggi hingga rendah, namun didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Indeks bahaya banjir tinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah dan sebagian kecil di Kecamatan Cimahi Utara. Untuk Indeks bahaya banjir rendah mayoritas berada pada Kecamatan Cimahi Utara yaitu pada Kelurahan Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki dan Cipageran. Selain itu, terdapat indeks bahaya banjir rendah pada sebagian wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Cimahi, Karangmekar dan Cigugur Tengah.

Indeks kerentanan banjir pada wilayah ini bernilai tinggi hingga rendah, dengan kelas tinggi mendominasi. Kerentanan tingkat tinggi berada pada kawasan dengan indeks bahaya banjir yang tinggi hingga rendah,

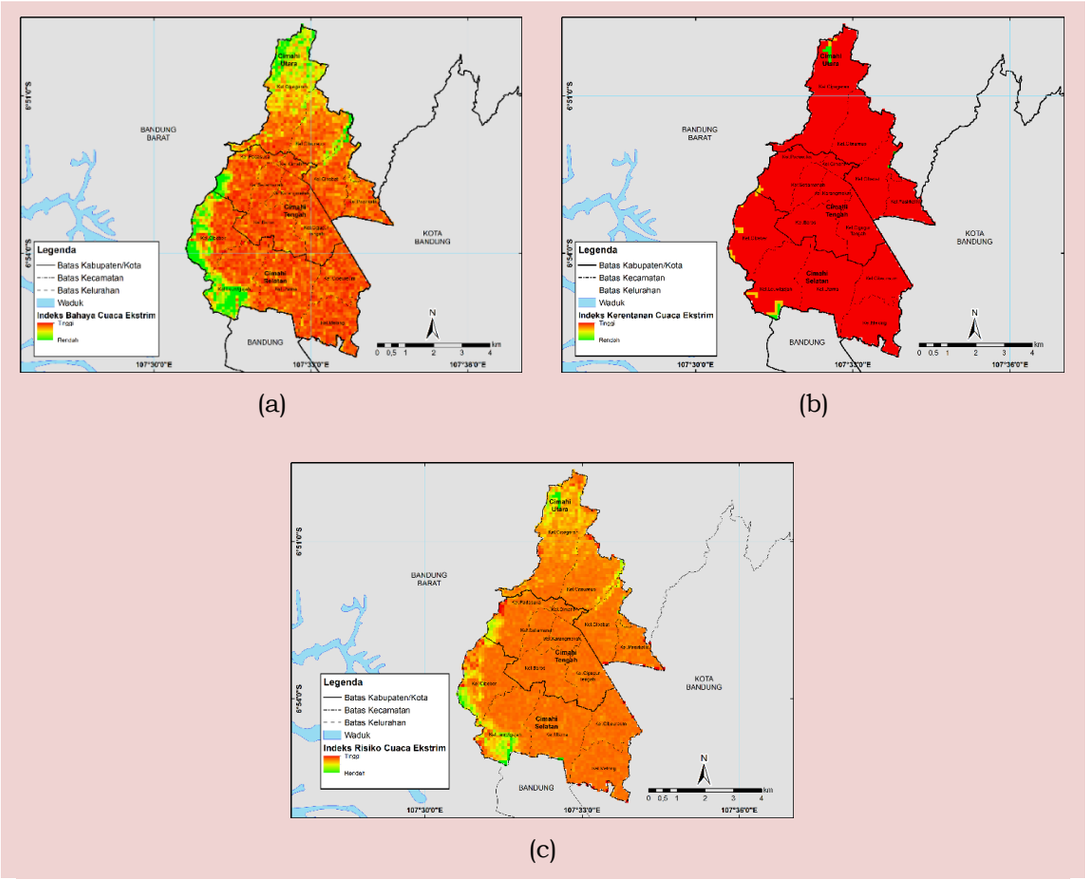
sedangkan untuk indeks kerentanan sedang hanya terdapat pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

b) Cuaca Ekstrem

Indeks bahaya cuaca ekstrim dibuat dengan menggunakan tiga parameter, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan (RBI, 2016). Keterbukaan lahan yang dipertimbangkan meliputi beberapa jenis lahan, seperti hutan, kebun/perkebunan, tegalan/ladang, sawah, dan lahan terbuka. Gambar adalah peta indeks bahaya cuaca ekstrim di Kota Cimahi. Indeks bahaya cuaca ekstrim tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Cimahi dengan indeks tinggi hingga rendah. Indeks bahaya cuaca ekstrim yang dominan di wilayah ini adalah indeks pada kelas tinggi.

Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan cuaca ekstrim. Berbeda dengan indeks bahaya, indeks kerentanan cuaca ekstrim di Kota Cimahi didominasi oleh indeks tinggi dengan pola persebaran yang merata pada Kota Cimahi. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks sedang hingga rendah. Dari kondisi potensi bahaya dan kerentanan tersebut, peta indeks risiko cuaca ekstrim dinilai dengan sebaran risiko seperti yang terlihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.84.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Cuaca Ekstrim Di Kota Cimahi



(a) (b)

(c)

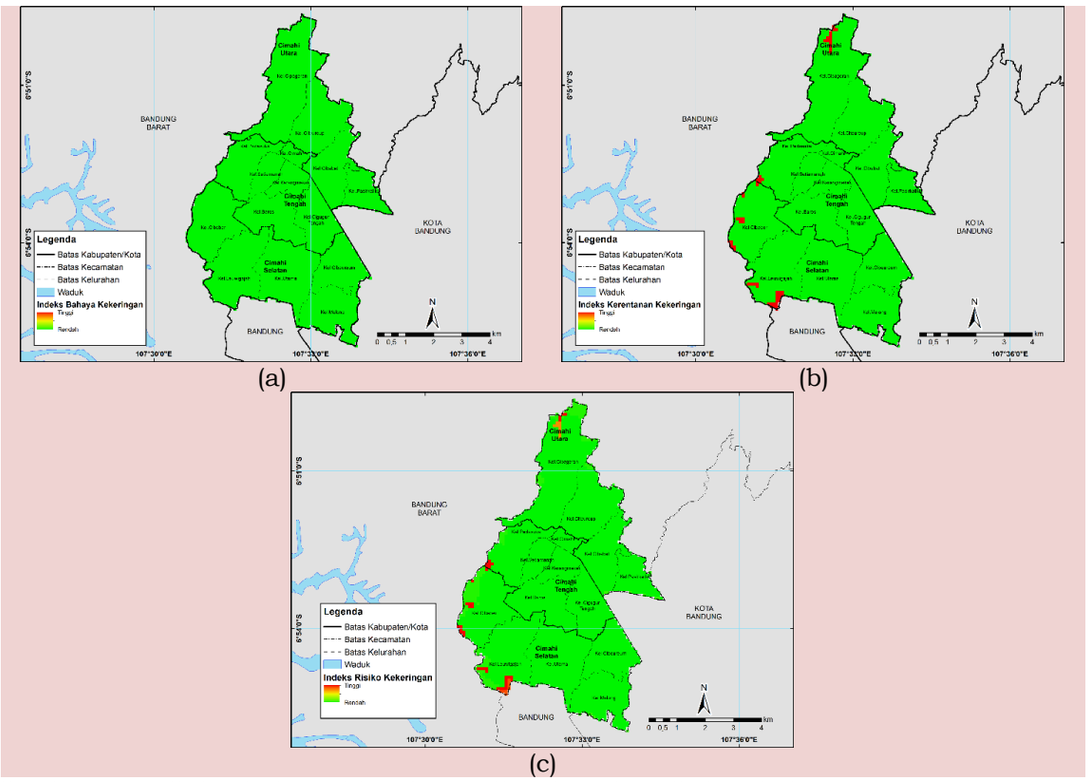
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

c) Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan dapat terjadi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Indeks bahaya kekeringan yang dapat dilihat pada **Gambar 2.85. (a),** menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya kekeringan pada kelas rendah yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Seperti indeks bahaya kekeringan, kelas kerentanan rendah mendominasi Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2.85. (b)**. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan

Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks kerentanaan kekeringan tinggi.

Gambar 2.85.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Kekeringan Di Kota Cimahi



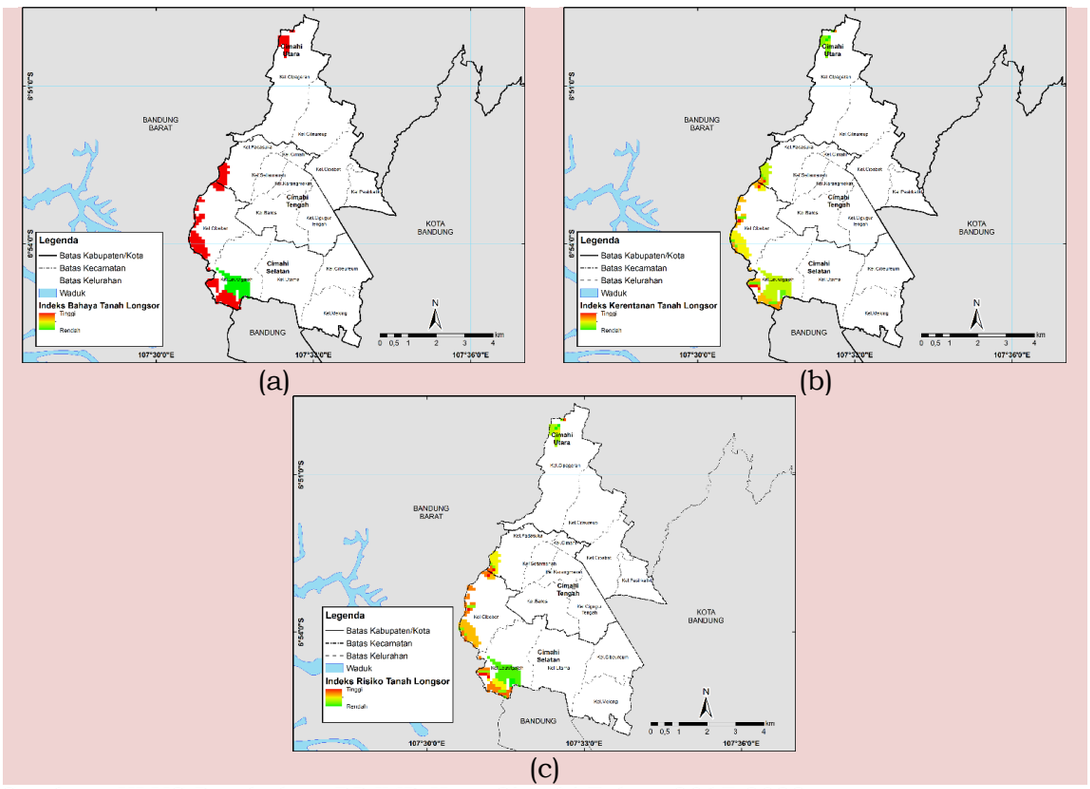
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

d) Tanah Longsor

Potensi bahaya tanah longsor hanya dapat terjadi di sebagian wilayah Kota Cimahi. Indeks tanah longsor menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi hingga rendah pada sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah. Pada lokasi yang sama,

digambarkan nilai indeks kerentanan tanah longsor yang memiliki nilai indeks kerentanan tinggi hingga rendah.

Gambar 2.86.
Peta Indeks (A) Bahaya; (B) Kerentanan; Dan (C) Risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

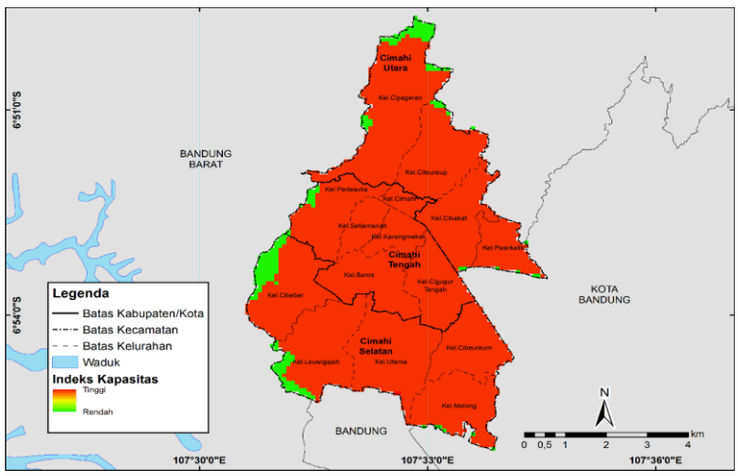
e) Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi (IPCC, 2007). Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan

longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (*Smit & Wandel*, 2006). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNPB (2016), Kota Cimahi memiliki indeks kapasitas adaptasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana di Kota Cimahi, maka Kota Cimahi dapat dengan cepat melakukan penyesuaian dan berusaha untuk kembali pada keadaan semula, sebelum terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan indikasi adanya infrastruktur yang terbentuk dari alam untuk melindungi dan mencegah beberapa bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam di wilayah tersebut mampu menjadi pelindung terhadap bencana, dan sebaliknya.

Gambar 2.87.
Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

15. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, salah satunya adalah pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta tersedianya Gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika.

Pembangunan sistem informasi perlu ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi website *www.cimahikota.go.id,* pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pameran potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat daerah, baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun perangkat daerah yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 13 Puskesmas dan 2 Puskesmas pembantu, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan) serta pembuatan Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 2.70.
Cakupan Pengembangan E-Government Daerah di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Cakupan pengembangan *e-Government* daerah	10	58	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pengembangan *e-Government* daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 10 persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 58 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga 100 persen.

Selanjutnya untuk Cakupan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 40 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 83 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 50 persen.

Tabel 2.71.
Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40	83	50

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2020, diolah

Selanjutnya, untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai 3,20 dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 3,16. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Cimahi Tahun 2018-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	3,20	3,16

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2020, diolah

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

a. Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
b. Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan
c. Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal.

16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode 2015 – 2019 terus mengalami penurunan dari 420 koperasi menjadi 259 koperasi. Hal ini disebabkan adanya koperasi-koperasi yang dibubarkan karena dinilai sudah tidak sehat dan tidak aktif. Yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi sehat adalah koperasi yang selalu mengadakan RAT tepat waktu.

Berdasarkan kriteria di atas, jumlah koperasi aktif di Kota Cimahi pada periode tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 80 koperasi aktif ditahun 2015 menjadi 105 koperasi di tahun 2019. Untuk jumlah koperasi sehat di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun tidak dalam jumlah banyak. Sisanya sebanyak 114 koperasi masih berada pada kriteria koperasi tidak aktif yang memerlukan pembinaan dan pengawasan agar dapat kembali menjadi koperasi aktif dan sehat.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.73.
Indikator Bidang Koperasi Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi	420	420	340	317	259
2	Koperasi Yang melaksanakan RAT (Koperasi Aktif)	80	76	89	103	105
3	Koperasi Sehat	-	30	33	36	40
4	Total Anggota Koperasi	18.995	46.103	50.137	43.909	51.402
5	Modal Sendiri	80.297.242.280	98.952.391.356	104.790.668.344	190.821.281.867	190.293.684.179
6	Modal Luar	141.602.537.174	26.594.970.972	106.725.450.190	133.131.698.017	141.490.036.366
7	Jumlah Aset	172.959.084.065	186.868.181.856	269.618.733.813	308.973.217.173	331.660.159.344
8	Volume Usaha	127.892.885.288	160.832.260.343	232.233.875.528	223.626.012.002	196.750.706.437
9	Sisa Hasil Usaha (SHU)	11.804.211.570	14.552.991.625	18.734.009.256	17.422.475.171	18.480.542.645

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cimahi, 2020, diolah

b. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM ini kedepannya akan dilakukan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu :

a. Klaster industri makanan dan minuman;
b. Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
c. Klaster industri kerajinan; dan
d. Klaster industri telematika.

Sebagai strategi dari pengembangan klaster-klaster tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra UKM yang diharapkan dapat menghasilkan produk-produk unggulan di Kota Cimahi. Sentra-sentra UMKM ini merupakan prasyarat dikembangkannya klaster-klaster dengan mengintegrasikan aktivitas hulu-hilir. Diharapkan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ini akan mampu mendongkrak usaha masyarakat dan mampu menjadi pusat pengembangan produk-produk unggulan tiap wilayah di Kota Cimahi.

Selanjutnya, untuk jumlah WUB (Wirausaha Usaha Baru) di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 15 WUB dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2 WUB.

17. Penanaman Modal

Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan

komunikasi serta transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi.

Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai Rp. 8.953.319.609.542, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp. 24.410.560.302.066. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74.
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp. 8.953.319.609.542	Rp. 9.744.433.463.274	Rp. 24.410.560.302.066

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2020, diolah

Adapun Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal) pada tahun 2017 yaitu sebesar 125 perusahaan, dan mengalami peningkatan ditahun 2019 menjadi 141 perusahaan. Sedangkan Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan pada tahun 2017 yaitu 2 Jenis, jumlah ini meningkat di tahun 2019 menjadi 3 jenis. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.75.
Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	178	141
Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2	3

Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2020, diolah

Diharapkan pelayanan izin usaha akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan pelayanan terintegrasi di MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan menggunakan sistem informasi yang baik sehingga bisa lebih

cepat dan meminimalkan interaksi langsung dengan pemohon perizinan.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Namun jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76.
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2018

INDIKATOR	2017	2018
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	200	50

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2019, diolah

Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif yaitu sekitar 55 persen pada tahun 2019, yang semula hanya 50 persen di tahun 2017.

Tabel 2.77.
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50	52	55

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Selanjutnya untuk cakupan pembinaan olahraga, persentase pembinaan olahraga sumber daya manusia yang terbina (atlet) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 18,18 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 37,27 persen. Sama halnya dengan persentase sumber daya manusia yang terbina (atlet), persentase sumber daya manusia yang terbina (pelatih) juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai 49,14 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,80 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78.
Persentase Sumberdaya Manusia Yang Terbina di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019
1	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18	32,73	37,27
2	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14	58,97	68,80
3	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03	n/a	21,20

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

Tabel 2.79.

Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2	Lapangan Basket	14	Baik
3	Lapangan Bola Volly	52	Baik
4	Lapangan Tenis	39	Baik
5	Kolam Renang	10	Baik
6	Lapangan/Gor Bulutangkis	49	Baik
7	Lapangan Futsal	17	Baik
8	Meja tenis Meja	41	Baik
9	Lapangan Bola/Sepak Bola	26	Baik
10	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11	Fitness	3	Baik
12	Wall Climbing	2	Baik
13	Lapangan/ Gor Serbaguna	11	Baik

Sumber : Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2019
Keterangan : Fasilitas sarana dan p019rasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

Tabel 2.80.

Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	PEMKOT (Bagian Aset)
2	Gor Sangkuring	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3	Lapangan Poral	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

Sumber : Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2019

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada even olahraga tingkat Kota maupun propinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olah raga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh pemkot cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang rusak berat, perlu diketahui stadion sangkuriang dulunya menjadi kebanggaan warga Cimahi dimana stadion sangkuriang merupakan homebase perserikatan Kota Cimahi, Persatuan Sepakbola Kota Cimahi (PERSEKOCI) yang masuk divisi III sampai 2006, serta menjadi lokasi kompetisi sepakbola antar sekolah. Untuk mengembalikan citra stadion sangkuriang sebagai Stadion legenda yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Cimahi perlu di usahakan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki atau merevitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi.

Dari permasalahan mengenai keterbatasan Lapangan Olahraga di Kota Cimahi pada Tahun 2016 Lapangan Krida Cimahi yang selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga khususnya olahraga sepakbola yang berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan satu dari sedikitnya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Cimahi dialihfungsikan menjadi Cimahi Technopark yang didasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal tersebut semakin mengurangi jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kota Cimahi. Sebagai konsukuensi dari kebijakan untuk mengalihfungsikan Lapangan Krida Cimahi menjadi Cimahi *Technopark*, Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk segera mendapatkan lahan pengganti untuk Lapangan Krida tersebut. Hal itu merupakan syarat dari terbitnya rekomendasi dari Kemenpora RI untuk pengalihfungsian tersebut selain dari desakan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Kelurahan Utama yang menuntut tersedianya lapangan olahraga yang sebelumnya biasa dipakai untuk kegiatan olahraga.

19. Statistik

Persentase ketersediaan data statistik daerah Kota Cimahi pada Tahun 2018 sebesar 40, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 36,77.

Tabel 2.81.
Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah di Kota Cimahi
Tahun 2018-2019

INDIKATOR	2018	2019
Persentase ketersediaan data statistik daerah	40	36,77

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2020, diolah

20. Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, online, dan *real time*, SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Agar kinerja layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi menjadi lebih optimal maka perlu melakukan peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan ditunjang oleh penerapan kebijakan peningkatan teknologi dan informasi di setiap instansi pemerintah, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan tepat maka akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu, berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase informasi yang aman di Kota Cimahi pada tahun 2018 hanya 1 persen dan pada tahun 2019 sudah mencapai 100 persen.

21. Kebudayaan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun) sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasikan karya seninya. Hal ini timbul karena keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung kesenian dimaksud. Pengembangan budaya lokal (tradisional) berupa kesenian/tarian dan sastra dapat menjadi potensi wisata di Kota Cimahi.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan, dengan persentase pada tahun 2017 baru mencapai 24 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 45 persen.

Tabel 2.82.
Persentase kebudayaan yang dilestarikan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24	29,63	45

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Pengembangan kebudayaan masih belum optimal seperti masih perlu ditindaklanjuti penggalian nilai-nilai sejarah dan arsitektur pada 23 bangunan-bangunan bersejarah (*heritage*) di Kota Cimahi untuk mendukung Cimahi sebagai kota wisata sejarah (*heritage*) dan wisata kesehatan.

Potensi budaya yang ada bisa dikembangkan melalui berbagai upaya baik penggalian potensi alam, nilai-nilai kesenian maupun sarana-prasarana yang perlu disiapkan sehingga diharapkan pelaku-pelaku budaya dan kesenian dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Tabel 2.83.
Data Cagar Budaya Terverifikasi di Kota Cimahi

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
1	PO2020100600001	SDN Baros Mandiri 4	Jl. Baros No.6 Rt.01 Rw.15 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
2	PO2020091700001	SDN Karang Mekar Mandiri 1	Jl. Jend. Amir Mahmud No. 505 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
3	PO2020091600004	Makam Embah Nurkarim	Jl. Cigugur Tengah Rt02 Rw05 Kota Cimahi Jawa Barat	Situs
4	PO2020090400001	Makam Mbah Tumpang	Jl. Gandawijaya Kota Cimahi Jawa Barat	Situs
5	PO2020090300003	Hotel Tjimahi	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
6	PO2020090300002	Pesawat Dakota C-47 Cimahi	Jl. Gatot subroto No. 6 Kota Cimahi Jawa Barat	Benda
7	PO2020072700003	Rumah Petinggi Belanda No 11	Jl. Sriwijaya No. 11 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
8	PO2020072700002	Kolam Renang Katak Riang (Tirta Yudha)	Jl. Pasir kumeli No. 39 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
9	PO2020072700001	SMP Negeri 1 Cimahi	Jl. Raden Embang Artawidjaja No. 12	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
			Kota Cimahi Jawa Barat	
10	PO2020072400002	SMP Negeri 2 Cimahi	Jl. Sudirman No. 152 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
11	PO2020071500001	Gereja Imanuel	Jl. Pasir kumeli 149 A Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
12	PO2020071300003	Rumah Kediaman Amir Machmud	Jl. Ibu Sangki RT 3 Rw 13 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
13	PO2019111100001	EREVELD LEUWIGAJAH (Makam Kehormatan Belanda)	Jl. Kerkhof Gang Kurba Miharja Leuwigajah Kota Cimahi Jawa Barat Kota Cimahi Jawa Barat	Situs
14	PO2019082100014	Rumah *Van Blommestein* /Gedung Anom/rumah Kebon Kopi Cibeureum	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.89 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
15	PO2019082100008	Masjid Agung Tjimahi	Jl. Kaum No. 2 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
16	PO2019053100011	Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cimahi/Abattoir	Jl. Sukimun, RT 03 RW 04 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
17	PO2019053100010	Masjid Masjid Baiturrokhmah (Masjid KH. Usman Dhomiri)	Jl. KH. Rd. Usman Dhomiri No. 133 RT.04 RW 08 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
18	PO2019052900058	Loji (Pos Penjagaan) Cimahi	Jl. Alun-alun Timur No. 634 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
19	PO2019041600003	Kolam Renang Berkleus	Jl. Sukimun RT 1 RW 4 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
20	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.Nter (Eks Bioskop Rio)	Jl. Pabrik Aci Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
21	PO2019041100822	Stasion Tjimahi (Stasiun Kereta Api Cimahi)	Jl. Stasion No. 1 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
22	PO2019041100637	Penjara Militer Poncol (MASMIL)	Jl. Poncol Selatan No. 24 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
23	PO2019041100482	Gereja Santo Ignatius Cimahi	Jl. Raya Baros No. 8 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
24	PO2019041000016	Gedung *The Historich* X' Gedung Sudirman	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
25	PO2015061200050	Rumah Sakit Dustira	Jl. dr. Dustira No.1 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

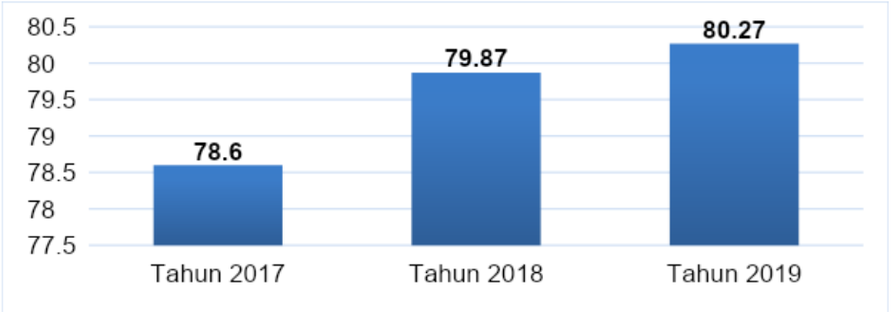
22. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penyedia kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dimana imej masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan minat baca rendah perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu melalui perpustakaan diharapkan kemampuan literasi masyarakat khususnya di Kota Cimahi dapat meningkat.

Dari data yang tersedia, diketahui bahwa tingkat Kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota pada tahun 2017 mencapai 78,6 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga menjadi 79,87 persen dan di tahun 2019 menjadi 80,27 persen.

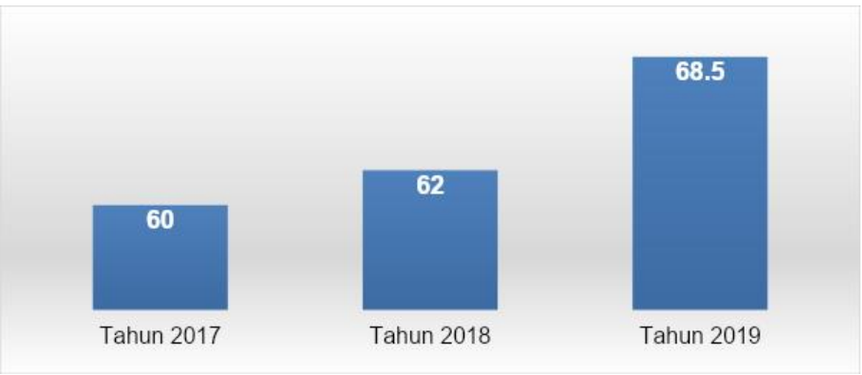
Gambar 2.88.
Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota di Kota Cimahi Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2020, diolah

Sama halnya dengan Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota, Persentase sarana baca masyarakat yang aktif juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 60 persen, tahun 2018 mencapai 62 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,5 persen.

Gambar 2.89.
Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2020, diolah

Dalam pengembangan perpustakaan terdapat beberapa komponen yang harus ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sistem layanan, penyempurnaan koleksi, dan fasilitas pendukung termasuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*).

23. Kearsipan

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Cimahi pada Tahun 2018 hanya 8 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 18,50 persen. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah. Sementara itu, untuk Persentase sumber daya pelayanan kearsipan pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 100 persen.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan diantaranya adalah melaksanakan diklat teknis serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan. Untuk penanganan kearsipan kedepan diperlukan terobosan untuk membangun sistem kearsipan digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang selama ini terjadi.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata di Kota Cimahi di dominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor pariwisata di Kota Cimahi belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota.

Di Kota Cimahi telah terdapat 3 event tingkat kota bahkan internasional diantaranya Baros International Animation Festival (BIAF), *Gatsoe Street* Carnival (GATREEC), dan pekan Seren Taun Cireundeu. Event - event ini berpotensi menjadi bangkitan ekonomi lokal dan dapat menjadi wadah ekspresi kreativitas warga

Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki 2 bus sakoci yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk tur keliling Kota Cimahi. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan kembali manajemen, fungsi dan manfaat dari Sakoci tersebut agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi perekonomian kota.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, dimana pada tahun 2017 baru mencapai 546 Wisatawan, dan mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 392 wisatawan. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi 899 wisatawan. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 3.526 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 hingga menjadi 43.707 wisatawan.

Tabel 2.84.
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)	546	392	899
Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)	3.526	5.852	43.707

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2020, diolah

Untuk fasilitas Hotel/Penginapan pada tahun 2019, Total keseluruhan Hotel/Penginapan di Kota Cimahi sebanyak 8 buah (Hotel berbintang/Non Bintang/Penginapan) dengan jumlah kamar seluruhnya yaitu 193 kamar dengan kapasitas tempat tidur berjumlah 308 tempat tidur.

Tabel 2.85.
Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur Menurut
Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH HOTEL/PENGINAPAN	KAPASITAS	
			KAMAR	TEMPAT TIDUR
1.	Cimahi Selatan	1	61	114

NO	KECAMATAN	JUMLAH HOTEL/PENGINAPAN	KAPASITAS	
			KAMAR	TEMPAT TIDUR
2.	Cimahi Tengah	5	103	161
3.	Cimahi Utara	2	29	33
	Total Kota Cimahi	**8**	**193**	**308**

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Selanjutnya untuk Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2019 sejumlah 54 buah, jumlah tersebut masih sama dengan jumlah pada tahun 2018.

Tabel 2.86.
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan
di Kota Cimahi Tahun 2016-2019

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019
1.	Cimahi Selatan	n/a	n/a	3	3
2.	Cimahi Tengah	n/a	n/a	29	29
3.	Cimahi Utara	n/a	n/a	22	22
	Total Kota Cimahi	n/a	n/a	**54**	**54**

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Pada tahun 2018 dan 2019 melalui inovasi *gastrodiplomacy* Pemerintah Kota Cimahi bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diantaranya UNPAD, UNPAR maupun ISBI dan Uni Eropa telah mengembangkan kewirausahaan sosial di 20 *homestay* di Cireundeu, Meskipun demikian, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kota. Hal ini disebabkan wisata yang dikembangkan merupakan hal yang sakral dan tidak boleh dikomersialkan keterlibatannya pun sangat terbatas pada kelompok warga tertentu. Untuk itu perlu didorong inovasi pengembangan pariwisata profan yang dapat dikomersialkan tetapi masih tetap bercirikhaskan wilayah Cireundeu atau masih terkait dengan budaya konsumsi Rasi seperti seni pertunjukan dan ekowisata (*tracking dan camping*).

2. Pertanian

Sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Meskipun demikian harus tetap dilakukan upaya pengembangan pada sector ini.

Melihat luas lahan yang ada di Kota Cimahi, Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Cimahi, terdapat 106,42 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis pada tahun 2015 dan 2016, serta 119 hektar pada tahun 2017 hingga 2019. Hal tersebut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.87.
Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2015-2018

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2015	106,42	28	134,42	714	279	9	n/a
2016	106,42	28	134,42	247,32	264	n/a	n/a
2017	119	17	136	n/a	n/a	n/a	n/a
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	-	184	-	-

Sumber : BPS dan Dispangtan, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang terbatas. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian. Angka produktivitas pertanian di Kota Cimahi terbilang cukup rendah. Produk-produk pertanian pangan seperti padi, palawija dan hortikultura masih menjadi produk dominan yang dihasilkan Kota Cimahi, namun demikian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ketiganya mengalami tren penurunan hasil produksi.

Untuk produksi padi selama periode tahun 2015 – 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data BPS (Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2018 – 2020) Produksi padi di Kota Cimahi Tahun 2015 sebesar 2.242 dan mengalami penurunan menjadi

406,54 ton di tahun 2019. Dengan luas panen yang menurun tajam dari 325 Ha menjadi 70,93 Ha, produktivitasnya pun mengalami penurunan dari 6,70 Ton/Ha menjadi 5,73 Ton/Ha. Namun apabila melihat upaya selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2018-2019, produksi padi di Kota Cimahi mengalami peningkatan dari 393,82 ton menjadi 406,54 ton dan produktivitasnya pun meningkat dari 5,55 ton/ha menjadi 5,73 ton/ha. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pengembangan pola penanaman pertanian yang ada di Kota Cimahi.

Rendahnya hasil produksi pertanian Kota Cimahi di atas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang.

Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi dan cenderung menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Cimahi Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Sektor pertanian hanya menyumbangkan sekitar 0,20 persen dari total PDRB ADHK Kota Cimahi yang mencapai 33.588 milyar rupiah pada Tahun 2019. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32,808 milyar rupiah seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89.

Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian Kota Cimahi Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB ADHK sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) terhadap PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	33,136	32,366	32,632	32,808	33,588

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Tabel 2.90.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	52,09 (CC)	52,09 (CC)	60,01 (B)

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2019, diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHK sektor pertanian mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Namun angka tersebut masih jauh dibawah capaian sektor lain. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan.

Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian menjadi sasaran kerja sektor. Adapun strategi tersebut antara lain pembentukan sentra ikan hias di Cibabat; sentra susu sapi dan tauge di Cipageran; dan pengembangan produk pertanian diantaranya adalah pengembangan buah Durian Kamajaya. Ke depannya akan dikembangkan pula tanaman herbal dan produk turunannya serta madu dan lebah di beberapa lokasi agroforestri di Bukit Padakasih Cibeber, Cimenteng, Legok Jawa, dan ex-TPA Leuwigajah. Strategi pengembangan rantai

nilai (hilirisasi) produk pertanian tersebut dapat dilakukan untuk dapat mendorong lahirnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM).

a. Sub Sektor Peternakan

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Selain itu terdapat hewan ternak lain yang juga dibudidayakan seperti sapi potong, kerbau, domba, kambing, sapi perah dan kuda.

Tabel 2.91.
Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging di Kota Cimahi
Tahun 2015-2019

No	Jenis Unggas	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ayam Buras	35.381	36.088	-	16.524	-
2	Ayam Ras Pedaging	82.122	106.759	-	37.694	37.694
3	Ayam Petelur	-	1.130	-	-	-
4	Itik	11.719	11.953	-	1.823	2515

Sumber : Statistik Daerah Kota Cimahi, 2020

Ternak domba adalah salah satu komoditas ternak terbanyak. Selain ternak domba, Kota Cimahi juga memiliki jumlah ayam pedaging yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah. Secara lebih rinci data pada tabel 2.91. memuat jumlah dan jenis komoditas unggas di Kota Cimahi pada tahun 2019. Sedangkan untuk komoditas unggas, jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukan adanya beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan.

Tabel 2.92. menunjukan bahwa di tengah keterbatasan lahan yang menjadi kendala sektor pertanian di Kota Cimahi, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan dari sub sektor peternakan terutama di Kecamatan Cimahi Utara yang

merupakan wilayah paling potensial untuk dapat dioptimalkan sub sektor peternakannya.

Tabel 2.92.
Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak di Kota Cimahi Tahun 2019

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi Potong	210
2	Kerbau	6
3	Domba	3183
4	Kambing	108
5	Sapi Perah	358

Sumber : Statistik Daerah Kota Cimahi, 2020

Tabel 2.93. menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 produksi nya mencapai 100 ton, dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 1.004 ton, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 712,44 ton.

Tabel 2.93.
Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Produksi Hasil Peternakan (Daging)	100	1.004	712,44
Produksi Hasil Peternakan (Susu)	750	823	757,857
Produksi hasil tanaman padi (ton)	1.674,13	1.559,4	1.693,2

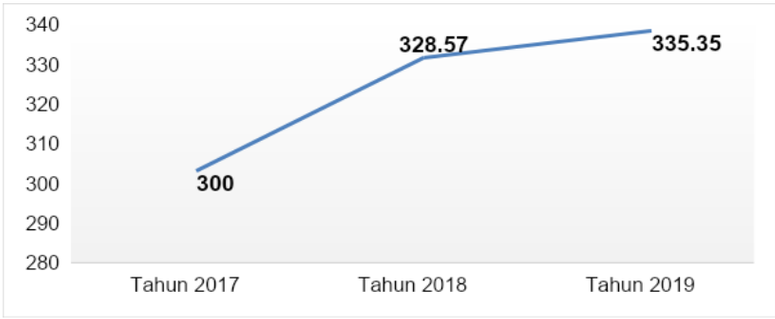
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2020, diolah

b. Sub Sektor Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Cimahi sangat kecil. Persoalan tersebut dikarenakan secara topografi wilayah yang bukan daerah pantai serta terbatasnya lahan untuk budidaya ikan hias. Produksi perikanan hanya disumbang dari perairan umum dan budidaya kolam. Jika

dibandingkan dengan daerah lain atau di Provinsi Jawa Barat, tingkat produksi perikanan tergolong rendah. Akan tetapi pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi, dimana pada tahun 2017 Jumlah produksi perikanan budidaya baru mencapai 300 ton, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 335,35 ton.

Gambar 2.90.
Produksi Perikanan Budidaya di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

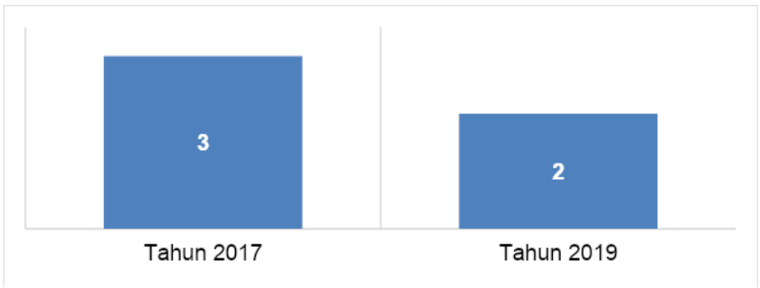


Sumber : Dinas Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020, diolah

Selain perikanan budidaya, di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak terlalu memakan lahan dan akan cocok bila dikembangkan di wilayah perkotaan yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Saat ini usaha tersebut sudah mulai dirintis melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) untuk membantu masalah bibit. Akan tetapi strategi tersebut belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Kedepan, Kota Cimahi diharapkan dapat mulai melirik usaha ikan hias berbasis kerakyatan berupa sentra ikan hias.

Di Kota Cimahi sendiri pada tahun 2017 baru terdapat 3 jenis ikan hias yang dikembangkan, dan itu juga mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi hanya 2 jenis.

Gambar 2.91.
Jenis Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

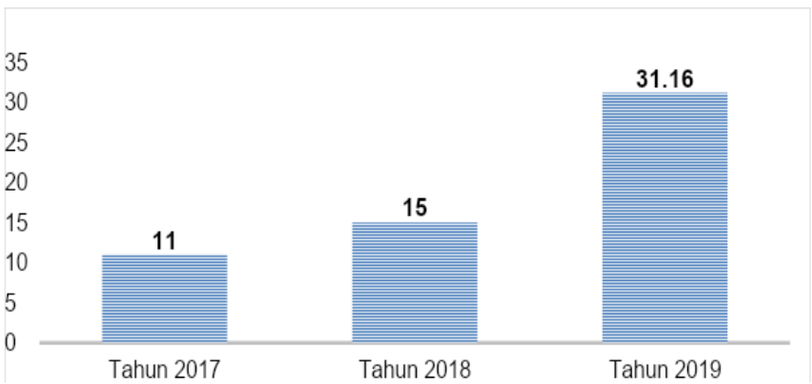


Sumber : Dinas Pertanian Kota Cimahi, 2020, diolah

c. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 11 Kg/Kap/Thn, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 31,16 Kg/Kap/Thn. Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 2.92.
Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019



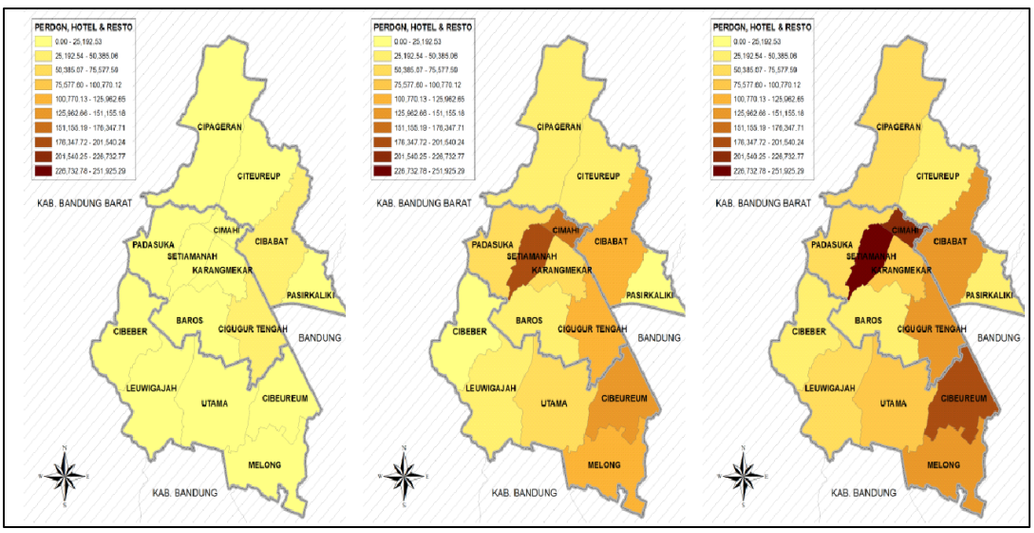
Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2020, diolah

3. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta diatas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan.

Gambaran pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Cimahi sebagai berikut :

Gambar 2.93.
Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan

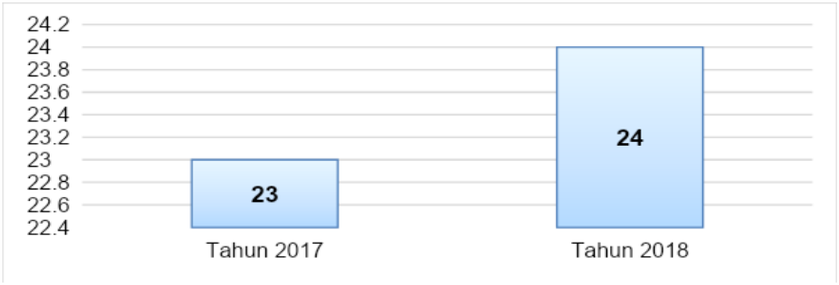


Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2017

Pengembangan di sektor perdagangan diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana pada tahun 2020 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional

(4 diantaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai dengan SNI. Adapun untuk promosi produk UKM/IKM, Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional juga masih terbilang rendah meskipun mengalami peningkatan di tahun 2018 yang berjumlah 24 IKM/UKM.

Gambar 2.94.
IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level Lokal, Regional Dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2017-2018



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Cimahi, 2020, diolah

4. Perindustrian

Sektor industri menjadi *leading* sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45 persen terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 2.94.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	46,78	46,61	45,88	45,69	47,81

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada Tahun 2019. Sektor Industri Pengolahan mendominasi struktur perekonomian Kota Cimahi selama beberapa tahun terakhir, bahkan jauh diatas sektor lainnya.

Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Akan tetapi seiring dengan menurunnya jumlah industri di Kota Cimahi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pun mengalami penurunan setiap tahunnya seperti yang tergambar pada tabel berikut ini :

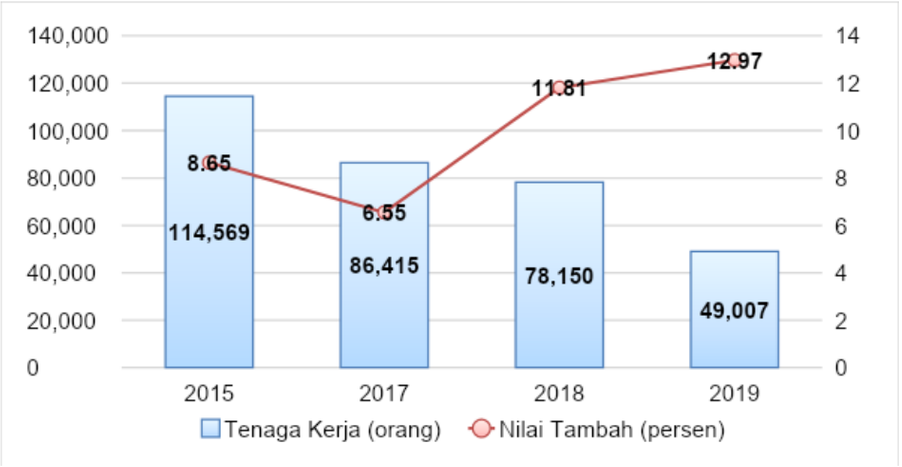
Tabel 2.95.
Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2017	2018	2019
Jumlah Industri	95	236	207	138
Tenaga Kerja (orang)	114.569	86.415	78.150	49.007

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri di Tahun 2018-2019 setelah sebelumnya mengalami perlambatan sangat berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi. Akan tetapi peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tersebut tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.55 jumlah tenaga kerja pada industri sedang besar tahun 2019 mengalami penurunan 37,29 persen dari tahun sebelumnya di saat nilai tambah bruto sektor industri pengolahan mengalami peningkatan.

Gambar 2.95.
Tenaga Kerja Industri Sedang Besar dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kota Cimahi Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya.

Tabel 2.96.
Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Tahun 2018 dan 2019

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM	
		2018	2019
1	Uji Nilai Gizi dan Kadaluarsa Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman Kota Cimahi	82	66
2	Desiminasi dan Cetak Desain Merk dan Kemasan Produk IKM Klaster Makanan dan Minuman	80	56
3	Festival Seleksi *Food Ethnic* dan Makanan & Minuman Halal Tingkat Kota Cimahi	100	147
4	*Workshop* Diversifikasi Olahan Pangan	80	104

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM	
		2018	2019
5	*Workshop Good Manufacturing Practices* (GMP)	-	25
6	Peningkatan Standar Mutu Produk bagi Pelaku IKM Makanan dan Minuman (PIRT, Sertifikat Halal, HAKI)	50	115
7	*Workshop* Teknologi Industri di Bidang Pengolahan Pangan	40	-

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2020, diolah

Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreatifitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep *green industry* (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi.

Gedung *Baros Information Technology Creative Centre* (BITC) sebagai bagian dari Kawasan Cimahi Techno Park saat ini menjadi salah satu kawasan pusat pengembangan sektor industri digital kreatif di Kota Cimahi dan telah menjadi salah satu percontohan nasional kawasan perkantoran bersama (*co working space*) yang dikelola oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh UPT Cimahi *Technopark*).

Pada Gedung BITC saat ini, terdapat aktifitas bisnis para *start up* pelaku industri digital kreatif dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.97.

Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITc

Jumlah Tenant	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Konstribusi PAD (Retribusi Daerah) [Rp]		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
16 perusahaan industri digital kreatif	94 orang	278.897.500	529.683.500	488.063.150

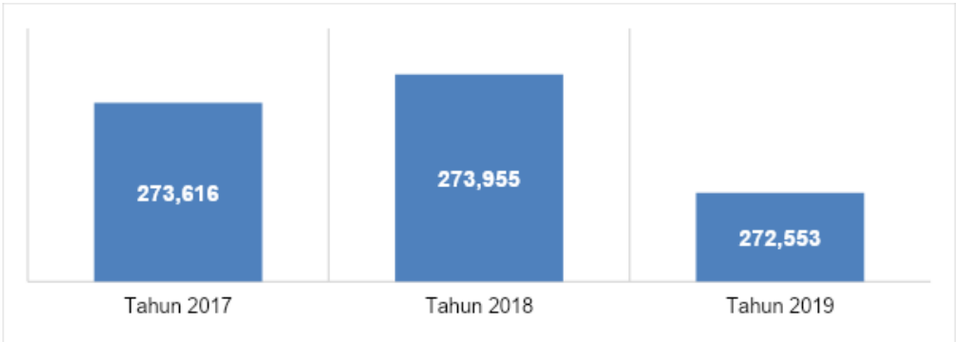
Sumber : Disdagkoperin, 2020

Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan.

5. Transmigrasi

Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi pada tahun 2017 sejumlah 273.616 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 273.955 orang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 272.553 orang.

Gambar 2.96.
Angka Kesempatan Kerja Di Kota Cimahi Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Transmigrasi Kota Cimahi, 2020, diolah

Akan tetapi, pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi dinilai tidak efektif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengiriman beberapa keluarga ke daerah tujuan transmigrasi, dari 5 KK yang dikirimkan ada 2 KK yang kembali pulang. Meskipun masih ada keluarga yang tetap bertahan di daerah transmigrasi masih memerlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Cimahi. Monitoring terhadap keluarga transmigran terakhir dilaksanakan Tahun 2018. Pada Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan dari pusat bahwa untuk Program Pengiriman Transmigran dilakukan

dengan *sharing* biaya, sedangkan pengiriman sebelumnya biaya pengiriman berasal dari pusat. Meskipun sudah ada 2 KK calon transmigran hasil sosialisasi, Kota Cimahi tidak jadi mengirimkan berdasarkan dari hasil evaluasi ketidakefektifan program transmigrasi ini.

2.3.3. Fungsi Pendukung

1. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Area-area perubahan tersebut meliputi : mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.98.
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	63,99 (B)	60,01 (B)

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2019 diolah

Namun demikian untuk kedepan Pemerintah Kota Cimahi akan mengikutsertakan 6 (enam) SKPD, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, RSUD Cibabat, Dinas Perhubungan, Kecamatan Cimahi Utara Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan dalam upaya masuk kedalam predikat zona integrtitas menuju WBK/WBBM. Hal ini sejalan dengan sakah satu hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB terkait dengan Reformasi Birokrasi.

b. SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari CC di Tahun 2016 menjadi B mulai Tahun 2017 sampai dengan 2019. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.99.
Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2016-2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Nilai SAKIP Kota Cimahi	50,27 (CC)	60,68 (B)	63,99 (B)	66 (B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

c. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun nilai LPPD Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.100.
Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	n/a	3,3590 (Sangat Tinggi)	3,3274 (Sangat Tinggi)	3,4624 (Sangat Tinggi)	Tinggi

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, 2020
** Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2020*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi pada Tahun 2016 mendapatkan Skor 3,3590 dengan status Sangat Tinggi, pada Tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 3,3274 dengan status tetap Sangat Tinggi, dan Tahun 2018 meningkat menjadi 3,4624 dengan status Sangat Tinggi. Hal ini dipengaruhi salah satunya adalah terkait dengan hasil penilaian terhadap capaian IKK yang meningkat, sehingga berpengaruh terhadap penilaian LPPD secara keseluruhan.

d. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin.

Oleh karena itu BKPSDMD melakukan secara berkesinambungan melakukan inventarisasi dan validasi terhadap data terkait

dengan 4 dimensi yang dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 2.101.
Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Indeks Profesionalitas ASN	75	68	Sementara di sistem IPPASN 53,14 BKPSDMD sedang berupaya untuk mencapai target yang ditetapkn di angka 54

Sumber : BKSDM Kota Cimahi, 2020, diolah

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat merupakan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.102.
Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Survey Kepuasan Masyarakat	76	80,99	80,75

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 76 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 80,99 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 80,75 persen.

Bahwa berdasarkan data, untuk SKM mengalami penurunan, dengan demikian sangat dimungkinkan ada *gap persepsi* antara pemberi layanan dengan yang menerima layanan. Menjadi tugas bersama agar setiap penerima layanan menerima informasi yang utuh terkait dengan layanan yang diberikan untuk mengurangi gap persepsi termaksud.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam menfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Kota Cimahi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.103.
Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Cakupan Kinerja DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya (%)	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cimahi, 2019, diolah

2.3.4. Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Kinerja pada fungsi perencanaan pembangunan Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan Kota Cimahi telah baik dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.104.
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020, diolah

2. Keuangan

a. Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.105.
Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Persentase ASN yang dibina (%)	100	100	100

NO	URAIAN	2017	2018	2019
2	Persentase ASN yang kompeten (%)	75	60	41
3	Persentase pelanggaran disiplin (%)	10	0,6	5
4	Penilaian kinerja pegawai (SKP) (%)	76	87	26

Sumber : BPSDM Kota Cimahi, 2020, diolah

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi baru secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah bidang litbang di Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2019. Adapun strategi pembinaan urusan ini lebih diarahkan kepada 3 hal, yaitu :

a. Penyelenggaraan penelitian bagi penyusunan kebijakan pembangunan;
b. Penelitian yang bersifat terapan dan implementatif dengan membuat beberapa *pilot project* di beberapa lokasi (lokus) seperti pengembangan kewirausahaan sosial melalui seni pertunjukan di Cireundeu, pengembagan *agroforestry* di Bukit Padakasih Cibeber dan Legok Jawa Cipageran, penanganan sampah dengan metode *black soldier* flies di Kelurahan Padasuka; dan
c. Pengembangan inovasi dan daya saing Kota Cimahi telah memiliki *science park (technopark*) dan juga bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam serta lembaga kerjasama hibah riset internasional dari Uni Eropa maupun *Value-chain Capacity Building Network* (VCBN).

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh indikator Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan, dimana pada tahun 2018 angkanya sebesar 25 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 75 persen.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi organisasi dan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pelayanan publik di Kota Cimahi akan dikembangkan konsep corporate university (CorpU). Pelaksanaan CorpU bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pemerintahan lainnya (Kementrian

atau Provinsi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta baik nasional maupun internasional atau dengan lembaga training lainnya.

Tabel 2.106.
Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan (%)	n/a	25	75

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2020, diolah

Pengelolaan dan koordinasi urusan penelitian ataupun kajian di Cimahi dilakukan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, kajian/penelitian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED. Kajian bagi penyusunan kebijakan pembangunan (termasuk Indeks Inovasi Daerah/IID, Indeks Daya Saing Daerah/IDSD dan indeks pengelolaan keuangan daerah/IPKD) dan pengembangn ilmu pengetahuan dilakukan oleh Bidang Litbang Bappeda, sementara kajian penyusunan perencanaan pembangunan oleh bidang-bidang di Bappeda dan yang lebih teknis oleh SKPD terkait.

Sejak berdirinya lembaga kelitbangan Kota Cimahi pada tahun 2019 telah menerima 4 penghargaan dalam bidang inovasi dan penelitian diantaranya :

a. Juara I tahun 2019 tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi (Budhipraja);
b. Juara 5 Kota dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019); dan
c. Masuk Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2019).

Mulai tahun 2021 Kota Cimahi juga akan mengukur indeks Inovasi Pengelolaan Keuangan daerah (IPDK). Direncanakan pada tahun 2020 ini Dokumen Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Cimahi yang didampingi oleh BPPT akan selesai dengan mengusung Cimahi sebagai kota Wisata Heritage dan Wisata Kesehatan melalui industri kreatif.

Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan kerjasama dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi serta pemberi hibah penelitian khususnya dalam pelaksanaan penelitian terapan berupa *pilot project* menjadi target kerja kelitbangan hingga tahun 2022.

Penguatan bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai seperti fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan.

2.3.5. Pengawasan

Kinerja pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.107.
Indikator Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Nilai AKIP	60,68	63,99	66,00
2	Persentase PD dengan hasil evaluasi LAKIP kategori BB	n/a ikunya baru ditetapkan 2019 saran - bkn tdk ada data	n/a	3,57%
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4	Nilai Maturitas SPIP	1,268	1,268	1,268

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2020, diolah

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Inovasi biasanya berkembang dalam klaster-klaster industri karena di dalam klaster industri inilah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan inovasi (*knowledge spillover and innovation diffusion*). Kota Cimahi dari sejak tahun 2012 mencoba mengarahkan pembangunan ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan membangun sentra. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/ lingkungan hidup, pendidikan (formal/informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (*stakeholder*) dalam proses pembangunan klaster/sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan SIDa, Kota Cimahi membangun Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*). Gedung ini diharapkan dapat memicu bangkitnya aktivitas ekonomi kota

khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya para pelaku usaha baru (*startup firms*) serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*).

Pengembangan kawasan BITC juga diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan *startup firms* dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusaha. Kota Cimahi akan mengembangkan sebuah Taman Teknologi (*Technopark*). Keberadaan Cimahi *Technopark* diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang implementatif (*applied research*).

Untuk meningkatkan budaya inovasi dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi maka Kota Cimahi akan melaksanakan apresiasi dan kompetisi inovasi antar SKPD, umum dan perguruan tinggi. Juga mendorong tumbuhnya inovasi organisasi dan pelayanan public bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cimahi bekerjasama dengan kantor pemerintahan lainnya, perguran tinggi dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan nasional maupun internasional.

Berkaitan pengukuran indeks daya saing terdapat tools alat ukur diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Radar Sistem Inovasi Daerah (RIDa) dua alat ukur ini dikembangakn oleh Kemenristek/BRIN. Pada tahun 2019 Kota Cimahi menempati urutan ke - 1 secara naisonal dan Tahun 2020 menmpati kurutan ke - 3 secara nasional untuk wilayah perkotaan. Pengukuran RIDa akan dimulai tahun 2021.

1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Berlaku 2010 Kota Cimahi pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.108.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2015-2018

(Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	17.165,96	18.735,56	20.276,01	21.918.08	23.321,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	50,95	55,91	61,83	71,78	75,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.434,09	1.489,41	1.861,81	1.0485,88	11.319,00
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.179,20	8.755,90	9.485,98	1.0485,88	11.319,00
Perubahan Inventori	867,38	979,44	1.023,99	1.096,71	1.135,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.050,95	-5.452,41	-6.119,17	-6065,22	-5.441,99
PDRB	**22.646,62**	**24.563,81**	**26.590,46**	**29.240,03**	**32.226,02**

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran

PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga Tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan

ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Cimahi pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.109.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2015-2018

(Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	13.459,90	14.150,22	14.815,38	15.505,44	16.146,36
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	40,36	43,07	45,59	51,78	53,41
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	980,93	983,75	1.058,15	1.079,54	1.118,43
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.190,59	6.469,50	6.846,37	7.379,43	7.770,13
Perubahan Inventori	609,77	629,65	632,51	654,25	664,84
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.405,11	-3.394,03	-3.490,87	-3.477,86	-3.111,34
PDRB	**17.876,44**	**18.883,16**	**19.907,13**	**21.192,60**	**22.641,83**

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

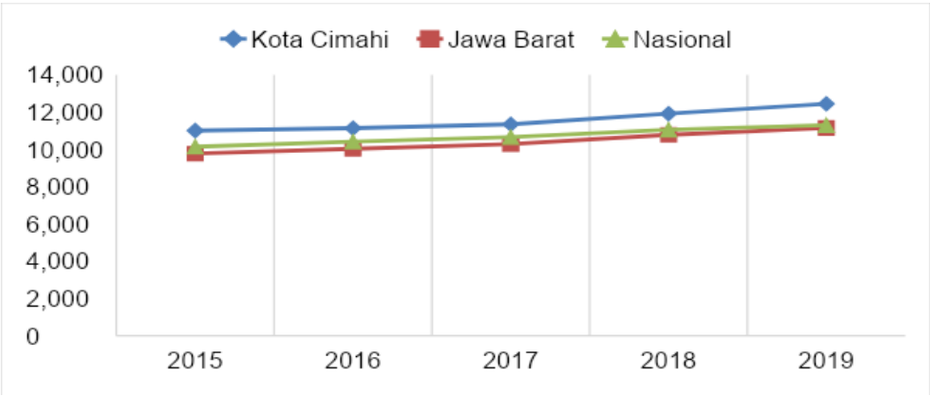
3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur standar hidup layak (*decent standard of living*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*/ppp). Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100, sedangkan penghitungan PPP menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selama periode 2015-2019 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,12 persen/tahun. Pada Tahun 2019 mencapai 12.448 Ribu Rupiah/Orang, yang berarti naik sebesar 4,42% dibanding tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Cimahi selalu berada di atas Jawa Barat dan Nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan ketiga tingkat pemerintahan ini menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu meningkat setiap tahun pada periode 2015–2019.

Gambar 2.97.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : 1. BPS Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah
2. BPS RI, 2020, diolah

4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Cimahi, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Cimahi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.110.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Cimahi
Tahun 2015-2018

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Total Konsumsi Rumah Tangga				
ADHB (Juta Rp)	17165959,97	18735560,28	20276012,95	21934813,51
ADHK 2010 (Juta Rp)	13459896,53	14150217,41	14815382,38	15490704,53
Proporsi terhadap PDRB				
(% ADHB)	75,80	76,27	76,25	75,66
Kapita (Ribu Rp)				
ADHB (Rp)	29.264.482,20	31.540.232,21	33.731.569,93	36.088.214,12
ADHK 2010 (Rp)	22.946.395,26	23.821.072,67	24.647.158,58	25.486.054,93
Pertumbuhan				
Total konsumsi RT	9,48	9,14	8,22	8,18
Perkapita	8,07	7,78	6,95	6,99
Jumlah penduduk (orang)	**586.580**	**594.021**	**601.099**	**607.811**

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2014-2018

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya

belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kota Cimahi menghabiskan dana sekitar 17165.959,97 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 18.735.560,28 juta Rupiah (2016); 20.276.012,95 juta Rupiah (2017); dan 21.934.813,51 juta Rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 8,18 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,48 persen.

5. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diindikasikan dengan beberapa indikator, yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan Persentase Bangunan Berizin. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Cimahi, persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai 60,92% pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan ketaatan seluruh masyarakat Cimahi dalam mematuhi peraturan tata ruang.

Tabel 2.111.
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	58,82%	64,71%	76,47%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah

Sementara indikator persentase bangunan berizin belum optimal pencapaiannya walaupun trennya meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2019, persentase bangunan berizin mencapai 30,50%.

Tabel 2.112.

Persentase Bangunan Berizin di Kota Cimahi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Persentase Bangunan Berizin	29,60%	29,84%	30,50%

Sumber : Dinas PUPR Kota Cimahi, 2020, diolah

6. Lama Proses Perijinan

Dalam rangka perkembangan iklim investasi di Kota Cimahi, maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Waktu penyelesaian izin ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar terpenuhi. DPMPTSP Kota Cimahi melayani 64 jenis perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya diperkenankan menarik retribusi dari 3 (tiga) jenis objek yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

7. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Sektor Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar untuk Kota Cimahi. Ada 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Adapun rincian jenis pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.113.

Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi

NO	JENIS PAJAK	URAIAN
1	Pajak Hotel	Hotel Melati Satu
		Hotel Bintang Dua
		Losmen /Rumah Penginapan /Pesanggrahan /Hoste /Rumah Kos
2	Pajak Restoran	Rumah Makan
		Katering
3	Pajak Hiburan	Tontonan Film/Bioskop
		Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

NO	JENIS PAJAK	URAIAN
		Permainan Ketangkasan
		Kolam Renang
4	Pajak Reklame	Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ megatron
		Reklame Kain
		Reklame Melekat/Stiker
		Reklame Berjalan
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan PLN
		Pajak Non PLN/Gen Set
6	Pajak Parkir	Pajak Parkir
7	Pajak Air	Pajak Air
8	Pajak BPHTB	Pajak BPHTB
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Pajak PBB

Sumber : Bapenda Kota Cimahi, 2020, diolah

Selain pajak, retribusi juga menjadi salah satu sumber PAD terbesar untuk Kota Cimahi. Ada 3 (tiga) jenis dan 12 (dua belas) macam retribusi yang diberlakukan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114.

Jenis dan Macam Retribusi Daerah Kota Cimahi

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
1	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rawat Jalan
			Spesialistik THT
			UGD
			Tindakan Medis
			Laboratorium/ Radiologi
			Pemeriksaan kesehatan (keuring)
			Buta Warna
			Pembinaan Haji
			Tes Kebugaran
			Jamkesmas
			JKN Non Kapitasi
			JKN
		Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Persil
			Pertokoan
			Pasar
			Industri
			Rumah Sakit
		Retribusi	Pemakaman Jenazah

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
		Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Perpanjangan Waktu Pemakaian Tanah
			Pemindahan Kerangka
			Tanah Cadangan
		Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Mobil Barang
			Kendaraan Roda Dua
			Roda Empat
			Mobil Box
		Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pasar
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Uji Pertama / Uji Awal
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/Mobil Penumpang
			Uji Berkala
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/Mobil Penumpang
			Pemeriksaan Teknis
			Mobil Barang/ Khusus
			Bus/ Mobil Penumpang
			Kendaraan Bermotor Roda 2
			Denda Keterlambatan
			Mobil Barang
			Mobil Bus
			Buku Uji
			Tanda Uji
			Tanda Samping Kendaraan
			Cat
			Stiker
			Uji Asap tebal (Smoke)/ Uji Emisi (CO/HC)
			Penerbitan Surat Ket. Rubah Bentuk Kendaraan
			Perubahan thd bak Muatan
			Perubahan thd Karoseri KB
			Surat Keterangan Penilaian Teknis
			Surat Keterangan Rubah Status
			Dari Umum ke tidak Umum
			Dari tidak Umum ke Umum
			Surat Keterangan numpang uji keluar daerah
			Surat Keterangan mutasi keluar
			Penggantian buku uji yang hilang/ rusak
			Penggantian tanda samping
			Cat
			Stiker

NO	JENIS	MACAM	URAIAN
		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Terminal	Kendaraan Umum
			Non Bus
			Ret. Kios
			Sewa Kios
			Ret. MCK
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rusunawa Cigugur Tengah
			Rusunawa Melong
			Rusunawa Leuwigajah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Sampai Dengan 10 Meter
			11 Sampai Dengan 20 Meter
			21 Sampai Dengan 30 Meter
			31 Sampai Dengan 40 Meter
			41 Sampai Dengan 50 Meter
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rumah Tinggal
			Industri/Perusahaan
			Sosial
		Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	Ijin Trayek & Kartu Pengawasan

Sumber : Bapenda Kota Cimahi, 2020, diolah

8. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Pada kurun waktu 2017-2019, tren realisasi investasi mengalami fluktuasi. Hingga saat ini terdapat 21 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha termasuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal yang salah satu sasarannya adalah untuk menciptakan investasi yang kondusif. Dukungan terhadap upaya tersebut juga dilakukan dengan menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) diharapkan iklim investasi di Kota Cimahi akan menjadi lebih efisien karena penggunaan sistem yang terintegrasi.

9. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/ S2/ S3)

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sangat besar yang seharusnya menjadi

modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi. Peningkatan kuantitas tenaga kerja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja.

Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK. Jumlah pencari kerja paling banyak pada urutan kedua adalah jenjang pendidikan S1/S2, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.115.
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						
	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2	Jumlah
2015	17	143	2.208	138	1.478	1.491	5.475
2016	20	149	1.714	16	317	443	2.659
2017	6	110	1.705	20	172	244	2.257
2019*	11	82	2.339	212		402	3.046

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2017, diolah
**Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2020, diolah*

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Latar belakang pendidikan saja belum menjadi syarat cukup untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian yang bersertifikasi telah menjadi syarat penting bagi tenaga kerja untuk dapat memasuki pasar kerja. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

10. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya. Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) dan dikalikan 100.

Tabel 2.116.
Rasio Ketergantungan di Kota Cimahi Tahun 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Ketergantungan	18,54	18,58	18,59	18,49	15,23

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Walau demikian, di tahun 2016 dan 2017 sempat terjadi perlambatan penurunan. Setelah tahun 2017, rasio ketergantungan kembali menurun dan bahkan cukup signifikan turun pada tahun 2019 menjadi 15,23 persen. Ini berarti 1 penduduk usia produktif di Cimahi menanggung beban 15 orang tidak produktif.

Tabel 2.117.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	5,43	5,63	5,43	5,68	6,84
2	Laju inflasi	Persen	3,93	2,93	3,26	3,18	2,78
3	PDRB per kapita	Juta	38,60	41,35	44,24	48,11	52,46
4	Indeks Gini	Indeks	0,41	0,42	0,37	0,364	0,363

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5	Persentase penduduk miskin	Persen	5,84	5,92	5,76	4,94	4,39
6	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	34.090	35.070	34.530	29.940	26.910
7	Garis Kemiskinan	Rp	386.513	411.665	433.759	462.969	484.804
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,91	0,71	1,10	0,84	0,60
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,21	0,14	0,35	0,23	0,14
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,42	76,69	76,95	77,56	78,11
11	Indeks Kesehatan	Nilai	n.a	n.a	82,45	82,69	82,91
12	Indeks Pendidikan	Nilai	n.a	n.a	74,66	74,72	74,81
13	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,75	13,76	13,77	13,79
14	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,78	10,89	10,93	10,94	10,95
15	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,58	73,59	73,61	73,75	73,89
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,09	n/a	65,33	64,49	63,39
17	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	282.539	n/a	297.050	297.539	296.513
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9	n/a	8,43	7,93	8,08
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
I.	**URUSAN WAJIB**						
1	**Pendidikan**						
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6	Persen	75	76	76	81,4	35,24
1.2	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Persen	98,92	106,91	101,69	95,22	102,54
1.3	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	Persen	89,08	89,28	88,73	79,74	96,29
1.4	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	97,08	77,98	95.73	89,67	96,45
1.5	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	68,66	73	75.29	77,41	78,81
1.6	Rasio Guru-Murid SD	Rasio	1:22	1:26	1:24	1:28	1:25
1.7	Rasio Guru-Murid SMP	Rasio	1:19	1:23	1:21	1:22	1:21
1.8	Rasio Guru-Murid SMA	Rasio	1:13	1:15	1:16	1:18	1:17
1.9	Rasio Guru-Murid SMK	Rasio	1:17	1:21	1:23	1:23	1:23
1.10	Persentase Kualifikasi Guru SD	Persen	93	89,5	89	92,2	93,7
1.11	Persentase Kualifikasi Guru SMP	Persen	93	92,3	93,7	94,9	96,1

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.12	Persentase Kualifikasi Guru SMA	Persen	n/a	96,8	97,3	97,2	97,9
1.13	Angka Putus Sekolah						
	-SD	Orang	n/a	n/a	39	44	8
	-SMP	Orang	n/a	n/a	59	67	4
	-SMA	Orang	n/a	n/a	39	19	1
	-SMK	Orang	n/a	n/a	244	230	7
2	**Kesehatan**						
2.1	Angka Kematian Bayi	Persen	8,54	6,38	6,17	4,18	5,83
2.2	Angka Kematian Ibu	Persen	166,78	77,36	113,98	102,16	120,26
2.3	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	86,67	100	100	100
2.4	Stunting	Persen	n/a	n/a	n/a	9,75	9,07
2.5	Gizi Buruk	Kasus	45	42	38	31	30
2.6	Prevalensi kurang gizi	Persen	n/a	n/a	6,91	6,29	5,58
2.7	Penemuan Pasien TB BTA Positif	Persen	79,9	51,33	89,62	87,75	100,24
2.8	Kumulatif Kasus HIV/AIDS	Kasus	257	307	350	402	493
2.9	Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	Persen	797	1086	218	292	1020
2.10	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Persen	89,9	91,2	91,8	96,3	97,3
2.11	Penanganan Komplikasi Kebidanan	Persen	81,34	78,06	74,74	88	92,1
2.12	Penanganan Komplikasi Neonatal	Persen	47,06	37,61	39,49	40,14	43,5
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	92,76	94,01	90,13	93,15	94,8
2.14	Posyandu Aktif	Persen	83,67	83,67	83,08	88,8	84,82
2.15	Kunjungan Puskesmas	Orang	622.691	627.225	495.176	645.060	792.255
2.16	Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit	Orang	484.651	819.112	948.903	822.939	799.742
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Statistik Transportasi						
3.1.1	Panjang Jalan Raya	km	n/a	118,87	119,0	118,87	118,87
3.1.2	Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	km	n/a	74,06*	53,32*	50,28*	53,29
3.1.3	Jalan Kota Dalam Kondisi Sedang	km	n/a	22,88*	45,18*	42,60*	40,67
3.1.4	Jalan Kota Dalam	km	n/a	3,06*	1,50*	7,12*	5,76

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kondisi Rusak						
3.1.5	Jalan Kota Dalam Kondisi Rusak Berat	km	n/a	0	0	0	0,29
3.1.6	Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service* (LOS)	Kategori	n/a	n/a	D	C	C
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.1	Rasio Luas Kawasan Kumuh	Persen	n/a	n/a	4,39	1,88	3,16
4.2	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	68,17	n/a	76,50	82,66 72,70	75,98
4.3	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	62,73	68,83	69,17	69,34	70,35
4.4	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	n/a	n/a	0,38	0,14	0,07
4.5	Penduduk Dengan Akses Santitasi Layak	Persen	67,32	69,95	70,02	72,67%	79.9%
4.6	Rumah Sehat	Persen	39,31	63,96	63,97	65%	65.04%
5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100
5.2	Indeks Resiko Bencana	Kategori	n/a	n/a	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
6	**Sosial**						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	n/a	n/a	0,76	23,59	37,93
7	**Tenaga Kerja**						
	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan	Orang	257.105	n/a	272.017	273.955	n/a
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92,23	n/a	92,33	92,36	92,20
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	73,38	n/a	76,97	77,21	74,14
8.3	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	Persen	n/a	n/a	24	26	29,87
8.4	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	n/a	n/a	70	79	96,43
9	**Pangan**						
9.1	Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	n/a	n/a	82,1	79,1	83,8
9.2	Pola Pangan Harapan ketersediaan	Persen	n/a	n/a	96,2	93,4	92,9
9.3	Pola Pangan Harapan Konsumsi	Persen	n/a	n/a	82,1	79,1	83,8
9,4	Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Persen	n/a	n/a	11	15	31,16
10	**Pertanahan**						
10.1	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	Persen	n/a	n/a	100	100	n/a
11	**Perhubungan**						
11.1	Persentase Angkutan Yang Layak Jalan	Persen	n/a	n/a	51,5	100	98,14
11.2	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	n/a	n/a	11,94	46,92	51,58
11.3	Persentase tersedianya halte dan terminal	Persen	n/a	55,30	57,69	70,37	91,30
12	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
12.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,31	1,27	1,19	1,12	1,07
12.2	Peserta KB Baru	Persen	9,7	10,3	5,8	n/a	n/a
12.3	Peserta KB aktif	Persen	77,7	78,2	75,9	n/a	n/a
12.4	Rasio Akseptor KB mandiri	Persen	n/a	n/a	80	82	79,92
12.5	Rasio Akseptor KB	Persen	n/a	n/a	78,51	78,99	78,89
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**						
13.1	Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
13.1.1	LPM	Unit	19	19	n/a	n/a	n/a
13.1.2	PKK	Unit	19	19	n/a	n/a	n/a
13.1.3	Posyandu	Unit	388	388	n/a	n/a	n/a
13.1.4	Kader Pembangunan	Orang	150	150	n/a	n/a	n/a
13.1.5	Swadaya masyarakat dalam pembangunan	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	n/a	n/a	n/a
13.1.6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	80	95,1	100
14	**Lingkungan Hidup**						
14.1	Indeks Kualitas Udara	Poin	n/a	n/a	39,24	52,03	70,23
14.2	Indeks Kulitas Air	Poin	n/a	n/a	38,8	11,33	45,35
14.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	n/a	n/a	31,83	32,67	46,80
14.4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	n/a	n/a	11,15	11,65	11,16
14.5	Persentase pengelolaan sampah	Persen	n/a	n/a	87	95	96,06
15	**Komunikasi dan Informatika**						
15.1	Cakupan pengembangan e-Government daerah	Persen	n/a	n/a	10	58	100
15.2	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	Persen	n/a	n/a	40	83	50
15.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	n/a	n/a	n/a	3,20	3,16
16	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
16.1	Jumlah Koperasi	Koperasi	420	420	340	317	259
16.2	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	80	76	89	103	105
16.3	Koperasi Yang melaksanakan RAT	Unit	80	76	89	103	105
16.4	Koperasi Sehat	Unit	n/a	30	33	36	40
16.5	Total Anggota Koperasi	Anggota	18.995	46.103	50.137	43.909	51.402
16.6	Jumlah Wirausaha Baru	WUB	n/a	n/a	15	2	n/a
16.7	Jumlah IKM yang memenuhi standar mutu	IKM	n/a	n/a	120	418	n/a
17	**Penanaman Modal**						
17.1	Realisasi Investasi	Rupiah	n/a	n/a	8.953.319.	9.744.433.	24.410.560.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	(PMA/PMDN)				609.542	463.274	302.066
17.2	Perusahaan yang melapor ke LKPM	Perusahaan	n/a	n/a	125	178	141
17.3	Jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	Izin	n/a	n/a	2	2	3
18	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
18.1	Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	Pemuda/ Organisasi	n/a	n/a	200	50	n/a
18.2	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	n/a	50	52	55
18.3	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	Persen	n/a	n/a	18,18	32,73	37,27
18.4	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	Persen	n/a	n/a	49,14	58,97	68,80
18.5	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	Persen	n/a	n/a	3,03	n/a	21,20
19	**Statistik**						
19.1	Buku Kota Dalam Angka	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada
19.2	Persentase ketersediaan data statistik daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	40	36,77
20	**Persandian**						
20.1	Persentase informasi yang aman	Persen	n/a	n/a	n/a	1	100
21	**Kebudayaan**						
21.1	Jumlah grup kesenian	Unit	283	178	n/a	n/a	n/a
21.2	Jumlah organisasi kesenian	Unit	69	n/a	n/a	n/a	n/a
21.3	Komunitas Adat	Unit	2	2	n/a	n/a	n/a
21.4	Jumlah Seniman	Orang	n/a	755	n/a	n/a	n/a
21.5	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	n/a	n/a	24	29,63	45
22	**Perpustakaan**						
22.1	Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota	Persen	n/a	n/a	78,6	79,87	80,27
22.2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	Persen	n/a	n/a	60	62	68,5
23	**Kearsipan**						
23.1	Persentase Perangkat Daerah	Persen	n/a	n/a	n/a	8	18,50

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	yang mengelola arsip secara baku						
23.2	Persentase Sumberdaya Pelayanan Kearsipan	Persen	n/a	n/a	100	100	n/a
II	**URUSAN PILIHAN**						
1	**Pariwisata**						
1.1	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	Orang	n/a	n/a	546	392	899
1.2	Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	Orang	n/a	n/a	3.526	5.852	43.707
1.3	Jumlah Hotel/Penginapan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	8
1.4	Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	n/a	n/a	n/a	54	54
2	**Pertanian**						
2.1	Luas Lahan Sawah	Ha	134,42	134,42	136	136	136
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20
2.3	PDRB ADHB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	55,19	56,68	58,53	60,60	65,07
2.4	Produksi Hasil Peternakan (Daging)	Ton	n/a	n/a	100	1.004	712,4
2.5	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	Ton	n/a	n/a	750	823	757,857
2.6	Produksi hasil tanaman padi (ton)	Ton	n/a	n/a	1.674,13	1.559,4	1.693,2
2.7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	n/a	300	328,57	335,35
2.8	Jenis Ikan Hias yang di Kembangkan	Jenis	n/a	n/a	3	n/a	2
2.9	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Kg/Kap/Thn	n/a	n/a	11	15	31,16
3	**Perdagangan**						
3.1	Jumlah Sarana Perdagangan :						
	- Pasar Permanen	Unit	n/a	3	n/a	n/a	n/a
	- Pasar Tidak Permanen	Unit	n/a	4	n/a	n/a	n/a
	- Mall	Unit	n/a	4	n/a	n/a	n/a
	- Supermarket	Unit	n/a	210	n/a	n/a	n/a
	- Toko/Kios	Unit	n/a	7.436	n/a	n/a	n/a
3.2	Pasar Tradisional Layak Fungsi	Persen	n/a	n/a	20	30	n/a
3.3	IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi Di Level	IKM/UKM	n/a	n/a	23	24	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Lokal, Regional Dan Nasional						
4	**Perindustrian**						
4.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	46,78	46,61	45,88	45,69	47,81
5	**Transmigrasi**						
5.1	Angka Kesempatan Kerja	Orang	n/a	n/a	273.616	273.955	272.553
III	**FUNGSI PENDUKUNG**						
1	**Sekretariat Daerah**						
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor/Predikat	n/a	n/a	n/a	63,99 (B)	60,01 (B)
1.2	Nilai SAKIP	Predikat	n/a	CC	B	B	B
1.3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor dan Status	n/a	3,3590 (Sangat Tinggi)	3,3274 (Sangat Tinggi)	3,4624 (Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
1.4	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n/a	n/a	75	68	72
1.5	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	n/a	n/a	76	80,99	80,75
2	**Sekretariat DPRD**						
2.1	Cakupan Kinerja DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya	Persen	n/a	n/a	100	100	100
IV	**FUNGSI PENUNJANG**						
1	**Perencanaan**						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
2	**Keuangan**						
2.1	Penetapan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Waktu/Tidak Tepat Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
3.1	Persentase ASN yang dibina	Persen	n/a	n/a	100	100	n/a
3.2	Persentase ASN yang kompeten	Persen	n/a	n/a	75	60	41
3.3	Persentase pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	10	0,6	5
3.4	Penilaian kinerja pegawai (SKP)	Persen	n/a	n/a	76	87	26
4	**Penelitian dan Pengembangan**						
4.1	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	Persen	n/a	n/a	n/a	25	75
5	**Pengawasan**						
5.1	Nilai AKIP	Nilai	n/a	n/a	60,68	63,99	66,00
5.2	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	3,57%
5.3	Opini BPK	Opini	n/a	n/a	WTP	WTP	WTP
5.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	1,268
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1.	PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran	Rupiah	17.876.392.22	18.880.442.23	19.907.130.29	21.038.451.01	n/a
2.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	11.012	11.141	11.353	11.921	12.448
3.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Perda	14	14	n/a	n/a	n/a
4.	Banyaknya Pencarian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan						
	- SLTA	Orang	2.208	1.714	1.705	n/a	n/a
	- D1/D2	Orang	138	16	20	n/a	n/a
	- D3	Orang	1.478	317	172	n/a	n/a
	- S1/S2	Orang	1.491	443	244	n/a	n/a
5.	Rasio Ketergantungan	rasio	18,54	18,58	18,59	18,49	15,23

Sumber : hasil pengolahan data, 2020

2.5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2019

Pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 telah memasuki tahun keempat. Sejak pelaksanaan tahun pertama, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi hasil RPJMD tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan oleh Bappeda dan menjadi masukan untuk penyusunan rencana tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan 12 (dua belas) indikator yang melebihi target, 3 (tiga) indikator sesuai target, 2 (dua) indikator belum ada data, dan 7 (tujuh) indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun indikator yang melebihi target yaitu: Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Laju Pertumbuhan Penduduk, Survey Kepuasan masyarakat, Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), Persentase luasan genangan terhadap luas kota, Rasio luas kawasan kumuh, *Level of Service* (LOS), dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Sementara indikator yang mencapai target yaitu Nilai LPPD, Opini BPK, dan Indeks Risiko Bencana.

Selain indikator yang melebihi target, terdapat juga 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks Profesionalitas ASN, Nilai SAKIP, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase cakupan layanan air limbah domestik, Persentase cakupan pelayanan air bersih, Persentase pengelolaan sampah, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang tidak ada datanya yaitu Indeks Williamson. Indeks Williamson tidak dapat dihitung sebab tidak tersedia data PDRB per kecamatan.

Tabel 2.118.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2017-2019

No	Indikator Tujuan/Sasaran	2017	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	76,95	-	77,56	-	78,11
2	Indeks Pendidikan (indeks)	74,66	74,1	74,72	74,15	74,81
3	Indeks Kesehatan (indeks)	82,45	82,47	82,69	82,49	82,91
4	Skor Pola Pangan Harapan	82,1	82,6	79,1	83,1	83,8

No	Indikator Tujuan/Sasaran	2017	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(Nilai)					
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07
6	Indeks reformasi birokrasi	n/a	-	63,99 (B)	60,00 (B)	60,01 (B)
7	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	BB	B
8	Nilai LPPD (predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	68	77	72
11	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	76	78	80,99	80	80,75
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	-	-	3,2	-	3,16
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,43	5,64	5,68	5,66	6,84
14	Indeks Gini (indeks)	0,41	0,4	0,364	0,4	0,363
15	Indeks Williamson (indeks)					
16	Angka Kemiskinan (%)	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39
17	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,43	8,26	7,93	7,52	8,08
18	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS) (Predikat)	D	D	C	D	C
19	Persentase pengelolaan sampah (%)	87	98	95	100	96,06
20	Persentase cakupan layanan air limbah domestik (%)	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98
21	Persentase luasan genangan terhadap luas kota (%)	0,38	0,31	0,14	0,23	0,07
22	Persentase cakupan pelayanan air bersih (%)	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35
23	Rasio luas kawasan kumuh (%)	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16
24	Indeks Resiko bencana (indeks)	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8
26	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	80	95,1	80	100
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	73,38	73,63	77,21	73,75	74,14
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	92,23	92,3	92,36	92,5	92,2

Sumber : Bappeda, 2020

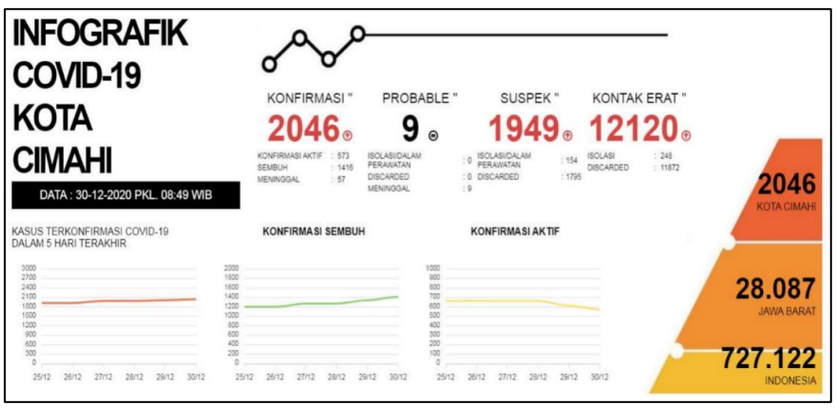
2.6. PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

Selain Demam Berdarah Dengue (DBD), hal lain yang terkategori dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah wabah pandemi seperti SARS, MERS, Flu Burung, dan COVID-19 yang pada 2020 melanda hampir seluruh negara hingga ke Indonesia dan Jawa Barat, termasuk Kota Cimahi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sehingga membutuhkan upaya yang konkrit dan massal di seluruh Indonesia untuk memerangi wabah ini.

Saat ini, berdasarkan data sampai dengan 30 Desember 2020 di Kota Cimahi telah terkonfirmasi 2046 kasus positif COVID-19 dengan 1416 sembuh, 57 orang meninggal dunia, dan 573 kasus aktif. Selain itu ada 9 kasus meninggal dunia dengan status *Probable,* 1949 kasus suspek, dan 12.120 kasus kontak erat. Kondisi luar biasa wabah pandemi seperti ini yang tentunya harus diwaspadai dan diantisipasi dalam penanganannya baik secara preventif maupun juga kuratifnya.

Pelayanan kesehatan diutamakan bagi penyediaan fasilitas kesehatan bagi korban COVID-19. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu upaya memutus rantai dan mencegah munculnya angka pasien virus adalah edukasi publik untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS).

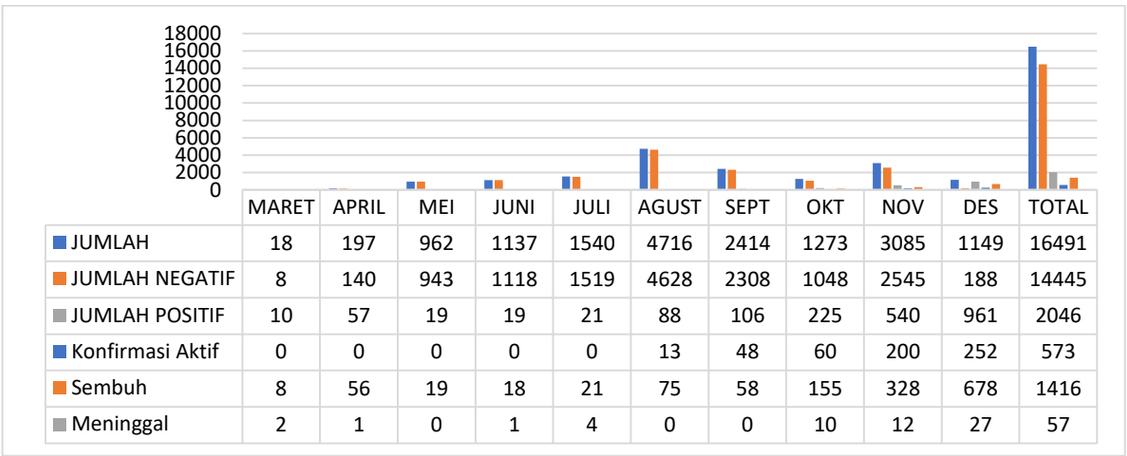
Gambar 2.98.
Data Kasus COVID-19 Kota Cimahi per 30 Desember 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Gambar 2.99.

Kapasitas Tes PCR Kota Cimahi Periode 1 Maret sd 30 Desember 2020



	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
JUMLAH	18	197	962	1137	1540	4716	2414	1273	3085	1149	16491
JUMLAH NEGATIF	8	140	943	1118	1519	4628	2308	1048	2545	188	14445
JUMLAH POSITIF	10	57	19	19	21	88	106	225	540	961	2046
Konfirmasi Aktif	0	0	0	0	0	13	48	60	200	252	573
Sembuh	8	56	19	18	21	75	58	155	328	678	1416
Meninggal	2	1	0	1	4	0	0	10	12	27	57

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Tabel 2.119.

Kesiapan Ruang Isolasi Rumah Sakit Kota Cimahi

NO	NAMA RUMAH SAKIT	MERAH	JENIS	KUNING	HIJAU
1	RS TK II DUSTIRA	2		38	34
2	RSUD CIBABAT	4	DEWASA	9	30
			KEBIDANAN	0	3
			ANAK	5	0
3	RS MITRA KASIH	0		0	6
4	RS KASIH BUNDA	0		0	6
5	RS AVISENA	0		2	16
6	RS MAL	0		0	1
7	RSGMP UNJANI	0		0	0
	JUMLAH	**6**		**55**	**93**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020

Sejak merebaknya virus ini berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Selain penerapan *Work From Home* (WFH), menjaga jarak, mencuci tangan, penggunaan masker dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), beberapa daerah di Indonesia juga telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kebijakan ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga diterapkan oleh beberapa daerah di Jawa Barat, antara lain wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai tanggal 22 April 2020 sampai 5 Mei 2020. Penetapan PSBB ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep-240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Namun dengan adanya penerapan *Work From Home* (WFH), menjaga jarak, PSBB, pembatasan transportasi, telah membatasi ruang gerak penduduk untuk beraktivitas. Tidak hanya para pekerja yang diminta untuk bekerja di rumah, para anak didik juga telah menerapkan *school from home* dengan metode yang baru yaitu sekolah *online* di rumah. Pembatasan-pembatasan ini menyebabkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan terhambat bahkan ada yang berhenti sama sekali.

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK serta semakin tidak menentunya dunia usaha dan secara khusus pada sektor informal. Diperkirakan pengangguran terselubung dan tenaga kerja pada sektor informal akan semakin meningkat seiring dengan semakin menurunnya kondisi perekonomian global. Penguatan jaring pengaman sosial menjadi kunci yang penting dalam menghadapi meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan dan ketidakpastian dunia usaha.

2.7. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, setiap daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penetapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran, adapun dalam penetapan SPM harus bersifat mutlak dan mudah distandarkan, sehingga setiap warga Negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Urusan Pemerintah Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar menerapkan SPM. Dengan demikian terdapat 6 (enam) bidang SPM, yaitu : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Adapun penerapan SPM di Kota Cimahi pada Tahun 2019, diuraikan sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di kabupaten/kota terdiri atas : Pendidikan Usia Dini; Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa target dan indikator capaian SPM Bidang Pendidikan telah ditentukan, yaitu :

Tabel 2.120.
Target dan Indikator Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kota Cimahi Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan	100%	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
		dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Cimahi sebagai berikut :

Tabel 2.121.

Target dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	Pendidikan Dasar (SD)	100%	102,54%	Setiap Tahun
	Pendidikan Dasar (SMP)	100%	96,29%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	100%	97,59%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	90,66%	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Alokasi anggaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.122.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2019

NO	CAKUPAN SPM	URAIAN SPM	BESAR ALOKASI	SUMBER DANA	KET
1	Barang dan/atau Jasa	Satuan Pendidikan : 8 Standar Nasional Pendidikan, Satuan Pendidikan, Akreditasi Minimal C	Rp. 17.016.370.000	APBN dan APBD Kota Cimahi	Melalui Belanja Langsung (Program Pendidikan Dua Belas Tahun, DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BOS dan BOP))
		Biaya Peserta Pribadi Didik : Perlengkapan Dasar dan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 59.754.217.586		
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kepala Sekolah : Kualifikasi Akademik, Sertifikat Profesi	Rp. 94.115.157.747	APBN dan APBD Kota Cimahi	Melalui Belanja Tidak Langsung

NO	CAKUPAN SPM	URAIAN SPM	BESAR ALOKASI	SUMBER DANA	KET
		Pendidik, Diklat Kepala Sekolah			(Tunjangan Penambahan Penghasilan sertifikasi) dan Belanja Langsung (Program Peningkatan Mutu Pendidikan)
		Guru : Kualifikasi Akademik, Sertifikat Profesi Pendidik,			
		Tenaga Penunjang dan Laboran : Kualifikasi Akademik.			

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Alokasi Anggaran yang disediakan dalam Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 adalah Rp 170.492.495.333 (45,42%) dari Total Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019 sebesar Rp. 375.345.121.653. (Sumber: DPPA-SKPD T.A 2019 (diolah).

Dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Pejabat Dinas Pendidikan sebanyak 19 Orang; dan
b. ASN Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebanyak 47 Orang.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan, meliputi :

a. Peraturan tentang SPM muncul setelah RPJMD disusun sehingga diperlukan penyesuaian di RPJMD baik indikator maupun targetnya;
b. Indikator yang ada di RPJMD yang lama secara subtansi sama dengan nomenklatur indikator SPM sesuai dengan peraturan yang ada. Namun targetnya yang harus disesuaikan; dan
c. Pelaksanaan pencapaian SPM bidang pendidikan belum sesuai secara nomenklatur indikator dengan RPJMD Kota Cimahi disebabkan oleh aturan tentang SPM bidang pendidikan baru disahkan sesudah RPJMD Kota Cimahi disahkan.

Solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu :

a. Melakukan perubahan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dan jangka pendek (RKPD dan Renja);
b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait; dan
c. Melakukan sinkronisasi dan keselarasan terhadap RPJMD Kota Cimahi.

2. SPM Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota terdapat 12 jenis pelayanan dasar, yaitu :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB); dan
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Tabel 2.123.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatakan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun usia lanjut sesuai standar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %.	Setiap Tahun
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %.	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Hasil capaian indikator SPM yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Puskesmas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.124.

Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2019
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	95.09
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	97.31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94.95
4	Pelayanan kesehatan balita	100	53.93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	71.55
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	90.08
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	70.26
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	72.96
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	98.36
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	114.32
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	74.06
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	100	69.02

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan) serta didukung pula oleh dana kapitasi/JKN di Puskesmas. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini terdapat pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan yang tersebar di bidang. Adapun total anggaran yang disediakan untuk pencapaian target-target SPM di tahun 2019 sebesar Rp. 10.120.952.500,- yang terdiri dari alokasi APBD Kota Cimahi sebesar Rp. 2.445.952.500,-, kemudian sumber

anggaran DAK Non Fisik berupa kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.7.675.000.000,-. Sedangkan untuk dana kapitasi JKN Puskesmas yang dikelola oleh masing-masing Puskesmas digunakan untuk kegiatan penunjang lainnya yang mendukung capaian seluruh indikator SPM.

Permasalahan pencapaian SPM bidang Kesehatan :

a. Jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai dan rasio dengan jumlah penduduk yang belum sesuai standar salah satu contohnya adalah kelangkaan tenaga apoteker di Puskesmas;
b. Keterbatasan sarana prasarana dan peralatan kesehatan;
c. Pembiayaan jaminan kesehatan yang terbatas; dan
d. Konsep pelaksanaan SPM yang masih didominasi oleh pelayanan kuratif.

Dari permasalahan diatas maka solusi untuk pencapaian SPM bidang kesehatan adalah :

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
c. Menggalakkan *universal health coverage* (UHC); dan
d. Perlu peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan.

Beberapa upaya telah coba dilaksanakan oleh dinas dan puskesmas untuk meningkatkan hasil capaian SPM setiap tahunnya. Antara lain melalui pemilihan kegiatan yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap capaian hasil indikator SPM, peningkatan kerjasama lintas sektor, penyusunan waktu pelaksanaan kegiatan di luar gedung dan dalam gedung di Puskesmas, peningkatan kunjungan rumah sebagai upaya promotif preventif yang dilakukan oleh petugas Puskesmas, peningkatan kompetensi bagi petugas kesehatan, kader kesehatan.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis Pelayan Dasar untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang tercantum dalam pasal 5

ayat (2) terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari, dan Penyediaan pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari yang layak dan aman diarahkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari dan 72,02% untuk target capaian Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan 100% untuk target capaian Pusat pada tahun 2019.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang memadai adalah terlayaninya pengelolaan air limbah domestik penduduk melalui sistem pengelolaan air limbah (SPAL) baik setempat maupun terpusat, dan pada tahun 2019 tercapai sebesar 60%. tetapi Target universal akses untuk tahun 2019 terkait sektor air limbah domestik adalah sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh penduduk harus sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik, baik berupa *on site* maupun *off site* sistem. Proses perumusan arah pengembangan sektor air limbah domestik Kota Cimahi sebenarnya dimulai sejak penyusunan visi dan misi sanitasi kota, penetapan tujuan dan sasaran yang memberikan kisi-kisi penetapan sistem sanitasi dan zona sanitasi, serta penetapan tingkat layanan. Berikut adalah Tabel SPM bidang Pekerjaan Umum :

Tabel 2.125.

Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Cimahi Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100 %	setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 %	setiap Tahun

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi sebagai pengampu pemenuhan SPM Penyediaan Air minum dan Pengelolaan Air Limbah Domestik berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2019 DPKP belum bisa optimal dalam mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan masih tertundanya rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan di Kota Cimahi, terbatasnya sumber air baku di Kota Cimahi, serta Kondisi air bawah tanah Kota Cimahi termasuk dalam Zona Merah.

Tabel 2.126.
Target dan Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kota Cimahi Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2019	
			Target	Capaian
1	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari har	100 %	70,35%
2	Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 %	75,98%

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki predikat kota dengan sanitasi yang baik dan telah meraih penghargaan terkait bidang sanitasi. Target SPM sektor air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 telah terlampaui tetapi masih harus memenuhi target universal akses tahun 2019 yaitu 100% akses pelayanan air limbah domestik.

Seksi Air Bersih beserta UPT Air Minum pada Dinas PKP di tahun 2019 memiliki 3 Kegiatan dalam Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih. Sebagian besar kegiatan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi Tahun 2019. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 10.963.615.304,00. Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Seksi Air Bersih.

Tabel 2.127.
Target dan Realisasi Anggaran SPM Seksi Air Bersih dan UPT Air Minum
Kota Cimahi Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	645.250.000,00	584.649.900,00	90,61
2		Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	8.419.974.776,00	7.746.556.541,00	92,01
3		Pengelolaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.898.390.528,00	1.823.819.004,00	96,07
Jumlah			**10.963.615.304,00**	**10.155.025.445,00**	**92,26**

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik Seksi Air Limbah dan UPT Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 mempunyai Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik dengan 3 Kegiatan bersumber dana dari APBD, APBN melalui DAK dan HIBAH. Jumlah anggaran sebesar Rp. 15.051.058.507,-. Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan pelayanan air limbah domestik di Kota Cimahi.

Tabel 2.128.
Anggaran SPM Pelayanan Air Limbah Domestik
Kota Cimahi Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	586.454.000,00	285.436.300,00	48,68

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2		Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	12.801.456.635,00	11.607.295.961,00	90,68
3		Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	1.663.147.872,00	1.454.034.354,00	87,43
Jumlah			**15.051.058.507,00**	**13.346.766.615,00**	**88,68**

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan SPM di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan pemerintah kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana satu orang petugas harus mengerjakan tugas operasional maupun pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Selain ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, Permasalahan yang dihadapi di kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi. Layanan yang ada dari PDAM Kab. Bandung stagnan melayani 12 % (14.445 SR) sejak Kota Cimahi berdiri dan cenderung menurun kuantitasnya saat ini. Baru pada Tahun 2015 mulai dibangun sarana air bersih skala besar dengan memanfaatkan dan mengolah air permukaan dengan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Cimahi SPAM Cimahi Utara kapasitas 50 lt/det namun hanya cukup untuk menambah + 5.000 SR;
b. Keterbatasan Sumber Air Baku, semenjak Kota Cimahi Berdiri tahun 2001 s/d 2019 baru memanfaatkan sumber air baku yang

berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;

c. Penurunan muka air tanah, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga tidak dapat menambah titik artesis baru untuk saat ini;
d. Keterbatasan/sulit mendapatkan lahan, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis;
e. Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar/tidak layak minum, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industry;
f. Lambannya program penyediaan SPAM Regional, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih, dll;
g. Belum mendukung & tidak stabilnya daya Listrik yg tersedia dari PT. PLN, terutama penggunaan daya listrik tinggi untuk pengoperasian sumur artesis; dan
h. Adanya pengelolaan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) belum/tidak berjalan optimal dan baik, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

Dalam meningkatkan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

a. Ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, adanya badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
b. Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
c. Penyedotan lumpur tinja oleh UPT ALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar;
d. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;
e. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan; dan
f. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan antara lain :

a. Adanya kegiatan pembebasan lahan untuk IPAL;

b. Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga menimbulkan minat untuk membangun sarana pengolahan air limbah di lokasi mereka;
c. Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
d. Agar rencana membangun IPLT pada tahun 2021 dapat di realisasikan; dan
e. Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) pada pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Target yang ditetapkan untuk SPM bidang kebencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.129.
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disahkan pada tanggal 5 Januari 2018 sedangkan RPJMD Kota Cimahi serta Restra BPBD dan renstra DPKP telah ditetapkan pada Tahun 2017, sehingga target pencapaian SPM belum diakomodir baik dalam RPJMD maupun Renstra BPBD dan renstra DPKP Kota Cimahi, sehingga ada perbedaan sasaran serta outcome dari kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut sehingga tidak sesuai dengan capaian SPM yang diharapkan pada SPM perumahan Rakyat yang ada di Kota Cimahi.

Untuk SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni, tidak ada data karena sampai dengan 2019 tidak ada warga yang mendapatkan relokasi tempat tinggal terkait dengan adanya program pemerintah daerah, selama ini program pemerintah Daerah dijalankan melalui ganti rugi. Di Kota Cimahi, rehabilitasi rumah tidak layak huni bukan untuk korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah, akan tetapi sifatnya fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Tabel 2.130.
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2019

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan	Target (%)	Realisasi (%)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	50	BPBD
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	DPKP

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada BPBD Kota Cimahi adalah bersumber dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp. 2.327.207.929 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pada penerapan SPM adalah sebagai berikut: Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp. 2.140.760.703.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai berjumlah 46 orang terdiri dari 24 orang ASN dan 20 orang Non ASN yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

Permasalahan masih tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antara BPBD dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga untuk Jenis Layanan dasar pada SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi masih belum dilaksanakan.

Solusi dari permasalahan diatas yaitu dengan merubah Tugas Pokok dan Fungsi oleh bagian Organisasi Setda Kota Cimahi sehingga dalam pelaksanaannya di tahun 2020 jelas Tupoksi di masing-masing Perangkat daerah untuk menunjang SPM Kota Cimahi.

5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Satpolppdamkar wajib menyediakan dua jenis pelayanan dasar dalam kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum; dan
b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Target yang ditetapkan untuk SPM bidang kebencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.131.

Target SPM Trantibum dan Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
		penegakan hukum Perda dan perkada	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Adapun Realisasi Penerapan SPM tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.132.

Realisasi Capaian SPM Trantibum dan Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	Karena yang dimaksud dalam peraturannya adalah warga negara yang terkena dampak sampai saat ini belum ada realisasinya karena belum teranggarkan
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	3,87%	8% dari jumlah penduduk total 510.000 (usia > 5 tahun, data agregat kependudukan 2018), sedangkan penduduk yang sudah memperoleh layanan informasi sebanyak 19.772 jiwa
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	70%	Mengacu pada Permendagri No 101 Tahun 2018, Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi terdiri dari: Penyuluhan RPB, Pembuatan Rencana Kontijensi (renkon); Penyusunan Kajian Mitigasi Longsoran dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Keterangan
					Banjir ; Kegiatan Simulasi Bencana di Pemkot Cimahi, SMPN 10 Cimahi, SMPN 8, SMPN 4, SDN Budhi Karya, SDN Melong Mandiri I, Puskesmas Cimahi Tengah dan pemasangan rambu evakuasi bencana, TTX (Gladi Ruang) di RS Dustira dan Stikes Jend A Yani; Penyediaan Sarpras dan Alat Penanggulangan Bencana (masih minim)
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	dari Data Log Book kejadian Bencana, pada tahun 2019 terdapat 201 kejadian bencana di Kota Cimahi seluruh kejadian tersebut dilayani oleh BPBD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	95,52%	

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Tabel 2.133.

Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Trantibum dan Linmas 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI	%
1	BPBD	2.327.207.929,-	2.140.760.703,-	91,99
2	Satpol PP Damkar	9.366.398.911,-	8.207.305.000,-	87,62
TOTAL		**13.244.611.050**	**11.765.570.971**	**89,68**

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Pagu anggaran total BPBD Kota Cimahi tahun 2019 adalah Rp. 2.327.207.929,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi anggaran BPBD Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.104.760.703,- (Dua Milyar Seratus Empat Juta Tujuh

Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah), atau tercapai 91,99%.

Pagu anggaran total Satpol PP Damkar Kota Cimahi tahun 2019 adalah Rp. 9.366.398.911 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah). Realisasi anggaran Satpol PP Damkar Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.207.305.000,- (Delapan Milyar, Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), atau tercapai 87,62%.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai berjumlah 46 orang terdiri dari 24 orang ASN dan 20 orang Non ASN yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab. Selain itu juga dibantu oleh Relawan manakala terjadi bencana. diantaranya terdiri dari FPRB Kota Cimahi, Tagana, PMI, KSB, KIC, KPSC, ORARI, Baraya Kodim, Jarambah dan KSR Unjani. Permasalahan dalam menjalankan fungsi pengelolaan bencana, antara lain :

a. Besarnya kebutuhan anggaran BPBD dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana dimana berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;
b. Ancaman Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu;

c. Terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
d. Terbatasnya sarana prasarana seperti gedung perkantoran, gudang penyimpanan logistik dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk dipergunakan pada setiap kondisi tahapan kebencanaan;
e. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana di lapangan;
f. Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya; dan
g. Belum optimalnya penyebarluasan informasi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan penambahan anggaran penyelenggaran pengelolaan bencana termasuk diantaranya mengakses anggaran dari Pusat dan Provinsi;
b. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda;
c. Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi (Pusdatin) kebencanaan, sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat memperoleh informasi dan peringatan dini kejadian bencana pada saat terjadi bencana di wilayah Kota Cimahi;
d. Perubahan paradigma dari responsif menjadi preventif merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya pengelolaan bencana;

e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur dan relawan) agar memiliki pengetahuan teknis tentang kebencanaan dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan bencana;
f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SOPD dan pihak-pihak terkait; dan
g. Peningkatan sosialisasi pada masyarakat dan *stakeholder* dalam hal kebencanaan.

6. SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri sosial Nomor 9 Tahun 2018, untuk standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial di kabupaten/kota terdapat beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota.

Tabel 2.134.
Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukan kinerja dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, untuk pencapaian target 100%, dinas sosial Kota Cimahi menggunakan pemahaman bahwa seluruh sasaran yang ada di setiap indikator dihitung berdasarkan data sasaran *real* yang ada dan berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial, tidak hanya berdasarkan jumlah sasaran yang dilayani saja atau yang datang ke puskesos. Untuk DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi pencapaian target SPM dimulai pada tahun anggaran 2020, karena di tahun-tahun sebelumnya belum dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 baru akan dilaksanakan pada tahun 2020, karena masa transisi di tahun 2019 DINSOSP2KBP3A tidak mengakomodir SPM tersebut, yang dilakukan adalah pada tahapan sosialisasi serta pengumpulan data saja. Namun di tahun sebelumnya ketika bidang sosial masih bergabung pada Dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial (Disnakertransos) telah memulai pelaksanaan dan penerapan SPM yang berakhir di tahun 2015.

Tabel 2.135.
Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2019 program dan kegiatan yang ada pada Bidang Sosial pada hakekatnya telah mengakomodir SPM, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Sosial sebagai berikut :

Tabel 2.136.

Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Program	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.	Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial	310.379.500,-	308.967.500,-	99,55%
		Program PKH (APBN)	81.600.000,-	81.600.000,-	100%
		Program ASPDB (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat) (APBN)	230.000.000,-	230.000.000,-	100%
		Program Jarak Jauh (APBN)	70.000.000,-	70.000.000,-	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial	80.448.000,-	74.010.000,-	92%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Program PKH (APBN)	3.806.400.000,-	3.806.400.000,-	100%
		Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar	168.000.000,-	168.000.000,-	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial	178.034.156,-	145.993.084,-	82%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat				

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Program	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota				

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Cimahi Tahun 2019, Sekretariat Daerah

Untuk mencapai pelayanan dan pelaksanaan SPM tentu saja akan ditemui permasalahan permasalahan. Permasalahan yang utama adalah adanya masa transisi sebagai akibat dari ditetapkannya peraturan menteri sosial yang baru yaitu Permensos Nnomor 9 tahun 2018. Adanya perbedaan yang cukup signifikan terhadap jenis layanan dan indikator yang sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya, hal ini akan sangat berdampak terhadap capaian SPM tersebut.

Adapun permasalahan pencapaian SPM bidang Sosial antara lain :

a. SPM bidang Sosial peraturannya muncul setelah dokumen perencanaan disusun sehingga tidak terakomodir di dokumen pelaksanaan anggaran;
b. Kurangnya pendataan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c. Kurangnya tenaga pekerja sosial; dan
d. Kurangnya koordinasi dengan pihak Provinsi dan Pusat serta Kabupaten/Kota sekitarnya.

Sebagai salah satu solusi yang dilakukan adalah :

a. Penyesuaian dan perubahan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dan jangka pendek (RKPD dan Renja);
b. Meningkatkan kualitas pendataan PMKS dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
c. Merekrut dan melatih tenaga pekerja sosial; dan
d. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan PMKS dengan pihak Provinsi dan Pusat serta Kabupaten/Kota sekitarnya.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2012-2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengubah pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur aspek pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi belanja. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 mengacu pada kepada kinerja Pelaksanaan APBD Kota Cimahi sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016,

sebagai landasan (*baseline*) dan penetapan arah pengembangan (*trend*) pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan Daerah Kota Cimahi selama kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,8 persen per tahunnya. Walau demikian pertumbuhan Pendapatan Daerah ini cenderung menurun dari tahun ketahun. Terdapat 3 (tiga) komponen pembentuk pendapatan daerah, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan kontribusinya, Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 masih disumbang dari dana Perimbangan yaitu sebesar 64,3 persen dengan pertumbuhan nilai sebesar 24,8 persen dari tahun sebelumnya. Posisi kedua tertinggi dalam membentuk Pendapatan adalah komponen PAD sebesar 23,5 persen dengan pertumbuhan sebesar 6,4 persen dari tahun 2015. Posisi terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 12,2 persen dengan pertumbuhan -48,5 persen dari tahun sebelumnya, yang berarti lebih kecil dari tahun 2015.

Untuk Dana Perimbangan, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 74,8 persen dengan pertumbuhan sebesar 6,9 persen. Sementara itu untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat pola yang terbalik dibandingkan dengan DAU. Walau DAK membentuk komponen yang lebih kecil sebesar 16,5 persen akan tetapi kecenderungannya tumbuh secara signifikan sebesar 284 persen dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun sebesar 77,3 persen.

Berdasarkan data realisasinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2016 ternyata memberikan kontribusi sebesar 23,5 persen terhadap total Pendapatan Kota dan telah tumbuh sebesar 6,4 persen dari tahun sebelumnya. PAD selama periode 2012-2016 rata-rata

bertumbuh sebesar 23,5 persen. Adapun komponen pembentuk PAD adalah :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dari keempat komponen tersebut yang memberikan kontribusi terbesar bagi PAD Kota Cimahi adala Lain-Lain PAD yang Sah yaitu sebesar 54,2 persen dengan pertumbuhan sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya. Lebih tingginya kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah dibandingkan dengan pos Retribusi, Pajak dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan PAD Kota Cimahi belum memaksimalkan potensi dari sektor riil yaitu pajak, retribusi, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Komponen kedua terbesar yang menyumbang PAD adalah Pajak Daerah yaitu sebesar 39,2 persen. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 16,5 persen. Pajak Daerah Tahun 2016 senilai Rp.112.060.908.223,00 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,1 persen. Akan tetapi kondisinya berbanding ternyata terbalik ketika komponen Retribusi dianalisis. Dengan kontribusi yang kecil yaitu 3,5 persen, angka realisasi Retribusi mengalami pertumbuhan sebesar 2,2 persen dari tahun sebelumnya.

Pelayanan pemerintah dapat terlihat dari besar dan pertumbuhan angka realisasi sumber PAD berupa Retribusi Daerah. Kontribusi Retribusi masih sangat kecil yaitu sebesar Rp.10.085.859.119,00 atau 3,5 persen pada Tahun 2016. Dimana kontribusi terbersar berasal dari retribusi jasa umum sebesar 59,94 persen, retribusi perizinan tertentu sebesar 21,40 pesen serta retribusi jasa usaha sebesar 18,66 persen. Melihat persentasi kontribusi retribusi jasa usaha sebesar 18,66 persen terlihat belum optimal pendapatan dari retribusi sektor tersebut yang seharusnya memberikan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Sementara itu, pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 71,9 persen. Komponen berikutnya yang menyumbang Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 23,1 persen dengan nominal Rp.34.400.190.120,00 atau turun sebanyak -5,6 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja dalam APBD dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika dibandingkan dengan Pendapatan, ternyata besarnya Belanja Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung tumbuh lebih besar dibandingkan Pendapatan. Belanja rata-rata telah tumbuh sebesar 13,3 persen selama periode 2012-2016.

Belanja Tidak Langsung menyumbang 44,7 persen terhadap total Belanja Kota Cimahi Tahun 2016 dan telah tumbuh sebesar 15,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung rata-rata bertumbuh 7,6 persen selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sementara komposisi Belanja Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung dengan proporsi sebesar 55,3 persen. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung periode 2012-2016 adalah 19,3 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, Belanja Tidak Langsung sebagian besar berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 91,1 persen. Hasil yang berbeda terjadi pada Belanja Pegawai pada Pos Belanja Langsung yang hanya membentuk proporsi yang kecil sebesar 12,7 persen. Untuk pos Belanja Langsung, komponen Belanja Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 50,7 persen dan Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 36,6 persen. Rata-rata pertumbuhan kedua komponen ini masing-masing adalah 19,2 persen dan 26,2 persen. Besarnya alokasi Belanja Barang dan Jasa ini tampaknya disebabkan oleh pergeseran pos narasumber yang dihitung sebagai belanja jasa sejak Tahun 2015.

Pembiayaan Daerah merupakan bagian dari pembentuk APBD. Pada Tahun 2013 dan 2014 terdapat Penyertaan Modal namun pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak dialokasikan lagi. Hal yang menjadi catatan adalah belum meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah (Perusda)

Kota Cimahi walau telah dilakukan penyuntikan dana Penyertaan Modal. Pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan revitalisasi usaha Perusahaan Daerah agar dapat menjadi sumber penghasil utama PAD. Sedangkan komponen Pembayaran Pokok Utang tetap dialokasikan selama kurun waktu 2012-2016.

Catatan lainnya adalah bahwa walaupun defisit anggaran telah semakin turun tetapi angka SiLPA justru semakin meningkat dengan pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 24,9 persen. Ternyata bila realisasi Belanja (melalui perubahan anggaran atau ABT) pada akhir tahun dibandingkan dengan yang direncanakan pada APBD murni selama 5 (lima) tahun terakhir selalu terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu selalu lebih kecil.

Tabel 3.1.

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2012-2016 Kota Cimahi

Kode Akun	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**PENDAPATAN**	**872.552.563.936,00**	**975.350.197.043,09**	**1.117.121.948.297,56**	**1.186.804.131.668,44**	**1.219.010.271.220,34**	**8,8%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**144.540.602.338,00**	**191.599.456.904,09**	**227.949.120.180,56**	**268.816.074.332,44**	**286.065.226.486,34**	**19,0%**
4.1.1	Pajak Daerah	63.753.989.389,00	91.644.684.568,00	91.795.256.385,00	112.124.306.126,00	112.060.908.223,00	16,5%
4.1.2	Retribusi Daerah	9.229.402.032,00	10.226.084.489,00	12.317.132.901,00	9.865.337.459,00	10.085.859.119,00	3,4%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.351.501.520,00	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	7.446.400.000,00	8.819.200.000,00	9,1%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	65.205.709.397,00	82.608.462.007,09	115.714.330.894,56	139.380.030.747,44	155.099.259.144,34	24,6%
4.2	**Dana Perimbangan**	**541.183.364.963,00**	**570.893.914.266,00**	**625.410.201.264,00**	**628.232.060.766,00**	**783.781.903.794,00**	**10,1%**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.406.987.963,00	56.075.572.266,00	61.103.333.264,00	45.907.112.766,00	68.092.972.794,00	2,2%

Kode Akun	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2	Dana Alokasi Umum	440.860.307.000,00	489.174.792.000,00	537.371.615.000,00	548.703.908.000,00	586.582.418.000,00	7,5%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.916.070.000,00	25.643.550.000,00	26.935.253.000,00	33.621.040.000,00	129.106.513.000,00	77,3%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**186.828.596.635,00**	**212.856.825.873,00**	**263.762.626.853,00**	**289.755.996.570,00**	**149.163.140.940,00**	**-0,2%**
4.3.1	Hibah					2.444.000.000,00	
4.3.2	Dana Darurat						
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	49.978.422.754,00	78.724.546.055,00	90.980.991.590,00	103.608.830.930,00	107.318.950.820,00	22,6%
4.3.4	Dana Penyesuaian	81.110.429.000,00	114.336.010.000,00	141.501.002.000,00	146.009.580.000,00		-8,0%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	54.216.029.168,00	17.576.334.315,00	28.398.507.790,00	36.433.091.640,00	34.400.190.120,00	4,2%
4.3.6	Dana Alokasi Cukai	1.523.715.713,00	2.219.935.503,00	2.882.125.473,00	3.704.494.000,00		1,0%
4.3.7	Dana Insentif Daerah					5.000.000.000,00	
4.3.9	Dana Pengembalian dari Pusat						

Kode Akun	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**BELANJA**	**833.411.877.047,00**	**922.343.621.547,00**	**1.042.608.970.972,00**	**1.074.961.450.668,00**	**1.358.761.627.001,00**	**13,3%**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**456.188.340.476,00**	**491.918.784.507,00**	**524.447.426.206,00**	**526.116.891.003,00**	**607.627.563.859,00**	**7,6%**
5.1.1	Belanja Pegawai	419.231.811.376,00	468.117.089.185,00	512.129.234.945,00	522.500.128.253,00	553.346.545.361,00	7,2%
5.1.2	Belanja Bunga	1.113.034.255,00	901.181.666,00	814.185.273,00	748.094.650,00	893.522.830,00	-4,3%
5.1.3	Belanja Subsidi						
5.1.4	Belanja Hibah	34.975.700.439,00	21.699.330.000,00	9.559.070.313,00	2.200.000.000,00	52.345.818.800,00	527,1%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	50.000.000,00	175.840.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00	125,0%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil						
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	781.833.656,00	781.833.656,00	733.672.675,00	618.668.100,00	723.393.018,00	-1,2%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	60.960.750,00	369.350.000,00	1.035.423.000,00		158.283.850,00	2%
5.2	**Belanja Langsung**	**377.223.536.571,00**	**430.424.837.040,00**	**518.161.544.766,00**	**548.844.559.665,00**	**751.134.063.142,00**	19,3%
5.2.1	Belanja Pegawai	72.608.278.603,00	85.729.394.837,00	79.365.866.807,00	79.014.364.196,00	95.107.639.784,00	7,6%

Kode Akun	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.770.220.766,00	223.962.477.736,00	287.349.176.601,00	289.047.103.053,00	380.857.789.689,00	19,2%
5.2.3	Belanja Modal	111.845.037.202,00	120.732.964.467,00	151.446.501.358,00	180.783.092.416,00	275.168.633.669,00	26,2%
	SURPLUS/DEFISIT	**39.140.686.889,00**	**53.006.575.496,09**	**74.512.977.325,56**	**111.842.681.000,44**	**-139.751.355.780,66**	-24,7%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**69.054.335.874,22**	**101.524.712.963,61**	**152.373.929.801,31**	**226.705.454.887,26**	**346.012.066.667,31**	49,6%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**71.232.108.218,22**	**108.233.360.399,61**	**154.492.950.821,31**	**227.694.153.357,26**	**346.867.574.887,31**	48,6%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.232.108.218,22	108.233.360.399,61	154.492.950.821,31	226.925.244.765,26	338.548.135.887,31	47,7%
6.1.3	Pinjaman Daerah				768.908.592,00	8.319.439.000,00	982,0%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.177.772.344,00**	**6.708.647.436,00**	**2.119.021.020,00**	**988.698.470,00**	**855.508.220,00**	18,2%
6.2.2	Penyertaan Modal		1.551.000.000,00	1.000.000.000,00			-35,5%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.177.772.344,00	5.157.647.436,00	1.119.021.020,00	988.698.470,00	855.508.220,00	8,4%

Kode Akun	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SILPA Tahun Berkenaan	**108.195.022.763,22**	**154.531.288.459,70**	**226.886.907.126,87**	**338.548.135.887,70**	**206.260.710.886,65**	**24,9%**
	APBD	**941.606.899.810,22**	**1.076.874.910.006,70**	**1.269.495.878.098,87**	**1.413.509.586.555,70**	**1.565.022.337.887,65**	**13,6%**

Sumber : data BPKAD Kota Cimahi, diolah, 2017

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan/ entitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Secara umum untuk menghitung Rasio Likuiditas dilakukan dengan menghitung *current ratio* dan *quick ratio*. Secara rata-rata nilai *current ratio* Kota Cimahi adalah setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Rp. 28,36 harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 28,36 : 1.

Tabel 3.2.
Rasio Likuiditas

Tahun	*Current Ratio*	*Quick Ratio*
2012	14,15	13,14
2013	33,97	32,70
2014	47,75	46,13
2015	28,07	27,41
2016	17,84	16,99
Rata-rata	**28,36**	**27,27**

Sumber : Hasil pengolahan data, 2018

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan entitas organisasi (pemerintah/perusahaan) dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Nilai *quick ratio* adalah sebesar 27,27 yang berarti

keadaanya sangat baik karena Kota Cimahi dapat membayar hutang walaupun sudah dikurangi persediaan.

Rasio Solvabilitas adalah kemampuan sebuah entitas organisasi (pemerintah/perusahaan) untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya entitas organisasi tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang entitas organisasi perekonomian dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.

Tabel 3.3.
Ratio Solvabilitias

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Total debt to equity ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,012
Total Debt to Total Asset Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,011

Sumber : hasil pengolahan data, 2018

Secara umum besarnya nilai rasio *solvabilitas* baik menggunakan *Total debt to equity ratio* maupun *Total debt to total asset ratio* cenderung sama yaitu sebesar 0,012 dan 0,011 atau 1,1%. Hal ini menunjukkan Kota Cimahi baru bisa menutupi utang sebesar 0,011 atau 1,1% dari total nilai asetnya.

Tabel 3.4.
Debt Ratio

Tahun	Rasio
2012	0,66
2013	0,50
2014	0,41
2015	0,70

Tahun	Rasio
2016	0,85
Rata-rata	0,62

Sumber : hasil pengolahan data, 2018

Debt Ratio menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Secara umum besarnya nilai kewajiban utang masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai aset kota dengan kecenderungan yang semakin besar dengan rata-rata sebesar 0,62 persen.

Bila dilihat dari rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah sangat bahwa nilai Aset terus mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 5,82 persen. Dari komponennya, ternyata Aset Lancar Kota Cimahi tumbuh sangat cepat yaitu sebesar 26,25 persen. Hal yang sama pun terjadi pada nilai Aset Tetap yang mengalami penurunan sebesar 6,54 persen. Bahkan nilai Investasi Jangka Panjang turun dengan sangat signifikan yaitu sebesar 25,14 persen.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai Kewajiban maka pertumbuhan nilai Aset Kota sebesar 13,63 persen. Dengan telah didapatkannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka kedepannya Pemerintah Kota Cimahi harus semakin meningkatkan tata kelola dan kinerja pengelolaan aset termasuk sebaiknya mulai menyusun strategi terhadap pengelolaan aset terutama dalam kaitannya dengan investasi jangka panjang dan strategi agar Aset Kota Cimahi memberikan pengaruh positif terhadap terhadap pendapatan daerah, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi kota.

Secara rata-rata, nilai Aset Lancar memberikan kontribusi sebesar yaitu sebesar 15,58 persen dengan nilai pertumbuhan 26,25 persen komponen terbesar berasal dari Aset lancar Berupa Uang Kas. sementara nilai Aset Lancar atau aset jangka pendek tubuh sangat cepat, nilai investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Cimahi justru cenderung mengalami penurunan terus secara rata-rata sebesar 25,14

persen. Terus menurunnya nilai investasi jangka panjang sangat berkaitan dengan profesionalisme organisasi pengelolaan investasi publik. Kedepannya perlu dilakukan perbaikan tata kelola prioritas investasi pemerintah daerah dan penataan lembaga pengelolaan investasi jangka panjang. Pola yang sama juga terjadi pada Aset Tetap Kota yang turun sebesar 0,67 persen. Aset Tetap merupakan komponen terbesar pembentuk Aset yaitu sebesar 80,83 persen.

Berdasarkan jenis Aset Tetap, Aset Berupa Tanah merupakan komponen terbesar dari total Aset Tetap yaitu sebesar 36.52 persen atau sebesar 29,3 persen dari total Aset keseluruhan. Besarnya nilai Aset Tanah Pemerintah Kota Cimahi telah tumbuh sebesar 12,17 persen pertahunnya. Adapun komponen terbesar ke dua pembentukan Aset Tetap adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan membentuk 27,50 persen terhadap nilai Aset Tetap atau 21,83 persen dari Seluruh Total Aset Kota. Akan tetapi komponen Aset tetap ini mengalami kecenderungan yang negatif sebesar 7,49 persen. Kecenderungan terus menurunnya nilai aset ini dapat mengindikasikan dua hal yaitu sudah semakin membaiknya kualitas infrastruktur jalan atau mengindikasikan tekanan ruang kota.

Pada urutan ketiga, komposisi Aset Tetap berasal dari Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 26,34 persen dari Total Aset Tetap atau sebesar 21,04 persen dari seluruh total Aset kota. Pertumbuhan nilai Gedung dan Bangunan adalah positif. Namun apabila aset daerah tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka hanya akan menjadi *cost center*.

Tabel 3.5.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Cimahi

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
01.00	**ASET**	**5,82**
01.01	**ASET LANCAR**	**26,25**
01.01.01	Kas	26,80

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
01.01.02	Piutang	77,93
01.01.03	Persediaan	9,72
	Biaya Dibayar Dimuka	(31,31)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**(25,14)**
	Investasi Nonpermanen	(47,29)
	Dana Bergulir	(30,98)
	Investasi Permanen	(24,91)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	(24,91)
	Pinjaman Jangka Panjang	
01.02	**ASET TETAP**	**6,54**
01.02.01	Tanah	12,17
01.02.02	Peralatan dan mesin	13,83
01.02.03	Gedung dan bangunan	9,24
01.02.04	Jalan, irigasi, dan jaringan	18,20
01.02.05	Aset tetap lainnya	33,35
01.02.06	Konstruksi dalam pengerjaan	(27,42)
01.02.07	Akumulasi Penyusutan	0,28
01.03	**ASET LAINNYA**	**3,32**
01.03.01	Tagihan penjualan angsuran	
01.03.02	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
01.03.03	Kemitraan dengan pihak kedua	

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Kemitraan dengan pihak ketiga	
01.03.04	Aset tak berwujud	63,34
	Akumulasi Amortisas	
00.03.05	Aset Rusak Berat	(13,48)
01.03.06	Built, Operate, and Transfer - B O	(33,33)
	Aset Lain-Lain	
	JUMLAH ASET DAERAH	**5,22**
02.00	**KEWAJIBAN**	**13,63**
02.01	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**17,35**
02.01.01	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	(22,92)
02.01.02	Bagian Lancar Utang Pengelolaan Persampahan	
	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	-
02.01.03	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Persampahan	
02.01.04	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Pemerintah Pusat	(0,98)
	Pendapatan Diterima Dimuka	
	Utang Belanja	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	Utang Lain-lain	(42,96)
02.01	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**17,38**
02.01.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	17,38
02.01.02	Utang Jangka Panjang - Utang Persampahan	

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
03.00	**EKUITAS DANA**	**6,75**
03.01	**EKUITAS DANA LANCAR**	**11,90**
03.01.01	SILPA	(3,45)
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	1.944,82
03.01.02	Cadangan piutang	72,34
03.01.03	Cadangan persediaan	(26,83)
03.01.04	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	(32,65)
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	(42,14)
03.02	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**8,23**
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
03.02.01	Diinvestasikan dalam aset tetap	(27,10)
03.02.02	Diinvestasikan dalam aset lainnya	(18,72)
03.02.03	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	(39,14)
	EKUITAS	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**35,21**

Sumber : LRA Tahun 2014, 2015, dan 2016, diolah

Nilai kewajiban Kota Cimahi telah tumbuh hampir 2,5 kali besarnya pertumbuhan nilai Aset yaitu tepatnya 13,63 persen. Kewajiban ini dibagi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dengan kontribusi sebesar 53,23 persen dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar 46,37 persen. Pertumbuhan nilai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang tidaklah terlalu berbeda secara signifikan. Masing-masing telah tumbuh sebesar 17,35 persen dan 17,38 persen.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pada bagian ini disajikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Pola kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan untuk pembangunan jangka menengah periode 2017-2022.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi penggunaan anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran, serta alokasi pemenuhan belanja aparatur sebelumnya. Analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Data Belanja pada periode 2012-2016 menunjukkan rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2012-2016 sebesar 82,4 persen. Tingkat penyerapan belanja tertinggi pada periode ini yaitu di Tahun 2012 sebesar 89,4 persen, dengan Belanja Tidak Langsung terserap sebanyak 90 persen dan Belanja Langsung terserap 88,7 persen.

Pada periode pembangunan jangka menengah yang lalu, rata-rata pertumbuhan penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 87,2 persen dan rata–rata pertumbuhan penyerapan Anggaran Belanja Langsung sebesar 78,9 persen. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah kota dalam menyerap anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung tidak terlalu optimal jika dibandingkan belanja tidak langsung.

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 secara serial disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Cimahi Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012			2013			2014		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
	BELANJA	**932.190.245.434**	**833.411.877.047**	**89,4**	**1.090.405.761.121**	**922.343.621.547**	**84,6**	**1.282.252.417.802**	**1.042.608.970.972**	**81,3**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**507.043.952.143**	**456.188.340.476**	**90,0**	**544.297.954.911**	**491.918.784.507**	**90,4**	**625.197.550.912**	**524.447.426.206**	**83,9**
1	Belanja Pegawai	462.940.112.932	419.231.811.376	90,6	506.981.721.615	468.117.089.185	92,3	600.649.591.112	512.129.234.945	85,3
2	Belanja Bunga	1.231.684.760	1.113.034.255	90,4	1.231.684.700	901.181.666	73,2	1.049.575.600	814.185.273	77,6
3	Belanja Subsidi									
4	Belanja Hibah	38.956.455.751	34.975.700.439	89,8	24.853.000.000	21.699.330.000	87,3	20.669.710.500	9.559.070.313	46,2
5	Belanja Bantuan Sosial	332.300.000	25.000.000	7,5	632.300.000	50.000.000	7,9	505.840.000	175.840.000	34,8
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	781.833.700	781.833.656	100,0	781.833.700	781.833.656	100,0	822.833.700	733.672.675	89,2

NO	URAIAN	2012			2013			2014		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
8	Belanja Tidak Terduga	2.801.565.000	60.960.750	2,2	9.817.414.896	369.350.000	3,8	1.500.000.000	1.035.423.000	69,0
B	**Belanja Langsung**	**425.146.293.290**	**377.223.536.571**	**88,7**	**546.107.806.209**	**430.424.837.040**	**78,8**	**657.054.866.890**	**518.161.544.766**	**78,9**
1	Belanja Pegawai	77.120.986.850	72.608.278.603	94,1	89.499.063.394	85.729.394.837	95,8	70.866.330.650	79.365.866.807	112,0
2	Belanja Barang dan Jasa	214.733.587.582	192.770.220.766	89,8	270.953.075.420	223.962.477.736	82,7	339.927.803.451	287.349.176.601	84,5
3	Belanja Modal	133.291.718.858	111.845.037.202	83,9	185.655.667.395	120.732.964.467	65,0	246.260.732.789	151.446.501.358	61,5

NO	URAIAN	2015			2016			Rata-Rata Penyerapan
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	
	BELANJA	**1.411.339.250.907**	**1.074.961.450.668**	**76,2**	**1.690.543.881.701**	**1.358.761.627.001**	**80,4**	**82,4**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**645.644.007.839**	**526.116.891.003**	**81,5**	**673.726.750.866**	**607.627.563.859**	**90,2**	**87,2**
1	Belanja Pegawai	640.071.639.160	522.500.128.253	81,6	600.482.692.390	553.346.545.361	92,2	88,4
2	Belanja Bunga	1.024.100.375	748.094.650	73,0	6.512.550.375	893.522.830	13,7	65,6
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	2.200.000.000	2.200.000.000	100,0	52.403.418.800	52.345.818.800	99,9	84,6
5	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	50.000.000	100,0	300.000.000	160.000.000	53,3	40,7
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	926.912.304	618.668.100	66,7	926.912.304	723.393.018	78,0	86,8
8	Belanja Tidak Terduga	1.371.356.000		0,0	13.101.176.996	158.283.850	1,2	15,2
B	**Belanja Langsung**	**765.695.243.068**	**548.844.559.665**	**71,7**	**1.016.817.130.835**	**751.134.063.142**	**73,9**	**78,4**
1	Belanja Pegawai	74.750.949.030	79.014.364.196	105,7	96.839.206.131	95.107.639.784	98,2	101,2

NO	URAIAN	2015			2016			Rata-Rata Penyerapan
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	
2	Belanja Barang dan Jasa	345.338.603.395	289.047.103.053	83,7	434.057.542.893	380.857.789.689	87,7	85,7
3	Belanja Modal	345.605.690.643	180.783.092.416	52,3	485.920.381.811	275.168.633.669	56,6	63,9

Sumber : LRA Tahun 2012,2013, 2014,2015 dan 2016, diolah

2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan gambaran tentang belanja daerah yang menganalisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Cimahi. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahun. Tren kenaikan ini terjadi pula pada Belanja Tidak Langsung, yang proporsinya selalu lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Komponen terbesar pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan disusul oleh Belanja Tambahan Penghasilan.

Sementara itu, Belanja Langsung memiliki variasi besaran selama 5 tahun (2012-2016). Belanja Langsung cenderung meningkat tiap tahun kecuali pada Tahun 2014 terjadi penurunan. Komponen di Belanja Langsung yang memiliki proporsi terbesar setiap tahun adalah Belanja Honorarium PNS. Lebih rinci untuk masing-masing komponen belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2012 sampai 2016 ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Cimahi Tahun 2012-2016

No	Uraian	Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	**462.852.718.989**	**515.332.437.175**	**552.451.062.322**	**563.394.268.993**	**609.085.229.370**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**419.231.811.376**	**468.117.089.185**	**512.129.234.945**	**522.500.128.253**	**553.337.039.683**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	292.821.968.037	307.236.429.345	325.026.885.161	343.232.117.806	358.024.128.628
2	Belanja Tambahan Penghasilan	118.266.273.135	150.834.925.142	178.560.046.948	169.462.195.337	185.348.927.413
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.866.300.200	4.275.420.000	4.355.630.000	4.337.730.000	4.323.910.000
4	Biaya Pemungutan Pajak	2.191.714.350	35.371.700			7.314.604
5	Insentif Pemungutan Pajak	2.701.164.350	5.454.281.996	3.857.497.100	5.062.611.250	5.225.512.900
6	Insentif Pemungutan Retribusi	384.391.304	280.661.002	329.175.736	405.473.860	407.246.138

No	Uraian	Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
B	**Belanja Langsung**	**43.620.907.613**	**47.215.347.990**	**40.321.827.377**	**40.894.140.740**	**55.748.189.687**
1	Belanja Honorarium PNS	17.950.889.650	21.872.321.375	23.605.099.500	22.782.434.700	27.277.115.800
2	Honorarium Non PNS/Honorer	8.824.576.200	6.412.902.500	142.898.000	112.230.000	10.000.000
3	Belanja Uang Lembur	1.661.681.750	2.238.200.000	3.019.929.850	2.922.685.500	2.723.721.600
4	Belanja Premi Asuransi	1.775.805.842	2.645.297.215	1.804.873.987	3.156.194.560	6.918.292.056
5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.628.658.600	2.235.776.550	1.471.305.500	947.151.000	928.379.600
6	Belanja Pakaian Kerja	416.721.900	461.848.500	895.312.600	1.033.907.800	972.813.200
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	1.831.839.550	2.569.748.350	700.262.500	1.493.820.440	2.786.763.900
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	462.291.520	428.333.040	368.183.040	104.000.000	240.400.000
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.366.521.000	3.760.993.000	3.449.810.000	3.128.762.900	5.952.087.650

No	Uraian	Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	3.701.921.601	4.589.927.460	4.864.152.400	5.212.953.840	7.938.615.881

Sumber : LRA Tahun 2012,2013, 2014,2015 dan 2016, diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun untuk periode 2012-2016. Alokasi belanja tersebut selanjutnya dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja ditambah pembiayaan pengeluaran) untuk mengetahui berapa besar porsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Cimahi.

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2012 persentasenya sebesar 55,4 persen dan tahun 2016 sebesar 44,8 persen. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2012-2015, Belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan belanja kebutuhan aparatur sebab masih diatas 50 persen. Sementara pada Tahun 2016, belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Cimahi Tahun 2012-2016

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2012	462.852.718.989	835.589.649.391	55,4
2	2013	515.332.437.175	929.052.268.983	55,5
3	2014	552.451.062.322	1.044.727.991.992	52,9
4	2015	563.394.268.993	1.075.950.149.138	52,4
5	2016	609.085.229.370	1.359.617.135.221	44,8

Sumber : Hasil Analisis,2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan anggaran Kota Cimahi periode 2012-2016. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap penyaluran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Adapun gambaran defisit riil anggaran selama periode tersebut dan upaya pembiayaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran Kota Cimahi

No.	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-Rata
01.00	Realisasi Pendapatan Daerah	1.117.121.948.298	1.186.804.131.668	1.219.010.271.220	1.174.312.117.062
	Dikurangi realisasi:				
02.00	Belanja Daerah	1.042.608.970.972	1.074.961.450.668	1.358.761.627.001	1.158.777.349.547
03.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	152.373.929.801	226.705.454.887	346.012.066.667	241.697.150.452
Defisit riil		(77.860.952.476)	(114.862.773.887)	(485.763.422.448)	(226.162.382.937)
Defisit riil %		-6,969780926	-9,678326088	-39,8490016	(18,83)
Pertumbuhan Defisit riil			38,86126681	311,7344387	175,30

Sumber : LRA Tahun 2014, 2015, dan 2016, diolah

Selama 3 (tiga) tahun yaitu 2014-2016 terlihat bahwa nilai Defisit Rill APBD Kota Cimahi cenderung mengalami kenaikan yang terus menerus secara signifikan, dengan rata-rata sebesar 173,30 persen per tahun. Besarnya Defisit Riil dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar 18,83 persen.

Berdasarkan 2014-2016, diketahui bahwa SiLPA pada periode ini naik terus dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 48 persen per tahunnya. Sementara hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

tumbuh lebih lambat yaitu sebesar 5,06 persen. Hasil penerimaan Pinjaman Daerah meningkat sangat signifikan karena adanya upaya pelunasan pinjaman Bank Dunia. Sementara itu, Pos Piutang Daerah kota cenderung mengalami penurunan sebesar 2,65 persen.

Tabel 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Cimahi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil		
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	154.492.950.821	226.925.244.765	338.548.135.887
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	8.122.400.000	7.446.400.000	8.819.200.000
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	768.908.592	8.319.439.000
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	150.068.042.468	48.427.671.594	78.659.488.900

Sumber : LRA Tahun 2014, 2015, dan 2016, diolah

Tabel 3.11.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Cimahi Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014		2015		2016		Rata-Rata
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	%
01.00	Jumlah SiLPA	154.492.950.821,31	100,00	226.925.244.765,26	100,00	338.548.135.887,31	100,00	100,00
02.00	Pelampauan penerimaan PAD	20.119.959.574,70	13,02	42.775.562.009,45	18,85	33.313.314.547,34	9,84	13,90
03.00	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(7.510.375.313,00)	(4,86)	(17.833.819.550,00)	(7,86)	(28.615.240.160,00)	(8,45)	(7,06)
04.00	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(27.089.749.308,00)	(17,53)	(24.407.129.937,00)	(10,76)	16.102.150.902,00	4,76	(7,84)
05.00	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-
06.00	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
07.00	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : LRA Tahun 2014, 2015, dan 2016, diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data pada periode 2014 sampai 2016 sebagaimana disajikan pada tabel diatas, terlihat bahwa besarnya pelampauan penerimaan PAD dari yang direncanakan adalah sebesar 13,9 persen. Akan tetapi besarnya penerimaan dana perimbangan ternyata selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu lebih rendah dari yang ditargetkan atau direncanakan yaitu sebesar 7,06 persen dari total SILPA. Hal yang sama juga terjadi pada pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ternyata selalu lebih rendah yaitu 7,84 persen. Terus menurunnya penerimaan dari dana perimbangan hendaknya menjadi perhatian karena membuat SiLPA terus menerus membesar.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan disajikan bertujuan untuk mengetahui kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai program-program pembangunan, kapasitas keuangan daerah merupakan total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Bagian ini berisi 2 (dua) pembahasan yaitu : 1) Analisis anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Cimahi tahun 2015-2020; 2) Prioyeksi APBD tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk menganalisis anggaran akan mengupas penyesuaian APBD akibat adanya pandemi COVID-19. Proyeksi pada tahun 2021 dan 2022 disusun berdasarkan data historis tahun 2015-2020.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi untuk tahun 2021 dan 2022 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perkiraan realisasi tahun 2020. Berdasarkan hasil perhitungan, rata–rata pertumbuhan pendapatan selama periode tahun 2015 - 2019 sebesar 5,50 persen. Dari ketiga komponen pendapatan, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar

11,83 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan yang sangat signifikan dari Dana Insentif Daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen kedua yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 8,91 persen dengan komponen Pajak dan Retribusi Daerah yang berkontribusi paling besar terhadap peningkatan rata-rata pertumbuhan PAD masing-masing sebesar 12,52 persen dan 13,19 persen. Namun besarnya rata-rata pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh peningkatan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.73.020.231.054,00. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait *Tax Amnesty*.

Pada sisi Belanja, rata-rata pertumbuhan pada periode tahun 2015-2019 sebesar 9,25 persen. Komponen Belanja Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi yaitu sebesar 13,79 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yang hanya 4,67 persen. Pada komponen Belanja Langsung, Belanja Barang dan Jasa memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi sebesar 17,99 persen. Sedangkan untuk komponen Belanja Tidak Langsung, Belanja Hibah menjadi komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi karena adanya peningkatan anggaran Belanja Hibah yang sangat signifikan pada Tahun 2016. Dari realisasi pendapatan dan belanja selama periode tahun 2015 – 2019 tersebut maka rata-rata pertumbuhan Defisit Anggaran sangat besar yaitu 63,79 persen.

Untuk rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah selama periode tahun 2015 – 2019 adalah sebesar 9,43 persen. Pengeluaran pembiayaan menjadi komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi daripada penerimaan pembiayaan yang disebabkan adanya pembayaran pokok hutang yang besar pada tahun 2019. Adapun rata-rata pertumbuhan SILPA pada periode tahun 2015 – 2019 adalah sebesar 5,49 persen.

Untuk realisasi anggaran tahun 2015 – 2019 secara rinci disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.12.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
4	**PENDAPATAN**	**1,186,804,131,668**	**1,218,994,660,218**	**1,481,647,893,979**	**1,316,230,476,122**	**1,433,371,386,974**	**5.50%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**268,816,074,332**	**286,049,615,484**	**383,911,991,301**	**335,016,530,127**	**360,955,331,173**	**8.91%**
4.1.1	Pajak Daerah	112,124,306,126	112,060,908,223	165,391,683,082	134,770,330,583	163,136,977,065	12.52%
4.1.2	Retribusi Daerah	9,865,337,459	9,750,932,968	10,239,610,285	12,220,530,827	15,832,320,921	13.19%
4.13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,446,400,000	8,819,200,000	9,256,000,000	9,391,200,000	9,297,600,000	5.96%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	139,380,030,747	155,418,574,293	199,024,697,934	178,634,468,717	172,688,433,187	6.50%
4.2	**Dana Perimbangan**	**628,232,060,766**	**783,781,903,794**	**820,783,188,232**	**788,025,064,842**	**801,160,744,727**	**6.79%**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	45,907,112,766	68,092,972,794	77,600,947,922	66,808,176,054	60,483,901,742	9.73%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	548,703,908,000	586,582,418,000	576,278,051,000	576,278,051,000	598,700,744,000	2.26%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	33,621,040,000	129,106,513,000	166,904,189,310	144,938,837,788	141,976,098,985	74.52%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**289,755,996,570**	**149,163,140,940**	**276,952,714,446**	**193,188,881,153**	**271,255,311,074**	**11.83%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	2,444,000,000	2,488,000,000	2,192,000,000	1,792,065,471	-9.45%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	103,608,830,930	107,318,950,820	117,325,163,171	128,044,295,494	129,853,567,820	5.86%
4.3.4	Dana Penyesuaian	146,009,580,000	0	0	0	0	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	36,433,091,640	34,400,190,120	50,885,928,000	10,167,148,716	48,860,258,783	85.72%
4.3.6	Dana BOS	3,704,494,000	-	50,871,020,275	48,285,436,943	48,657,280,000	-2.16%
4.3.7	Dana Insentif Daerah	-	5,000,000,000	55,382,603,000	4,500,000,000	42,092,139,000	583.72%
5	**BELANJA**	**1,074,961,450,668**	**1,358,743,658,898**	**1,339,382,098,733**	**1,489,072,968,877**	**1,501,760,938,252**	**9.25%**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**526,116,891,003**	**607,627,563,859**	**501,702,378,675**	**592,738,168,300**	**607,397,864,512**	**4.67%**
5.1.1	Belanja Pegawai	522,500,128,253	553,346,545,361	483,803,464,386	570,330,482,845	586,764,369,789	3.53%
5.1.2	Belanja Bunga	748,094,650	893,522,830	1,519,531,175	518,723,151	687,088,955	14.02%
5.1.4	Belanja Hibah	2,200,000,000	52,345,818,800	13,947,887,750	16,159,150,000	15,355,225,000	554.22%

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50,000,000	160,000,000	-	344,250,000	3,227,128,000	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	0	0	0	0	0	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa	618,668,100	723,393,018	1,112,117,364	926,912,304	1,133,383,686	19.07%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	178,916,425	1,319,378,000	4,458,650,000	230,669,082	195.13%
5.2	**Belanja Langsung**	**548,844,559,665**	**751,134,063,142**	**837,679,720,058**	**896,334,800,577**	**894,363,073,740**	**13.79%**
5.2.1	Belanja Pegawai	79,014,364,196	95,107,639,784	113,042,912,108	88,719,622,895	81,599,837,059	2.42%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289,047,103,053	380,857,789,689	454,312,088,607	531,594,947,618	552,425,239,111	17.99%
5.2.3	Belanja Modal	180,783,092,416	275,139,538,669	270,324,719,343	276,020,230,064	260,337,997,570	11.72%
	SURPLUS/DEFISIT	**111,842,681,000**	**139,749,990,679**	**142,265,795,246**	**-172,842,492,754**	**-68,389,551,278**	**-63.79%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**226,705,454,887**	**345,974,183,692**	**197,050,112,792**	**339,184,615,618**	**190,083,302,756**	**9.43%**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**226,705,454,887**	**346,829,691,912**	**206,225,060,012**	**340,040,123,838**	**214,728,841,711**	**10.12%**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	226,925,244,765	338,510,252,912	206,225,060,012	340,040,123,838	165,917,985,198	5.94%
6.1.2	Pinjaman Daerah	768,908,592	0	0	0	0	
6.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	8,319,439,000	0	0	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					48,810,856,513,00	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**988,698,470**	**855,508,220**	**9,174,947,220**	**855,508,220**	**24,645,538,955**	**912.28%**
6.2.1	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	988,698,470	855,508,220	9,174,947,220	855,508,220	24,645,538,955	912.28%

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan APBD pada tahun 2015 – 2019 menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Bila Pendapatan berdasarkan APBD Tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar rata-rata 5,50 persen. Begitu juga pada sisi Belanja mengalami kenaikan pada APBD Tahun 2020 sebesar rata-rata 9,25 persen.

Pada pelaksanaannya APBD Tahun 2020 harus mengalami beberapa kali penyesuaian atau *Refocusing.* Hal ini disebabkan adanya pandemic *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Penyesuaian atau anggaran tahun 2020 merupakan salah satu amanat pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah sebagai implementasi dari beberapa peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksananya, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Hasil penyesuaian anggaran tahun 2020 dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2020. Setelah perubahan dapat dilihat bahwa Pendapatan mengalami penurunan sebesar 0,18 persen dan Belanja mengalami kenaikan sebesar 2,23 persen. Adapun dari perkiraan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 65,30 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 31,46 persen.

Tabel 3.13.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2020			Perkiraan Realisasi	% Realisasi
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	% Penyesuaian		
4	**PENDAPATAN**	**1.460.263.737.006**	**1.462.841.536.680**	**0,18%**	**1.331.409.195.380**	**91,02%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**413.275.043.059**	**331.843.741.664**	**-19,70%**	**350.088.506.804**	**105,50%**
4.1.1	Pajak Daerah	210.856.941.890	136.545.238.041	-35,24%	148.013.449.966	108,40%
4.1.2	Retribusi Daerah	19.591.393.672	14.825.308.329	-24,33%	14.278.757.163	96,31%
4.13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.391.200.000	0,00%	9.778.080.000	104,12%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	173.435.507.496	171.081.995.294	-1,36%	178.018.219.675	104,05%
4.2	**Dana Perimbangan**	**820.677.634.000**	**809.451.077.197**	**-1,37%**	**782.081.907.564**	**96,62%**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	59.459.407.000	103.946.603.056	74,82%	89.106.849.828	85,72%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	600.104.380.000	542.550.698.000	-9,59%	539.717.972.000	99,48%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	161.113.847.000	162.953.776.141	1,14%	153.257.085.736	94,05%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**226.311.059.947**	**321.546.717.819**	**42,08%**	**199.238.781.012**	**61,96%**
4.3.1	Pendapatan Hibah		0		136.884.794	100,00%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	147.680.364.947	134.519.705.819	-8,91%	91.509.268.218	68,03%
4.3.4	Dana Penyesuaian	0	52.252.300.000,00	100,00%	0	0,00%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0	37.044.684.000	100,00%	9.862.600.000	26,62%
4.3.6	Dana BOS				-	
4.3.7	Dana Insentif Daerah	78.630.695.000	97.730.028.000	24,29%	97.730.028.000	100,00%
5	**BELANJA**	**1.541.975.799.738**	**1.576.350.590.820**	**2,23%**	**1.029.292.260.246**	**65,30%**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**710.945.562.233**	**787.674.516.194**	**10,79%**	**538.613.477.253**	**68,38%**
5.1.1	Belanja Pegawai	687.484.193.570	572.571.612.934	-16,71%	496.567.997.735	86,73%
5.1.2	Belanja Bunga	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%	580.029.038	58,00%
5.1.4	Belanja Hibah	18.750.326.480	15.688.221.480	-16,33%	13.016.471.450	82,97%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	3.394.820.000	100,00%	2.845.575.000	83,82%

Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2020			Perkiraan Realisasi	% Realisasi
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	% Penyesuaian		
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa					
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.711.042.182	195.019.861.780	5155,12%	25.603.404.030	13,13%
5.2	**Belanja Langsung**	**831.030.237.505**	**788.676.074.626**	**-5,10%**	**490.678.782.993**	**62,22%**
5.2.1	Belanja Pegawai	84.437.210.909	98.022.822.976	16,09%	76.649.139.044	78,20%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.145.749.028	520.004.318.232	-2,65%	349.382.214.704	67,19%
5.2.3	Belanja Modal	212.447.277.568	170.648.933.418	-19,67%	64.647.429.245	37,88%
	SURPLUS/DEFISIT	**-81.712.062.732**	**-113.509.054.140**	**38,91%**	**302.116.935.134**	**-266,16%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**81.712.062.732**	**113.509.054.140**	**38,91%**	**96.108.998.790**	**84,67%**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**86.641.871.069**	**121.693.751.477**	**40,46%**	**130.241.943.878**	**107,02%**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	86.641.871.069	121.693.751.477	40,46%	121.693.751.478	**100,00%**
6.1.2	Pinjaman Daerah					
6.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				8.548.192.400,00	**100,00%**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4.929.808.337**	**8.184.697.337**	**66,02%**	**34.132.945.088**	**417,03%**
6.2.1	Penyertaan Modal	2.500.000.000	5.754.889.000	130,20%	0	**0,00%**
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2.429.808.337	2.429.808.337	0,00%	34.132.945.088	**1404,76%**

Dengan menggunakan hasil analisis dari rata-rata pertumbuhan realisasi APBD tahun 2015 – 2019 dan perkiraan realisasi APBD Tahun 2020 maka disusun proyeksi APBD tahun 2021 dan 2022. Pendapatan pada tahun 2021-2022 diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,91 persen. Dari penurunan 11,91 persen tersebut terdapat beberapa kelompok Pendapatan yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Komponen yang mengalami kenaikan yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,82 persen. Sementara kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu pendapatan transfer yakni sebesar 16,28 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Lebih lanjut, proyeksi pendapatan Tahun 2021 dan 2022 untuk beberapa komponen tidak ditargetkan dengan pertimbangan kewenangan alokasinya tidak berada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Beberapa sumber pendapatan dimaksud antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, BOS, Dana Insentif Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sisi Belanja untuk tahun 2021-2022 diproyeksikan mengalami rata-rata mengalami penurunan sebesar 12,42 persen. Adanya kondisi luar biasa akibat Pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2021 menjadi pertimbangan dalam menghitung proyeksi Belanja tersebut.

Dengan pertimbangan kondisi tersebut, maka skenario keuangan sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diupayakan dengan memprioritaskan belanja untuk :

1. Penerapan pelayanan dasar;
2. Percepatan penanganan wabah COVID-19; percepatan penanganan dampak pandemi; dan pemulihan pasca pandemi. Alokasi belanja mulai Tahun 2020 sampai dengan 2022 diarahkan untuk eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring

pengaman sosial (*social safety net*), dan dukungan terhadap dunia usaha termasuk UMKM;

3. Mendukung pencapaian visi, misi dan prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2017-2022; dan
4. Program-program yang mendukung sasaran dan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Pada Tabel 3.14. disajikan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyajian perencanaan anggaran berdasarkan peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah akan memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.14.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan Akun PP Nomor 12 Tahun 2019
dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	RKPD 2022
4,00	**PENDAPATAN**	**1.293.373.842.498,00**	**1.080.785.014.364,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**344.133.306.653,00**	**345.126.746.519,00**
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	149.306.538.666,00
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	13.446.340.000,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	172.982.667.853,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**949.240.535.845,00**	**735.658.267.845,00**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**820.769.545.501,00**	**607.187.277.501,00**
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.769.545.501,00	607.187.277.501,00
4.2.01.02	Dana insentif daerah	-	-
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-
4.2.01.05	Dana desa	-	-
4.2.02	**Transfer antardaerah**	**128.470.990.344,00**	**128.470.990.344,00**
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344,00	128.470.990.344,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	-

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	RKPD 2022
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**-**	**-**
4.3.01	Hibah	-	-
4.3.02	Dana darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-
5,00	**BELANJA**	**1.524.593.549.263,00**	**1.456.603.610.506,00**
5.1	**Belanja operasi**	**1.326.436.826.675,00**	
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307,00	
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780,00	
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.04	Belanja subsidi	-	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	13.400.000.000,00
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	
5.2	**Belanja modal**	**174.276.636.698,00**	**-**
5.2.1	Belanja Modal	174.276.636.698,00	
5.3	**Belanja tidak terduga**	**23.880.085.890,00**	**25.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	25.000.000.000,00
5.4	**Belanja transfer**	**-**	
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-	
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-	
	Surplus/Defisit	**(231.219.706.765,00)**	**(375.818.596.142,00)**
6,00	**PEMBIAYAAN**	**231.219.706.765,00**	**66.228.020.598,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**233.649.515.102,00**	**78.657.828.935,00**
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102,00	78.657.828.935,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.429.808.337,00**	**12.429.808.337,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	-	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-

Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, hubungan antara belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian. Belanja Pemerintah (*Government Expenditure*) terutama Belanja Langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut dapat terwujud apabila belanja pemerintah dapat memberikan daya ungkit bagi sektor riil pelaku usaha (termasuk UMKM) di Kota Cimahi. Belanja daerah akan diupayakan agar berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku ekonomi yang berdomisili (memiliki NPWP) di Kota Cimahi.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada Sub bab ini disajikan penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
   Data periode 2017 sampai dengan 2020 menunjukkan adanya SiLPA yang bervariasi dari tahun ke tahun. Namun dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada Tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19, diasumsikan seluruh penerimaan daerah digunakan. Hal ini menyebabkan tahun 2022 tidak terdapat SiLPA atau 0 (nol).

Tabel 3.15.
Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Uraian	Realisasi (Rp) APBD (Rp)				Proyeksi (Rp)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	206.225.060.012,00	340.040.123.838,00	166.342.122.863,00	233.649.515.102,00	233.649.515.102,00	78.657.828.935,00

Sumber : data diolah oleh Bappeda Kota Cimahi

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Kebutuhan pengeluaran wajib dan mengingat pada periode RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dibagi menjadi 2 (dua) konsep. Konsep pertama adalah pengeluaran wajib dan mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini diterapkan pada realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2017 sampai dengan 2019 serta proyeksi Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16. dengan nilai yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebesar Rp.406.523.294.738,00 dan naik terus sampai Tahun 2020 ditargetkan Rp.594.787.459.647,00.

Sedangkan konsep kedua diterapkan untuk proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2021 dan 2022. Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2021 dan tahun 2022 menggunakan definisi belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penjelasan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sedangkan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.16.

Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Cimahi Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi
		2017	2018	2019	2020*
A	**Belanja Tidak Langsung**	**397.348.347.518**	**488.604.675.555**	**504.330.911.840**	**589.102.762.310**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	214.018.948.798	286.526.614.374	296.081.270.703	351.323.623.546
2	Tambahan Penghasilan PNS	168.540.915.100	170.954.429.097	175.510.319.000	199.435.233.064
3	Gaji dan Tunjangan DPRD	2.894.350.300	21.625.317.273	23.513.656.133	25.021.945.700
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	8.358.220.000	7.284.375.000	6.860.700.000	10.315.620.000
5	Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	119.597.652	168.304.356	167.730.514	182.340.000
6	Belanja Penerimaan Lainnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota	370.000.000	600.000.000	600.000.000	624.000.000
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	414.667.129	-	-	1.200.000.000
8	Belanja Bunga	1.519.531.175	518.723.151	463.851.804	1.000.000.000
9	Belanja Bantuan Keuangan	1.112.117.364	926.912.304	1.133.383.686	-

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi
		2017	2018	2019	2020*
	Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa				
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**9.174.947.220**	**855.508.220**	**4.491.680.520**	**5.684.697.337**
1	Penyertaan Modal	-	-	3.499.999.500	3.254.889.000
2	Pembayaran Pokok Utang	9.174.947.220	855.508.220	991.681.020	2.429.808.337
	TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT (A+B)	406.523.294.738	489.460.183.775	508.822.592.360	594.787.459.647

Sumber : hasil analisis, 2020
*Keterangan : * Perubahan Keempat APBD TA 2020*

Tabel dibawah menyajikan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022 dengan nilai yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Tahun 2021 ditargetkan Rp.872.157.456.990,00 dan naik sebesar 29,04 persen pada tahun 2022 menjadi Rp.1.125.404.634.223,00 Peningkatan ini disebabkan adanya alokasi belanja tanah untuk pengembangan RSUD di belanja infrastruktur. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel 3.17.

Dalam menyusun APBD, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus lainnya yang terdapat pada pedoman penyusunan APBD. Hal khusus lainnya tersebut adalah antara lain berupa kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal khusus ini antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka pada proyeksi belanja wajib dan mengikat dialokasikan anggaran untuk :

a. Fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
b. Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
c. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah

yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang APBN);

d. Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah;
e. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
f. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.17.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 an Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Uraian	Proyeksi			
		2021	%	2022	%
A	**Belanja Mengikat**	**363.006.132.246**		**445.356.132.246**	
1	Belanja Pegawai	218.006.132.246	16,2%	300.356.132.246	24,2%
2	Belanja Pegawai BLUD	62.350.000.000	4,6%	62.350.000.000	5,0%
3	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.143.688.000	5,6%	76.143.688.000	6,1%
4	Belanja Modal BLUD	6.506.312.000	0,5%	6.506.312.000	0,5%

No	Uraian	Proyeksi			
		2021	%	2022	%
B	**Belanja Wajib**	**505.721.516.407**		**676.618.693.640**	
1	Pendidikan	297.619.015.356	22,1%	249.901.548.498	20,1%
2	Kesehatan	94.385.321.936	14,3%	84.337.262.679	15,3%
3	Infrastruktur	51.679.027.393	8,7%	271.405.418.191	45,9%
4	Peningkatan kapasitas SDM	2.713.661.464	0,3%	4.004.965.401	0,3%
5	Penguatan APIP	9.267.221.707	0,9%	13.786.830.374	1,1%
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.057.268.551	3,7%	53.182.668.496	4,3%
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.429.808.337**		**2.429.808.337**	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-		-	
2	Penyertaan modal daerah	1.000.000.000			
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337		2.429.808.337	
4	Pemberian Pinjaman Daerah				
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.				
	Total Belanja Wajib Mengikat	**778.345.970.644**		**788.345.970.644**	

Sumber : hasil analisis, 2020

3. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dilakukan berdasarkan penghitungan proyeksi pendapatan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kota Cimahi.

Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah adalah belanja langsung yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan. Berdasarkan pola penghitungan tersebut, maka realisasi kapasitas riil keuangan daerah Kota Cimahi pada periode 2017 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18.
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2020

Uraian	Realisasi			Proyeksi
	2017	2018	2019	2020*
Pendapatan	1.481.647.893.979	1.316.230.476.122	1.429.423.973.103	1.399.005.933.947
Pencairan Dana Cadangan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	206.225.060.012	340.040.123.838	166.342.122.863	121.693.751.477
Total penerimaan	1.687.872.953.991	1.656.270.599.960	1.595.766.095.966	1.520.699.685.424
Dikurangi :				
Pengeluaran pembiayaan	9.174.947.220	855.508.220	4.491.680.520	5.684.697.337
Belanja Tidak Langsung	501.702.378.675	592.738.168.300	607.051.965.713	788.878.013.015

Uraian	Realisasi			Proyeksi
	2017	2018	2019	2020*
SILPA	339.315.908.038	166.342.122.864	112.533.776.117	
Kapasitas riil keuangan daerah	**837.679.720.058**	**896.334.800.576**	**871.688.673.616**	**726.136.975.072**

Sumber : hasil analisis, 2020
*Keterangan : * Perubahan Keempat APBD TA 2020*

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berlaku lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Untuk itu, konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan adanya perubahan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dengan menjumlahkan seluruh penerimaan daerah lalu dikurangi dengan pengeluaran wajib dan mengikat. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah adalah besaran anggaran yang dapat dibelanjakan di luar dari alokasi pengeluaran wajib dan mengikat. Proyeksi kapasitas keuangan daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.19.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Proyeksi	
	2021	2022
Pendapatan	1.293.373.842.498,00	1.080.785.014.364,00
Sisa Lebih Perhitungan	233.649.515.102,00	78.657.828.935,00

Uraian	Proyeksi	
	2021	2022
Anggaran		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Total penerimaan	1.527.023.357.600,00	1.159.442.843.299,00
Dikurangi :		
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat	778.345.970.644,00	788.345.970.644,00
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	**512.765.106.602,00**	**371.096.872.655,00**

Sumber : hasil analisis, 2020

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan langkah berikutnya setelah mengetahui kapasitas keuangan daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Untuk itu, alokasi anggaran kota diprioritaskan untuk :

a. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
b. Penerapan pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimal/SPM);
c. Pencapaian visi dan misi RPJMD;
d. Mendukung upaya percepatan penanganan dan pemulihan pasca Pandemi COVId-19 (mulai Tahun 2020);
e. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi; dan
f. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terbagi atas 3 (tiga) prioritas. Prioritas tersebut meliputi Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat; Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan

dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut; dan Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi ketiga prioritas tersebut berlaku untuk Tahun 2018 sampai dengan 2020, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20.
Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2018-2020

Uraian	Realisasi		Proyeksi
	2018	2019	2020*
Kapasitas riil keuangan daerah :	**896.334.800.576**	**871.688.673.616**	**726.136.975.072**
Prioritas I	177.113.394.682	164.079.097.083	111.165.097.749
Prioritas II	682.052.947.959	696.543.863.596	580.237.267.531
Prioritas III	37.168.457.935	11.065.712.937	34.734.609.792

Sumber : hasil analisis, 2020
*Keterangan : * Perubahan Keempat APBD TA 2020*

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2021 dan 2022 akan dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walaupun pernyataan prioritas masih sama dengan periode 2018-2020, namun pengertian/lingkup belanja wajib dan mengikat pada prioritas I dan belanja pada prioritas II dan III berbeda dengan Tahun 2021 dan 2022.

Dengan demikian, alokasi kapasitas keuangan daerah Kota Cimahi untuk mendanai pembangunan Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat;
b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; dan
c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Penyajian alokasi kapasitas keuangan untuk prioritas I dan II digabungkan sebab prioritas II yang menggambarkan kebutuhan anggaran untuk belanja pemenuhan visi dan misi serta pemenuhan pelayanan dasar juga menjadi bagian dari prioritas I yang merupakan pengeluaran wajib dan mengikat. Setelah dialokasikan untuk prioritas I dan II, maka sisa dari kapasitas keuangan dialokasikan untuk prioritas III. Adapun alokasi masing-masing prioritas untuk tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21.
Rencana Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Proyeksi	
	2021	2022
Kapasitas keuangan daerah :	**1.348.962.237.760**	**1.240.223.561.580**
a. Prioritas I dan II :	872.157.456.990	1.125.404.634.223
- Prioritas I	508.176.252.903	583.478.193.759
- Prioritas II	363.981.204.087	541.926.440.464
b. Prioritas III	476.804.780.770	114.818.927.357

Sumber : hasil analisis, 2020

Dengan mulai berlakunya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

maka kedepannya akan diukur indeks kualitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi enam dimensi yaitu : (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran indeks akan mulai dilakukan pada tahun 2021.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, Kota Cimahi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, dapat dilihat isu-isu strategis yang menjadi prioritas kota untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan analisis lingkungan internal yang melihat kekuatan dan kelemahan Kota Cimahi serta analisis lingkungan eksternal yang melihat pula peluang dan ancaman yang timbul dari luar Kota Cimahi.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pada perencanaan pembangunan Tahun 2017-2022 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kota Cimahi, antara lain :

4.1.1. Upaya Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal

Meski kondisi kemiskinan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan, dilihat dari 2 (dua) indikasi yaitu meningkatnya garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang, namun jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2019 masih tinggi yaitu sebanyak 26.910 jiwa. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih optimal untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi.

Pandemi COVID-19 mulai berdampak pada kondisi kemiskinan di Kota Cimahi. Banyak penduduk yang berstatus hampir miskin dan rawan miskin akhirnya jatuh pada kemiskinan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020, angka kemiskinan Kota Cimahi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 4,39 persen menjadi 5,11 persen. Penerima bantuan sosial pun terus meningkat bila dihitung dari mulai awal pandemi sampai dengan akhir tahun 2020.

4.1.2. Masih Terjadi Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah. Data Tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan Indeks Gini Kota Cimahi cenderung mengalami penurunan dari 0,395 hingga mencapai 0,363 di Tahun 2019. Dengan kecenderungan penurunan Indeks Gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus tetap mewaspadai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, antara lain pengangguran yang ditandai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi yang meningkat pada Tahun 2019.

4.1.3. Kurangnya Penyerapan Tenaga Kerja

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Cimahi mengalami penurunan hingga menjadi 63,39 persen, sebelumnya pada Tahun 2018 mencapai 64,49 persen. Penurunan angka TPAK tersebut juga diwarnai dengan kondisi kualitas tenaga kerja yang rendah sehingga belum terjadi peningkatan angka penyerapan tenaga kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja. Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Badan Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini dan diperkirakan masih akan berlanjut di tahun depan telah berdampak sangat besar terhadap semua sektor ekonomi di Kota Cimahi terutama

sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, dengan adanya pandemi ini kegiatan produksi hampir di semua perusahaan di Kota Cimahi perlahan-lahan berkurang dan akhirnya terhenti. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi tenaga kerja dimana perusahaan tidak lagi menerima tenaga kerja baru.

4.1.4. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi sedikit mengalami peningkatan sehingga angkanya naik menjadi 8,08 persen.

Permasalahan pengangguran diperkirakan akan bertambah seiring dengan berlanjutnya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak secara ekonomi kepada perusahaan-perusahaan. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan banyak melakukan PHK. Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, sampai dengan bulan November tahun 2020 sudah ada 12 perusahaan yang melakukan PHK dan 17 perusahaan merumahkan pekerjanya. Akibatnya jumlah pengangguran di Kota Cimahi menjadi bertambah. Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi meningkat cukup signifikan dari 8,08 persen di tahun 2019 menjadi 13,30 persen. Bahkan pada posisi ini Kota Cimahi menempati urutan kedua nilai TPT tertinggi se-Jawa Barat.

4.1.5. Menurunnya Kondisi Kemantapan Jalan

Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2019 adalah 118.873 KM. Jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,63 persen dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 persen merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,49 persen merupakan jalan kota. Jalan kota sepanjang 105,19 km menurut kondisi jalan terdiri dari 56,057 km atau 53,29 persen dalam kondisi baik 42,778 km atau

40,67 persen kondisi sedang, atau 6,058 km atau 5,76 persen kondisi rusak.

Kondisi kemantapan jalan di Kota Cimahi sebesar 93,96 persen namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan dengan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa menyediakan trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat. Maka diperlukan kajian tentang standarisasi ruas jalan terhadap kondisi jalan yang ada.

4.1.6. Masih Rendahnya Tingkat Pelayanan Jalan dan Transportasi di Kota Cimahi

Tingkat Pelayanan Jalan atau Level of Service (LOS) di beberapa ruas jalan Kota Cimahi secara rata-rata yaitu nilai C (LOS C) dan nilai rata-rata *Volume Capacity Ratio* (VCR) = 0,64 (Arus stabil; kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan; Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan), walaupun berdasarkan hasil perhitungan LOS ruas jalan Kota Cimahi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi masih terdapat LOS beberapa ruas berada di tingkat/ nilai F (Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar) yaitu Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata (Cihanjuang) dan ruas jalan Mahar Martanegara, terutama pada waktu/ jam sibuk. Adapun saat ini kedua ruas jalan tersebut merupakan jalur penghubung Kabupaten Bandung Barat – Kota Cimahi – Kota Bandung dan Kabupaten Bandung – Kota Cimahi – Kota Bandung.

Permasalahan tersebut diakibatkan oleh karena minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan, sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi tidak optimal. Penyebab lainnya adalah kapasitas jalan yang ada di Kota Cimahi belum memadai/ memenuhi standar fungsi jalan, untuk menampung jumlah kendaraan dari luar daerah yang melintas/ memasuki Kota Cimahi sehingga menambah kepadatan lalu lintas.

Untuk menangani permasalahan rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut, diperlukan beberapa penanganan seperti : penambahan kapasitas ruas jalan, rekayasa lalu lintas, serta perlu adanya pembatasan

volume kendaraan dan harus mendorong perubahan penggunaan moda transportasi di masyarakat (dari kendaraaan pribadi ke transportasi umum/sepeda). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, bahwa Kota Cimahi termasuk dalam kawasan perkotaan inti Cekungan Bandung dilakukan pengembangan transportasi masal yang difokuskan kepada peningkatan pelayanan transportasi dengan menyediakan alat transportasi yang berbasis jalan dan rel. Selain itu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi juga masih perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pelayanan transportasi umum.

4.1.7. Masih Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Memperhatikan 7 indikator kumuh terkait Infrastruktur perumahan dan permukiman, yang diantaranya keteraturan bangunan, jalan lingkungan, sarana air bersih, sarana pelayanan air limbah, sarana persampahan dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah dapat melayani penduduk kota Cimahi, namun belum seluruhnya. Yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, adalah sejauh mana kuantitas dan kualitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara menyeluruh (*no one left behind*) sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, dan air limbah, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar mutu.

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang rendah dapat di indikasikan dengan banyaknya rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni atau kumuh, hal ini dapat dilihat dari SK Kumuh tahun 2015 bahwa kawasan kumuh di kota cimahi seluas 176,77 Ha, dan sudah di tuntaskan tahun 2019 seluas 162,56 Ha sehingga masih ada sisa kawasan kumuh yang harus di tangani seluas 14,21 Ha, untuk memastikan tidak tumbuhnya kawasan kumuh baru perlu di lakukan kembali identifikasi dan verifikasi terkait dengan luas kawasan kumuh di Kota Cimahi. Sebagian besar permukiman kumuh berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan

industri. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang tinggi berdampak terhadap tingginya jumlah kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh. Penataan kawasan perumahan dan permukiman agar memastikan bahwa perumahan yang di bangun sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan saat ini pengembangan perumahan diarahkan untuk pembangunan secara vertikal dan memenuhi standar kelayakan sebagai tempat hunian. Untuk memfasilitasi perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, pemerintah Kota Cimahi menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sebagai tempat sementara sehingga warga Cimahi memiliki rumah sendiri.

4.1.8. Belum Optimalnya Akses Terhadap Air Bersih

Rendahnya akses air bersih masyarakat di Kota Cimahi lebih disebabkan karena belum optimalnya ketersediaan infrastruktur serta terbatasnya sumber air bersih yang layak dan aman yang digunakan oleh masyarakat. Indikasi penyebab kualitas air bersih di Kota Cimahi masih rendah yang pertama adalah tercemarnya air tanah oleh air limbah domestik maupun limbah padat domestik yang menyerap ke dalam tanah. Selanjutnya penyebab rendahnya akses air bersih adalah dari ketersediaan sumber air, saat ini sumber air baku di Kota Cimahi yang dikelola oleh UPTD air Minum Kota Cimahi adalah SPAM Citeureup yang menggunakan sumber air dari Sungai Cibabat, dan akan di kembangkan juga pemanfaatan Sumber air pada sungai Cibeureum dan kolam retensi sebagai sumber air baku.

Selain itu perlu dimaksimalkan penyediaan air bersih secara regional, kerjasama antar daerah terkait pengelolaan air baku masyarakat dimana didalamnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dalam

koordinasi lintas wilayah. Kerjasama tersebut adalah berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber air baku alternatif untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Kota Cimahi melalui sistem perpipaan, mengingat Kota Cimahi memiliki sumber air yang terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.

4.1.9. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019 dengan menggunakan Sistem Kalkulasi IKA-INA (Siskana) menyatakan bahwa kualitas sungai dan anak-anak sungai di Kota Cimahi berstatus marginal (satu tingkat di atas kualitas agak buruk). Hal ini disebabkan pencemaran yang berasal dari air limbah domestik yang masih mendominasi dibandingkan limbah industri, dengan kata lain belum memenuhi baku mutu air limbah domestik. Oleh karenanya pengurangan beban pencemar dari air limbah domestik yang selama ini masih belum terkelola dengan optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Belum adanya SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) terpusat seperti IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kawasan menjadi salah satu penyebab belum terkelolanya air limbah domestik di Kota Cimahi (Strategi Sanitasi Kota, 2015). Unit pengelolaan air limbah domestik (UPTD Air Limbah) Kota Cimahi sampai saat ini masih melakukan kerjasama dengan IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu) Bojongsoang Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja. Saat ini jumlah unit IPAL yang di bangun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini disebabkan karena terkendalanya pengadaan lahan untuk pembangunan dan pemilihan teknologi pengolahan IPAL. Selain terkendala pada kondisi infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang belum terbangun optimal, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik yang aman juga masih kurang.

Untuk memaksimalkan pelayanan terkait pengelolaan Air limbah domestik, pembangunan IPLT diarahkan untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan dengan memperhatikan *Masterplan* Air Limbah

Kota Cimahi, serta ditinjau dari sisi geografi, ketersediaan lahan dan akses pelayanan penduduk yang rawan sanitasi.

4.1.10. Belum Optimalnya Penanganan Genangan dan Banjir di Kota Cimahi

Pelayanan sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam) lebih dari 2 kali setahun merupakan salah satu aspek SPM keciptakaryaan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di Kota Cimahi, menyempitnya 5 (lima) sungai yang melintasi Kota Cimahi yaitu Sungai Cilember, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Cihaur dan Cibiuk masih menjadi penyebab banyaknya genangan banjir pada waktu hujan dikarenakan kapasitasnya sudah tidak memadai (Review Masterplan Drainase, 2018).

Namun seyogyanya perlu ditegaskan bahwa salah satu penyebab banjir adalah alih fungsi lahan di KBU (Kawasan Bandung Utara). Oleh karenanya Kota Cimahi harus memperlebar dan mengembalikan fungsi sungai-sungai khususnya yang ada di wilayah hilir yang akan masuk ke Kabupaten Bandung. Normalisasi sungai ini adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

Berikut adalah rincian permasalahan yang dihadapi oleh Kota Cimahi terkait terjadinya banjir, yaitu penyempitan penampang sungai, pendangkalan, pencemaran, pembuangan limbah, dan limpasan air yang besar dari daerah hulu sungai yang telah disebutkan di atas. Namun usaha yang melibatkan kota/kabupaten sekitar Kota Cimahi ini membutuhkan penanganan lintas kota/kabupaten dimana hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Sedangkan rincian permasalahan terhadap kondisi genangan yang masih terjadi di Kota Cimahi diantaranya yaitu penyempitan penampang saluran di hilir, pencemaran/pembuangan sampah ke saluran, pendangkalan/sedimentasi saluran, penempatan utilitas melintang saluran (pipa PDAM, kabel PLN, kabel FO), dan elevasi/ketinggian daerah

pemukiman lebih rendah dari saluran. Adanya bangunan tidak berizin yang didirikan oleh masyarakat di atas saluran drainase juga menyulitkan proses pemeliharaan saluran drainase. Pembuatan sumur-sumur resapan khususnya di kawasan permukiman cukup padat yang dapat menjadi solusi untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah sehingga akan meminimalisir genangan akibat hujan di kawasan permukiman juga belum efektif dilakukan. Selain penanganan fisik pada kondisi saluran-saluran drainase tersebut, aspek edukasi terhadap masyarakat juga menjadi penting agar masyarakat tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase.

4.1.11. Belum Optimalnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan lainnya adalah adanya penurunan jumlah anggota linmas sebagai sumber daya pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang terlihat dengan adanya penurunan jumlah rasio antara jumlah anggota linmas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

4.1.12. Tingginya Potensi Bencana

Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi melanda wilayah Kota Cimahi adalah gerakan tanah atau longsor, gempa, aliran lahar dan banjir. Lokasi yang berpotensi mengalami bencana gerakan tanah atau longsor berada di sebagian wilayah Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, berada pada wilayah dengan kelerengan diatas 15 persen dengan luas mencapai 147 hektar. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Banjir yang terjadi di Kota Cimahi secara umum disebabkan oleh besarnya volume air larian (*run off*) pada saat curah hujan tinggi, yang juga menyebabkan meluapnya aliran sungai di wilayah Cimahi bagian selatan.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dengan luas mencapai 98 hektar. Sementara itu potensi terjadinya bencana non alam kebakaran juga besar

kemungkinannya terjadi di Kota Cimahi. Lokasi rawan bencana kebakaran di Kota Cimahi berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi. Penanganan terhadap bencana kebakaran banyak terkendala dikarenakan diantaranya aksesibilitas jalan menuju lokasi kebakaran tidak bisa dimasuki oleh kendaraan pemadam kebakaran, masih kurangnya sosialisasi terkait penanganan bencana kebakaran.

Potensi bencana yang mengancam Kota Cimahi selain yang disebutkan diatas, potensi bencana yang harus dihadapi adalah gempa bumi, puting beliung dan kekeringan. Melihat permasalahan potensi terjadinya bencana alam dan non alam tersebut, maka Kota Cimahi perlu melakukan upaya pengelolaan manajemen kebencanaan yang komprehensif.

4.1.13. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam konteks lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota yang menyebabkan degradasi lingkungan dan masih belum tercapainya standar pelayanan minimal. Permasalahan tersebut terkait dengan : 1) tidak adanya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah kota. Saat ini Kota Cimahi memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir yang berada di Desa Sarimukti Kabupaten Bandung Barat yang dikelola secara regional oleh Provinsi Jawa Barat yang akan berakhir kontraknya, dan sebagai tempat pengganti pengelolaan sampah akhir berikutnya berada di Desa Legok Nangka Kabupaten Bandung; 2) kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena dengan luas Kota Cimahi yang terbatas banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya untuk pembangunan perumahan baik yang teratur maupun tidak teratur; 3) daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terlampaui, khususnya untuk pangan dan air bersih; 4) rendahnya kualitas air akibat limbah industri, pertanian, domestik dan peternakan; 5) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; menurunnya kualitas udara akibat polusi udara dari kendaraan dan industri.

Rendahnya kualitas lingkungan hidup ditandai dengan ada pencemaran lingkungan di Kota Cimahi yang terjadi pada lingkungan air

dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Terkait daya dukung daya tampung air bersih Kota Cimahi termasuk ke dalam zona kritis muka air tanah yang dikategorikan ke zona merah oleh provinsi, disini dibutuhkan program pemulihan air baku dengan salah satunya adalah program konservasi air tanah melalui penanaman pohon dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4.1.14. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Berdasarkan kondisi pendidikan yang ada di Cimahi, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya angka partisipasi murni di pendidikan dasar baik SD maupun SMP. Hal ini ditandai dengan belum mencapainya APM yang maksimal apalagi dibandingkan antara APM SD dan SMP;
2. Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran yang belum semua sekolah terfasilitasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai akreditasi sekolah;
3. Belum meratanya distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan masih perlunya peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal ini ditandai dengan terkonsentrasinya guru satu bidang studi di satu sekolah;
4. Masih terdapat angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP. Pada Tahun 2019 meski angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah angka putus sekolah masih ada untuk seluruh jenjang pendidikan;
5. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan dan kecakapan hidup. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat;

6. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan; dan
7. Pola pendidikan setelah adanya Pandemi COVID-19 mengalami pergeseran, yang selama ini lekat dengan konsep belajar tatap muka dalam ruang kelas menjadi tatap muka secara *online*. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kesiapan metode pembelajaran online yang standar, masih ditemui beberapa anak didik yang kesulitan dalam penyediaan infrastruktur *hardware* belajar online seperti HP atau komputer/laptop. Selain itu keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa orang tua murid sulit menyediakan biaya untuk koneksi internet secara kontinu setiap hari kerja.

4.1.15. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kota Cimahi belum berada dalam kondisi yang ideal. Hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan :

1. Masih tingginya angka kematian ibu merupakan masalah yang cukup serius.

   AKI di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 166,78, dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 77,36. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 113,98 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 hinggga angkanya menjadi 102,16. Jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 120,26;
2. Masih tingginya persentase kasus kualitas stunting dan kasus gizi buruk di Kota Cimahi.

   Angka balita stunting di Kota Cimahi tahun 2019 adalah sejumlah 9,07 persen, walaupun angka ini masih dibawah target Nasional sejumlah 14 persen namun di tingkat kelurahan masih ada beberapa kelurahan dengan angka di atas target Nasional tersebut. Kondisi ini perlu diperbaiki melalui intervensi percepatan penurunan stunting dimana Kota Cimahi termasuk kedalam salah satu lokus penurunan stunting di Jawa Barat.

   Kasus gizi buruk di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebanyak 31 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 30. Masih tingginya kasus gizi buruk di Kota Cimahi disebabkan oleh rendahnya faktor

ekonomi dari keluarga miskin hingga tahun 2019 kondisinya masih tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi pada balita. Selain itu dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi yang baik bagi anak-anak;

3. Tingginya penemuan kasus (*case detection rate*) TB BTA Positif di Kota Cimahi, tahun 2019 penemuan pasien TB BTA Positif mencapai 100,24, angka ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang belum mencerminkan hidup sehat;
4. Meningkatnya Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS.

   Total kumulatif kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi mengalami tren peningkatan dimana tahun 2019 mencapai 493 kasus. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi. Sebab yang mengindikasikan terjadinya kondisi tersebut adalah tingginya kesulitan yang dihadapi oleh penderita HIV/AIDS dari keluarga pra sejahtera dalam mengakses pelayanan kesehatan;
5. Menurunnya Persentase Posyandu Aktif.

   Jumlah Posyandu Aktif di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 88,8 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 84,82 persen. Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Cimahi terutama dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Cimahi; dan
6. Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Kota Cimahi.

   Di Kota Cimahi berdasarkan data sampai dengan 30 Desember 2020 di Kota Cimahi telah terkonfirmasi 2046 kasus positif COVID-19 dengan 1416 sembuh, 57 orang meninggal dunia, dan 573 kasus aktif. Selain itu ada 9 kasus meninggal dunia dengan status *Probable,* 1949 kasus suspek, dan 12.120 kasus kontak erat.

   Terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kota Cimahi, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Cimahi terdapat beberapa kendala,

yaitu : antrian panjang tes laboratorium; terbatasnya reagen untuk tes, keterbatasan tenaga puskesmas untuk melakukan tes dan tracing kontak erat; kapasitas rumah sakit yang penuh; minimnya tempat isolasi khusus; kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang belum optimal;

Dengan kondisi sampai dengan saat ini dimana belum ditemukannya obat COVID-19, jumlah kasus COVID-19 akan terus bertambah, walau diharapkan akan mulai teratasi dengan telah ditemukannya vaksin COVID-19 yang akan mulai didistribusikan dan diaplikasikan pada tahun 2021.

4.1.16. Belum Optimalnya Penanganan PMKS

Penanganan PMKS di Kota Cimahi dirasakan belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh :

1. Masih rendahnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 0,76 persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2019 hingga menjadi 37,93 persen; dan
2. Kurangnya koordinasi penanganan PMKS untuk wilayah lintas batas. Dengan adanya PMKS yang datang dari kabupaten/kota sekitar.

4.1.17. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat

Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara optimal, kegiatan masih ceremonial dan perempuan belum mampu memahami dan mengaspirasikan isu-isu sensitif gender. Selain dari permasalahan pembangunan yang responsif gender dan pemberdayaan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat perlu juga diperhatikan permasalahan urusan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga karena urusan tersebut kalau diperhatikan bisa memicu untuk

meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan mengeliminir permasalahan sosial yang ada.

Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Urusan perempuan erat kaitannya dengan urusan perlindungan anak, yang masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada kualitas tumbuh kembang anak yaitu :

1. Pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak masih rendah;
2. Peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak masih belum optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan hak-hak anak; dan
3. Perkembangan teknologi mempengaruhi pola asuh orang tua yang menyebabkan orang tua cenderung membiarkan anak mereka sibuk dengan '*gadget*' daripada menghabiskan waktu dengan orang tua.

Sementara itu, dalam urusan pemuda dan olahraga muncul beberapa permasalahan diantaranya kurangnya sumberdaya dan sarana olahraga sebagai tempat aktivitas masyarakat untuk berolahraga, dan belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan di Kota Cimahi.

4.1.18. Belum Optimalnya Pengendalian Kependudukan.

Rasio Akseptor KB mandiri di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 80 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 82 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 79,92 persen. Namun demikian angka penurunan peserta KB aktif ini dapat diantisipasi diantaranya dengan adanya dukungan kepesertaan KB mandiri.

Merebaknya wabah COVID-19 menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kelahiran akibat terhambatnya Pelayanan KB yang dijalankan selama masa pandemi. Selain itu, paradigma pelayanan KB harus diubah yang sebelumnya konsep KB diartikan dengan penggunaan kontrasepsi menjadi perencanaan keluarga untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk itu diperlukan pemahaman secara holistik dalam

upaya komunikasi terkait perencanaan keluarga kepada masyarakat. Mencermati hal ini diperlukan sosialisasi lebih digiatkan lagi dengan menggunakan saluran-saluran digital seperti media sosial agar tetap dapat menjangkau masyarakat.

Pengendalian penduduk perlu dilakukan mengingat laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang mencapai 1,31 pertahun dengan kebijakan keluarga berencana dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan.

4.1.19. Belum Optimalnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Hasil evaluasi kinerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi menunjukkan bahwa pengembangan Koperasi dan UMK di Kota Cimahi belum optimal disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu :

1. Permasalahan *manajerial,* karena kurangnya kapasitas SDM dalam mengelola usaha;
2. Permasalahan permodalan, karena terbatasnya akses terhadap permodalan terutama perbankan; dan
3. Permasalahan pemasaran, karena terbatasnya jaringan pemasaran UMK terutama pemasaran keluar daerah. Teknologi informasi dan digitalisasi belum banyak dimanfaatkan dikalangan UMK.

Selain ketiga hal di atas, adanya pandemik COVID-19 juga berdampak besar pada sektor UMK di Kota Cimahi. Dari 4.901 Usaha Ultra Mikro dan Usaha Mikro ada sebanyak 20 persen mengalami dampak penurunan usaha dan 50 Koperasi yang sebagian besar adalah koperasi simpan pinjam mengalami kredit macet. Berdasarkan hasil survey Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi 90,9 persen UMK mengalami penurunan penjualan, 35,6 persen produksi terhambat, 51,2 persen mengalami masalah permodalan, 34 persen distribusi terhambat dan 35 persen sulit mendapatkan bahan baku.

4.1.20. Belum Optimalnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Sarana Prasarana Olahraga

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Namun jumlah Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan.

Sarana dan prasarana olahraga pendukung kegiatan masyarakat yang ada di Kota Cimahi perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal, termasuk sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam kondisi rusak melalui upaya revitalisasi.

Urusan Pemerintahan Pilihanmerupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ada 3 urusan pilihan yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi, yakni urusan pariwisata, perdagangan dan perindustrian (yang sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam Undang0Undang 23 Tahun 2014 hanya terbatas pada industri kecil menengah).

Permasalahan dalam sektor pariwisata di Kota Cimahi diantaranya adalah masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baik berupa sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Selain itu, promosi pariwisata yang dilakukan juga masih belum optimal.

Pada Sektor perdagangan, permasalahan yang muncul diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pasar tradisonal di Kota Cimahi. Meskipun pasar tradisional yang ada dapat berfungsi dan melayani masyarakat akan tetapi pasar-pasar tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standar nasional indonesia atau belum distandarisasi. Permasalahan tersebut ditandai dengan baru terdapat 12,5% atau baru 1 dari 8 pasar tradisional yang ada di Kota Cimahi sesuai standar nasional indonesia (SNI). Selain itu, masih terbatasnya para pelaku UMKM yang melakukan pemasaran/ trading *online* dan kerjasama dengan toko ritel modern.

Pada sektor industri, para pelaku IKM di Kota Cimahi masih mengalami keterbatasan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam upaya mewujudkan produk-produk khas dan unggulan Kota Cimahi yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta kerjasama antar industri hulu dan hilir. Selain itu, para pelaku IKM belum sepenuhnya memenuhi amanat undang-undang khususnya yang terkait dengann Izin Usaha Industri dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

4.1.21. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; masih perlunya peningkatan kompetensi dan pengelolaan penilaian kinerja aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dari kategori B (Baik) menjadi A (Sangat Baik) dengan mengacu kepada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; indeks kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Telaahan Isu Internasional

Isu internasional yang berkembang pada saat penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu penyebaran virus COVID-19 atau Virus Corona.

Pandemi COVID-19 diperkirakan akan menahan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Hal ini didasarkan pada peranan Tiongkok yang cukup besar dalam peta ekspor-impor, pariwisata dan investasi Indonesia sehingga berisiko menahan prospek percepatan

pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Berdasarkan data, ekspor total Indonesia ke Tiongkok pada 2019 mencapai 17,0% dari total ekspor dan menempati urutan pertama. Impor dari tiongkok juga menempati urutan pertama dengan pangsa sebesar 17,2% dari total impor 2019. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan asing dari Tiongkok adalah kedua terbesar setelah Malaysia mencapai 2,07 juta orang dengan penghasilan devisa wisman Tiongkok merupakan yang tertinggi. *Foreign Direct Investment* (FDI) Tiongkok ke Indonesia juga merupakan yang terbesar kedua setelah Singapura dengan pangsa 16,8% dari total FDI. Oleh karena itu, Pandemi Covid-19 berpotensi mendatangkan risiko pada perekonomian Indonesia dengan rambatan melalui jalur perdagangan (ekspor, impor) baik barang ataupun jasa (pariwisata), serta investasi.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan kasus positif COVID-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (*second wave*) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi tersebut memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Keuangan, berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 terkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

4.2.2. Telaahan Isu/ Kebijakan Nasional

Penelaahan isu atau kebijakan nasional dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode Tahun 2015-2019 dan Tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan periode RPJMD Kota Cimahi berada pada kedua RPJMN tersebut. Selain itu dimuat juga telaahan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG's), dan kebijakan mengenai penanganan stunting menurut RPJMN 2020-2024.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan visi misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Adapun Visi Presiden dan menjadi visi pembangunan jangka menengah Indonesia Tahun 2020-2024, adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam mencapai visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :

   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
   4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3) Moderasi beragama; dan
4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :

1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;

4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui :

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sasaran makro pembangunan nasional periode 2020-2024 disajikan pada gambar dibawah. Target dari beberapa indikator makro ini menjadi target bersama dan membutuhkan dukungan untuk mewujudkannya.

Gambar 4.1.

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024

Berikut diuraikan program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berada di lokasi Kota Cimahi sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 4.1.

Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 di Kota Cimahi

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Milliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)	4832	4832	4832	4832	4832	4.537,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi,** Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)	22952	22952	22952	22952	22952	1.729,4	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi**, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/Regional (SR)	0	628,4	628,4	628,4	628,4	14.473,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi**, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
SPALD-S Skala Individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)	53147,8	53147,8	53147,8	53147,8	53147,8	884,6	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi**, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Milliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Jumlah TPA yang dibangun (unit)	3	0	1	2	1	4.566,0	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi,** Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	80,2	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi**, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	120,4	Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, **Kota Cimahi**, Kota Bandung	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	DAK/PEMDA

Sumber : RPJMN 2020 - 2024

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tertulis dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*" Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA, yakni :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran pokok pembangunan nasional Tahun 2015-2019 diarahkan untuk mencapai :

a. Perekonomian yang tumbuh relatif tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang didukung dengan terjaganya ketahanan pangan, energi, dan air, pengembangan sektor ekonomi utama, ketersediaan infrastruktur, dan percepatan pembangunan kelautan;
b. Pembangunan yang berkelanjutan mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan dan penanganan bencana pada tingkat daerah terus ditingkatkan;
c. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara;
d. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, menguatnya karakter dan jati diri bangsa, serta menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat; dan
f. Menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah (menurunnya jumlah kabupaten tertinggal).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum;
f. Pelindungan Masyarakat; dan
g. Sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Berikut diuraikan Jenis dan mutu pelayanan dasar di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 4.2.

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota

JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
SPM Pendidikan	a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Warga Negara dengan ketentuan : a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
SPM Kesehatan	a. pelayanan kesehatan ibu hamil; b. pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. pelayanan kesehatan balita; e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Warga Negara dengan ketentuan : a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita; e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes

JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
			melitus; j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
SPM Pekerjaan Umum	a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	setiap Warga Negara
SPM Perumahan Rakyat	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota	c. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan d. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	a. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
SPM Ketenterama, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. pelayanan penyelamatan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Warga Negara dengan ketentuan: a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota

JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
	dan evakuasi korban kebakaran.		untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
SPM Sosial	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	Warga Negara dengan ketentuan: a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti; b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti; c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam dan di luar panti; d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti; e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar

JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR
			perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goal's)* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dalam rangka pencapaian tersebut, ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB. Sasaran nasional digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantahan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berikut diuraikan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 4.3.

Evaluasi Indikator SDGs Kota Cimahi Tahun 2018

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
1	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.1 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Angka Kemiskinan	5,77	4,94	Tercapai
2	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.1 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (Rts) Yang Difasilitasi	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	
3	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui Sjsn Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	88.26%	88.26	Belum Tercapai
4	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan	2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Jumlah PKH	9279kk	9279	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
5	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja/Buruh	78	70,21	Tercapai
6	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	96.24	Tercapai
7	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan	3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	Cakupan Penertiban Administrasi Kependudukan	-	98,79	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
8	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	92.50%	93.6	Tercapai
9	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	Persentase Akses Penduduk Terhadap Air Minum Berkualitas	82%	87.51	Tercapai
10	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,	3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap	Persentase Akses Penduduk Terhadap Jamban Sehat	70.5%	72.6	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.				
11	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40%penduduk berpendapatan terbawah.	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Rasio Rumah Layak Huni	-	98.7	Tercapai
12	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,	3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75.83%	82.30	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
13	I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional Dan Daerah	Dokumen Kajian Mitigasi Kebencanaan	1	4	Tercapai
14	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% 92013 : 19,6 %)	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita.	Prevalensi Kurang Gizi	<10%	6.29%	Tercapai
15	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	1.2 menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 , menjadi 8,5% (2015:17,4%)	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pola Pangan Harapan	96.2%	96.2	Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkaelaparan dan menjamin Menghilangkan Kelaparan Dan Menjamin Akses Bagi Semua Orang,

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
								Khususnya Orrmasuk bayi, terhadap makanan
16	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 2 tahun /balita pada tahun 2019 menjadi 28% (2013 :32,9%).	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta	Prevalensi Stunting Pada Baduta	<12.04%	6,29	Tercapai
17	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2 Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada thun 2019 menjadi 9,5% (2013:12%).	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/ Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe	Prevalensi Kurang Gizi	<10%	6.29%	Tercapai
18	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil	2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013:37,1%).	Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.	Persentase Ibu Hamil Kek	2.4%	3.15	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		dan menyusui, serta manula						
19	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.4 Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013:38%)	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	94.46	Tercapai
20	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5(2014:81,8),dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015:40,9 kg /kapita /tahun).	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (Pph) Mencapai; Dan Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	11	14	Tercapai
21	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5(2014:81,8),dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015:40,9 kg /kapita /tahun).	Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (Rupiah Per Tenaga Kerja)	Persentase Petani Yang Telah Mengikuti Pelatihan Sertifikasi	-		Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
22	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah Varietas Unggul Tanaman Dan Hewan Untuk Pangan Yang Dilepas	Produksi Hasil Peternakan (Daging Dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750 l/tahun	Daging : 1.004 ton/tahun; Susu : 823.482 liter/tahun	Tercapai
23	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan	-	+15	Belum Tercapai
24	II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Proporsi Hewan Ternak Dan Sejenisnya, Diklasifikasikan Menurut Tingkat Risiko	Rasio Jumlah Ternak Sakit Yg Ditangani Terhadap Jumlah Populasi Ternak Yg	1:1	1.1	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan		Kepunahan: Berisiko, Tidak Berisiko, Dan Risiko Yang Tidak Diketahui	Terjangkit Penyakit			
25	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2019 menjadi 306(2010:346).	Angka Kematian Ibu (AKI).	AKI (PER 100.000 Kelahiran Hidup)	102	102,16	Belum Tercapai
26	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.2 Meningkatnya persentase persalinan Pemerintah Daerah oleh tenaga kesehatan terampil pada Kabupaten/Kota. tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	96.24%	Tercapai
27	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	1.3 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	96.24%	Tercapai
28	III. Menjamin kehidupan yang	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi	2.1 Menurunnya angka kematian per1000	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	AKB (PER 1000 Kelahiran Hidup)	7.12	4,18	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Kelahiran Hidup				
29	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93.6%	93.59	Tercapai
30	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi<0,5%(2014;0,46%)	Jumlah Penderita HIV/ AIDS	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	60.98%	Tercapai
31	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria	Angka Bebas Jentik (ABJ)	>= 95%	91.9	Tercapai
32	III. Menjamin kehidupan yang	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga	4.1 Menurunnya persentase merokok	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di	5%	5	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	pada	<=18tahun	Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
33	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	65.65	Tercapai
34	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur >=18 Tahun	Persentase Peningkatan Kategori Keluarga Sehat	3	2.9	Belum Tercapai
35	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28(2012;2,6)	Total Fertility Rate (TFR).	TFR	1.98	1.98	Tercapai
36	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,	7.2 Pemakaian tahun;61,9%) Meningkatnya 2019 kontrasepsi menjadi angka 66% prevalensi	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB	78.60%	78.60	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	seluruh penduduk semua usia	informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional		(PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin				
37	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	8.1 Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk.	Persentase Pembiayaan Kesehatan Bagi Pbi Jkn Kota Cimahi (60 % Dari Premi)	100%	97.20	Tercapai
38	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase Pembiayaan Kesehatan Bagi Pbi JKN Kota Cimahi (60 % Dari Premi)	100%	97.20	Persen
39	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	4.1 Menurunnya persentase merokok pada	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	Persentase Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (Sesuai Fornas) Yang Telah Diajukan Oleh Puskesmas	100%	100	Tercapai
40	III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	4.1 Menurunnya persentase merokok pada	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur >=15 Tahun.	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5%	5	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
41	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.2 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 86% (2015:72,5%).	PERSENTASE SD/MI BERAKREDITASI MINIMAL B.	SD AKREDITASI A (50 SEKOLAH DARI 125/ 40%)	44.80	96%	Tercapai
42	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Persentase SMP/MTS Terakreditasi Minimal B.	Persentase SMP Yang Terakreditasi A	61,11	97%	Tercapai
43	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101.96	103%	Tercapai
44	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Mts/Sederajat	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP	89,00	105	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
45	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >= 15 Tahun	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	11,1	10,93	Tercapai
46	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD DAN TK/RA	76,27	81,40	Tercapai
47	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingka t pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak -anak dalam kondisi rentan	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) SD/MI/ Sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) SD/MI/ Sederajat		98%	Tercapai
48	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan	Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat	4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (2) Smp/Mts/Sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (2)		99%	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak -anak dalam kondisi rentan			SMP/MTS/Sederajat			
49	IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi	5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur => 15 Tahun	Angka Melek Huruf (AMH)	99,982	99,98	Tercapai
50	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan PPRG	70	79	Tercapai
51	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Terpadu	100	100	Tercapai
52	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta	2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Terpadu	100	100	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		berbagai jenis eksploitasi lainnya	tahun 2019					
53	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Kawin	21.5	21.5	Tercapai
54	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	20	25	Tercapai
55	V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manageria	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon II Dan III)	-	Eselon 2 18,52%, Eselon 3 42,27 %	Tercapai
56	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan	3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota	Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	-	-	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global						
57	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	70,52	69,34	Belum Tercapai
58	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	2.1 Meningkatnya yang 100% layak (2014: pada 60,9%).akses tahun terhadap 2019 menjadi sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	-	-	Belum Tercapai
59	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	2.2 yang Berbasis 45.000 Meningkatnya melaksanakan pada Masyarakat tahun jumlah 2019 Sanitasi (STBM) desa/kelurahan (2015: Total 25.000).	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	ODF		2 kelurahan	Belum Tercapai
60	VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi	2.2 yang Berbasis 45.000 Meningkatnya melaksanakan pada Masyarakat tahun	Proporsi Rumah Tangga (RT) Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Proporsi Rumah Tangga (RT) Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air	-	-	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	yang berkelanjutan untuk semua.	semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	jumlah 2019 Sanitasi (STBM) desa/kelurahan (2015: Total 25.000).		Limbah Off Site			
61	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	1.1. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita. (ADHK)	PDRB (ADHK)	21078,19	21038,45	Tercapai
62	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	2.1. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	PDRB PER KAPITA. (ADHB)	PDRB (ADHB)	29333,94	28992,53	Tercapai
63	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak	Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	9.1. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Jumlah Kantor Bank	Jumlah Kantor Bank	26	30	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	untuk semua.							
64	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Persentase Tenaga Kerja Formal	Jumlah Tenaga Kerja Formal (Buruh/Karyawan/Pegawai)	181419	176156	Tercapai
65	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	PERSENTASE TENAGA KERJA INFORMAL SEKTOR PERTANIAN	JUMLAH PEKERJA BEBAS (PERTANIAN DAN NON PERTANIAN)	6393	11249	Tercapai
66	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah Tenaga Kerja Informal (Penduduk Yang Berusaha Baik Sendiri Maupun Dibantu Buruh Tidak Tetap)	72776	68738	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		terhadap jasa keuangan						
67	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	Persentase Setengah Pengangguran	Angka Kesempatan Kerja	278574	273955	Tercapai
68	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,26	7,93	Tercapai
69	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja	UPAH MINIMUM KOTA (UMK) (RP)	2678028	2678028	Tercapai
70	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Domestik	3880	5852	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
71	VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	575	392	belum Tercapai
72	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekono mi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	1.2. Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service)	D	D	Belum Tercapai
73	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekono mi dan kesejahteraan manusia,	1.5. Terbangunnya pelabuan strategis Pemerintah Daerah Provinsi; untuk menunjang tol laut pada 24 Pemerintah Daerah pelabuhan pada tahun 2019.	Jumlah Pelabuhan Strategis	Jumlah Gedung Terminal	1	1	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua						
74	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	3.1. Berkurangnya emisi CO mendekati 26% pada tahun 2019.	PERSENTASE PERUBAHAN EMISI CO2/EMISI GAS RUMAH KACA	Indeks Kualitas Udara	40	52,03	Tercapai
75	IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	3.1. Berkurangnya emisi CO mendekati 26% pada tahun 2019.	Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah	45	48	Tercapai
76	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	2.1. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil Kementerian Koordinator Bidang menjadi 87 pada tahun 2019 (2015; 80,3).	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Jumlah Dokumen Laporan Ranham		5	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
77	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari p opulasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	1.1. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Koefisien Gini.	Indeks Gini	0,4	0,37	Tercapai
78	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari p opulasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Angka Kemiskinan	5,77	4,94	Tercapai
79	X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	3.1. Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja/Buruh	78	70,21	Tercapai
80	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis	Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil	Jumlah Cagar Budaya Yang Terverifikasi		0	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
			karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.					
81	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil	Jumlah Objek Wisata Yang Dikembangkan (Budaya)		2	Belum Tercapai
82	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil	Jumlah Paket Wisata Unggulan (Budaya)		0	Tercapai
83	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Cakupan Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Dasar	100	100	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
		kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang -orang dalam situasi rentan						
84	XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	6.1. Meningkatnya cakupan penanganan Kementerian sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani	Persentase Pengelolaan Sampah	90	95	Tercapai
85	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	Persentase Perusahaan Yang Melakukan Self Monitoring	66,67	42,53	Belum Tercapai
86	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota	Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	8.22	34,15	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
			dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).					
87	XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Jumlah Tps3r Yang Dibangun	Jumlah Tps3r Yang Terbangun	-	9 unit	Belum Tercapai
88	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah	Dokumen Kajian Mitigasi Kebencanaan	1	4	Tercapai
89	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	Cakupan Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Dasar	100	100	Tercapai
90	XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR	Dokumen Biennial Update Report (Bur) Indonesia	Persentase Kelurahan Yang Pro Iklim	7	13.3	Belum Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
			ke-1).					
91	XV. Melindungi,merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	Indeks Tutupan Lahan	-	34,15	Belum Tercapai
92	XV. Melindungi,merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti- kan kehilangan keanekaragaman hayati.	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi Kementerian terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	Luas Taman Kehati	Luas Kawasan Terkonservasi	15000	208,50	Belum Tercapai
93	XVI. Menguatkan	Target 16.2 Menghentikan	2.1 terhadap 38,62%	Proporsi Perempuan	Cakupan Anak Dan	100	100	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	untuk Menurunnya anak untuk anak perempuan).prevalensi anak pada laki-laki tahun kekerasan 2019 dan (2013: 20,48%	Dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun	Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Di Unit Terpadu			
94	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	Jumlah Orang Atau Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigas	Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat		0	Belum Tercapai
95	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel,	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%,	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	OPINI BPK	WTP	WTP	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	dan inklusif di semua tingkatan.		Kabupaten: 30%, Kota:41%).					
96	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA).	SAKIP	B	B	Tercapai
97	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMILIKI NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAIK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA).	JUMLAH DOKUMEN LPPD, DOKUMEN SPM	100	100	Tercapai
98	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	20	25	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.			(DPRD				
99	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON I DAN II)	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON II DAN III)	-	Eselon 2 18,52%, Eselon 3 42,27 %	Tercapai
100	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.3 Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).	Indeks Lembaga Demokrasi.	Terverifikasinya Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Peruntukkannya	100	100	Tercapai
101	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	6.4 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).	Indeks Kebebasan Sipil	Jumlah Dokumen Laporan Ranham		5	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
	berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	tingkatan						
102	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	6.5 Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).	Indeks Hak-Hak Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	75	80	Tercapai
103	XVI. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	0.73	46.87	Belum Tercapai
10	XVI. Menguatkan	Target 16.9 Pada tahun 2030,	7.2 Meningkatnya	Persentase Anak Yang	Cakupan Penerbitan	96	98,79	Tercapai

No	Tujuan SDGs	Target Global	Target Nasional	Indikator SDGs Provinsi	Indikator SDGs Kota Cimahi	Tahun 2018		Keterangan (Perbandingan Dengan Target Nasional)
						Target	Realisasi	
4	masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Memiliki Akta Kelahiran.	Kartu Keluarga Dan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk			

Sumber : SDG's Kota Cimahi Tahun 2019, Bappeda

5. Kebijakan Mengenai Penanganan *Stunting* Dalam RPJMN 2020-2024

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak di kawasan perkotaan baru mencapai 51,54 persen, termasuk di dalamnya cakupan layanan akses air minum perpipaan yang baru mencapai 29,30 persen. Begitu halnya dengan layanan air limbah domestik yang layak di perkotaan hanya 69,36 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses aman 11,12 persen. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (3,85 persen), dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/ atau pantai/tanah lapang/kebun) sebesar 8,52 persen di perkotaan. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan *stunting*.

Berdasarkan data, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Status Awal: 37,2% (Riskesdas, 2013) Capaian Akhir: 27,7% (SSGB, 2019). Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

Penanganan stunting dituangkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2020–2024 yaitu **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta** terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi Hal ini dilakukan melalui: **Percepatan perbaikan gizi masyarakat** untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup : a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak

dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) terkait stunting yang pelaksanaannya di lingkungan pemerintah daerah sebagai berikut :

a. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Proyek prioritas strategis percepatan penurunan kematian ibu dan stunting disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015)
• 27,7% balita di Indonesia stunting (tahun 2019)</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">Meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan :
1. Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup; dan
2. Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td>Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td></tr>
<tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td></td><td>AKI menurun hingga 230/100.000 KH

Prevalensi stunting balita menurun hingga 24,1% (prioritas di 260 kab/kota)</td><td>AKI menurun hingga 217/100.000 KH

Prevalensi stunting balita 21,1% (prioritas di 360 kab/kota)</td><td>AKI menurun hingga 205/100.000 KH

Prevalensi stunting balita 18,4% (prioritas di 460 kab/kota)</td><td>AKI menurun hingga 194/100.000 KH

Prevalensi stunting balita 16,0% (prioritas di 514 kab/kota)</td><td>AKI menurun hingga 183/100.000 KH

Prevalensi stunting balita 14,0% (prioritas di 514 kab/kota</td><td>AKI 183/100.000 KH

Prevalensi stunting balita turun menjadi 14,0%</td></tr>
</table>

Pelaksana	Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud, KKP, KemenPUPR, BPOM, KemenPPPA, Kemendagri, Kemenkominfo, **Pemda.**
***Highlight* Proyek**	Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan)

Sumber : Lampiran II Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

b. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Proyek Prioritas Strategis Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58% termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42%. Selain itu, 9,36% rumah tangga masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58% untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman);
2. Menurunkan persentase rumah tangga yang BABS di tempat terbuka menjadi 0%; dan
3. Menurunkan angka stunting akibat akses sanitasi buruk menjadi kurang dari 10%.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td>Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET<table><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Total</th></tr><tr><td>SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota
SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 303.028 SR di 168 kab/kota
• SPALD-Setempat Skala Kota: 24 unit</td><td>SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota
• SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota
• SPALD-Setempat Skala Kota: 77 unit</td><td>SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota
• SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota
• SPALD-Setempat Skala Kota: 101 unit</td><td>SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota
• SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota
• SPALD-Setempat Skala Kota: 152 unit</td><td>SPALDTerpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota
• SPALDTerpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota
• SPALDSetempat Skala Kota: 151 unit</td><td>Skala Kota: 311.760 SR di 28 kab/kota
• SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 1,4 juta SR di 168 kab/kota
• SPALD-Setempat Skala Kota: 505 unit di 374 kab/kota</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Swasta, Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem off site) skala regional, kota, dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK, Masyarakat);
2. Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK);
3. Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda); dan
4. Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda).</td></tr>
</table>

Sumber : Lampiran II Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

6. Kebijakan Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19

Masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh COVID-19 telah dengan cepat memberi efek domino bagi masalah sosial, ekonomi dan keuangan. Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
h. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
o. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus*

Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk menahan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi.

4.2.3. Telaahan Isu/ Kebijakan Regional

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus memperhatikan perencanaan pembangunan provinsi. Untuk itu, perumusan isu strategis Kota Cimahi memperhatikan isu-isu strategis dan kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Beberapa isu pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, disajikan sebagai berikut :

a. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
b. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
c. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
d. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
e. Reformasi Birokrasi.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

a. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

   Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.

   Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

b. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

c. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

d. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

   Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

   Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

e. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

   Dalam tata kelola pemerintahan, '*Good Governance*' atau 'Tata Kelola yang Baik' harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

   Di Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023

TUJUAN		SASARAN	
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi			
Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban			
1.1.	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif			
2.1.	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
		2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
		2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah	2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal
		2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah			
3.1.	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
		3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
		3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
3.2.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
		3.2.2.	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan

TUJUAN		SASARAN	
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi			
			domestik
		3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.			
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
		4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
		4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5.1.	Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*	5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
		5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Sumber : RPJMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

Pencapaian visi dan misi pembangunan diprioritaskan pada beberapa hal. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

a. Akses pendidikan untuk semua;
b. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
c. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
d. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
e. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
f. Infrastruktur konektivitas wilayah;
g. Gerakan membangun desa (Gerbang desa);
h. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah); dan
i. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

2. Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, dampak COVID-19 di Jawa Barat diperkirakan melalui jalur perdagangan barang (ekspor dan impor) meskipun dampak yang lebih besar diperkirakan dari sisi impor. Berdasarkan data, ekspor Jawa Barat ke Tiongkok pada 2019 mencapai 1,67 miliar USD atau 5,65% dari total ekspor Jawa Barat dan menempati peringkat ke-5. Tiga komoditas ekspor utama ke Tiongkok adalah TPT, kertas dan alas kaki. Pada Januari 2020, ekspor Jabar ke Tiongkok masih tumbuh 8,5% (yoy). Dampak COVID-19 secara langsung pada ekspor Jawa Barat diperkirakan masih moderat dan *manageable*.

Di sisi lain, terdapat peluang bagi Jawa Barat melalui potensi peningkatan penjualan domestik dan potensi pengalihan permintaan dari negara lain khususnya pada industri TPT. Peluang berupa peningkatan penjualan pada industri TPT domestik yang sebelumnya banyak melakukan impor bahan baku dari dari Tiongkok, serta pengalihan permintaan *rest of the world* ke Tiongkok untuk industri TPT menjadi ke Indonesia sebagai salah satu negara penghasil TPT terbesar dengan integrasi produk dari hulu ke hilir.

Impor Jabar dari Tiongkok mencapai 23,50% dari total impor Jabar dan menempati ranking ke-1 dan didominasi oleh impor bahan baku (60%). Adapun tiga komoditas impor utama dari Tiongkok adalah TPT, furnitur dan electrical.

Pada Januari 2020, impor Jabar dari Tiongkok masih tumbuh 2,18% (yoy). Namun demikian, impor bahan baku komoditas TPT dan elektronik tercatat turun masing-masing 15,38% (yoy) dan 21,97% (yoy). Dampak COVID-19 pada impor diperkirakan akan lebih besar mengingat berbagai kendala sudah dihadapi oleh pelaku usaha di Jawa Barat. Melalui survei, liaison dan FGD yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jawa Barat, diketahui beberapa kendala yang sudah mulai dirasakan oleh pelaku usaha antara lain : *delay* pengiriman barang impor dari Tiongkok, potensi kendala produksi akibat

kelangkaan bahan baku, serta kendala Inventori bahan baku jika outbreak lebih panjang dari yang diperkirakan. Rata-rata *inventory* industri manufaktur di Jawa Barat adalah 3 bulan.

Namun demikian, mengingat impor bahan baku Jawa Barat cukup besar mencapai 60% dari total impor, maka kendala impor akan memberikan risiko pada kinerja produksi industri manufaktur di Jawa Barat. Industri Jawa Barat yang memiliki *import content* cukup tinggi diantaranya elektronik, TPT, alas kaki dan barang dari logam. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 pada industri manufaktur Jawa Barat diperkirakan beragam. Adapun industri yang rentan terdampak secara signifikan adalah industri elektronik mengingat rata-rata 50% bahan baku dipenuhi dari impor. Selain itu, minimnya alternatif sumber bahan baku selain dari Tiongkok. Industri lain yang juga berpotensi menerima dampak adalah TPT dan alas kaki terkait dengan *delay* pengiriman impor bahan baku dan *cancel order*.

Dampak COVID-19 melalui jalur investasi di Jawa Barat diperkirakan minim mengingat FDI dari Tiongkok hanya menempati urutan ke-9 dengan pangsa 1,76% dari total FDI Jawa Barat. Investasi terbanyak dilakukan pada sektor *real estate* dan industri pengolahan. Adapun pada industri pengolahan FDI terbanyak pada TPT dan elektronik. Potensi kendala yang terjadi baru berupa penundaan event investasi seperti Taiwan Expo (expo investasi Taiwan-Jawa Barat) diundur ke November 2020 dari semula Februari 2020. Kendala lainnya adalah tertahannya penggunaan tenaga asing dari Tiongkok pada beberapa proyek investasi strategis Jabar dikarenakan tidak dapat kembali ke Indonesia pasca Imlek di Tiongkok.

Dampak COVID-19 melalui sektor jasa pariwisata juga diperkirakan minim. Hal ini didasarkan pada data jumlah kunjungan wisata di Jawa Barat pada 2019 didominasi oleh wisatawan nusantara yang mencapai 94,7%, sedangkan wisatawan asing hanya sebanyak 5,3% dari total wisatawan. Wisman yang paling banyak berkunjung adalah dari Malaysia dan Singapur. Jumlah wisman dari Tiongkok juga hanya sebesar 0,95% dari total wisman yang datang ke Jawa Barat.

Di sisi lain, potensi risiko meningkatnya dampak pada pariwisata sejalan dengan *travel warning* yang diberlakukan berbagai negara tidak hanya Tiongkok, serta penurunan *business event* di daerah industri yang memiliki investasi tinggi dari Tiongkok, seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merumuskan beberapa kebijakan. Kebijakan ini diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Beberapa kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang telah diterbitkan dalam rangka pencegahan penanganan pandemi COVID-19, antara lain :

a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat; dan

d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

4.2.4. Telaahan Isu/ Kebijakan Daerah

1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032, tujuan pembangunan dan penataan ruang Kota Cimahi dijabarkan dalam kebijakan penataan ruang yang terkait dengan arah pembangunan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Cimahi

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
1. Kebijakan perencanaan tata ruang meliputi : a. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif; b. Tindak Lanjut RTRW Kota Cimahi dalam rencana yang lebih rinci berupa RDTR dan rencana rinci lainnya; c. Penyelarasan RTRW Kota Cimahi dengan substansi RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Barat	**1. Strategi perencanaan tata ruang meliputi** a. Meningkatkan peran kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang; b. Menyusun rencana rinci sesuai dengan arahan RTRW Kota; c. Mengkoordinasikan dan mensinergikan RTRW kota dengan RTRW Nasional, RTRW Propinsi Jawa Barat, RTRW Kota Bandung, RTRW Kabupaten Bandung Barat, dan RTRW Kabupaten Bandung.	1. Penyesuaian pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan penyediaan layanan dasar sarana, prasarana, perumahan dan pemukiman, ruang kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya dan kegiatan lingkunanya. 2. Penyesuaian fungsi utama Kota Cimahi sebagai Kawasan Perkotaan Inti dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi yakni : Pusat Pemerintahan kota/kecamatan, Pusat perdangan dan jasa berskala regional, Pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penunmpang regional dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Cekungan Bandung. 3. Penyesuaian Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah administrasi Kota Cimahi yang masuk dalam Kawasan Bandung
2. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi: **a. Kebijakan pengembangan wilayah :** 1) Kebijakan pengembangan wilayah Kota Cimahi diwujudkan melalui pembagian wilayah kota menjadi 5(lima) Sub Wilayah Kota yaitu SWK A, SWK B, SWK C, SWK D, SWK E.	**2. Strategi Pemanfaatan Ruang meliputi :** **a. Strategi pengembangan wilayah meliputi** 1) Strategi penataan SWK A, meliputi : ▪ Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa; ▪ Mengembangkan RTH; ▪ Mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2008; ▪ Mengembangkan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan; ▪ Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air. 2) Strategi penataan SWK B, meliputi : ▪ Mengendalikan perkembangan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang; ▪ Mengembangkan kawasan pendidikan tinggi; ▪ Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa; ▪ Mengembangkan RTH Kota. 3) Strategi penataan SWK C, meliputi : ▪ Mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang; ▪ Mengembangkan kegiatan perdagangan; ▪ Mengembangkan RTH. 4) Strategi penataan SWK D, meliputi : ▪ Mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008; ▪ Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air; ▪ Mengembangkan kegiatan industri kreatif berbasis telematika; ▪ Mengembangkan RTH 5) Strategi penataan SWK E, meliputi : ▪ Mengendalikan perkembangan perumahan; ▪ Menata kawasan pariwisata berbasis lingkungan; ▪ Menata kawasan militer menjadi kawasan herritage kota; ▪ Mengembangkan RTH	Utara (KBU), meliputi : Kec. Cimahi Tengah : Sebagian Kel. Cigugur Tengah, Sebagian Kel. Karangmekar, Sebagian Kel. Setiamanah, Sebagian Kel. Padasuka, Kel Cimahi, Kel. Pasairkaliki, Sebagian Kel. Cibabat, Sebagian Kel. Cipageran, Kel. Citeureup. dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) maka perlu disusun instrumen pengendalian (Peraturan Zonasi) dalam kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah yang termasuk dalam KBU yang mengacu pada Perda Pedoman Pengendalian KBU. 4. Penyesuaian batas wilayah sebagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2017 tentang batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan KabupatenBandung Barat dengan Kota Cimahi. 5. Penyesuaian target petetapan Kawasan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dan atau Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Cimahi sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan Sawah. 6. Penyesuaian rencana tata ruang terhadap kebijakan rencana dan pelaksanaan 2 Proyek Strategis Nasional, yaitu Proyek *DoubleTrack* Jawa Selatan dan Proyek *High SpeedTrain* Jakarta-Bandung yang akan melalui Kota Cimahi, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
b. Kebijakan pengembangan	**b. Strategi Pengembangan**	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
struktur ruang : 1) Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan strategis kota; 2) Peningkatan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PPK, SPPK, dan PL; 3) Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; 4) Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota.	**Struktur Ruang :** 1) Strategi Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan strategis kota, meliputi : ▪ Pengendalian pembangunan yang belum merata di seluruh kawasan kota; ▪ Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan strategis kota. 2) Strategi Peningkatan peran pusat-pusat pelayanan kota meliputi: ▪ Mengembangkan pusat pelayanan yang kompak melalui pengembangan hirarki yang lebih bersifat horizontal. Pusat-pusat pelayanan yang dikembangkan hanya meliputi pusat pelayanan kota, pusat pelayanan sub-kota, san pusat pelayanan lingkungan. ▪ Mengembangkan Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan regional. ▪ Mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat perdagangan yang melayani bagian wilayah kota, Industri Kreatif dan Industri Rumahan serta permukiman. ▪ Mengembangkan Pusat Lingkungan sebagai pusat perdagangan skala lingkungan dan permukiman. 3) Strategi Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	polutif, meliputi : ▪ Mengarahkan Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. ▪ Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya. ▪ Mengarahkan kawasan Boros sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional. ▪ Mengarahkan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat Industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non polutif. 4) Strategi Penataan infrastruktur wilayah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota, meliputi : ▪ Mengembangkan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan PPK dan SPPK serta pengembangan jalan lokal dari SPPK dan PL terdekatnya, serta jalan lokal primer yang menghubungkan antar SPPK. ▪ Mengembagkan sarana dan prasarana perekonomian baik di pusat kota, sub pusat maupun pusat lingkungan untuk mendukung Kota Cimahi sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non polutif. ▪ Menambahkan/ meningkatkan pelayanan energi listrik. ▪ Meningkatkan pelayanan persampahan Kota Cimahi menuju pada zero waste (tanpa	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	sampah) dan memberikan nilai ekonomi dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) ▪ Mengembangkan prasarana telekomunikasi secara bertahap. ▪ Mengembangkan jaringan air bersih secara bertahap dengan perhatian khusus pada pelayanan perpipaan dan melanjutkan sistem non perpipaan. ▪ Mengembangkan jaringan air bersih secara bertahap dengan perhatian khusus pada pelayanan perpipaan dan melanjutkan sistem non perpipaan. ▪ Mengembangkan jaringan air limbah dengan perhatian khusus pada saluran air limbah terpusat, MCK Komunal, dan saluran pengelolaan air limbah kawasan industri. ▪ Meningkatkan pelayanan prasarana pejalan kaki pada kawasan yang memiliki potensi kawasan terpadu dan wajah kota. ▪ Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi regional. ▪ Mengembangkan prasarana kegiatan ruang evakuasi bencana yang memiliki akses dari area potensial terjadinya bencana.	
c. Kebijakan pengembangan pola ruang : 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi : ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara melalui penekanan penerapan ruang terbuka hijau publik yang berfungsi	**c. Strategi Pengembangan Pola Ruang** 1) Strategi pengembangan kawasan lindung ▪ Strategi pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara melalui penekanan penerapan ruang terbuka hijau publik yang berfungsi sebagai kawasan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
sebagai kawasan resapan dan rekreasi; ▪ Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung ▪ Penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan. 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : ▪ Pengembangan perumahan dengan sistem pola hunian vertikal guna efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas; ▪ Pengendalian kawasan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional; ▪ Pengendalian kawasan industri beserta lahan-lahan tidur di sekitarnya; ▪ Pemanfaatan lahan kawasan militer sebaga kawasan pertahanan dan keamanan; ▪ Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; ▪ Peningkatan fungsi, luasan dan kualitas RTNH sebagai salah satu ruang publik kota; ▪ Pengembangan potensi wisata air Ciseupan, wisata budaya lokal Cireundeu dan fasilitas olahraga di Padasuka dan Sangkuriang sebagai satu kesatuan objek – daerah tujuan wisata.	resapan dan rekreasi, meliputi : - Mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2008 - Mengembalikan fungsi lahan kawasan budidaya menjadi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Mengembangkan kawasan rekreasi yang berdaya dukung lingkungan. - Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah. ▪ Strategi menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung, meliputi: - Mengamankan garis-garis sempadan seperti sempadan SUTT, sempadan sungai, sempadan saluran serta sabuk hijau. - Pencegahan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kawasan hutan lindung. - Melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi. ▪ Strategi penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan meliputi: - Mengembangkan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	jalur hijau di sepanjang jalan arteri dan kolektor - Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap - Mengarahkan tempat pemakaman umum agar dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. - Menyediakan hutan kota - Mengatur keberadaan RTH privat melalui penetapan peraturan KDB dan KDH - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan RTH privat 2) Strategi pengembangan Kawasan Budidaya ▪ Strategi pengembangan perumahan dengan sistem pola hunian vertikal guna efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, meliputi: - Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan melalui dukungan pelayanan prasarana dasar permukiman serta membantu penyediaan perumahan layak huni. - Mengembangkan hunian vertikal dengan pembangunan rumah susun - Mengendalikan pembangunan perumahan di Kawasan Bandung Utara. ▪ Strategi pengendalian kawasan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional, meliputi: - Mengembangkan kegiatan perdagangan dan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	jasa dengan pola kluster yang terintegrasi dengan hunian maupun yang bersifat koridor pada jalan utama. - Mengembangkan pusat perdagangan jasa secara vertikal sehingga tercapai efisiensi penggunaan ruang. - Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa. - Menata dan mengendalikan kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang tidak sesuai dengan arahan intensitas dan skala pelayanannya sehingga tidak menambah kemacetan kota. ▪ Strategi pengendalian kawasan industri beserta lahan-lahan tidur di sekitarnya, meliputi: - Pengaturan terhadap penggunaan air permukaan oleh industri - Pengendalian emisi pencemaran yang berasal dari buangan industri, baik limbah cair, padat maupun gas. - Menginventarisasi lahan tidur industri dan industri-industri yang akan diakuisisi. - Mengembangkan industri kreatif berbasis telematika. - Memanfaatkan lahan tidur menjadi RTH - Mendorong pembangunan hunian pekerja industri dan kelengkapannya.	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	▪ Strategi pemanfaatan lahan kawasan militer sebagai kawasan pertahanan dan keamanan melalui penetapan kawasan militer sesuai dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. ▪ Strategi pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana, meliput: - Menyediakan ruang evakuasi bencana yang aman - Menyediakan jalur evakuasi yang mudah diakses; dan - Menyediakan prasarana dan sarana pendukung proses evakuasi bencana. ▪ Strategi peningkatan fungsi, luasan dan kualitas RTNH sebagai salah satu ruang publik kota, meliputi: - Menata dan mengembangkan RTNH yang ada; dan - Meningkatkan luasan RTNH ▪ Strategi pengembangan potensi wisata air Ciseupan, wisata budaya lokal Creundeu dan fasilitas olahraga di Padasuka dan Sangkuriang sebagai satu kesatuan objek – daerah tujuan wisata, meliputi: - Menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati (biodiversity) flora-fauna - Meminimalkan alih fungsi lahan/kawasan lindung - Menjaga dan melestarikan sumber air permukaan - Melakukan rehabilitasi lahan kritis - Menjaga kawasan wisata dengan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.	
d. Kebijakan pengembangan kawasan strategis : 1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota dilaksanakan melalui kebijakan penetapan kawasan strategis lingkungan, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis ekonomi.	**d. Strategi Kawasan Strategis** 1) Penataan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kota kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk memacu perkembangan wilayah di sekitarnya 2) Penataan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kota kepentingan sosial budaya untuk mempertahankan nilai sejarah kawasan dan pelestarian bangunan bersejarah serta pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan. 3) Penataan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kota kepentingan pertahanan dan keamanan.	
3. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: a. Penetapan ketentuan umum peraturan zonasi; b. Penetapan ketentuan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang; c. Penetapan ketentuan insentif dan disinsentif; d. Penetapan sanksi.	**3. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang meliputi** : a. Menyusun peraturan zonasi, ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien, efektif dan akuntabel; b. Menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang, peraturan zonasi dan perizinan yang diterbitkan pemerintah Daerah; c. Menyusun mekanisme dan perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang; d. Menyusun tata cara mengidentifikasi dan menghitung dampak penting; e. Menyusun tata cara pengenaan dan penghitungan denda dan dampak pembiayaan pembangunan; f. Menyusun tata cara pengawasan dan	

KEBIJAKAN	STRATEGI PENATAAN RUANG	ISU KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
	pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan g. Menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan perizinan yang diterbitkan pemerintah Daerah.	

Sumber : Laporan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kota Cimahi, tantangan yang dihadapi dalam masa 20 tahun, serta mempertimbangkan modal dasar potensinya, maka Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005-2025 adalah :

"CIMAHI KOTA CERDAS"

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. ***C****reative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
b. ***E****galitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
c. ***R****eligious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
d. ***D****evelopable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;
e. ***A****ccretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; dan
f. ***S****ustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya pada masa depan dituntut untuk menjadi kota yang **CERDAS** agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cerdas bersinonim dengan pandai, pintar, cerdik, yaitu

memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman yang timbul. Sebagai kota yang relatif sempit serta ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas sifat **CERDAS** harus dimiliki Kota Cimahi agar menjadi kota yang lebih baik dan dapat menyokong kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Sejalan dengan itu **CERDAS** dapat diartikan pula sebagai singkatan dari *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian, Visi **CIMAHI KOTA CERDAS** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Tabel 4.7.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

VISI	MISI
Kota CERDAS dalam aspek Sumber Daya Manusia	**Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.** Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui

VISI	MISI
	pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
Kota CERDAS dalam Aspek Pemerintahan	**Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.** Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.
Kota CERDAS dalam Aspek Ekonomi	**Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.** Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.
Kota CERDAS dalam Aspek Sosial dan Budaya	**Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan.** Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.
Kota CERDAS dalam Aspek Lingkungan Hidup	**Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.** Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat

VISI	MISI
	yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta ketiga, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota

Sumber : RPJPD Cimahi 2005- 2025

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Sehubungan dengan dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi, maka dilakuan juga KLHS untuk menyakinkan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Kota Cimahi. Adapun hasil dari KLHS tersebut diuraikan dibawah ini.

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta uji publik yang telah dilakukan, dapat dirumuskan dan disepakati 7 (tujuh) isu prioritas di Kota Cimahi, yaitu :

a. **TPB 11 :** Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
b. **TPB 6 :** Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
c. **TPB 3 :** Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
d. **TPB 10 :** Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

e. **TPB 13 :** Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
f. **TPB 1 :** Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; dan
g. **TPB 17 :** Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis skenario pencapaian terhadap masing-masing isu prioritas serta masukan dari *stakeholder*, maka diperoleh isu strategis KLHS per misi RPJMD dan rekomendasinya dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi. Hal ini disajikan pada tabel di bawah.

Muatan rekomendasi pada tabel di bawah telah ditindaklanjuti dalam Perubahan RPJMD. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan indikator setiap sasaran dan target setiap tahun di Bab V Perubahan RPJMD, untuk mengatasi gap atau kekurangan yang dimaksud pada tabel tersebut. Dalam mendukung pencapaian setiap target sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah pada Bab VI Perubahan RPJMD.

Tabel 4.8.
Rumusan alternatif Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi
Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, dan Unggul				
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	1. Masih rendahnya persentase pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Cimahi dengan akreditasi yang baik (minimal B).	a. Pemerataan kualitas tenaga pendidik. b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. c. Penyediaan bantuan operasional sekolah dan/atau madrasah. d. Optimalisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (dikdas) sembilan tahun.	Melakukan peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar; serta menyediakan bantuan operasional sekolah dan optimalisasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai upaya melakukan pemerataan akses pendidikan dasar untuk semua
		2. Masih ada anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar di Kota Cimahi yang belum mencapai target.		

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
			e. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar untuk semua kalangan.	kalangan.
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Belum optimalnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cimahi.	a. Pengembangan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif. b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan. c. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kota Cimahi e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. f. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi tingkat *unmet need* pelayanan kesehatan; serta menggalakkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat untuk mengurangi insiden berbagai jenis penyakit.
		2. Tingkat *unmet need* pelayanan kesehatan di Kota Cimahi perlu diturunkan.		
		3. Tingginya insiden Tuberkulosis (TB) di Kota Cimahi.		
		4. Perlu peningkatan jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Kota Cimahi, untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita.		
		5. Indeks kesehatan di Kota Cimahi perlu ditingkatkan.		
	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi perlu dikendalikan secara terus-menerus.	a. Peningkatan pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana. b. Peningkatan informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai program keluarga berencana. c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana.	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keluarga berencana yang diiringi dengan peningkatan SDM.
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik				
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Perlu peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan meningkatkan indeks nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikator.	a. Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kinerja tiap instansi pemerintah; b. Peningkatan, penguatan, pengelolaan arsip daerah; c. Peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Meningkatkan nilai SAKIP melalui optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dari setiap instansi pemerintah di Kota Cimahi, serta dilakukan penyelenggaraan dan pengelolaan arsip daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan lebih baik.

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan oleh instansi pemerintah yang memilikinya. 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori nilai sangat tinggi.	a. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat tercipta Kota Cimahi yang bersih dari KKN, memiliki pelayanan publik yang baik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; b. Meninjau ulang peraturan yang tidak jelas, multitafsir, inkonsistensi, dan tumpang tindih; c. Meninjau praktik penyelenggaraan di pemerintahan terkait penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, d. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah di setiap tingkatan;	Meningkatkan, memperbaiki dan/atau meninjau ulang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi, serta menciptakan sinergitas dan koordinasi di setiap tingkatan pemerintah daerah yang lebih baik sehingga tercipta Kota Cimahi yang bersih dari KKN, memiliki pelayanan publik yang baik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
	3. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	1. Perlu meningkatkan dan mempertahankan laporan keuangan Kota Cimahi dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Belum optimalnya Indeks Profesionalitas ASN.	a. Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Pembangunan sistem intern tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan; c. Peningkatan kualitas dari aparatur tata kelola keuangan untuk memahami akuntansi pemerintahan; d. Pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur guna mempermudah tata kelola penyediaan dana untuk pengadaan infrastruktur.	Menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur untuk kemudahan pengelolaan dana pengadaan infrastruktur untuk kemajuan Kota Cimahi.

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
	4. Meningkatnya profesionalitas aparatur	1. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN.	a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur; b. Peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; c. Peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dengan menyeimbangkan kuantitas, kualitas, dan distribusi ASN.	Membentuk ASN dengan indeks profesionalitas yang tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur itu sendiri dan juga kinerja pemerintahan dengan menyeimbangkan kuantitas, kualitas, serta pendistribusian sumber daya aparatur secara merata di Kota Cimahi
	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan. 2. Belum optimalnya akses terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan, kepemilikan akte lahir, listrik, air minum dan sanitasi. 3. Perlu pengadaan atau peningkatan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	a. Perbaikan sistem pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi; b. Optimalisasi penyampaian informasi kepada publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat; c. Peningkatan komunikasi, informasi, dan media massa untuk publik; d. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kemudahan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat; e. Pengembangan teknologi guna membantu optimalisasi pelayanan dasar terkait kesehatan, kependudukan, energi listrik, air minum dan sanitasi; f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi standar pelayanan sesuai UU	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kota Cimahi dengan mengoptimalkan teknologi untuk memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan komunikasi antara pemerintah Kota Cimahi dengan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana demi kemudahan akses pelayanan dasar.

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
			No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
Misi 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan				
1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Masih rendahnya PDB per kapita di Kota Cimahi jika dibandingkan dengan target nasional.	a. Perluasan kesempatan kerja b. Meningkatkan kesesuaian karakteristik angkatan kerja dengan jenis pekerjaan yang ada. c. Peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan untuk seluruh kalangan, khususnya bagi masyarakat miskin. d. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar untuk seluruh kalangan, khususnya masyarakat miskin. e. Peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat miskin. f. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat miskin. g. Pengadaan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. h. Peningkatan lapangan pekerjaan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin.	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin; meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin; meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial; serta pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
		2. Laju pertumbuhan PDB per kapita di Kota Cimahi perlu ditingkatkan.		
	2. Meningkatnya pemerataan pendapatan	1. Perlu sedikit penurunan koefisien gini di Kota Cimahi, agar mencapai target nasional.		
	3. Menurunnya kemiskinan	1. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi perlu diturunkan, karena selama ini Kota Cimahi lebih fokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi.		
		2. Masih terdapat masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi yang belum mendapat akses pelayanan dasar, seperti sumber air minum dan sanitasi yang layak, serta sumber listrik.		
		3. Perlunya menurunkan indeks risiko bencana, terutama di pusat-pusat pertumbuhan Kota Cimahi agar mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap kejadian bencana.		
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan				
1. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	1. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	1. Meningkatkan tingkat pelayanan jalan di Kota Cimahi.	a. Penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan perhubungan yang memadai. b. Optimalisasi penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk pemerataan layanan di seluruh wilayah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait keselamatan lalu
		2. Kurang meratanya pelayanan infrastruktur kota, khususnya sarana dan prasarana transportasi.		

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
			umum demi keselamatan lalu lintas dan angkutan, serta pelayanan jasa sektor perhubungan; c. Pemberian edukasi dan sosialisasi terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan terhadap masyarakat; d. Pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum menyangkut kelayakan kendaraan melalui operasi penertiban kendaraan bermotor; e. Sosialisasi kepada pengguna kendaraan bermotor terkait kelayakan kendaraan; f. Sosialisasi kepada pengguna ruas jalan tentang menjaga kebersihan ruas jalan. g. Pemantapan dan peningkatan infrastruktur transportasi, terminal, serta fasilitas penunjang pelayanan.	lintas, kelayakan kendaraan, menjaga kebersihan ruas jalan terhadap masyarakat. Selain itu, dilakukan optimalisasi penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan, serta pelayanan jasa sektor perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas permukiman	1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1. Masih rendahnya proses daur ulang sampah. 2. tidak adanya Tempat Pemrosesan Akhir	a. Pengembangan program pengelolaan sampah dan limbah b3 terpadu . b. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah b3 terpadu. c. Peningkatan pengelolaan sampah di tingkat sumber dengan menggunakan bank sampah, TPS 3R, dan TPST. d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan daur ulang sampah dan limbah b3. e. Peningkatan	Mengoptimalkan sistem pengelolaan daur ulang sampah, dan limbah b3 dengan cara: penyusunan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah b3; meningkatkan jumlah, operasi kerja, dan pemeliharaan sarana dan prasarana; meningkatkan kemampuan aparat pengelola sampah dan limbah b3; kerja sama antar wilayah; pengembangan teknologi; sosialisasi dan meningkatkan peran serta
	2. Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	1. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3. 2. Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
			operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah b3. f. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan sampah dan limbah b3. g. Penyusunan kebijakan pengelolaan daur ulang sampah dan limbah b3. h. Pemberian edukasi kebijakan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan daur ulang sampah dan limbah b3. i. Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan sampah dan limbah b3 antar wilayah/daerah. j. Peran serta masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah b3.	masyarakat.
	3. Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	1. Masih rendahnya kondisi drainase. (permasalahan pada perubahan RPJMD)	a. Koordinasi perencanaan drainase perkotaan. b. Peningkatan kapasitas saluran drainase. c. Peningkatan pemeliharaan dan inspeksi saluran drainase. d. Kebijakan tidak membuang sampah pada saluran drainase. e. Kebijakan tidak adanya bangunan liar diatas drainase.	Pengoptimalan kondisi drainase dengan cara: koordinasi perencanaan drainase perkotaan; peningkatan kapasitas, pemeliharaan, dan inspeksi saluran; serta kebijakan perlindungan drainase dari sampah dan bangunan liar.
	4. Meningkatnya pelayanan air bersih	1. Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat	a. Pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan/rehabilitasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, serta kawasan jasa	Pengoptimalan akses layanan sumber air minum dan air bersih dengan cara: pengembangan, pengelolaan dan

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
		khususnya masyarakat miskin. 2. Belum adanya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	penyedia air bersih tinggi. b. Pembangunan dan pengelolaan, pemeliharaan sumur, reservoir, embung, dan bangunan penampung air. c. Peningkatan akses layanan air bersih dan air minum secara merata. d. Pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi jaringan air bersih. e. Peningkatan kuantitas dan pemeliharaan kualitas dari sarana dan prasarana air bersih dan air minum. f. Pengembangan infrastruktur jaringan air terpadu. g. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sumber air dan kawasan jasa penyedia air bersih tinggi. h. Penyusunan kebijakan insentif penghematan air pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri. i. Penyusunan kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah dan pembangunan infrastruktur pada kawasan jasa penyedia air bersih tinggi. j. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air.	pemeliharaan kawasan sumber air; pembangunan sumur, reservoir, embung, bangunan penampung air; peningkatan akses layanan; peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air; pengembangan infrastruktur jaringan air terpadu; kerjasama antar daerah; kebijakan intensif penghematan air; kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah dan pembangunan infrastruktur pada kawasan jasa penyedia air bersih tinggi; dan peningkatan efisiensi pemanfaatan air.
	5. Mengurangi luas kawasan kumuh	1. Tingginya jumlah kawasan kumuh. (permasalahan pada perubahan RPJMD)	a. Penataan kawasan kumuh. b. Peningkatan	Mengurangi luas kawasan kumuh dan meningkatkan akses hunian layak

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
		2. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau	infrastruktur penanganan sampah di kawasan kumuh. c. Pengadaan perumahan dan rusun layak huni dan aman. d. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana terkait air bersih, sanitasi, kebersihan dan keamanan yang layak dan memadai. e. Peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). f. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan. g. Peningkatan pelayanan bantuan teknis perencanaan penataan bangunan. h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih.	dan terjangkau melalui penataan kawasan kumuh; penyediaan perumahan/rusun layak huni; peningkatan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, kebersihan, dan keamanan yang layak dan memadai; peningkatan RTH; peningkatan pelayanan bantuan teknis; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. .
3. Meningkatkan ketahanan bencana	1. Meningkatnya ketahanan bencana	1. Perlunya penurunan indeks risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. 2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih tinggi. 3. Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 4. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana yang perlu diturunkan. 5. Belum dibentuk dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	a. Penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. b. Kerja sama antar sektor dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. c. Peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, kapasitas adaptasi masyarakat. d. Penetapan zona rawan bencana dan pembatasan kegiatan dan pembangunan didalamnya. e. Peningkatan kawasan ruang hijau terbuka. f. Penyusunan	Mengurangi risiko bencana melalui penyusunan kajian risiko dan strategi pengurangan risiko, peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana mitigasi bencana, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan bahaya dan mitigasi bencana, serta kerja sama antar sektor dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana.

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
		tingkat daerah.	masterplan dan pengembangan kota hijau dan kota tangguh. g. Penyediaan lokasi evakuasi khususnya pada wilayah rawan bencana. h. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana khususnya pada wilayah rawan bencana.	
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	1. Perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan. 2. Luasan lahan kritis yang belum banyak berkurang, terutama di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.	a. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pembatasan pemanfaatan ruang pada zona yang rentan akan penurunan kualitas lingkungan hidup. b. Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). c. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup. e. Penyusunan dan penegakkan aspek legal dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan merusak kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan melalui mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang disertai penegakkan aspek legal bagi yang melanggar dan merusak kualitas lingkungan, meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan RTH, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup.
Misi 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkesinambungan dan Berkelanjutan				
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	a. Pemberian pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat, termasuk keterlibatan pemuda dalam pembangunan baik di tingkat kota hingga desa dari tingkat perencanaan hingga pengawasan;	Memberikan pembinaan dan memberdayakan organisasi masyarakat, termasuk keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan dengan menciptakan

Tujuan	Sasaran	*Gap* atau Kekurangan	Alternatif Rekomendasi	Rekomendasi
			b. Peningkatan jaminan dalam hal partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; c. Pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi individu maupun organisasi atau LSM yang berpengaruh terhadap pembangunan Kota Cimahi; d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat untuk menciptakan integrasi yang baik.	integrasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan apresiasi bagi pihak yang berpengaruh dalam pembangunan di Kota Cimahi.
	2. Meningkatnya pengarusutamaan gender	1. Belum adanya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Diperlukan adanya peningkatan nila nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 3. Diperlukan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG).	a. Penyusunan kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Kota Cimahi; b. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender; c. Peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kota Cimahi disertai dengan penyusunan dan penguatan kebijakan serta kelembagaan terkait pengarusutamaan gender.

Sumber : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Berikut disajikan rekomendasi penyempurnaan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) pada Perubahan RPJMD yang didasarkan pada pilar-pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola kelembagaan. Rekomendasi

ini berupa arahan yang ditujukan untuk pencapaian dari setiap misi pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

a. Pilar Sosial

Penyempurnaan KRP pada Perubahan RPJMD yang mempertimbangkan pilar sosial berfokus pada penguatan muatan dari Misi ke-1 dan Misi ke-5 Perubahan RPJMD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

1) Misi ke-1 : Tujuan ke-1 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan kualitas pendidikan dasar; dan
   b) Pemerataan akses pendidikan dasar.
2) Misi ke-1 : Tujuan ke-1 untuk Sasaran 2, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Optimalisasi jaminan kesehatan bagi masyarakat;
   b) Pemerataan akses pelayanan kesehatan;
   c) Penurunan insiden penyakit Tuberkulosis (TB) dan penyakit lainnya; dan
   d) Penurunan angka kematian bayi dan balita.
3) Misi ke-1 : Tujuan ke-1 untuk Sasaran 3, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan pelayanan program keluarga berencana; dan
   b) Pemberian edukasi dan sosialisasi tentang keluarga berencana.
4) Misi ke-5 : Tujuan ke-1 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

b) Peningkatan jaminan dalam hal partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan.

5) Misi ke-5 : Tujuan ke-1 untuk Sasaran 2, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Penyusunan kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan;
   b) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan
   c) Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

b. Pilar Ekonomi

Penyempurnaan KRP pada Perubahan RPJMD yang mempertimbangkan pilar ekonomi berfokus pada penguatan muatan dari Misi ke-3 Perubahan RPJMD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

1) Misi ke-3 : Tujuan 1 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita; dan
   b) Peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

2) Misi ke-3 : Tujuan 1 untuk Sasaran 2, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

   Penurunan koefisien gini untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

3) Misi ke-3 : Tujuan 1 untuk Sasaran 3, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
   b) Pemerataan akses pelayanan dasar, seperti sumber air minum dan sanitasi yang layak, serta sumber listrik bagi masyarakat miskin dan rentan; dan

c) Penurunan kerentanan masyarakat miskin terhadap kejadian bencana dan kondisi ekstrim lainnya.

c. Pilar Lingkungan Hidup

Penyempurnaan KRP pada Perubahan RPJMD yang mempertimbangkan pilar lingkungan hidup berfokus pada penguatan muatan dari Misi ke-4 Perubahan RPJMD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

1) Misi ke-4 : Tujuan 1 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan pelayanan transportasi; dan
   b) Pemerataan pelayanan infrastruktur kota.
2) Misi ke-4 : Tujuan 2 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   Pengurangan timbulan sampah.
3) Misi ke-4 : Tujuan 2 untuk Sasaran 2, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Optimalisasi pengelolaan limbah B3; dan
   b) Pemerataan akses layanan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
4) Misi ke-4 : Tujuan 2 untuk Sasaran 3, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   Peningkatan pelayanan drainase permukiman.
5) Misi ke-4 : Tujuan 2 untuk Sasaran 4, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Pemerataan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan; dan

b) Penyusunan kebijakan insentif untuk efisiensi pemanfaatan air bagi pelaku di bidang pertanian dan industri.

6) Misi ke-4 : Tujuan 2 untuk Sasaran 5, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Pengurangan kawasan kumuh; dan
   b) Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

7) Misi ke-4 : Tujuan 3 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Penurunan indeks risiko bencana;
   b) Penyediaan sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan; dan
   c) Penyusunan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kota.

8) Misi ke-4 : Tujuan 4 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Pemerataan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
   b) Pemerataan akses layanan sistem pengelolaan lumpur tinja air limbah;
   c) Peningkatan jumlah ODF (*Open Defecation Free*) atau SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan); dan
   d) Peningkatan luasan RTH.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Penyempurnaan KRP pada Perubahan RPJMD yang mempertimbangkan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berfokus pada penguatan muatan dari Misi ke-2 Perubahan RPJMD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :

1) Misi ke-2 : Tujuan 1 untuk Sasaran 1, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan kinerja pemerintah daerah; dan
   b) Peningkatan indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2) Misi ke-2 : Tujuan 1 untuk Sasaran 2, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk instansi yang terkait; dan
   b) Peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
3) Misi ke-2 : Tujuan 1 untuk Sasaran 3, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   Mempertahankan laporan keuangan dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4) Misi ke-2 : Tujuan 1 untuk Sasaran 4, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   Peningkatan indeks profesionalitas ASN.
5) Misi ke-2 : Tujuan 1 untuk Sasaran 5, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai :
   a) Peningkatan kepuasan masyarakat akan pelayanan public di Kota Cimahi;
   b) Optimalisasi akses terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan, kepemilikan akta kelahiran, listrik, air minum, dan sanitasi; dan
   c) Pengadaan dan peningkatan fasilitas publik yang terstandar dan teregister.

Berdasarkan hasil analisis perumusan alternatif dan pengelompokan rekomendasi, Tabel 4.10 memuat arahan kebijakan dan arahan program berdasarkan visi dan misi Perubahan RPJMD disertai arahan lokasi pelaksanaan. Arahan kebijakan dan arahan program yang disampaikan pada tabel di bawah merupakan arahan kebijakan dan arahan program, namun diuraikan berdasarkan visi, misi, dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022. Proses ini dilaksanakan sebagai langkah penelaahan atau integrasi KLHS sebagai kebijakan dan program dalam Perubahan RPJMD.

Tabel 4.9.
Arahan Kebijakan Dan Arahan Program Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, dan Unggul					
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Program pengelolaan pendidikan.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar. 2. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama. 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 4. Pengelolaan pendidikan non-formal/kesetaraan.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi.
		b. Peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya dengan meningkatkan akreditasi sekolah.	Program pengembangan kurikulum	Bentuk kegiatan : 1. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. 2. Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non-formal. 3. Pengembangan materi belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.	
			Program pendidik dan tenaga kependidikan	Bentuk kegiatan: 1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal/kesetaraan. 2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. 3. Pembinaan kelompok	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
				kerja guru (KKG), tenaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG).	
		c. Pemerataan akses pendidikan bagi semua.	Program pemberian bantuan biaya dan akses pendidikan.	Bentuk kegiatan: 1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. 2. Pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah atau dari keluarga kurang mampu. 3. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk warga yang putus sekolah.	
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bentuk kegiatan : 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kota 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kota. 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. 4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi.
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Bentuk kegiatan : 1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT). 2. Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I tertentu perusahaan rumah tangga.	
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Bentuk kegiatan : 1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan. 2. Pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan. 3. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia. 4. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kota. 5. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kota.	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
		c. Peningkatan identifikasi dan pencegahan dari epidemi dan penyakit menular.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kota 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kota. 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. 2. Pengembangan inovasi dan teknologi	
		d. Pembinaan dan pemantauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Bentuk kegiatan : 1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kota. 2. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat kota. 3. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat kota.	
		e. Penyuluhan mengenai imunisasi dan kesehatan anak kepada masyarakat.			
		f. Terjaminnya kesehatan bagi semua masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan.	Program penyediaan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Pemberian akses dan penyederhanaan birokrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Pemberian keringanan biaya bagi masyarakat miskin melalui pelayanan dan jaminan kesehatan. 3. Penambahan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.	
	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	a. Pengendalian angka kelahiran baru.	Program pengendalian penduduk.	Bentuk kegiatan : 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan di wilayah dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi.
			Program pembinaan keluarga berencana (KB).	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 2. Pendayagunaan tenaga penyuluh	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
				KB/petugas lapangan KB. 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB. 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	
		b. Edukasi dan pembinaan kesejahteraan keluarga.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik					
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Optimalisasi pelaporan kinerja pemerintah daerah.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	Bentuk kegiatan : 1. Administrasi tata pemerintah. 2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	Pemerintah daerah Kota Cimahi dan seluruh kecamatan di Kota Cimahi
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Bentuk kegiatan : 1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah	a. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Program penyelenggaraan pengawasan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pengawasan internal. 2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.	Pemerintah daerah Kota Cimahi dan seluruh kecamatan di Kota Cimahi
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.	Bentuk kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 2. Asistensi dan pendampingan.	
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan. 2. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia. 3. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat.	
		b. Pengembangan program penyediaan data dan kearsipan antar lembaga yang terkait.	Program pengelolaan arsip.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan arsip dinamis daerah. 2. Pengelolaan arsip statis daerah. 3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan.	
			Program perlindungan dan penyelamatan arsip.	Bentuk kegiatan : 1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana. 2. Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan. 3. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.	
			Program perijinan penggunaan arsip.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.	
	3. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	a. Peningkatan sistem tata kelola keuangan dan barang milik daerah beserta dengan pelaporannya menjadi lebih efektif, akuntabel, dan transparan.	Program pengelolaan keuangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. 2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah. 3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	Pemerintah daerah Kota Cimahi dan seluruh kecamatan di Kota Cimahi, khususnya Kecamatan Cimahi Selatan.
			Program pengelolaan barang milik daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan barang milik daerah.	
			Program pengelolaan pendapatan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.	
			Program perekonomian dan pembangunan.	Bentuk kegiatan : 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian. 2. Administrasi pembangunan.	
			Program administrasi umum.	Bentuk kegiatan : 1. Perencanaan dan keuangan.	
			Program layanan	Bentuk kegiatan :	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			dan administrasi keuangan.	1. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Bentuk kegiatan: 1. Pembahasan kebijakan anggaran.	
			Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian. 2. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif.	
	4. Meningkatnya profesionalitas aparatur	a. Pembentukan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah guna terciptanya profesionalisme dan integritas.	Program kepegawaian daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Peningkatan kapastitas ASN. 2. Pembinaan ASN.	Pemerintah daerah Kota Cimahi dan seluruh kecamatan di Kota Cimahi
			Program pengembangan sumber daya manusia.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan kompetensi teknis. 2. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.	
			Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Bentuk kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	
			Program penyelenggaraan pengawasan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pengawasan internal. 2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Bentuk kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas DPRD. 2. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD.	
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	
	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Pengembangan kebijakan terkait standar pelayanan publik.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.	Bentuk kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis di **b**idang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 2. Asistensi dan pendampingan.	Pemerintah daerah Kota Cimahi dan seluruh kecamatan di Kota Cimahi, khususnya Kecamatan Cimahi Selatan.
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Bentuk kegiatan : 1. Pembentukan Perda dan peraturan DPRD. 2. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	
			Program administrasi umum.	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan administrasi umum.	
		b. Pengembangan sumber daya aparatur dan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi penyelenggaraan	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
		infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kemudahan akses informasi dan pelayanan publik.	pelayanan publik.	kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.	
			Program pendaftaran penduduk.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan pendaftaran penduduk.	
			Program pencatatan sipil.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan pencatatan sipil.	
			Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Bentuk kegiatan : 1. Penataan administrasi kependudukan. 2. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.	
			Program pengelolaan profil kependudukan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyusunan profil kependudukan.	
			Program pengembangan sumber daya manusia.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan kompetensi teknis.	
Misi 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan					
1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	a. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait perekonomian wilayah kota.	Program pengelolaan pendapatan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi.
			Program perekonomian dan pembangunan.	Bentuk kegiatan : 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.	
			Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian. 2. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif.	
		b. Penanaman modal untuk memperkuat perekonomian wilayah kota.	Program pengembangan iklim penanaman modal.	Bentuk kegiatan : 1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota. 2. Pembuatan peta potensi investasi kota.	
			Program pelayanan penanaman modal.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.	
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Bentuk kegiatan : 1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.	
		c. Pengembangan ekonomi kreatif.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan	Bentuk kegiatan : 1. Penyediaan prasarana (zona/ruang/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi,	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			perlindungan hak kekayaan intelektual.	dan berinteraksi bagi insan kreatif.	
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. 2. Pengembangan desa/kelurahan inovatif. 3. Pengembangan industri kreatif.	
	2. Meningkatnya pemerataan pendapatan	a. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.	Program pengembangan sumber daya manusia.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan kompetensi teknis. 2. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi, terutama di wilayah yang kekurangan infrastruktur pendukung.
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 4. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. 5. Pengukuran produktivitas tingkat kota.	
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Bentuk kegiatan : 1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota.	
			Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia 2. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat.	
		b. Pemerataan dan penjaminan kesempatan kerja.	Program penempatan tenaga kerja.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan antarkerja. 2. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS). 3. Pengelolaan informasi pasar kerja. 4. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan).	
			Program hubungan industrial.	Bentuk kegiatan : 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
				pendaftaran perjanjian kerja bersama. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.	
		c. Pemerataan infrastruktur wilayah	Program pembangunan infrastruktur wilayah	Bentuk kegiatan : 1. Pembangunan infrastruktur daerah berupa sarana prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.	
	3. Menurunnya kemiskinan	a. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam berwirausaha.	Program pengendalian izin usaha industri.	Bentuk kegiatan : 1. Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi dan di kawasan permukiman kumuh.
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).	Bentuk kegiatan : 1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
			Program pengembangan UMKM.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	
		b. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.	Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh.	Bentuk kegiatan : 1. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. 2. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar.	
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Bentuk kegiatan : 1. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan.	
		c. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.	Program perlindungan dan jaminan sosial.	Bentuk kegiatan : 1. Pemeliharaan anak-anak terlantar. 2. Pengelolaan data fakir miskin..	
			Program rehabilitasi sosial.	Bentuk kegiatan : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. 2. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti sosial.	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan					
1. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	1. Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	a. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan lalu lintas jalan baik di dalam kota maupun antar kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Bandung Raya.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).	Bentuk kegiatan : 1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kota. 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota. 3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 4, Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota. 5. Persetujuan hasil analisis analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kota. 6. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. 7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam satu kota. 8. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas antar kota/kabupaten. 9. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan. 10. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam kota.	Seluruh wilayah di Kota Cimahi dan bekerjasama dengan kabupaten/ kota di Metropolitan Bandung Raya.
			Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.	Bentuk kegiatan : 1. Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan.	
		b. Pengembangan sistem transportasi umum dan sarana transportasi rendah emisi.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan terminal penumpang Tipe C. 2, Pengujian berkala kendaraan bermotor. 3. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam satu kota. 4. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan. 5. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam kota.	
			Program penelitian dan pengembangan	Bentuk kegiatan : 1. Penelitian dan	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			daerah.	pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.	
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	
2. Meningkatkan kualitas permukiman	1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	a. Peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota.	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
		b. Pengelolaan persampahan perkotaan.	Program pengelolaan persampahan.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	
		c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	
		d. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	
	2. Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	a. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah kota.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
		b. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	
		c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
		mengurangi dampak lingkungan hidup.	penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	
	3. Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	a. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan drainase ramah lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
	4. Meningkatnya pelayanan air bersih	a. Pengelolaan sumber air bersih.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
			Koordinasi vertikal dengan Provinsi, untuk melaksanakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Bentuk kegiatan : 1. Pelaksanaan pengelolaan das lintas daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	
		b. Peningkatan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).	
		c. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan keanekaragaman hayati (sub kegiatan: pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)).	
		d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber air bersih.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
		e. Pengelolaan peyediaan air minum.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).	
		f. Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	Program pengembangan permukiman.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.	
			Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).	Bentuk sub-kegiatan : 1. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
	5. Mengurangi luas kawasan kumuh	a. Pengembangan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lainnya.	Program penyelenggaraan penataan ruang.	Bentuk kegiatan : 1. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR). 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang.	Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan
			Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh.	Bentuk kegiatan : 1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 3. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	
			Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Bentuk kegiatan : 1. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan kecil.	
		b. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman.	Program pengembangan permukiman.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.	
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Program pengelolaan persampahan.	Program pengelolaan persampahan. Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	
			Program pengelolaan dan pengembangan	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan sistem	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			sistem air limbah.	air limbah domestik.	
			Program penyelenggaraan jalan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan jalan.	
		c. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota (sub kegiatan : pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	
		d. Pengurangan dampak limbah berbahaya terhadap kawasan permukiman.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).	Bentuk kegiatan : 1. Penyimpanan sementara limbah B3 2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	
		e. Pemeliharaan lingkungan permukiman dan perkotaan yang aman, sehat, dan bersih.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
			Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.	Bentuk kegiatan : 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah. 2. Penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota.	
		f. Peningkatan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.	Program penanggulangan bencana.	Bentuk kegiatan : 1. Pelayanan informasi rawan bencana. 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	
3. Meningkatkan ketahanan bencana	1. Meningkatnya ketahanan bencana	a. Pengembangan dan penyusunan perencanaan kegiatan dan program terkait pengurangan risiko bencana.	Program penanggulangan bencana.		Seluruh kecamatan di Kota Cimahi terutama wilayah rentan terhadap bahaya.
			Program penanganan bencana.	Bentuk kegiatan : 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.	
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	
			Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
		b. Pengembangan infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim.	Program pegelolaan dan pengembangan sistem drainase.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.	
			Program pengelolaan sumber daya air.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota.	
			Program pengembangan perumahan.	Bentuk kegiatan : 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi.	
			Program penyelenggaraan jalan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan jalan.	
		c. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota (sub kegiatan: pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	
		d. Peningkatan anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	Program pengelolaan keuangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. 2. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah.	
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	a. Penyusunan kebijakan rencana tata ruang.	Program penyelenggaraan penataan ruang.	Bentuk kegiatan : 1. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR). 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang. 4. Koordinasi dan sinkronisasi	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
				pengendalian pemanfaatan ruang.	
		b. Pemantauan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.	Program pengelolaan izin membuka tanah.	Bentuk sub-kegiatan : 1. Penerbitan izin membuka tanah.	
			Program pengendalian izin usaha industri.	1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah.	
		c. Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	
			Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).	Bentuk kegiatan : 1. Penyimpanan sementara limbah B3 2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Bentuk kegiatan : 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
		d. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ Kota (sub kegiatan : pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	
		e. Peningkatan pengelolaan dan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati.	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Bentuk kegiatan : 1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).	
			Program pengelolaan hutan.	Bentuk kegiatan : 1. Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 2. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.	
		f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota.	
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	
		g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang lingkungan hidup.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah.	
			Program	Bentuk kegiatan :	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	1. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	
		h. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.	
Misi 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkesinambungan dan Berkelanjutan					
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan berkelanjutan.	Bentuk kegiatan : 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 2. Pemberian pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat, termasuk keterlibatan pemuda dalam pembangunan baik di tingkat kota hingga desa dari tingkat perencanaan hingga pengawasan; 3. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK atau kegiatan lainnya untuk membantu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
		b. Penyusunan program peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan.	Program penghargaan atas partisipasi dalam mendukung tercapainya tujuan berkelanjutan.	Bentuk kegiatan : 1. Pemberian penghargaan lingkungan hidup. 2. Fasilitasi masyarakat atau LSM yang berpartisipasi dalam mendukung tercapainya tujuan berkelanjutan.	
			Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA.	Bentuk kegiatan: 1. Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA. 2. Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA.	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Bentuk kegiatan : 1. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. 2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan.	

Tujuan	Sasaran	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi
			Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.	Bentuk kegiatan : 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa serta pemberdayaan MHA.	
		c. Perbaikan dan pengembangan sistem komunikasi sebagai jalur integrasi antara pemerintah dengan masyarakat.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Bentuk kegiatan : 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.	
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	Bentuk kegiatan : 1. Pengembangan inovasi dan teknologi.	
	2. Meningkatnya pengarusutamaan gender	a. Penguatan kebijakan kesetaraan gender dalam pemerintah dan kehidupan.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	Bentuk kegiatan: 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi
			Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan.	Bentuk kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	
		b. Optimalisasi program untuk mendukung peningkatan pengarusutamaan gender.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak.	Bentuk kegiatan : 1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.	
			Program perlindungan perempuan.	Bentuk kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan. 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.	

Sumber : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

4.2.5. Penetapan Isu Strategis Kota Cimahi

Isu strategis Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kota Cimahi yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan, isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, dan isu/kebijakan Kota Cimahi, termasuk hasil

KLHS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan *stakeholder*, maka ditetapkan sejumlah isu strategis pembangunan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022, meliputi :

1. **Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi**

   Dengan kondisi ini, Kota Cimahi sebagai salah satu daerah yang dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Barat, tentu harus mengambil berbagai kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi.

   Dari sisi kesehatan perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, perlindungan populasi beresiko tinggi (lansia dan comorbid), peningkatan penerapan protokol kesehatan di masyarakat, serta pelibatan aktif komunitas masyarakat.

   Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian baik secara mikro/rumah tangga maupun secara makro regional dan nasional. Hal ini juga memberikan pukulan yang sangat berat bagi sektor-sektor ekonomi di Kota Cimahi. Semua sector ekonomi mulai dari Industri Pengolahan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, sampai sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdampak. Masyarakat banyak kehilangan kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber pendapatannya juga banyak yang mengalami penurunan usaha bahkan sampai kehilangan usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif agar (1) para pelaku usaha dapat menciptakan bangkitan ekonomi baru maupun mengembangkan usahanya dan (2) memunculkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

2. **Penanggulangan Kemiskinan**

   Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 maka penanggulangan kemiskinan yang komprehensif masih diperlukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan. Partisipasi dan koordinasi menjadi kata kunci dari penanganan penanggulangan kemiskinan.

Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

3. Penanggulangan Pengangguran

Adanya permasalahan dalam kesempatan kerja di Kota Cimahi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Pasar Kerja. Kota Cimahi termasuk daerah dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) yang cukup besar, seharusnya dapat menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi.

Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*mismatching*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, iklim investasi dan penanaman modal di Indonesia selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terlalu menggairahkan, sehingga menyebabkan beberapa perusahaan menutup usahanya di Kota Cimahi.

4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan

Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga berpendapatan rendah, sehingga perlu peningkatan upaya pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Cimahi selama periode tahun 2015-2019

secara perlahan mulai menunjukkan penurunan. Walau demikian, upaya pemerataan pendapatan masih harus diupayakan secara optimal untuk mengantisipasi kemungkinan akan meningkatnya kembali ketimpangan pendapatan akibat meningkatnya pengangguran di Kota Cimahi Tahun 2019.

5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi di Kota Cimahi seperti bencana banjir, kebakaran dan longsor merupakan isu strategis, mengingat kejadian tersebut hampir berulang setiap tahun dan belum mampu terselesaikan dengan baik.

Bencana banjir merupakan bencana yang selama ini sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dimana kualitas resapan air yang semakin memburuk dengan turunnya daya dukung lingkungan sebagai ekses negatif dari perluasan area terbangun dan perlu dilakukan perbaikan kualitas sistem drainase di Kota Cimahi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi bencana banjir adalah adanya limpahan air dari wilayah hulu di sekitar Kota Cimahi. Mengingat bencana banjir yang sering terjadi maka perlu penanganan komprehensif dari seluruh *stakeholder*. Disamping itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan bencana juga turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kebencanaan.

6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi

Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.

Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi juga masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan transportasi.

7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi. Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta kota yang *liveable* , maka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada pelayanan pengelolaan air limbah, pelayanan air bersih, serta penanggulangan genangan. Pelayanan pengelolaan air limbah diarahkan untuk menuntaskan pengelolaan limbah domestik yang semula banyak menggunakan septic tank individual yang belum layak dan aman, atau yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL (domestik) yang berskala kawasan. Untuk penyediaan air bersih yang layak dan aman, arah Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengembangkan SPAM melalui jaringan perpipaan. Untuk penanggulangan genangan pemerintah daerah membuat *master plan* terkait drainase yang terintegrasi.

8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup terkait perubahan tata guna/fungsi lahan dan pencemaran merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan di dalam implementasinya baik dalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian izin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara instansi terkait.

Dengan bertambahnya alih fungsi lahan, semakin kecil zona resapan air, sehingga kuantitas air tanah di Kota Cimahi semakin berkurang, untuk menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah perlu berbagai upaya terutama terkait perlindungan zona konservasi air tanah.

Terkait pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air, perlu upaya terkait pengelolaan air limbah yang mencemari air permukaan, khususnya air limbah domestik, air limbah industri, limbah pertanian serta limbah peternakan. Sedangkan pencemaran udara lebih didominasi oleh emisi dari kendaraan bermotor.

9. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia Kota Cimahi yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.

10. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita. Upaya tersebut dilakukan dilakukan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kota Cimahi, serta peningkatan gizi masyarakat. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular dan tidak menular serta pola hidup bersih dan sehat (PHBS); pengembangan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Kemudian perlu juga diupayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang dalam hal ini diwujudkan dengan upaya pencapaian *universal health coverage* (UHC) melalui jaminan kesehatan masyarakat.

11. **Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

    Peningkatan penanganan PMKS dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, dengan tujuan meningkatkan modal sosial di Kota Cimahi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pemberdayaan masyarakat.

12. **Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat**

    Untuk mewujudkan iklim pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, pengembangan pendekatan pemberdayaan yang berprespektif gender, peningkatan pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.

13. **Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

    Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan terutama keluarga berencana dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan.

14. **Optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah**

    Pembangunan dalam bidang ekonomi diantaranya dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada pada sektor koperasi dan UMKM serta sektor industri, perdagangan dan pariwisata baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, daya saing dan pemberdayaan masyarakat.

15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang didukung dengan keberhasilan reformasi birokrasi sebagai kunci utama menuju masyarakat Kota Cimahi yang lebih maju.

Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan penyelenggaraan kompetisi inovasi antar SKPD, umum dan perguruan tinggi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI DAN MISI KOTA CIMAHI

Pembangunan jangka menengah periode tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil**.

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“ MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA “

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala

Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua

pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hat ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. *Output*-nya adalah kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjamin, kesehatan keluarga dan tingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan

pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022. Kesejahteraan yang ingin dicapai setama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul**

   Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik**

   Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam tiga dimensi. **Pertama**, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan

efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan profesional membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Aparatur diharapkan dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, serta optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. **Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan**

   Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

4. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan**

   Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidlines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam

memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada di dalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. **Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan**

   Misi kelima ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika pembangunan. Pemerintahan daerah berperan sebagai media untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran aktif masyarakat yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintahan daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender, dan berkelanjutan.

5.2. TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi dijabarkan kedalam 8 (delapan) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran pada perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja tujuan dan

sasaran perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

Penentuan target kinerja masing-masing indikator mulai Tahun 2020 selain berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan permasalahan terkini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Indonesia sangat mempengaruhi tidak saja kesehatan masyarakat, tapi juga perekonomian.

Dalam setahun terakhir data menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada perekonomian nasional juga pada kondisi sosial masyarakat terutama kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,49 (y-on-y). Angka kemiskinan meningkat 0,37 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 9,78 persen (Maret 2019-2020) begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen dari tahun sebelumnya menjadi 7,07 persen (Agustus 2019-2020).

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan kinerja di beberapa Indikator Makro sejak adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar -4,08 (y-on-y). Angka kemiskinan meningkat 1,06 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 7,88 persen (Maret 2019-2020) begitu juga dengan ketimpangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Gini dari 0,398 menjadi 0,403. Sama halnya dengan angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pun mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari tahun sebelumnya menjadi 10,46 persen (Agustus 2019-2020) lebih tinggi dari TPT Nasional.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi Nasional dan Jawa Barat, Kota Cimahi juga mengalami memburuknya indikator makro akibat dari dampak pandemi COVId-19 terutama Angka Kemsikinan dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). Angka Kemiskinan Kota Cimahi meningkat 0,72 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 5,11 persen (Maret 2019-2020) sedangkan TPT meningkat sebesar 5,37 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 13,30 persen (Agustus 2019-2020).

Bercermin dari perkembangan beberapa indikator makro ekonomi di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 di Kota Cimahi, maka Pemerintah Kota Cimahi melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan beserta target indikatornya mulai Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Penyesuaian ini diperlukan untuk mewujudkan perencanaan yang responsif terhadap perkembangan keadaan termasuk keadaan kemampuan keuangan daerah. Target-target pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Penyesuaian target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 juga merupakan bagian dari upaya pencapaian target Indikator Makro Pembangunan Daerah. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi selain merupakan hasil perhitungan proyeksi berdasarkan data publikasi BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi juga mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.1.

Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	2018		2019		TARGET RPJMD			TARGET PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,95	-	77,56	-	78,11	-	-	-	77,66	77,86	78,12	78,12
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07	1,15	1,1	1,05	1,04	1,02	1,00	1,00
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39	5,45	5,14	4,98	5,21	5,07	5,02	5,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,43	8,26	7,93	7,52	8,08	6,8	6,0	5,3	13,30	12,64	11,37	11,37
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,43	5,64	5,68	5,66	6,84	5,69	5,72	5,75	-3,07	3,69	5,11	5,11
6	Indeks Gini	Poin	0,41	0,4	0,364	0,4	0,363	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	33,12	-	34,87	-	36,86	-	-	-	35,36	36,29	37,77	37,77

Dari 7 (tujuh) Indikator Makro tersebut 4 (empat) diantaranya merupakan target yang sudah diarahkan oleh Provinsi Jawa Barat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 untuk Kota Cimahi.

Tabel 5.2.
Perbandingan Indikator Makro Kota Cimahi Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dan Hasil Prediksi Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022

No	Indikator	Target Pembangunan dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023			Target Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	77,85-78,14	78,07-78,55	78,41-79,02	77,66	77,86	78,12
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(-3,07) - (-1,78)	3,69 - 4,97	5,11 - 5,75	(-3,07)	3,69	5,11
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,09-5,04	4,98-4,94	4,85-4,8	5,21	5,07	5,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,12-9,11	8,74-8,83	8,78-8,99	13,30	12,64	11,37

Adapun penyesuain utuk Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta indikatornya disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.3.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022

VISI : MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

MISI 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74,07	74,10	74,15	74,20	-	-	-
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,45	82,47	82,49	82,51	-	-	-
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,31	1,25	1,2	1,15	-	-	-
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	-	77,86	78,41	78,41

MISI 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	-	-	-	-	74,84	74,9	74,9
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	-	-	-	82,94	83,12	83,12
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	-	-	-	1,02	1	1

MISI 2 :
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	CC	B	BB	BB	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	-
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	75	75	77	79	-	-	-
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	76	78	80	82	-	-	-
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah		Indeks reformasi birokrasi		-	-	-	60,43 (B)	60,73 (B)	60,73 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP		-	-	-	B	B	B
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD		-	-	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK		-	-	-	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN		-	-	-	58	62	62
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat		-	-	-	82,37	83,20	83,20
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		-	-	-	3,18	3,19	3,19

MISI 3 :
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,62%	5,64%	5,66%	5,69%	-	-	-
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,41	0,4	0,4	0,39	-	-	-
		Indeks Williamson	0,35	0,34	0,33	0,32	-	-	-
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,92%	5,77%	5,61%	5,45%	-	-	-
		TPT	9,0%	8,26%	7,52%	6,78%	-	-	-
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi		PDRB perkapita	-	-	-	-	36,29	37,77	37,77
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	-	-	-	3,69	5,11	5,11
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	-	-	-	-	0,39	0,38	0,38
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	-	-	-	-	5,07	5,02	5,02
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	12,64	11,37	11,37

MISI 4 :
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)	D	D	D	D	-	-	-
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	87%	98%	100%	100%	-	-	-
	Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	70,10%	76,75%	83,41%	90,06%	-	-	-
	Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	0,38%	0,31%	0,23%	0,15%	-	-	-
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	69,17%	70,52%	72,02%	79,24%	-	-	-
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Rasio luas kawasan kumuh	4,39%	3,96%	3,78%	2,91%	-	-	-

MISI 4 :
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	-	-	-
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	31,83	32,25	33,3	34,13	-	-	-
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi		Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)	-	-	-	-	C	C	C
	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)	-	-	-	-	C	C	C
Meningkatkan kualitas permukiman		Rasio luas kawasan kumuh	-	-	-	-	0,18	0,18	0,18
	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh (%)	-	-	-	-	0,18	0,18	0,18
Meningkatkan ketahanan bencana		Indeks Resiko Bencana	-	-	-	-	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	-	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	-	-	-	-	34,36	36,07	36,07
	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	-	-	-	-	34,36	36,07	36,07

MISI 5 :
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80%	80%	80%	80%	-	-	-
	Meningkatnyapengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,38	73,63	73,75	74	-	-	-

MISI 5 :
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,23	92,30	92,50	92,70	-	-	-
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	-	-	92,40	92,60	92,60
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	-	-	-	81,25	82,00	82,00
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	-	-	-	74,50	75,00	75,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	-	-	92,40	92,60	92,60

Sumber : hasil analisis, 2020

5.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan hal-hal yang dijanjikan pada saat kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi. Untuk pembangunan jangka menengah periode 2017-2022 terdapat 21 (dua puluh satu) prioritas. Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Adapun 21 (dua puluh satu) prioritas pembangunan daerah tahun 2017-2022, meliputi :

1. 1000 Lapangan Kerja;
2. Alokasi Anggaran Rp 100 Juta Per Tahun;
3. Bebas SPP;
4. Gratis Raskin;
5. Gratis Usaha Khusus UMKM;
6. Kemudahan Birokrasi;
7. Kesejahteraan Buruh;
8. Kestabilan Keberlangsungan Industri;

9. Optimalisasi Sarana Olahraga;
10. Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi;
11. Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri;
12. Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik;
13. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan;
14. Pengembangan Pasar Tradisional;
15. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di Setiap Kelurahan;
16. Santunan Kematian Masyarakat Ber KTP Cimahi;
17. Tambahan Fasilitas dan Insentif Guru PAUD;
18. Tambahan Insentif Guru Ngaji;
19. Tambahan Insetif RT RW;
20. Tambahan Penghasilan Guru; dan
21. Keringanan DSP SMU SMK.

Selain 21 (dua puluh satu) prioritas pembangunan yang dijelaskan di atas, terdapat penambahan 1 (satu) satu prioritas pembangunan daerah yaitu Percepatan Penanganan dan Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Salah satu isu besar yang dihadapi oleh dunia saat ini yaitu wabah COVID-19. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Dengan kondisi saat ini yang ditimbulkan oleh COVID-19, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil upaya-upaya strategis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ini sampai dengan akhir periode RPJMD.

Penyesuaian APBD tahun ini membawa konsekuensi pada pencapaian target-target pembangunan. Dapat dipastikan berbagai sasaran pembangunan akan tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian target pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai akhir periode RPJM Tahun 2022, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang diambil mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 selain melanjutkan apa yang telah dimulai sejak awal periode RPJMD, juga diwarnai dengan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan pasca pandemi. Dengan pertimbangan kondisi yang ada dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Cimahi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan dimaksud disajikan pada Tabel 6.1. di bawah ini :

Tabel 6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat
			Meningkatkan Mutu Pendidikan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan
			Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
			Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan
			Meningkatkan Pelayanan Rujukan
	Mengendalikan laju pertumbuhan	Penguatan dan pemaduan pelayanan	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penduduk	KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil
			Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah
	Meningkatnya profesionalitas aparatur		Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang prima
			Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan pelayanan publik kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik (MPP)
			Meningkatkan kualitas dan integrasi Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) daerah
			Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Misi 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya pertumbuhan	Peningkatan iklim dan realisasi investasi	a. Meningkatkan iklim dan promosi penanaman modal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
pembangunan ekonomi	ekonomi		b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal c. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		Peningkatan daya saing industri kecil menengah	Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengendalian serta pengawasan industri kecil menengah
		Pengembangan sektor perdagangan	a. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas distribusi b. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk buatan dalam negeri
		Peningkatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Optimalisasi pengembangan UMKM	a. Meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM b. Meningkatkan skala usaha UMKM
		Menjaga ketersediaan dan konsumsi pangan serta meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat	a. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Meningkatkan pengawasan keamanan dan kerawanan pangan
		Peningkatan kapasitas dan kualitas koperasi	a. Meningkatkan sistem dan manajerial koperasi b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi
		Peningkatan kesejahteraan petani/peternak	Meningkatkan penyuluhan pertanian
		Peningkatan produk dan produktivitas pertanian/peternakan	a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian b. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner c. Meningkatkan budidaya perikanan
		Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk turunan Pertanian	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja b. Meningkatkan akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
		Peningkatan kesejahteraan buruh	Meningkatkan fasilitasi hubungan industrial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menurunnya kemiskinan	Peningkatan perlindungan dan pelayanan sosial	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terutama penerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dan dan Meningkatkan inovasi penanggulangan kemiskinan pada kelembagaan masyarakat melalui tekhnologi tepat guna dan media lainnya.
		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Akses Pelayanan Dasar
		Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan akurasi data penerima jaminan sosial
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan, sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas permukiman	Meningkatnya kualitas permukiman	Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Mengurangi dan menangani timbulan sampah
			Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik
			Mengurangi titik dan luas genangan
			Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Pengentasan permukiman kumuh perkotaan	Mengembangkan permukiman layak huni
Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung	Meningkatkan kualitas udara dan air permukaan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		lingkungan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan Meningkatkan inovasi Masyarakat dalam penggunaan tekhnologi tepat guna dan media lainnya.
			Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
			Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
			Meningkatkan sumber daya keolahragaan
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
			Meningkatkan perlindungan dan hak hak anak
			Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya

Sumber : hasil analisis, 2020

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema Kota Cimahi per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kota Cimahi.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap berbagai aspek terutama sosial dan ekonomi, maka pada Perubahan RPJMD ini dilakukan penyesuaian tema atau fokus pembangunan tahunan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Adapun tema pembangunan Kota Cimahi setiap tahun selama 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

Gambar 6.1

Fokus/Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018-2022



Sumber : hasil analisis, 2020

Lebih rinci mengenai fokus pembangunan Tahun 2020 sampai dengan 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 2020 fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dengan penekanan pada penguatan fasilitas kesehatan dan melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha;
2. Tahun 2021 fokus pada percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dengan penguatan kesehatan untuk mencegah berulangnya pandemi (kesehatan), perlindungan sosial, revitalisasi kondisi sosial, dengan Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat saat menghadapi Pandemi COVID dan wabah penyakit lainnya, berupa Penguatan kapasitas kelembagaan sosial dan petugas sosial dalam pendampingan sosial dan mekanisme bantuan sosial terdampak wabah COVID-19 dan pada sektor ekonomi untuk mengejar dan memenuhi target-target RPJMD. Selain itu perlu didorong inovasi-inovasi dalam bidang penataan kota yang lebih sehat, dan

memungkinkan interaksi sosial dengan aman, serta kualitas udara dan air yang lebih baik; dan

3. Tahun 2022 fokus pada melanjutkan pemulihan sosial dan ekonomi serta pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Strategi yang telah dipilih untuk mewujudkan sasaran pembangunan, sekaligus menjadi prioritas pembangunan tahunan Kota Cimahi. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD melalui perencanaan tahunan di RKPD.

6.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, membutuhkan program yang tepat. Program tersebut akan mengimplementasikan setiap sasaran sesuai dengan strategi dan arah kebijakan. Program-program tersebut disebut sebagai program pembangunan daerah.

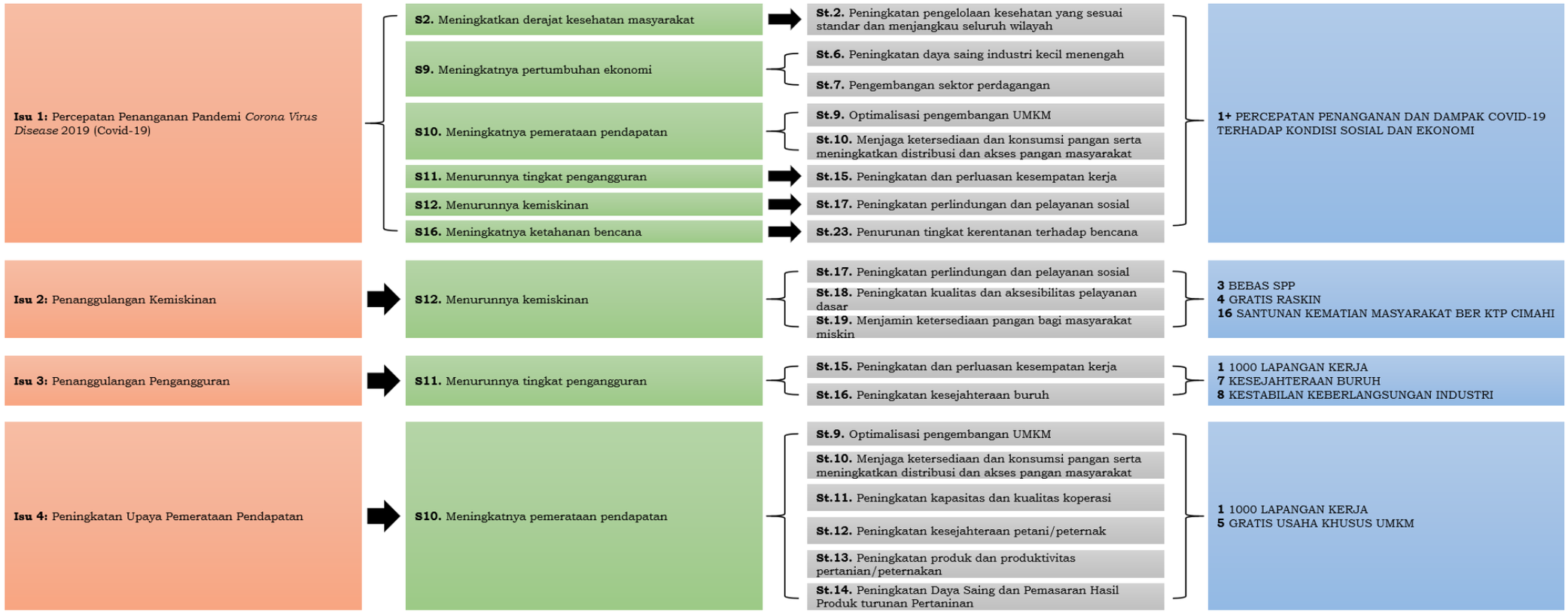
Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Mengingat strategis dan pentingnya program pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan target yang akan dicapai.

Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Keterhubungan isu strategis, sasaran, dan strategi

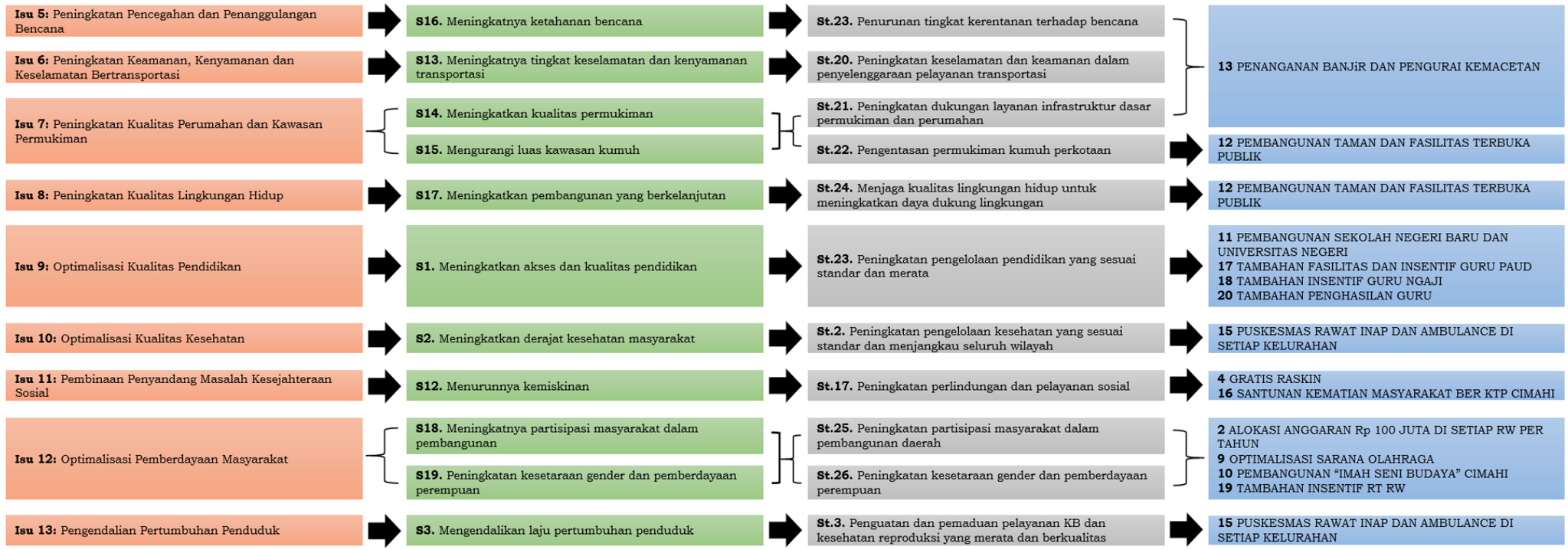
dengan program prioritas program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi disajikan pada Gambar 6.2. Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, pada Tabel 6.2 disajikan 21 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan dalam beberapa program pembangunan daerah.

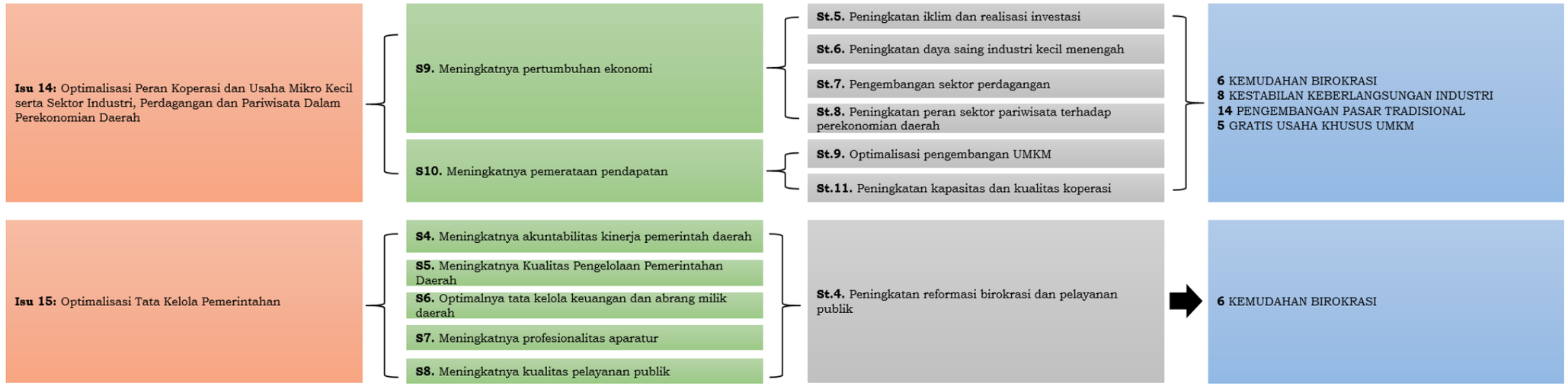
Gambar 6.2

Keterkaitan Isu Strategi, Sasaran, Strategi, dan Prioritas Pembangunan Daerah



Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022




Isu 14: Optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah
S9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
S10. Meningkatnya pemerataan pendapatan
St.5. Peningkatan iklim dan realisasi investasi
St.6. Peningkatan daya saing industri kecil menengah
St.7. Pengembangan sektor perdagangan
St.8. Peningkatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
St.9. Optimalisasi pengembangan UMKM
St.11. Peningkatan kapasitas dan kualitas koperasi
6 KEMUDAHAN BIROKRASI
8 KESTABILAN KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI
14 PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL
5 GRATIS USAHA KHUSUS UMKM
Isu 15: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
S4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
S5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
S6. Optimalnya tata kelola keuangan dan abrang milik daerah
S7. Meningkatnya profesionalitas aparatur
S8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
St.4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
6 KEMUDAHAN BIROKRASI

Tabel 6.2.

Pelaksanaan Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2017-2022

Pada Program Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
+1	PERCEPATAN PENANGANAN DAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DinsosP2KBP3A
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DPKUKMP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Sosial	DinsosP2KBP3A
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	DPKUKMP
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DPKUKMP
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DPKUKMP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dispangtan

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispangtan
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DPKUKMP
			Program Pengembangan Ekspor	DPKUKMP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengembangan Kebudayaan	Disbudparpora
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDMD
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora
			Program Pengembangan UMKM	DPKUKMP
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DPKUKMP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dispangtan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DPKUKMP
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispangtan
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp	DPKUKMP

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
			Koperasi	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudparpora
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dispangtan
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol dan Damkar
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DinsosP2KBP3A
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DPKUKMP
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dispangtan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dipangtan
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda bag. Admirek
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DPKUKMP
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DPKUKMP
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DPKUKMP
			Program Standardisasi Dan Perlindungan	DPKUKMP

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
			Konsumen	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes dan RSUD Cibabat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPKP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPKP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPKP
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
1	1000 LAPANGAN KERJA	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Ketersediaan Dan Akses Pangan		
		Program Peningkatan Produktivitas Dan Produksi Hasil		

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
		Pertanian /Peternakan Serta Pengembangan Budidaya Perikanan		
		Program Kerjasama Peningkatan Potensi Sumber Daya Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2	ALOKASI ANGGARAN Rp 100 JUTA DI SETIAP RW PER TAHUN	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
3	BEBAS SPP	Program Pendidikan Dua Belas Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	GRATIS RASKIN	Program Peningkatan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program kebijakan		Sekretariat

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
		perberasan		Daerah
5	GRATIS USAHA KHUSUS UMKM	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
6	KEMUDAHAN BIROKRASI	Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Kelitbangan Utama Dan Pendukung	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengelolaan Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
		Program Peningkatan Kualitas Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
		Daerah		
		Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Daerah	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Peningkatan Kualitas Konstruksi	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Pengawasan Jasa Konstuksi		
7	KESEJAHTERAAN BURUH	Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
8	KESTABILAN KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
				Perindustrian
		Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
9	OPTIMALISASI SARANA OLAHRAGA	Program Peningkatan Sumberdaya Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
10	PEMBANGUNAN "IMAH SENI BUDAYA" CIMAHI	Program Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
11	PEMBANGUNAN SEKOLAH NEGERI BARU DAN UNIVERSITAS NEGERI	Program Pendidikan Dua Belas Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
12	PEMBANGUNAN TAMAN DAN FASILITAS TERBUKA PUBLIK	Program Pengembangan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program pemanfaatan ruang		
		Program pengendalian pemanfaatan ruang		
13	PENANGANAN BANJIR DAN PENGURAI KEMACETAN	Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Pra bencana, Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan		
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ		
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
		Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan		
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Lalu Lintas		
		Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas		
		Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas		
		Program Peningkatan Pelayanan Dan Sarana Prasarana Angkutan		
		Program Peningkatan Kapasitas Sungai Dan Pengendali Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
14	PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Program Peningkatan Efisiensi	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Dinas Perdagangan,

NO	PRIORITAS PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2018-2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2022)	PERANGKAT DAERAH
		Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
15	PUSKESMAS RAWAT INAP DAN AMBULANCE DI SETIAP KELURAHAN	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16	SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT BER KTP CIMAHI	Program Peningkatan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial	PROGRAM BPKAD nya?	BPKAD
17	TAMBAHAN FASILITAS DAN INSENTIF GURU PAUD	Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
18	TAMBAHAN INSENTIF GURU NGAJI	Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan		Sekretariat Daerah
19	TAMBAHAN INSENTIF RT RW	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
20	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
21	KERINGANAN DSP SMU SMK	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

Sumber : hasil analisis, 2020

Selain program prioritas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga mengalokasikan program-program untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai

prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Sehubungan dengan amanat tersebut, maka ditetapkan beberapa program pembangunan daerah yang mendukung penerapan SPM yang disajikan dalam Tabel 6.3. Program yang mendukung penerapan SPM pada Tahun 2021 dan 2022 menggunakan nomenklatur program yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun penerapan 6 (enam) bidang SPM disajikan pada tabel di bawah.

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan dengan BAB II mengenai SPM maka pada bagian ini akan dilakukan penambahan nama program yang telah disesuaikan dengan indikator capaian pada BAB II. Penamaan program telah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019.

Tabel 6.3.
Program Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH
					2021	2022	
SPM BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100%	100%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan		2 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau	Persen	100%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH
					2021	2022	
			menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
3	Pendidikan Anak Usia Dini		3 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100%	100%	
SPM BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10.480	10.689	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2 Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10.400	10.608	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3 Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	9.950	10.148	
4	Pelayanan kesehatan balita		4 Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	25.129	25.380	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5 Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatakan layanan kesehatan	Orang	69.586	69.586	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6 Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	247.325	249.848	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		7 Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	31.712	31.781	
8	Pelayanan kesehatan		8 Jumlah Warga	Orang	57.440	58.026	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH
					2021	2022	
	penderita hipertensi		Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan				
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9 Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	Orang	9.716	9.815	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		10 Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	923	932	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11 Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2.576	2.602	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)		12 Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	6.391	6.456	
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	69,65	69,82	DPKP
			2 Persentase air minum layak dan aman	Persen	24,06	24,23	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	76,78	77,48	DPKP

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH
					2021	2022	
			2 Nilai beban pencemar	ton per hari	31	31	
SPM BIDANG PERUMAHAN							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	1 Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		2 Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen	100	100	
SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1 Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	Persen	100	100	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2 Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran	1 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			2 Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persen	100	100	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH
					2021	2022	
SPM BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	DINSOSP2KBP3A
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		2 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		3 Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		4 Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100	100	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	DINSOSP2KBP3A

Sumber : hasil analisis, 2020

Program pembangunan daerah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun untuk mewujudkan setiap sasaran pembangunan disajikan pada tabel di bawah. Tabel ini menyajikan program pembangunan daerah untuk mendukung setiap sasaran pada masing-masing misi RPJMD. Pada tabel tersebut akan menyajikan program-program perangkat daerah yang telah dipilih menjadi program pembangunan daerah untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran RPJMD. Program meliputi program yang diterapkan Tahun 2018 yang berbeda nomenklaturnya dengan

program tahun 2019 dan 2020 dan program tahun 2021 dan 2022. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) kelompok nomenklatur program pembangunan daerah yang masing-masing menggambarkan program yang digunakan di Pemda Kota Cimahi selama periode RPJMD Tahun 2018 sampai dengan 2022. Program pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2018-2022. Program pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disajikan pada :

1. Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2018;
2. Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2019-2020; dan
3. Tabel 6.6. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2021-2022.

Tabel 6.4.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kota Cimahi Tahun 2018

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
Sasaran 1.1 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**74,07**			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	APK SD : 105,60%	24.636.357.289,00	DISDIK
Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	94,1	PAUD 23,92% APK SMA 102,6%	500.527.000,00	DISDIK
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	APK PAUD TK 81,4%	7.510.260.860,00	DISDIK
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	AMH : 99,98%	3.650.633.620,00	DISDIK
Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	40.80	820.624.800,00	DISDIK
	Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	61,11		
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75	%Tendik TK yang memenuhi SK : 22%	4.627.221.724,00	DISDIK
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	%Tendik SD yang memenuhi SK : 48%		
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	%Tendik SMP yang memenuhi SK : 60%		
Program Perlindungan Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	60%	0,8363	151.080.000,00	DINSOSP2KBP3A
Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan	Tingkat kepuasan pengunjung	78,6	AMH : 99,98%	769.507.500,00	DISKOMINFOARPUS;

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Perpustakaan	perpustakaan umum kota				DISDIK
Sasaran 1.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**82,45**			
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	762.456.000,00	DINKES
	Prevalensi stunting pada baduta	12,04	< 12.04 %		
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,53846154	97.705.780,00	DINKES
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	10.335.900,00	DINKES
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	115.029.800,00	DINKES
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	902.255.395,00	DINKES
	Prevalensi stunting pada baduta	12,04	< 12.04 %		
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	110.713.100,00	DINKES
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88,26%	88,26	31.497.527.158,00	DINKES
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,53846154	211.831.550,00	DINKES
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,53846154	5.940.680.415,00	DINKES
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,53846154	2.669.933.729,00	DINKES
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Kepuasan pelanggan	73,25%	74,8	153.166.024.786,00	RSUD CIBABAT
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan SPA (sarana prasarana dan alat (DAK dan BANGUB)	50,00%	0	-	RSUD CIBABAT

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 1.3 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**1,31**			
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama kawin	21,5 tahun%	21,5%	336.877.450,00	DINSOSP2KBP3A
Program pelayanan kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan tingkat kontrasepsi	27,38%	26,60%	572.942.950,00	DINSOSP2KBP3A
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio akseptor KB mandiri	80%	82,44%	29.315.000,00	DINSOSP2KBP3A
Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	78,51%	78,99%	1.650.463.400,00	DINSOSP2KBP3A
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik					
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah					
Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**SAKIP**	**CC**			
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	N/A	100,00%	1.343.655.479,00	SETDA Bag. Organisasi; DPMPTSP;Kecamatan Cimahi Utara; Kecama6an Cimahi Selatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100,00%	3.604.074.313,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100,00%	478.736.125,00	BAPPEDA
Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100,00%	60.000,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100,00%	181.095.000,00	BAPPEDA
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100,00%	1.229.632.910,00	SETDA Bag. Adbang
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Jumlah kajian penelitian dan	NA	0,00%	377.370.000,00	BAPPEDA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
dan Teknologi	pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan Kota Cimahi				
Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan Kota Cimahi	NA	0,00%	149.032.000,00	BAPPEDA
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	NA	100,00%	353.426.394,00	DISKOMINFOARPUS
	Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	40,00%		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100,00%	55.684.372.755,00	Seluruh Perangkat Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	#N/A	40.331.966.217,00	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	#N/A		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	63,91 (B)	3.845.458.947,00	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase realisasi anggaran	85%	88,64%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	0,00%	1.136.608.000,00	BPBD; Disbudparpora; Disdukcapil; Diskominfo; DPMPTSP; Dishub; Disnaker; Inspektorat; Kesbangpol; Satpol PP Damkar; Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	0,00%	4.109.091.333,00	Seluruh Perangkat Daerah
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya fasilitasi pengingkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 bulan	12 bulan	246.924.661,00	DISKOMINFOARPUS
Program kerjasama informasi dengan mass media	Tersebarluskannya informasi pembangunan daerah melalui media massa, cetak dan elektronik	12 bulan	12 bulan	2.038.311.381,00	DISKOMINFOARPUS

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksanannya proses pengkajian bidang informasi dan komunikasi melalui pengkajian/ analisis isu pemberitaan di media massa	12 bulan	12 bulan	354.451.550,00	DISKOMINFOARPUS
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	58,33%	3.692.218.171,00	DISKOMINFOARPUS
	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	83,00%		
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 Bulan	12 Bulan	76.781.444,00	DISKOMINFOARPUS
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	100 persen	100,00%	471.951.800,00	DISKOMINFOARPUS
Program penyelamatan dan pelestarian dokumn/arsip daerah	Tersimpannnya arsip secara aman, tertib dan mempermudah penemuan kembali arsip yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	749.589.825,00	DISKOMINFOARPUS
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlakananya perbaikan sistem administrasi kearsipan	12 Bulan	12 Bulan	283.445.000,00	DISKOMINFOARPUS
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan Kinerja DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya	100%	100,00%	57.906.713.870,00	Sekretariat DPRD
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**			
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	100%	100,00%	189.048.975,00	SETDA Bag. Pemerintahan
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pengadaaan tanah untuk sarana olahraga	1 ha	1,1143 Ha	12.211.541.850,00	Disbudparpora
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya batas wilayah Kota Cimahi	100%	100,00%	646.526.483,00	SETDA Bag. Pemerintahan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah (APEKSI)	100%	100,00%	275.999.509,00	SETDA Bag. Pemerintahan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama	100%	100,00%	2.781.432.275,00	SETDA Bag. Adm Kesra
Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan peraturan yang telah dikaji dan ditegakkan	33%	100,00%	844.374.782,00	SETDA Bag. Adm Kesra
Program Penguatan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya sosialisasi	100%	100,00%	41.171.750,00	SETDA Bag. Hukum

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
	RANHAM				
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peraturan yang telah dikaji dan ditegakkan	100%	100,00%	1.195.797.618,00	SETDA Bag. Hukum
Program pengembangan data/informasi	Persentase data yang digunakan dalam perencanaan	100%	100,00%	313.767.000,00	Bappeda; DPUPR
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi	100%	100,00%	2.286.965.336,00	SETDA Bag. Umum & Protokoler
Sasaran 1.3 : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	**Opini BPK**	**WTP**			
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme pengawasan aparatur	1 Tahun	-	506.753.434,00	Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	100%	80,00%	2.493.090.530,00	Inspektorat; BKPSDMD; SETDA-Bag.Hukum; Kecamatan
Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100,00%	7.499.646.602,00	BPKAD, Bapenda, Setda-Bag.Adbang
Sasaran 1.4 : Meningkatnya profesionalitas aparatur	**Indeks Profesionalitas ASN**	**75**			
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan Aparatur yang Terlatih	100%	0,00%	1.991.045.900,00	BKPSDMD
Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	0,00%	167.685.500,00	BKPSDMD
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pelayanan fasilitasi purna bhakti PNS	100%	0,00%	3.070.750,00	BKPSDMD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 bulan	12 bulan	2.509.070.382,00	BKPSDMD
	Persentase ASN yang kompeten	75%	60,00%		
	Penilaian kinerja pegawai (SKP)	76	87,00%		
	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan	0,3	52,00%		
	persentase pelanggaran disiplin yang sama	0,1	100,00%		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 1.5 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**76**			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	12 bulan	12 bulan	3.926.933.864,00	DISDUKCAPIL; Kecamatan
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.2%	81,75%		
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	0,69	79,30%		
	Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	0,00%		
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	0,00%		
	Validitas database pelayanan kependudukan	NA	#N/A		
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	90%	50,00%		Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersertifikasinya pelaksana pekerja konstruksi di Kota Cimahi	300 orang	0 orang	217.533.882,00	DPUPR
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	#N/A	287.813.000,00	DPUPR
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 bulan	12 bulan	5.887.023.140,00	SATPOL PP DAMKAR; Kecamatan Cimahi Selatan; Kecamatan Cimahi Tengah; Kecamatan Cimahi Utara
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,00%	475.539.650,00	Kecamatan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurunnya angka gangguan Trantibum	7 kegiatan	6 kegiatan	357.223.600,00	Satpol PP DAMKAR
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan					
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi					

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017–2022

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 1.1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	**LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)**	**5,43%**	**6,46%**		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	17800,00%	1.392.544.279,00	DPMPTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	200,00%	1.523.871.700,00	DPMPTSP
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	0,00%	631.422.600,00	DPKUKMP
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	0,00%	4.632.775.351,00	DPKUKMP
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	0,00%	243.797.520,00	DPKUKMP
Program Penataan Struktur Industri	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	N/A	0,00%	112.179.000,00	DPKUKMP
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar tradisional layak fungsi	20,00%	0,00%	61.589.488.813,00	DPKUKMP
	Tertatanya sistem pergudangan di Kota Cimahi	0,00%	0,00%		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah peredaran barang tidak layak konsumsi	0	0 Kasus	746.399.383,00	DPKUKMP
Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	23 IKM/UKM	0,00%	312.561.600,00	DPKUKMP
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	100,00%	98.191.000,00	DISBUDPARPORA
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	100,00%	777.368.450,00	DISBUDPARPORA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546	392,00%	653.897.700,00	DISBUDPARPORA
Sasaran 1.2 : Meningkatkan pemerataan pendapatan	**Indeks Gini**	**0,41**	**0,364**		
	Indeks Williamson	**0,35**	**n/a**		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	2 kelompok	278.588.183,00	DPKUKMP
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	2941	2984	292.293.800,00	DPKUKMP
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	2 kelompok	65.811.200,00	DPKUKMP

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	2 WUB	415.558.700,00	DPKUKMP
	Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	2941	2984		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	90	95	591.359.400,00	DPKUKMP
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	1.200.343.500,00	DISNAKER
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi	N/A	15,00%	317.511.100,00	DISPANGTAN
Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	300 ton	328,57 ton	1.394.910.839,00	DISPANGTAN
	Jumlah Jenis Ikan Hias yang dikembangkan	3 jenis	00.00		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio jumlah ternak sakit yg ditangani terhadap jumlahpopulasi ternak yg terjangkit penyakit	01.01	01.01	580.665.419,00	DISPANGTAN
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750 Ribu L/tahun	Daging : 100.4 ton/tahun; Susu : 823 Ribu L/tahun	183.929.956,00	DISPANGTAN
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1757,8	353.121.301,00	DISPANGTAN
Program Pemasaran Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi perikanan	lokal (kota Cimahi)	lokal (kota Cimahi)	132.567.937,00	DISPANGTAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase keikutsertaan dalam promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	95%	100%	136.954.240,00	DISPANGTAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi peternakan	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	35.821.000,00	DISPANGTAN
Sasaran 1.3 : Menurunnya kemiskinan	**Angka Kemiskinan**	**5,92%**	**4,94%**		
	TPT	**9,00%**	**7,93%**		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	117.694.750,00	DISNAKER
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	1.160.422.500,00	DISNAKER
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	680.385.875,00	DISNAKER

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pola Pangan Harapan ketersediaan (Indeks)	96,2	93,4	754.897.472,00	DISPANGTAN
	Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya	N/A	- Rata-rata kenaikan beras 3.5% - Rata-rata kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya 7.3%		
	Persentase bahan pangan segar yang aman di konsumsi	60%	65%		
	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat (Indeks)	11	15		
Program Pengendalian Kebijakan Perberasan	Pola Pangan Harapan ketersediaan (Indeks)	96,2	93,4	2.000.399.697,00	SETDA-Bag.Admirek
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	5,60%	331.993.000,00	DINSOSP2KBP3A
Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	5,60%	117.006.600,00	DINSOSP2KBP3A
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	19,23%	413.924.517,00	DINSOSP2KBP3A
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	0,00%	835.336.596,00	DINSOSP2KBP3A
Program pembinaan anak terlantar	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	0,00%	123.074.000,00	DINSOSP2KBP3A
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	0,00%	245.015.000,00	DINSOSP2KBP3A
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	19,23%	48.907.400,00	DINSOSP2KBP3A
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan					
Tujuan 1 : Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi					
Sasaran 1.1 : Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	**Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)**	**D**			
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65,00%	100,00%	660.724.600,00	DISHUB

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase Angkutan yang Layak jalan	65,00%	100%		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100,00%	200.914.500,00	DISHUB
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun; Rasio operasi penegakan ketertiban parkir.	100%	100,00%	848.980.500,00	DISHUB
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan	25 km/jam	Tidak bisa dihitung/diukur	16.435.132.011,00	DISHUB
	Rasio fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota	100%	100,00%		
	Rasio fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	100%	100,00%		
	Rasio fasilitas perlengkapan pemantauan kemacetan lalu lintas	100%	0,00%		
Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	100%	100,00%	2.077.499.138,00	DISHUB
	Rasio pelanggaran lalu lintas	0%	0,00%		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	105573	4.753.920.600,00	DPUPR
	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	3234		
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang terpantau	100%	100,00%	435.955.900,00	DPUPR
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di kawasan strategis kota	37 unit bangunan	16 dokumen perencanaan 3 unit bangunan baru 4 rehab	10.931.476.837,00	DPUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	% kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	92,40%	93,91%	55.303.483.125,00	DPUPR
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas permukiman	**Jumlah Kawasan Kumuh Sedang**	**11**			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 2.1 : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	**Persentase pengelolaan sampah**	**87%**			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	80%	84,04%	12.680.361.844,00	DPKP
Sasaran 2.2 : Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	**Persentase cakupan layanan air limbah domestik**	**70,10%**			
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan kapasitas IPAL Komunal	4,03%	0,00%	10.265.893.274,00	DPKP
Sasaran 2.3 : Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	**Persentase luasan genangan terhadap luas kota**	**0,38%**			
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Menurunnya area genangan	N/A	0,00%	2.982.302.043,00	DPKP
Sasaran 2.4 : Meningkatnya pelayanan air bersih	**Persentase cakupan pelayanan air bersih**	**69,17%**			
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase peningkatan layanan air bersih perpipaan	1,81%	2,08%	12.686.790.350,00	DPKP
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	0,00%	129.004.250,00	DPKP
Sasaran 2.5 : Mengurangi luas kawasan kumuh	**Rasio luas kawasan kumuh**	**4,39%**			
Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	0,00%	3.545.229.749,00	DPKP
Program pembangunan turap/talud/bronjong	Presentase Titik Longsor yang tertangani	100%	0,00%	745.083.919,00	DPKP
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	100%	0,00%	8.143.293.793,00	DPKP
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	0,00%	32.649.364.134,00	DPKP
	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	0,00%		
	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,19%	0,20%		
Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan bencana					
Sasaran 3.1 : Meningkatnya ketahanan bencana	**Indeks Resiko bencana**	**Kelas Resiko Sedang**			
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100%	71,19%	2.312.060.855,00	SATPOL PP DAMKAR

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi	100%	0,00%	1.005.562.950,00	BPBD
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	79,21%	0,00%	148.851.134,00	BPBD
Tujuan 4 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan					
Sasaran 4.1 : Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**31,83**			
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	11,65%	7.535.792.550,00	DPKP, DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kelurahan yang sudah pro klim	0	6,67%	1.380.328.891,00	DLH
	Luas kawasan terkonservasi	N/A	0,00%		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Akses layanan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	100,00%	676.461.947,00	DLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Udara	1,19	90,60%	201.658.400,00	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	100%	100,00%	3.125.659.091,00	DLH
	Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring	44,67%	31,49%		
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	52,63%	0,00%	783.421.925,00	DPUPR, Bappeda
Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	0,00%	471.051.600,00	DPUPR; Kecamatan; Satpol PP & Damkar
Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase bangunan berizin	29,60%	Capaian target belum bisa diukur	795.073.321,00	DPUPR
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan					
Tujuan 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender					
Sasaran 1.1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**80%**			
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	30,00%	20.947.658.705,00	Kecamatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	30,00%	10.858.621.424,00	Kecamatan; SETDA-Bag.Pemeintahan
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	49%	48,08%	316.833.600,00	BAPPEDA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		
			Capaian	Rp (Realisasi)	
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75%	80,00%	219.187.500,00	Kesbangpol; Kecamatan; SETDA Bag. Pemerintahan; SATPOL PP & DAMKAR
Program Pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	100%	95,71%	2.034.233.820,00	Kesbangpol
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, ormas dan linmas	12 bulan	12 bulan	1.160.474.000,00	Kesbangpol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	1.925.335.100,00	Kesbangpol
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	50%	375 orang		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	200 orang	Tidak bisa dihitung/diukur	1.701.414.943,00	Disbudparpora
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pemuda/Organisasi Pemuda yang berwirausaha	100 orang	100 orang	73.159.750,00	Disbudparpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	0,00%	2.334.149.952,00	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	0,00%		
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	0,00%	104.973.600,00	Disbudparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	0,00%	-	Disbudparpora
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	29,63%	336.672.400,00	Disbudparpora
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	29,63%	1.774.373.000,00	Disbudparpora
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	29,63%	620.956.000,00	Disbudparpora
Sasaran 1.2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**73,38**			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Capaian	Rp (Realisasi)	
	(IDG)				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**92,23**			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	78,57%	522.522.581,00	DINSOSP2KBP3A
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	#N/A	105.065.000,00	DINSOSP2KBP3A
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	26,00%		
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	#N/A		
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	#N/A	336.554.776,00	DINSOSP2KBP3A
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	#N/A		
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	#N/A		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	78,57%		

Sumber : hasil analisis, 2020

Tabel 6.5.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2019-2020

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul							
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing							
Sasaran 1.1 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**74,07**					
Program Pendidikan Dua Belas Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	104,14	70.706.810.350	95,57	32.313.713.226	DISDIK
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,73	98.69		90,83		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,38	102.72		93,25		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	88,73	97,49		91,27		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,29	78.90		83,03		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,24	80,01		87,53		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	94,1	105,58		121,75		
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	35,42	6.818.017.977	67,64	4.971.733.690	DISDIK
	Persentase TK terakreditasi	Akreditasi TK A (1,79%)	77,36		77,36		
	Persentase PAUD terakreditasi	Akreditasi PAUD B (3,10%)	28,84		28,57		
	Angka Melek Huruf (AMH)	99,98	99,99		99,98		
	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	50,00		38,30		
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75	59,77	19.526.194.448	57	9.683.449.225	DISDIK
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	52,54		67,95		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	77,78		51,29		
	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	49,60		50,86		
	Persentase SD yang terakreditasi B	SD akreditasi B (57,6%)	48,00		46,55		
	Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	65,00		57,78		
	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	SMP akreditasi B (27,78%)	20,00		17,78		
	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	SMP akreditasi C (2,78%)	2,50		2,22		
	Persentase angka kelulusan SD	100%	100,00		100		
	Persentase angka kelulusan SMP	100%	100,00		99,94		
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	60%	87,94	471.014.812		418.198.473	DINSOSP2KBP3A
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,6	80,27	640.379.450		353.393.900	DISKOMINFOARPUS; DISDIK
	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	68,50				
Sasaran 1.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**82,45**					
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3,12	9.935.834.559		19.582.101.656	DINKES
	Prevalensi stunting pada baduta	12,04	0,32		4,75		
Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88,26%	91,70	27.565.652.865	93,67	31.198.479.389	DINKES
Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan	46,15	92,31	6.976.226.227	92,31	7.686.153.742	DINKES

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	strata Madya						
Program Pengembangan Lingkungan Sehat				653.105.000		-	DINKES
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan SPA (sarana prasarana dan alat (DAK dan BANGUB)	50,00%		42.878.719.061		-	RSUD CIBABAT
Program Peningkatan Pelayanan Rujukan	Kepuasan pelanggan	73,25%	78,94	162.793.097.864		152.288.859.434	RSUD CIBABAT
Sasaran 1.3 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**1,31**					
Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	78,51%	78,89	3.307.907.394		1.858.774.500	DINSOSP2KBP3A
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik							
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah							
Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**SAKIP**	**CC**					
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Nilai komponen pelaporan LKIP kota	100%	100,00	928.454.174		219.317.808	SETDA Bag. Organisasi
	Persentase PD yang memiliki Evaluasi Jabatan yang baik	100%	100,00				
	Persentase PD/Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	30%	80,76				
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100,00	2.108.963.039		791.186.700	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	100%	100,00				
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100,00				
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100,00				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%	100,00				
	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100,00		100		
Program Kelitbangan Utama dan Pendukung	Persentase Kajian Penelitiandan Pengembangan Yang Digunakan Sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi	NA	50,00	652.936.000		200.641.000	BAPPEDA
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	NA	NULL	320.182.962		162.915.000	DISKOMINFOARPUS
	Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	36,77		36,77		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	79,21	81.615.934.293		59.898.676.877	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	115,33				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	73,68	5.261.908.830		2.424.881.238	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase realisasi anggaran	85%	93,11				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	68,59	3.603.005.883		1.393.465.800	Seluruh Perangkat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	100,00	4.903.083.213		3.342.803.061	DISKOMINFOARPUS
	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	50,00				
Program Peyelengaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi yang aman	NA	100,00	143.480.497	2	40.330.000	DISKOMINFOARPUS
Program sistem pengelolaan dan pelayanan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	18,52	610.244.732	18,5	290.991.250	DISKOMINFOARPUS
Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Miliik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah per tahun	5-10%	21,04	2.641.390.352		1.491.151.570	BAPENDA
	Realisasi target pendapatan daerah	89%	95,74				
Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100%	99,00	57.134.612.125		29.447.454.445	Sekretariat DPRD
	Persentase sarana alat mass media yang digunakan	100%	-				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**					
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase penegasan batas daerah yang telah diidentifikasi	100%	100,00	360.650.634	100	75.061.850	SETDA Bag. Pemerintahan
	Cakupan Tanah Pemerintah Kota yang Bersertifikat	203	NULL				
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Persentase dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang bernilai baik	100%	NULL	10.396.648.029		4.534.872.597	SETDA Bag. Pemerintahan
	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	NULL				
	Persentase produk hukum yang tersusun	100%	165,76				SETDA Bag. Hukum
	Persentase kasus hukum terfasilitasi	100%	160,42				
	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perekonomian	75%	93,65				SETDA Bag. Admirek
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	100%	93,73				SETDA Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase pelaksanaan pekerjaan yang di Monev	100%	95,32				SETDA Bag. Adbang
	Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi	100%	NULL				SETDA Bag. Umum & Protokoler
Sasaran 1.3 : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	**Opini BPK**	**WTP**					
Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan Dan Fasilitasi	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 1	Level 2	861.233.500	100	432.145.600	Inspektorat
	Nilai Maturitas SPIP	3,00	1,27		100		
Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Miliik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	70%	75,00	2.632.295.057	100	1.135.524.460	BPKAD
	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	90%	100,00		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	90%	100,00		100		
Sasaran 1.4 : Meningkatnya profesionalitas aparatur	**Indeks Profesionalitas ASN**	**75**					
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 bulan	-	5.640.793.250		1.519.640.400	BKPSDMD
	Persentase ASN yang kompeten	75%	28,00				
	Penilaian kinerja pegawai (SKP)	76	26,00		24		
	Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	0,3	-				
	persentase pelanggaran disiplin	0,1	5,00		5		
Sasaran 1.5 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**76**					
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	12 bulan	NULL	5.315.149.353	93,81	5.548.274.313	DISDUKCAPIL; Kecamatan
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.2%	98,91		93,81		
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	0,69	47,34		93,81		
	Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	68,70		93,81		
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	85,63		93,81		
	Validitas database pelayanan kependudukan	NA	91,10		93,81		
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	90%	NULL		87,66		Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Pesentase kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial dan kepemudaan olahraga yang difasilitasi	71%	100,00	2.944.429.483		1.417.382.115	SETDA Bag. Adm Kesra
	Persentase kegiatan keagamaan	97%	100,00				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	yang difasilitasi						
Program peningkatan kualitas konstruksi	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	27,91	48.213.466.976		2.730.868.973	DPUPR
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,00	8.553.165.132		6.020.798.274	SATPOL PP DAMKAR; Kecamatan Cimahi Selatan; Kecamatan Cimahi Tengah; Kecamatan Cimahi Utara
Program Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase wilayah yang terpantau	100%	100,00	2.088.991.900		1.320.149.300	Kesbangpol
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan							
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi							
Sasaran 1.1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	**LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)**	**5,62%**	**7,85%**		**-2,26%**		
Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	141,00	1.803.119.650		861.606.450	DPMPTSP; Kecamatan
	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	3,00				
Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	NULL	5.099.010.474	100	2.916.420.515	DPKUKMP
	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	N/A	NULL				
Program kerjasama peningkatan potensi sumber daya perdagangan	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	3,00	62.768.000	100	23.590.000	DPKUKMP
	Prosentase pedagang kaki lima dan asongan paham aturan / tata tertib	6,67%	NULL		100		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar tradisional layak fungsi	20,00%	NULL	5.880.171.625	100	3.411.697.503	DPKUKMP
	Tertatanya sistem pergudangan di Kota Cimahi	0,00%	NULL		100		
	Meningkatnya daya saing produk UKM/IKM	4,00%	NULL		100		
	Tertatanya bangunan di 4 pasar tradisional	15,00%	NULL		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah peredaran barang tidak layak konsumsi	0	0,00	602.064.452	100	204.377.000	DPKUKMP
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	23 IKM/UKM	NULL	141.686.075		1.600.000	DPKUKMP
	Prosentase kenaikan omset pedagang selama mengikuti pameran promosi	5%	NULL				
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546	899,00	1.493.099.061		433.950.000	DISBUDPARPORA
	Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3526	43707,00				
	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	1,00				
Sasaran 1.2 : Meningkatkan pemerataan pendapatan	**Indeks Gini**	**0,41**	**0,363**		**0,38**		
	Indeks Williamson	**0,35**	**n/a**		**n/a**		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	NULL	1.021.667.960	45 WUB	414.209.500	DPKUKMP
	Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	2941	NULL		3121		
Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	762.447.900	8,51%	607.824.500	DISNAKER
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi	N/A	9,43%	525.715.600	4,28%	5.370.000	DISPANGTAN
Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian /Peternakan serta Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging :100 ton/tahun; Susu : 750.000 L/tahun	Daging : -; Susu : 867.029 L/tahun	1.945.477.915	Daging : - ; Susu : 1.300.000 L/tahun	1.613.277.730	DISPANGTAN
	Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1768		1387,2		
	Produktivitas tanaman padi	n/a	6,7 Ton/Ha		6.6 Ton/Ha		
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	300 ton	335,35 ton		270 ton		
	Rasio jumlah ternak sakit yg ditangani terhadap jumlahpopulasi ternak yg terjangkit penyakit	01.01	0,04		01.01		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Jumlah Jenis Ikan Hias yang dikembangkan	3 jenis	2,00		4 jenis		
Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/peternakan/perikanan	Persentase keikutsertaan dalam promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	95%	100%	94.566.497	0	-	DISPANGTAN
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi peternakan	Prov. Jawa Barat	Prov Jabar		Luar provinsi jawa barat dan online		
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi perikanan	lokal (kota Cimahi)	Provinsi Jawa Barat		Luar provinsi jawa barat dan online		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	90	105,00	1.103.548.000	105	347.915.500	DPKUKMP
Program Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	2,00	73.837.800	2	1.000.000	DPKUKMP
Program Pembentukan Sentra Jasa/Perdagangan	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	0,00	56.145.000	0	900.000	DPKUKMP
Sasaran 1.3 : Menurunnya kemiskinan	**Angka Kemiskinan**	**5,92%**	**4,39%**		**5,11%**		
	TPT	**9,00%**	**8,08%**		**13,30%**		
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	272553,00	1.296.652.475	300.209	874.835.150	DISNAKER
Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	92,90	600.268.150	92,90	229.425.400	DISPANGTAN
	Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya	N/A	Beras medium 1% Beras premium 1% Daging sapi 2% Telur ayam 5%		Beras medium 0,81% Beras premium 1,05% Daging sapi 2,38% Telur ayam 6,08%		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase bahan pangan segar yang aman di konsumsi	60	60,00		78		
	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	31,16		31,56		
Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76%	tidak ada data	4.296.654.768		2.339.161.300	DINSOSP2KBP3A; Kecamatan
	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	tidak ada data				
	Persentase PSKS yang tersertifikasi	4,67%	tidak ada data				
	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	67,00				
	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	tidak ada data				
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan							
Tujuan 1 : Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi							
Sasaran 1.1 : Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	**Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)**	**D**					
Program Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65,00%	32,32	11.318.516.645		2.135.182.156	DISHUB
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase Angkutan yang Layak jalan	65,00%	37,00	2.161.796.465		1.655.862.765	DISHUB
	Persentase penurunan titik kemacetan	90%	20,00				
Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Angkutan	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	56%	51,58	1.559.740.071		696.988.852	DISHUB
	Persentase tersedianya halte dan terminal	64%	91,30				
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	105,49	761.069.055		469.935.350	DPUPR
	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	2,66				
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	92,40%	99,20	47.076.801.066		28.826.662.408	DPUPR
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas permukiman	**Jumlah Kawasan Kumuh Sedang**	**11**					

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
Sasaran 2.1 : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	**Persentase pengelolaan sampah**	**87%**					
Program pengurangan timbulan sampah	Persentase pengurangan timbulan sampah	8,22%	0,14	1.120.279.685	13,19%	1.376.849.350	DPKP; DLH
Program penanganan timbulan sampah	Timbulan sampah yang ditangani	N/A	96,06	19.956.432.921	84,43%	15.398.371.121	DLH
Sasaran 2.2 : Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	**Persentase cakupan layanan air limbah domestik**	**70,10%**					
Program peningkatan pelayanan air limbah domestik	Persentase peningkatan kapasitas IPAL Komunal	4,03%	10,66	13.346.766.615	10,86	4.748.531.350	DPKP
	Persentase kapasitas IPAL komunal yang digunakan	100%	75,98		75,83		
Sasaran 2.3 : Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	**Persentase luasan genangan terhadap luas kota**	**0,38%**					
Program peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	83,33	6.120.873.050	100%	2.616.438.700	DPKP
Sasaran 2.4 : Meningkatnya pelayanan air bersih	**Persentase cakupan pelayanan air bersih**	**69,17%**					
Program peningkatan pelayanan air bersih	Total kapasitas SR Air Bersih	12.136	12.136	10.155.025.445	78.130	3.383.213.355	DPKP
	Persentase SR Air Bersih terpasang dari total rencana	25,84%	70,35		69,82		
Sasaran 2.5 : Mengurangi luas kawasan kumuh	**Rasio luas kawasan kumuh**	**4,39%**					
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	0,14	65.815.339.490	0,41	15.028.722.532	DPKP
	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	75,88		75,88		
	Persentase luas taman terhadap luas kota	0,19%	0,15		0,22		
Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan bencana							
Sasaran 3.1 : Meningkatnya ketahanan bencana	**Indeks Resiko bencana**	**Kelas Resiko Sedang**					
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100%	94,00	2.586.014.919	100%	1.677.708.199	SATPOL PP DAMKAR
Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi	100%	100,00	2.276.201.953	100%	1.328.924.338	BPBD
	Waktu tanggap bencana	15 menit	15,00				
Program peningkatan kapasitas sungai dan pengendali banjir	Persentase Kapasistas Sungai terhadap kapasitas sungai yang ideal	17550 m3	17550,30	5.911.844.936	8400,00	27.378.440.339	DPKP

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Persentase Kapasistas Pengendali Banjir terhadap kapasitas Pengendali banjir yang ideal	7,41%	76,85		80,00		
Tujuan 4 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan							
Sasaran 4.1 : Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**31,83**					
Program Peningkatan Kualitas Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien	1,19	0,44	264.223.333	0,659602	42.965.300	DLH
Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Persentase Peningkatan Kualitas Air Permukaan	57%	17,77	1.609.679.617	82,22%	1.037.131.492	DLH
Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	11,16	356.013.350	11,16	781.413.230	DPKP
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kelurahan yang sudah pro klim	0	13,33	1.726.085.150		34.777.500	DLH
	Luas kawasan terkonservasi	N/A	3775,46		18,951 m2		
Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	100%	100,00	393.272.826	100%	230.548.900	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	100%	100,00	1.816.971.663	100%	821.968.699	DLH
	Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring	44,67%	68,60		33,85%		
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	52,63%	84,21	907.322.684		391.429.600	DPUPR, Bappeda
Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase bangunan berizin	29,60%	30,50	1.096.657.074		381.671.400	DPUPR
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan							
Tujuan 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender							
Sasaran 1.1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**80%**					
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	80%	NULL	48.927.547.708		24.919.977.348	Kecamatan
	Persentase lembaga yang berdaya	100%	100,00				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	35,00				
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100,00	466.100.000		332.000.000	BAPPEDA
	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	49%	80,00				
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75%	80,00	708.389.000		-	Kesbangpol; Kecamatan; SETDA Bag. Pemerintahan; SATPOL PP & DAMKAR
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	100%	-	675.000		-	Kesbangpol
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina dlm pendidikan politik	12%	-				
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	tidak ada data	887.761.900	100%	360.179.250	Kesbangpol
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	50%	tidak ada data				
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%	55,00	1.344.555.748		447.739.300	Disbudparpora
Program Peningkatan Sumberdaya Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	32,27	1.800.803.051		282.599.750	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	68,08				
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03%	21,02				
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	33,33				
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik swasta)	100%	100,00				
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai	100%	100,00				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		
			Capaian	Rp (Realisasi)	Capaian	Rp (Realisasi)	
	(lapangan olahraga milik TNI)						
Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	45,00	1.551.692.100		390.715.000	Disbudparpora
Sasaran 1.2 : Meningkatnya pengarusutamaan gender	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**73,38**					
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**92,23**					
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	31,13	548.022.000		148.176.000	DINSOSP2KBP3A
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	29,87				
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	49,49				
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	96,43				
Program perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100,00	70.381.524	100%	62.489.427	DINSOSP2KBP3A

Sumber : hasil analisis, 2020

Tabel 6.6.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Cimahi Tahun 2021-2022

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul										
Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**77,86**		**78,41**		**78,41**		
Sasaran: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan		**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**74,84**		**74,9**		**74,9**		
Program Pengelolaan Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	102,77	50.191.800.049	103,04	34.207.108.049	103,04	84.398.908.098	Dinas Pendidikan
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	96,81		97,08		97,08		
	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	97,46		97,73		97,73		
	4	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,015		0,014		0,014		
	5	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	Nilai	95,47		95,48		95,48		
	6	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	Persen	54,66		54,66		54,66		
	7	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,6		97,6		97,6		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	8	Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	Persen	95,69		96,55		96,55		
	9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	89,81		90,08		90,08		
	10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,37		76,64		76,64		
	11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	79,32		79,59		79,59		
	12	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,019		0		0		
	13	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	96,29		96,56		96,56		
	14	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	Nilai	77,8		77,81		77,81		
	15	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	Persen	78,56		78,56		78,56		
	16	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,1		97,77		97,77		
	17	Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	Persen	80		86,66		86,66		
	18	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	Persen	77,08		77,35		77,35		
	19	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	77,08		77,35		77,35		
	20	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	Nilai	52		52,1		52,1		
	21	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	Persen	51,39		51,39		51,39		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	22	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	46,7		46,7		46,7		
	23	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Persen	53,11		62,95		62,95		
	24	Angka Melek Huruf	Persen	99,99		99,99		99,99		
	25	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	68,89		68,06		68,06		
	26	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	Nilai	100		100		100		
	27	Persentase PKBM yang Terakreditasi	Persen	62,5		66,67		66,67		
	28	Persentase LKP yang Terakreditasi	Persen	40		46,67		46,67		
	29	Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	persen			100		100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	Nilai		-	1:24	200.000.000	1:24	200.000.000	Dinas Pendidikan
	2	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	Nilai			1:24		1:24		
	3	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	Nilai			1:07		1:07		
	4	Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai			1:07		1:07		
Sasaran: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		**Indeks Kesehatan**	**Indeks**	**82,94**		**83,12**		**83,12**		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	1	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	Persen	69,23	57.494.819.124	84,62	47.161.419.374	84,62	104.656.238.498	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Kesehatan Masyarakat	2	Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	Persen	83		83		83		
	3	Prevalensi stunting pada balita	Persen	10,8		10,7		10,7		
	4	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC))	Persen	96		97		97		
	5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	Persen	100		100		100		
	6	Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	Persen	90		90		90		
	7	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	86		90		90		
	8	Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	Persen	100		100		100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Persen	95	417.400.100	97	2.542.400.100	97	2.959.800.200	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	Persen	100	92.415.000	100	125.925.000	100	218.340.000	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	Persen	53	4.675.472.400	54	409.816.000	54	5.085.288.400	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75	154.403.967.888	80	165.007.067.888	80	319.411.035.776	RSUD CIBABAT
Sasaran: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		**Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**	**Persen**	**1,02**		**1**		**1**		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengendalian Penduduk	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,3	220.805.400	2,1	266.715.400	1,8	487.520.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)		9,1		9		9		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Rasio Akseptor KB	Persen	78,9	3.315.286.200	79	2.066.275.400	79	5.381.561.600	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Rasio akseptor KB mandiri	Persen	80		80		80		
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik										
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah		**Indeks reformasi birokrasi**	**Indeks**	**60,43 (B)**		**60,73 (B)**		**60,73 (B)**		
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		**Nilai SAKIP**	**Predikat**	**B**		**B**		**B**		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	85 (B)	22.794.024.500	90 (A)	22.746.727.150	90 (A)	45.540.751.650	Sekretariat DPRD

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	679.730.867	100	1.203.011.100	100	1.882.741.967	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	979.269.000	100	1.608.557.300	100	2.587.826.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100		100		100		
	3	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100		100		100		
	4	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100		100		100		
	5	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100		100		100		
	6	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100		100		100		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	100	417.400.000	100	960.000.000	100	1.377.400.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	10		10		10		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	327.003.000	3	1.250.000.000	3	1.577.003.000	Inspektorat
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	Persen	15	1.061.910.200	18	2.160.800.000	18	3.222.710.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	2.151.944.900	100	2.151.944.900	100	4.303.889.800	Kecamatan Cimahi Utara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	3.675.657.500	100	3.613.908.300	100	7.289.565.800	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	2.682.036.700	100	2.624.450.700	100	5.306.487.400	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Pengelolaan Arsip	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20	162.869.600	25	575.837.867	25	738.707.467	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1	Tingkat keberadaan dan Keuutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	Persen	5	19.400.000	10	225.800.000	10	245.200.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	1	Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	100	9.700.000	100	14.692.000	100	24.392.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah		**Nilai LPPD**	**Predikat**	**Tinggi**		**Tinggi**		**Tinggi**		
Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100,00%	1.203.234.900	100,00%	1.565.606.900	100,00%	2.768.841.800	Sekretariat Daerah
	2	Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	3	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	4	Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	Persen	77,00%		77,00%		77,00%		
	5	Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	6	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	7	Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	Persen	77		77		77		
	8	Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	9	Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	Persen	100,00%		100,00%		100,00%		
	10	Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	Persen	79,05%		79,05%		79,05%		
	11	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100		100		100		
Sasaran: Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah		**Opini BPK**	**Opini**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	25.805.511.690	100	28.443.422.800	100	54.248.934.490	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	2	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100		100		100		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen	6,4	2.646.532.600	2	2.334.732.400	2	4.981.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	90		90		90		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	Persen	70	727.407.600	80	1.180.000.000	80	1.907.407.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Nilai Hasil Pengawasan	Persen	70	384.100.000	80	1.700.000.000	80	2.084.100.000	Inspektorat
Sasaran: Meningkatnya profesionalitas aparatur		**Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks**	**58**		**62**		**62**		
Program Kepegawaian Daerah	1	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	Persen	13,5	1.657.766.000	14	2.668.310.000	14	4.326.076.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	Persen	5		5		5		
	3	Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	Persen	24,5		25		25		
	4	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	79		80		80		
Sasaran: Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		**Survey Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**82,37**		**83,2**		**83,2**		
Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen	60-65	1.218.458.400	65-70	1.266.577.700	65-70	2.485.036.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	2	Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	Persen	100	48.768.300	100	48.768.300	100	97.536.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	3	Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	Persen	100	297.250.000	100	297.250.000	100	594.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pendaftaran Penduduk	1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99	339.208.000	99	339.208.000	99	678.416.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	99		99		99		
Program Pencatatan Sipil	1	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	50	360.000.000	55	360.000.000	55	720.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	75		80		80		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	92	727.955.600	95	727.955.600	95	1.455.911.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	90	16.799.900	92	16.799.900	92	33.599.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	1.281.170.400	100	1.281.170.400	100	2.562.340.800	Kecamatan Cimahi Utara
	2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100		100		100		
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	91		91		91		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	1	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	1.388.077.200	100	1.390.240.600	100	2.778.317.800	Kecamatan Cimahi Tengah

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pelayanan Publik	2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100		100		100		
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82		83		83		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	963.279.200	100	964.279.200	100	1.927.558.400	Kecamatan Cimahi Selatan
	2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100		100		100		
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86		86		86		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			75	2.968.000.000	75	2.968.000.000	Kecamatan Cimahi Utara
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			75	4.318.000.000	75	4.318.000.000	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			75	3.702.000.000	75	3.702.000.000	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	100	2.858.145.900	100	3.274.588.384	100	6.132.734.284	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Persen	100		100		100		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	100	335.394.300	100	572.031.276	100	907.425.576	Kantor Kesatuan Bangsa

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Persen	100	2.098.694.550	100	2.146.326.450	100	4.245.021.000	Kantor Kesatuan Bangsa
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen	100	690.302.200	100	420.000.000	100	1.110.302.200	Kantor Kesatuan Bangsa
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	Persen	100	371.206.000	100	316.000.000	100	687.206.000	Kantor Kesatuan Bangsa
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persen	100	1.586.187.800	100	2.261.187.800	100	3.847.375.600	Kantor Kesatuan Bangsa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	90	54.769.705.500	90	56.914.317.292	90	111.684.022.792	Sekretariat Daerah
	2	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	Kategori	B		B		B		
	3	Persetanse Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persen	100		100		100		
	4	Persetanse Perangakat Daerah yang Menerapkan SOP	Persen	100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	5	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelaynaan	Persen	100		100		100		
	6	Persetanse Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Persen	100		100		100		
	7	Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	Persen	100		100		100		
	8	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen	100		100		100		
	9	Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	Nilai	78		80		80		
	10	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	100		100		100		
	11	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	Persen	100		100		100		
	12	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Kategori	B		B		B		
	13	Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	Persen	100		100		100		
	14	Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	Nilai	80		81		81		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	Persen	100	4.084.178.180	100	4.634.178.000	100	8.718.356.180	Sekretariat Daerah
	2	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Persen	100		100		100		
	3	Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	Persen	100		100		100		
	4	Persetase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	100		100		100		
	5	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	Persen	100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	6	Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	Persen	97		97		97		
	7	Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	Persen	71		71		71		
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesehajteraaan Rakyat	Nilai	84		84		84		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Indeks**	**3,18**		**3,19**		**3,19**		
Program Aplikasi Informatika	1	Cakupan pengembangan e-Government daerah	Persen	70	1.635.040.000	80	2.970.418.750	80	4.605.458.750	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	Persen	50	2.668.974.600	55	2.036.999.800	55	4.705.974.400	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	Persen	50	266.028.800	60	283.000.000	60	549.028.800	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	Persen	30	100.438.200	35	462.500.000	35	562.938.200	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	1	Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	Persen	80,27	335.844.800	80,27	709.000.000	80,27	1.044.844.800	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
	2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	Persen	2		3		3		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 3: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan										
Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi		**PDRB perkapita**	**Juta Rupiah**	**36,29**		**37,77**		**37,77**		
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Persen**	**3,69**		**5,11**		**5,11**		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Jumlah kebijakan penanaman modal	Kebijakan	1	382.499.600	2	382.499.600	2	764.999.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Persentase sistem informasi online penanaman modal	Persen	46,88%	752.581.000	62,50%	685.467.460	62,50%	1.438.048.460	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Perusahaan	230	462.562.000	250	90.100.000	250	552.662.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	1	Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	Persen	-	-	4,76%	300.000.000	4,76%	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Perencanaan dan Pembangunan	1	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	68,8	5.584.987.200	78,8	5.584.987.200	78,8	11.169.974.400	Dinas Perdagangan,

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Industri	2	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Sentra	2		3		3		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	Pasar	1	4.344.647.247	1	12.344.647.247	1	16.689.294.494	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	Persen	100	497.985.000	100	497.985.000	100	995.970.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor	1	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	Persen	20	521.935.000	25	521.935.000	25	1.043.870.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	Persen	45	455.000.000	50	455.000.000	50	910.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	Persen	60	451.665.000	80	451.665.000	80	903.330.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	Persen	46,51	124.653.200	50	124.653.200	50	249.306.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
										Menengah, dan Perindustrian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	Persen	66,67	650.000.000	83,33	300.000.000	83,33	950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata	1	Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	Persen	66,67	50.000.000	83,33	275.000.000	83,33	325.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	Persen	20,86	887.578.000	25,18	150.000.000	25,18	1.037.578.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran: Meningkatnya pemerataan pendapatan		**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,39**		**0,38**		**0,38**		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	Persen	30%	105.579.800	40%	105.579.800	40%	211.159.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	Persentase koperasi sehat	Persen	13%	772.572.800	15%	772.572.800	15%	1.545.145.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	Persen	70%	322.707.000	75%	107.342.200	75%	430.049.200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	Persentase koperasi aktif	Persen	38%	76.950.000	40%	76.950.000	40%	153.900.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	Persen	16.67	326.257.600	18.67	326.257.600	18.67	652.515.200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	1	Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	Persen	17.54	1.655.976.600	17.54	1.480.959.800	17.54	3.136.936.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	2	Persentase peningkatan wirausaha baru	Persen	24.59		24.59		24.59		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Rata-rata ketersediaan Energi	kkal/kap/hari	2400	1.038.389.500	2400	550.622.700	2400	1.589.012.200	Dinas Pangan dan Pertanian
	2	Rata-rata ketersediaan Protein	gr/kap/hari	63		63		63		
	3	Rata-rata Konsumsi Energi	kkal/kap/hari	2.100		2.100		2.100		
	4	Rata-rata Konsumsi Protein	gr/kap/hari	57		57		57		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	Persen	100	39.832.400	100	39.832.400	100	79.664.800	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	Persen	70	25.160.000	70	25.160.000	70	50.320.000	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	Persen	25	55.000.000	25	55.000.000	25	110.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen	7,94	338.639.700	15,87	215.052.900	15,87	553.692.600	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	100	791.010.200	100	791.010.200	100	1.582.020.400	Dinas Pangan dan Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Jumlah produksi ikan konsumsi	ton	250	699.866.800	252,5	699.866.800	252,5	1.399.733.600	Dinas Pangan dan Pertanian
	2	Jumlah produksi ikan hias	ekor	1.000.000		1.020.000		1.020.000		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Angka Konsumi ikan	Kg/kapita/thn	35	86.740.200	37	86.740.200	37	173.480.400	Dinas Pangan dan Pertanian
Sasaran: Menurunnya kemiskinan		**Angka Kemiskinan**	**Persen**	**5,07**		**5,02**		**5,02**		
Program Pemberdayaan Sosial	1	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Persen	6,63	1.519.718.800	6,73	1.685.826.000	6,73	3.205.544.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	1.337.894.300	100	1.919.189.000	100	3.257.083.300	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		100		100		
	3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		100		100		
	4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	3.298.713.000	100	4.199.962.100	100	7.498.675.100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran		**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persen**	**12,64**		**11,37**		**11,37**		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	Persen	10	1.442.773.600	15	1.219.556.600	15	2.662.330.200	Dinas Tenaga Kerja
	2	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Persen	5		5		5		
Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	50	724.278.400	50	746.745.181	50	1.471.023.581	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	Persen			90%	93.538.000	90%	93.538.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	1	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	50	1.709.180.108	50	1.477.347.000	50	3.186.527.108	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	Prosentase koordinasi kawasan transimgrasi	Persen		-	100%	-	100%	-	Dinas Tenaga Kerja
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan										

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Tujuan: Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi		**Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)**	**Predikat**	**C**		**C**		**C**		
Sasaran: Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi		**Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)**	**Predikat**	**C**		**C**		**C**		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persen	67	13.226.754.570	67	17.548.673.335	67	30.775.427.905	Dinas Perhubungan
	2	Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persen	95		95		95		
	3	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	78,09		78,09		78,09		
	4	Persentase penurunan titik kemacetan	Persen	20		30		30		
Program Penyelenggaraan Jalan	1	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	93,37	39.949.267.253	94,87	25.353.650.300	94,87	65.302.917.553	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan: Meningkatkan kualitas permukiman		**Rasio luas kawasan kumuh**	**Persen**	**0,18**		**0,18**		**0,18**		
Sasaran: Meningkatnya kualitas pemukiman		**Rasio luas kawasan kumuh (%)**	**Persen**	**0,18**		**0,18**		**0,18**		
Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase Tingkat Hunian	Persen	100	3.746.212.671	100	3.996.440.500	100	7.742.653.171	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen	100		100		100		
Program Kawasan Permukiman	1	Persentase rumah tidak layak huni	Persen	1,45	5.136.878.100	1,47	9.437.099.800	1,47	14.573.977.900	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	luas kawasan kumuh ringan	Ha	7,23		7,23		7,23		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen	10	1.085.245.000	10	1.091.254.500	10	2.176.499.500	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengembangan Permukiman	1	Persentase Pemakaman yang tersedia	persen	7,60	525.000.000	7,60	973.352.400	7,60	1.498.352.400	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	Persen	0,058	5.983.341.740	0,058	10.390.085.400	0,058	16.373.427.140	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	persen	1,60		1,60		1,60		
Program Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	Persen	74	25.853.670.200	73	29.204.241.782	73	55.057.911.982	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	Persen	24		26		26		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	76,78	8.690.648.292	77,48	4.863.439.400	77,48	13.554.087.692	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	nilai beban pencemar	ton per hari	31		31		31		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	Persen	0,057	2.373.347.500	0,004	2.412.970.000	0,004	4.786.317.500	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	Pesentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	persen	57,14		42,86		42,86		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	69,65	9.958.804.319	69,82	8.634.749.300	69,82	18.593.553.619	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	Persentase air minum layak dan aman	Persen	24,06		24,23		24,23		
Tujuan: Meningkatkan ketahanan bencana		**Indeks Resiko Bencana**	**Indeks**	**Kelas Resiko Sedang**		**Kelas Resiko Sedang**		**Kelas Resiko Sedang**		
Sasaran: Meningkatnya ketahanan bencana		**Indeks Resiko Bencana**	**Indeks**	**Kelas Resiko Sedang**		**Kelas Resiko Sedang**		**Kelas Resiko Sedang**		
Program Pencegahan, Penanggulangan,	1	Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	Persen	100	1.600.355.600	100	2.023.390.600	100	3.623.746.200	Satuan Polisi Pamong Praja dan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persen	100		100		100		Pemadam Kebakaran
Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	Persen	73,33	2.752.664.100	100	3.128.280.500	100	5.880.944.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		100		100		
	3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100		100		
Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	773.126.300	100	1.007.983.000	100	1.781.109.300	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Kapasitas Sungai	m3	62,015	9.457.819.083	114,826	9.151.483.099	114,826	18.609.302.182	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	Persen	80		80		80		
Tujuan: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)**	**Indeks**	**34,36**		**36,07**		**36,07**		
Sasaran: Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)**	**Indeks**	**34,36**		**36,07**		**36,07**		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Persen	100	150.814.100	100	450.804.900	100	601.619.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	1	Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	Persen	70	3.953.493.350	75	2.645.013.550	75	6.598.506.900	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Kerusakan Lingkungan Hidup	2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	Nilai	16		15,5		15,5		
	3	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	Nilai	0,6215		0,6196		0,6196		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	Persen	1,15	2.316.976.000	1,18	2.228.976.000	1,18	4.545.952.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Persen	75	111.567.500	75	52.194.300	75	163.761.800	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	Persen	50	777.788.800	55,55	933.288.800	55,55	1.711.077.600	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	62	1.251.560.000	62	1.729.520.000	62	2.981.080.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	1	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	71	60.593.044.220	72,5	7.297.800.000	72,5	67.890.844.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	Persen	6,2	192.000.000	8	192.000.000	8	384.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat perhargaan lingkungan hidup	Persen	50	129.743.000	50	129.826.300	50	259.569.300	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan	1	Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	Persen	100	242.922.200	100	242.416.900	100	485.339.100	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Hidup										
MISI 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan										
Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**92,85**		**93**		**93**		
Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**Persen**	**98,3**		**99,4**		**99,4**		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	85	13.656.429.400	90	13.990.029.400	90	27.646.458.800	Kecamatan Cimahi Utara
	2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	80		80		80		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	85	19.384.527.500	90	19.583.138.300	90	38.967.665.800	Kecamatan Cimahi Tengah
	2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	80		80		80		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	90	17.143.956.200	90	17.646.130.760	90	34.790.086.960	Kecamatan Cimahi Selatan
	2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	Persen		-	100	-	100	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Persen		-	100	-	100	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen	100	307.051.100	100	554.505.600	100	861.556.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	60	887.616.100	70	945.000.000	70	1.832.616.100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1	Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	Persen	50	14.954.114.300	53	18.150.615.700	53	33.104.730.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	Persen	50		50		50		
Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	1	Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	Persen	10	400.000.000	12	400.000.000	12	800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	50	624.307.300	52	683.000.000	52	1.307.307.300	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
	2	Persentase kebudayaan yang	Persen	50		55		55		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		dilestarikan								Olahraga
Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)**	**Indeks**	**79,65**		**80,48**		**80,48**		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	33	745.340.000	33	964.536.000	33	1.709.876.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**92,85**		**93**		**93**		
Program Perlindungan Perempuan	1	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	122.793.900	100	215.866.000	100	338.659.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	265.269.700	100	264.785.400	100	530.055.100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan	Proyeksi				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	58.475.000	100	158.820.000	100	217.295.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen	87.94	233.813.800	90	233.813.800	90	467.627.600	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	Persen	0,65	412.853.100	0,65	412.853.100	0,65	825.706.200	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen	12,39		12,39		12,39		
	3	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen	14,46		14,46		14,46		
	4	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen	11,66		11,66		11,66		
	5	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	Persen	0,37		0,39		0,39		
	6	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	Persen	1,25		1,25		1,25		

Sumber : hasil analisis, 2020

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, baik dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD, juga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cimahi. Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kerangka pendanaan menggambarkan belanja daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Adapun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang memuat belanja selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 7.1. Tabel tersebut menyajikanrealisasi belanja Tahun 2018 dan 2019, Perubahan APBD tahun 2020 dengan format berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sementara proyeksi belanja untuk Tahun 2021 dan 2022 menggunakan format belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja daerah dimaksud terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi			Proyeksi	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5	**BELANJA**	**1.489.072.968.877**	**1.478.740.639.329**	**1,029,292,260,246**	**1.524.593.549.263**	**1.456.603.610.506**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**592.738.168.300**	**607.051.965.713**	**538,613,477,253**		
5.2	**Belanja Langsung**	**896.334.800.577**	**871.688.673.616**	**490,678,782,993**		
5.1	**Belanja operasi**				**1.326.436.826.675**	
5.1.01	Belanja pegawai				774.916.162.307	
5.1.02	Belanja barang dan jasa				524.921.603.780	
5.1.03	Belanja bunga				1.000.000.000	1.000.000.000
5.1.04	Belanja subsidi				-	
5.1.05	Belanja hibah				11.116.326.450	13.400.000.000

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi			Proyeksi	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5.1.06	Belanja bantuan sosial				14.482.734.138	
5.2	**Belanja modal**				**174.276.636.698**	
5.2.1	Belanja Modal				174.276.636.698	
5.3	**Belanja tidak terduga**				**23.880.085.890**	**25.000.000.000**
5.3.1	Belanja tidak terduga				23.880.085.890	25.000.000.000
5.4	**Belanja transfer**				**-**	**-**
5.4.01	Belanja bagi Hasil				-	-
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan				-	-

Sumber : hasil analisis, 2020

Program perangkat daerah yang memuat judul program selama 5 (lima) tahun periode pembangunan jangka menengah Kota Cimahi, dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Penyajian program tersebut dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu program sebelum dan yang telah menerapkan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program yang sebelum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) meliputi Tahun 2018 sampai dengan 2020. Sementara program yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, meliputi Tahun 2021 dan 2022. Program tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

Lebih lanjut, program perangkat daerah yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu program Tahun 2018 dan program tahun 2019 sampai tahun 2020. Program Tahun 2018 disusun sesuai dengan APBD Tahun 2019 yaitu sebelum penetapan RPJMD dan menjadi tahun pertama RPJM, sedangkan program Tahun 2019 dan 2020 merupakan hasil rumusan RPJMD.

Pengelompokan program perangkat daerah periode tahun 2018-2022 yang diuraikan diatas disajikan sebagai berikut :

1. Program Tahun 2018 menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program Tahun 2018 disusun sesuai dengan APBD Tahun 2019 yaitu sebelum penetapan RPJMD dan menjadi tahun pertama RPJMD;
2. Program Tahun 2019 dan 2020, menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan merupakan hasil perumusan RPJMD setelah kepala daerah dilantik; dan
3. Program Tahun 2021 dan 2022, menerapkan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimuktahirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Dalam dokumen Perubahan RPJMD ini program-program tahun 2021 dan 2022 yang disusun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, mengutamakan penggunaan indikator kinerja program yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, indikator program juga menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang urusan pemerintahan daerah wajib terkait pelayanan dasar, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Penyesuaian indikator kinerja program untuk indikator program tahun 2021 dan 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja *outcome* yang akan dihasilkan; penerapan *logic model* atau *cascading* kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, dan program (ditindaklanjuti ke indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah).

Tabel 7.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2018

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**423.141.780.305,00**	
				Pendidikan				**41.745.625.293,00**	
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	101,96	24.636.357.289,00	DISDIK
				Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	94,10	94,20	500.527.000,00	DISDIK
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	76,27	7.510.260.860,00	DISDIK
				Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	23%	3.650.633.620,00	DISDIK
				Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	44,80%	820.624.800,00	DISDIK
					Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	61,11%		
				Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi	75	75	4.627.221.724,00	DISDIK
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	75		
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	75		
				Kesehatan				**195.484.493.613,00**	
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3	762.456.000,00	DINKES
					Prevalensi stunting pada	12,04	<12.04		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					baduta				
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,54	97.705.780,00	DINKES
				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3	10.335.900,00	DINKES
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3	115.029.800,00	DINKES
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3	902.255.395,00	DINKES
					Prevalensi stunting pada baduta	12,04	<12.04		
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3	110.713.100,00	DINKES
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	88,26%	88,26%	31.497.527.158,00	DINKES
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,54	211.831.550,00	DINKES
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,54	5.940.680.415,00	DINKES
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	61,54	2.669.933.729,00	DINKES
				Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Kepuasan pelanggan	73,25%	73,25%	153.166.024.786,00	RSUD CIBABAT
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan SPA (sarana prasarana dan alat (DAK dan BANGUB)	50,00%	50,00%	-	RSUD CIBABAT
				Pekerjaan umum dan penataan ruang				**73.979.730.190,00**	
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	106.173	4.753.920.600,00	DPUPR
					Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	3.234		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Capaian	Rp. (Realisasi)	
	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang terpantau	100%	100%	435.955.900,00	DPUPR
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	% kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	92,4%	93%	55.303.483.125,00	DPUPR
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di kawasan strategis kota	37 unit bangunan	12 dokumen perencanaan, 2 unit bangunan	10.931.476.837,00	DPUPR
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	52,63%	74%	783.421.925,00	DPUPR, Bappeda
	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	471.051.600,00	DPUPR; Kecamatan; Satpol PP & Damkar
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase bangunan berizin	29,60%	30%	795.073.321,00	DPUPR
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersertifikasinya pelaksana pekerja konstruksi di Kota Cimahi	300 orang	450 orang	217.533.882,00	DPUPR
	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	33%	287.813.000,00	DPUPR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				**99.630.412.767,00**	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan kapasitas IPAL Komunal	4,03%	4,03%	10.265.893.274,00	DPKP
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	80%	129.004.250,00	DPKP
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Menurunnya area genangan	N/A	0,46%	2.982.302.043,00	DPKP
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase peningkatan layanan air bersih perpipaan	1,81%	2,52%	12.686.790.350,00	DPKP
	Program pengelolaan areal	Rasio Tempat	73,53		3.545.229.749,00	DPKP

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				pemakaman	Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk		73,86		
				Program pembangunan turap/talud/bronjong	Presentase Titik Longsor yang tertangani	100%	100%	745.083.919,00	DPKP
				Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	100%	100%	29.090.952.498,00	DPKP
					Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	30%		Kecamatan
				Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	1,30%	32.649.364.134,00	DPKP
					Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	73,86		
					Persentase luas taman terhadap luas kota	0,191%	0,204%		
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	11,15%	7.535.792.550,00	DPKP, DLH
				Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat				**10.186.261.329,00**	
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100%	100%	2.312.060.855,00	SATPOL PP DAMKAR
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi	100%	100%	1.005.562.950,00	BPBD
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	79,21%	78.5%	148.851.134,00	BPBD
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 bulan	12 bulan	5.887.023.140,00	SATPOL PP DAMKAR; Kecamatan Cimahi Selatan; Kecamatan Cimahi Tengah; Kecamatan Cimahi Utara
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	475.539.650,00	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Capaian	Rp. (Realisasi)	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurunnya angka gangguan Trantibum	7 kegiatan	7 kegiatan	357.223.600,00	Satpol PP DAMKAR
	Sosial				**2.115.257.113,00**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	6,49%	331.993.000,00	DINSOSP2KBP3A
	Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	6,49%	117.006.600,00	DINSOSP2KBP3A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	28,00%	413.924.517,00	DINSOSP2KBP3A
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,29%	835.336.596,00	DINSOSP2KBP3A
	Program pembinaan anak terlantar	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,29%	123.074.000,00	DINSOSP2KBP3A
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	6,29%	245.015.000,00	DINSOSP2KBP3A
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	28,00%	48.907.400,00	DINSOSP2KBP3A
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**95.635.166.619,00**	
	Tenaga Kerja				**3.158.846.625,00**	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	1.200.343.500,00	DISNAKER
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	117.694.750,00	DISNAKER
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	1.160.422.500,00	DISNAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	273.955	680.385.875,00	DISNAKER
	Pemberdayaan Perempuan dan					

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Perlindungan Anak				**1.115.222.357,00**	
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	70%	522.522.581,00	DINSOSP2KBP3A
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	29,50%	105.065.000,00	DINSOSP2KBP3A
					Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	20%		
					Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	46,00%		
				Program Perlindungan Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	60%	60%	151.080.000,00	DINSOSP2KBP3A
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	29,50%	336.554.776,00	DINSOSP2KBP3A
					Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	20%		
					Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	46,00%		
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	70%		
				Pangan				**2.755.297.169,00**	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	93,4	754.897.472,00	DISPANGTAN
					Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya	N/A	Rata-rata kenaikan beras 3,5% Rata-rata kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya 7,3%		
					Persentase bahan pangan segar yang aman di konsumsi	60	65		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11	15		
				Program Pengendalian Kebijakan Perberasan	Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	93,4	2.000.399.697,00	SETDA-Bag.Admirek
				Pertanahan				**12.400.590.825,00**	
				Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	100%	100%	189.048.975,00	SETDA Bag. Pemerintahan
				Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pengadaaan tanah untuk sarana olahraga	-	1 ha	12.211.541.850,00	Disbudparpora
				Lingkungan Hidup				**18.064.470.173,00**	
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	80%	80%	12.680.361.844,00	DPKP
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Akses layanan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	100%	676.461.947,00	DLH
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kelurahan yang sudah pro klim	0	7%	1.380.328.891,00	DLH
					Luas kawasan terkonservasi	N/A	15000 m2		
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Udara	1,19	1,17	201.658.400,00	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	100%	100%	3.125.659.091,00	DLH
					Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring	44,67%	66,67%		
				Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				**3.926.933.864,00**	
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	12 bulan	12 bulan	3.926.933.864,00	DISDUKCAPIL; Kecamatan
					Cakupan penerbitan	95.2%	0,96		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					Kartu Tanda Penduduk				
					Cakupan penerbitan akte kelahiran	0,69	0,73		
					Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	0,65		
					Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	0,96		
					Validitas database pelayanan kependudukan	NA	0,75		
					Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	90%	91%		Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**10.858.621.424,00**	
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	30%	10.858.621.424,00	Kecamatan; SETDA-Bag.Pemeintahan
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**2.589.598.800,00**	
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama kawin	21,5 tahun%	21,5%	336.877.450,00	DINSOSP2KBP3A
				Program pelayanan kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan tingkat kontrasepsi	27,38%	27%	572.942.950,00	DINSOSP2KBP3A
				Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio akseptor KB mandiri	80%	80%	29.315.000,00	DINSOSP2KBP3A
				Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	78,51%	78,51%	1.650.463.400,00	DINSOSP2KBP3A
				Perhubungan				**20.223.250.749,00**	
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65,00%	66,00%	660.724.600,00	DISHUB
					Persentase Angkutan yang Layak jalan	65,00%	61,20%		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio terminal angkutan penumpang pada setiap	100%	100%	200.914.500,00	DISHUB

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun; Rasio operasi penegakan ketertiban parkir.	100%	100%	848.980.500,00	DISHUB
				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan	25 km/jam	25 km/jam	16.435.132.011,00	DISHUB
					Rasio fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota	100%	100%		
					Rasio fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	100%	100%		
					Rasio fasilitas perlengkapan pemantauan kemacetan lalu lintas	100%	100%		
					Persentase penurunan titik kemacetan	90%	55%		
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	100%	100%	2.077.499.138,00	DISHUB
					Rasio pelanggaran lalu lintas	0%	0%		
					Rasio stadar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	100%	100%		
					Rasio standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota	100%	100%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Komunikasi dan Informatika				**6.331.905.763,00**	
				Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya fasilitasi pengingkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	12 bulan	12 bulan	246.924.661,00	DISKOMINFOARPUS
				Program kerjasama informasi dengan mass media	Tersebarluskannya informasi pembangunan daerah melalui media massa, cetak dan elektronik	12 bulan	12 bulan	2.038.311.381,00	DISKOMINFOARPUS
				Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksanannya proses pengkajian bidang informasi dan komunikasi melalui pengkajian/ analisis isu pemberitaan di media massa	12 bulan	12 bulan	354.451.550,00	DISKOMINFOARPUS
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	20%	3.692.218.171,00	DISKOMINFOARPUS
					Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	45%		
				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				**1.643.611.283,00**	
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	2 kelompok	278.588.183,00	DPKUKMP
				Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	2941	2999	292.293.800,00	DPKUKMP
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	2 kelompok	65.811.200,00	DPKUKMP
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	15 WUB	415.558.700,00	DPKUKMP
					Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	2941	2999		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	90	95	591.359.400,00	DISPANGTAN
				Penanaman Modal				**2.916.415.979,00**	
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	145	1.392.544.279,00	DPMPTSP
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2	1.523.871.700,00	DPMPTSP
				Kepemudaan dan Olahraga				**4.213.698.245,00**	
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	200 orang	200 orang	1.701.414.943,00	Disbudparpora
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pemuda/Organisasi Pemuda yang berwirausaha	100 orang	100 orang	73.159.750,00	Disbudparpora
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	32,73%	2.334.149.952,00	Disbudparpora
					Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	58,97%		
				Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	32,73%	104.973.600,00	Disbudparpora
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	0	-	Disbudparpora
				Statistik				**353.426.394,00**	
				Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	NA	100%	353.426.394,00	DISKOMINFOARPUS
					Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	20%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Kebudayaan				**2.732.001.400,00**	
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	33%	336.672.400,00	Disbudparpora
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	33%	1.774.373.000,00	Disbudparpora
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	33%	620.956.000,00	Disbudparpora
				Perpustakaan				**769.507.500,00**	
				Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,6	78,7	769.507.500,00	DISKOMINFOARPUS; DISDIK
				Kearsipan				**1.581.768.069,00**	
				Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 Bulan	12 Bulan	76.781.444,00	DISKOMINFOARPUS
				Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	100 persen	100 persen	471.951.800,00	DISKOMINFOARPUS
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumn/arsip daerah	Tersimpannnya arsip secara aman, tertib dan mempermudah penemuan kembali arsip yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	749.589.825,00	DISKOMINFOARPUS
				Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlakananya perbaikan sistem administrasi kearsipan	12 Bulan	12 Bulan	283.445.000,00	DISKOMINFOARPUS
				Urusan Pemerintahan Pilihan				**73.051.257.959,00**	
				Pariwisata				**1.529.457.150,00**	
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	0	98.191.000,00	DISBUDPARPORA
				Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	-	777.368.450,00	DISBUDPARPORA
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546	575	653.897.700,00	DISBUDPARPORA
					Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3526	3880		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	0		
				Pertanian				**3.135.481.792,00**	
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi	N/A	15%	317.511.100,00	DISPANGTAN
				Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	300 ton	328,57 ton	1.394.910.839,00	DISPANGTAN
					Jumlah Jenis Ikan Hias yang dikembangkan	3 jenis	0 jenis		
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio jumlah ternak sakit yg ditangani terhadap jumlahpopulasi ternak yg terjangkit penyakit	1:1	1:1	580.665.419,00	DISPANGTAN
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750.000 l/tahun	Daging : 100,4 ton/tahun; Susu : 823.000 l/tahun	183.929.956,00	DISPANGTAN
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1757,8	353.121.301,00	DISPANGTAN
				Program Pemasaran Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi perikanan	lokal (kota Cimahi)	lokal (kota Cimahi)	132.567.937,00	DISPANGTAN
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase keikutsertaan dalam promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	95%	100%	136.954.240,00	DISPANGTAN
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi peternakan	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	35.821.000,00	DISPANGTAN
				Perdagangan				**62.648.449.796,00**	
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar tradisional layak fungsi	20,00%	30,00%	61.589.488.813,00	DPKUKMP
					Tertatanya sistem pergudangan di Kota Cimahi	0,00%	0,00%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
					Meningkatnya daya saing produk UKM/IKM	4,00%	8,00%		
					Tertatanya bangunan di 4 pasar tradisional	15,00%	50,00%		
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah peredaran barang tidak layak konsumsi	0	0	746.399.383,00	DPKUKMP
				Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	23 IKM/UKM	47 IKM/UKM	312.561.600,00	DPKUKMP
				Perindustrian				**5.620.174.471,00**	
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	350 IKM	631.422.600,00	DPKUKMP
				Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	350 IKM	4.632.775.351,00	DPKUKMP
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	350 IKM	243.797.520,00	DPKUKMP
				Program Penataan Struktur Industri	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	N/A	1 naskah akademis	112.179.000,00	DPKUKMP
				Transmigrasi				**117.694.750,00**	
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	282.366	117.694.750,00	DISNAKER
				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				**199.590.328.820,00**	
				Perencanaan				**4.894.566.038,00**	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%	3.604.074.313,00	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%	100%	478.736.125,00	BAPPEDA
				Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis	Persentase penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	60.000,00	BAPPEDA

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				dan cepat Tumbuh	sesuai dengan peraturan				
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100%	181.095.000,00	BAPPEDA
				Program pengembangan data/informasi	Persentase data yang digunakan dalam perencanaan	100%	100%	313.767.000,00	Bappeda; DPUPR
				Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	49%	64%	316.833.600,00	BAPPEDA
				Keuangan				**7.499.646.602,00**	
				Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	7.499.646.602,00	BPKAD, Bapenda, Setda-Bag.Adbang
				Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				**4.670.872.532,00**	
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan Aparatur yang Terlatih	100%	100%	1.991.045.900,00	BKPSDMD
				Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	167.685.500,00	BKPSDMD
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pelayanan fasilitasi purna bhakti PNS	100%	100%	3.070.750,00	BKPSDMD
				Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 bulan	12 bulan	2.509.070.382,00	BKPSDMD
					Persentase ASN yang kompeten	75%	75%		
					Penilaian kinerja pegawai (SKP)	76	76		
					Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	0,3	0,3		
					persentase pelanggaran disiplin	0,1	0,1		
				Penelitian dan Pengembangan				**526.402.000,00**	
				Program Penelitian dan	Jumlah kajian penelitian	NA	25%	377.370.000,00	BAPPEDA

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan				
				Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	NA	25%	149.032.000,00	BAPPEDA
				Kesatuan Bangsa				**5.120.042.920,00**	
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, ormas dan linmas	12 bulan	12 bulan	1.160.474.000,00	Kesbangpol
				Program Pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	100%	100%	2.034.233.820,00	Kesbangpol
					Persentase kelompok masyarakat yang terbina dlm pendidikan politik	12%	14%		
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	100%	1.925.335.100,00	Kesbangpol
					Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	50%	50%		
				Pendukung Pemerintahan				**176.878.798.728,00**	
				Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75%	75%	219.187.500,00	Kesbangpol; Kecamatan; SETDA Bag. Pemerintahan; SATPOL PP & DAMKAR
				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	N/A	100%	1.343.655.479,00	SETDA Bag. Organisasi; DPMPTSP;Kecamatan Cimahi Utara; Kecama6an Cimahi Selatan
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya batas wilayah Kota Cimahi	100%	100%	646.526.483,00	SETDA Bag. Pemerintahan
				Program peningkatan kerjasama	Terjalinnya kerjasama	100%	100%	275.999.509,00	SETDA Bag.

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				antar pemerintah daerah	antar pemerintah daerah (APEKSI)				Pemerintahan
				Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%	1.229.632.910,00	SETDA Bag. Adbang
				Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama	100%	100%	2.781.432.275,00	SETDA Bag. Adm Kesra
				Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan peraturan yang telah dikaji dan ditegakkan	33%	99	844.374.782,00	SETDA Bag. Adm Kesra
				Program Penguatan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya sosialisasi RANHAM	100%	100%	41.171.750,00	SETDA Bag. Hukum
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peraturan yang telah dikaji dan ditegakkan	100%	100%	1.195.797.618,00	SETDA Bag. Hukum
				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi	100%	100%	2.286.965.336,00	SETDA Bag. Umum & Protokoler
				Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan Kinerja DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya	100%	100%	57.906.713.870,00	Sekretariat DPRD
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	100%	100%	2.493.090.530,00	Inspektorat; BKPSDMD; SETDA-Bag.Hukum; Kecamatan
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme pengawasan aparatur	1 Tahun	1 Tahun	506.753.434,00	Inspektorat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	55.684.372.755,00	Seluruh Perangkat Daerah
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%	40.331.966.217,00	Seluruh Perangkat Daerah
					Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100%		
				Program peningkatan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	70 (B)	3.845.458.947,00	Seluruh Perangkat

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Capaian	Rp. (Realisasi)	
				pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Daerah
					Persentase realisasi anggaran	85%	85%		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	100%	1.136.608.000,00	BPBD; Disbudparpora; Disdukcapil; Diskominfo; DPMPTSP; Dishub; Disnaker; Inspektorat; Kesbangpol; Satpol PP Damkar; Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	100%	4.109.091.333,00	Seluruh Perangkat Daerah
								791.300.838.953,00	

Sumber : hasil analisis, 2020

Tabel 7.3.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2019-2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**567.415.866.764,00**		**357.148.559.010,02**	
	Pendidikan				**97.051.022.775,00**		**46.968.896.141,00**	
	Program Pendidikan Dua Belas Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	101,69	104,14	70.706.810.350,00		32.313.713.226	DISDIK
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,73	98,69				
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	96,38	102,72				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	88,73	97,49				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	75,29	78,90				
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	78,24	80,01				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	94,10	105,58				
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	76	35,42	6.818.017.977,00		4.971.733.690	DISDIK
		Persentase TK terakreditasi	Akreditasi TK A (1,79%)	77,36				
		Persentase PAUD terakreditasi	Akreditasi PAUD B (3,10%)	28,84				
		Angka Melek Huruf (AMH)	99,980	99,99				
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	50				
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang	75	59,77	19.526.194.448,00		9.683.449.225	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	memenuhi standar kompetensi							
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	SD (rata-rata UKG 52)	52,54					
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	SMP (rata-rata UKG 55,5)	77,78					
	Persentase SD yang terakreditasi A	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	49,60					
	Persentase SD yang terakreditasi B	SD akreditasi B (57,6%)	48					
	Persentase SMP yang terakreditasi A	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	65,00					
	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi B	SMP akreditasi B (27,78%)	20,00					
	Persentase sekolah SMP yang terakreditasi C	SMP akreditasi C (2,78%)	2,50					
	Persentase angka kelulusan SD	100%	100					
	Persentase angka kelulusan SMP	100%	100					
	Kesehatan				**250.802.635.576,00**		**210.755.594.221,02**	
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	NA	3,12	9.935.834.559,00		19.582.101.656	DINKES
		Prevalensi stunting pada baduta	12,04	6,98				
	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan	88,26%	92,28	27.565.652.865,00		31.198.479.389	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	kesehatan nasional							
	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	46,15	92,31	6.976.226.227,00		7.686.153.742	DINKES
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan SPA (sarana prasarana dan alat (DAK dan BANGUB)	50,00%		42.878.719.061,00		-	RSUD CIBABAT
	Program Peningkatan Pelayanan Rujukan	Kepuasan pelanggan	73,25%	78,94	162.793.097.864,00		152.288.859.434	RSUD CIBABAT
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	100	653.105.000,00		-	DINKES
	Pekerjaan umum dan penataan ruang				**98.055.316.855,00**		**32.800.567.731,00**	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	105.193 m	105.493	761.069.055,00		469.935.350	DPUPR
		Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	2,660 m	2.661				
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% kondisi jalan dan jembatan yang mantap	92,4%	93,96	47.076.801.066,00	94,02	28.826.662.408	DPUPR
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	52,63%	84,21	907.322.684,00		391.429.600	DPUPR, Bappeda
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase bangunan berizin	29,60%	30,50	1.096.657.074,00		381.671.400	DPUPR
	Program peningkatan kualitas konstruksi	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	17%	27,91	48.213.466.976,00		2.730.868.973	DPUPR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				**101.705.862.886,00**		**53.936.759.506,00**	
	Program peningkatan pelayanan air limbah	Persentase peningkatan	4,03%	10,66	13.346.766.615,00	10,86	4.748.531.350	DPKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	domestik	kapasitas IPAL Komunal						
		Persentase kapasitas IPAL komunal yang digunakan	100%	75,98		75,83		
	Program peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	83,33	6.120.873.050,00	100	2.616.438.700	DPKP
	Program peningkatan pelayanan air bersih	Total kapasitas SR air bersih	12.136	12.136	10.155.025.445,00	78.130	3.383.213.355	DPKP
		Persentase SR air bersih terpasang dari total rencana	25,84%	70,35		69,82		
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	1,51%	0,14	65.815.339.490,00	0,41	15.028.722.532	DPKP
		Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	73,53	75,88		75,88		
		Persentase luas taman terhadap luas kota	0,19%	015		0,22		
	Program peningkatan kapasitas sungai dan pengendali banjir	Persentase Kapasistas Sungai terhadap kapasitas sungai yang ideal	17550 m3	17550,30	5.911.844.936,00	8400,00	27.378.440.339	DPKP
		Persentase Kapasistas Pengendali Banjir terhadap kapasitas Pengendali banjir yang ideal	7,41%	76,85		80,00		
	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,15%	11,16	356.013.350,00	11,16	781.413.230	DPKP dan DLH
	Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat				**15.504.373.904,00**		**10.347.580.111,00**	
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan	100%	94	2.586.014.919,00		1.677.708.199	SATPOL PP DAMKAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	kebakaran							
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	77	8.553.165.132,00		6.020.798.274	SATPOL PP DAMKAR; Kecamatan Cimahi Selatan; Kecamatan Cimahi Tengah; Kecamatan Cimahi Utara	
Program Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase wilayah yang terpantau	100%	100	2.088.991.900,00		1.320.149.300	Kesbangpol	
Program Dukungan Manajemen, Koordinasi Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi	100%	100	2.276.201.953,00		1.328.924.338	BPBD	
	Waktu tanggap bencana	15 menit	15					
Sosial				**4.296.654.768,00**		**2.339.161.300,00**		
Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	0,76%	37,93	4.296.654.768,00		2.339.161.300	DINSOSP2KBP3A; Kecamatan	
	Persentase LKS yang terakreditasi	20,00%	19,23					
	Persentase PSKS yang tersertifikasi	4,67%	90,47					
	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49%	67,42					
	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%	57,69					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**118.829.797.689,40**		**65.108.901.807,00**		
Tenaga Kerja				**2.059.100.375,00**		**1.482.659.650,00**		
Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh	Persentase kenaikan UMK	8,71%	8,03%	762.447.900,00	8,51%	607.824.500	DISNAKER	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja (Orang)	273.616	272.553	1.296.652.475,00	300.209	874.835.150	DISNAKER
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**1.089.418.336,00**		**628.863.900,00**	
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	60%	87,94	541.396.336,00		480.687.900	DINSOSP2KBP3A
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100				`DINSOSP2KBP3A
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,30%	31,11	548.022.000,00		148.176.000	DINSOSP2KBP3A
		Keterlibatan perempuan dalam parlemen	24%	29,87				
		Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	45,94%	49,49				
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	70%	96,43				
	Pangan				**600.268.150,00**		**229.425.400,00**	
	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan	Pola Pangan Harapan ketersediaan	96,2	92,9	600.268.150,00	92,9	229.425.400	DISPANGTAN
		Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya	N/A	Beras medium 1% Beras premium 1% Daging sapi 2% Telur ayam		Beras medium 0,81% Beras premium 1,05% Daging sapi 2,38%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
				5%		Telur ayam 6,08%		
	Persentase bahan pangan segar yang aman di konsumsi	60%	60%		78%			
	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	11%	31,16%		31,56%			
Pertanahan				**360.650.634,00**		**75.061.850,00**		
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase penegasan batas daerah yang telah diidentifikasi	100%	100	360.650.634,00		75.061.850		SETDA Bag. Pemerintahan
	Cakupan Tanah Pemerintah Kota yang Bersertifikat	203	208					
Lingkungan Hidup				**26.886.945.195,00**		**18.942.612.362,00**		
Program pengurangan timbulan sampah	Persentase pengurangan timbulan sampah	8,22%	13,99%	1.120.279.685,00		1.376.849.350		DLH
Program penanganan timbulan sampah	Timbulan sampah yang ditangani	N/A	96,06	19.956.432.921,00		15.398.371.121		DLH
Program Peningkatan Kualitas Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien	1,19	0,635	264.223.333,00		42.965.300		DLH
Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Persentase Peningkatan Kualitas Air Permukaan	57%	17,77	1.609.679.617,00		1.037.131.492		DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kelurahan yang sudah pro klim	0	13,33	1.726.085.150,00		34.777.500		DLH
	Luas kawasan terkonservasi	N/A	3775,46					
Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	100%	100	393.272.826,00		230.548.900		DLH
Program Pengendalian	Persentase	100%	100					DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pengaduan yang ditangani			1.816.971.663,00		821.968.699	
		Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring	44,67%	68,60				
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				**5.315.149.353,40**		**5.548.274.313,00**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	12 bulan		5.315.149.353,40		5.548.274.313	DISDUKCAPIL; Kecamatan
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95.2%	98,91				
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	0,69	47,34				
		Cakupan penerbitan akte kematian	58.1%	68,71				
		Cakupan penerbitan kartu keluarga	95.2%	85,63				
		Validitas database pelayanan kependudukan	NA	91,1				
		Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	90%	92,00				Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**48.927.547.708,00**		**24.919.977.348,00**	
	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	80%	100	48.927.547.708,00		24.919.977.348	Kecamatan
		Persentase lembaga yang berdaya	100%	100				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Tingkat keswadayaan masyarakat	NA	35					
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**3.307.907.394,00**		**1.858.774.500,00**	
	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	78,51%	78,89	3.307.907.394,00		1.858.774.500	DINSOSP2KBP3A
Perhubungan					**15.040.053.181,00**		**4.488.033.773,00**	
	Program Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	65,00%	32,32	11.318.516.645,00		2.135.182.156	DISHUB
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase Angkutan yang Layak jalan	65,00%	37	2.161.796.465,00		1.655.862.765	DISHUB
		Persentase penurunan titik kemacetan	90%	20				
	Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Angkutan	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	56%	51,58	1.559.740.071,00		696.988.852	DiISHUB
		Persentase tersedianya halte dan terminal	64%	91,30				
Komunikasi dan Informatika					**4.903.083.213,00**		**3.342.803.061,00**	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan e-Government daerah	10%	100	4.903.083.213,00		3.342.803.061	DISKOMINFOARPUS
		Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40%	50				
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					**2.125.215.960,00**		**762.125.000,00**	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	15 WUB	21 WUB	1.021.667.960,00	45 WUB	414.209.500	DPKUKMP
		Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro	2941	3039		3121		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	menjadi kelas kecil							
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	90	105	1.103.548.000,00	105	347.915.500	DPKUKMP
	Penanaman Modal				**1.803.119.650,00**		**861.606.450,00**	
	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	125	141	1.803.119.650,00		861.606.450	DPMPTSP; Kecamatan
		jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	2	2				
	Kepemudaan dan Olahraga				**3.145.358.799,00**		**730.339.050,00**	
	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%	55	1.344.555.748,00		447.739.300	Disbudparpora
	Program Peningkatan Sumberdaya Olahraga	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	18,18%	45,2	1.800.803.051,00		282.599.750	Disbudparpora
		Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	49,14%	68,80				
		Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	3,03%	21,20				
		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	0%	33,33				
		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik swasta)	100%	100				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik TNI)	100%	100					
Statistik					**320.182.962,00**		**162.915.000,00**	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	NA	-		320.182.962,00		162.915.000	DISKOMINFOARPUS
	Persentase ketersediaan data statistik daerah	NA	36,77					
Persandian					**143.480.497,00**		**40.330.000,00**	
Program Peyelengaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi yang aman	NA	3,52		143.480.497,00		40.330.000	DISKOMINFOARPUS
Kebudayaan					**1.551.692.100,00**		**390.715.000,00**	
Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	24%	45		1.551.692.100,00		390.715.000	Disbudparpora
Perpustakaan					**640.379.450,00**		**353.393.900,00**	
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,6	80,27		640.379.450,00		353.393.900	DISKOMINFOARPUS ; DISDIK
	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	60	68,5					
Kearsipan					**610.244.732,00**		**290.991.250,00**	
Program sistem pengelolaan dan pelayanan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	18,52		610.244.732,00		290.991.250	DISKOMINFOARPUS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Pilihan				**15.974.542.499,00**		**8.612.182.748,00**	
	Pariwisata				**1.493.099.061,00**		**433.950.000,00**	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	546		1.493.099.061,00		1.002.638.550	DISBUDPARPORA
		Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	3526					
		Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	0	1				
	Pertanian				**2.565.760.012,00**		**1.618.647.730,00**	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi	N/A	9,43%	525.715.600,00	4,28%	5.370.000	DISPANGTAN
	Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian /Peternakan serta Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Susu)	Daging : 100 ton/tahun; Susu : 750.000 L/tahun	Daging : - ; Susu : 867.029 L/tahun	1.945.477.915,00	Daging : 104 ton/tahun; Susu : 1.300.000 L/tahun	1.613.277.730	DISPANGTAN
		Produksi hasil tanaman padi(ton)	1674,13	1768		1387,2		
		Produktivitas tanaman padi	N/A	6,7 Ton/Ha		6,6 Ton/Ha		
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	300 ton	335.57 ton		270 ton		
		Rasio jumlah ternak sakit yg ditangani terhadap jumlahpopulasi ternak yg terjangkit penyakit	1:1	1:1		1:1		
		Jumlah Jenis Ikan Hias yang	3 jenis	2		4		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	dikembangkan							
Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/peternakan/perikanan	Persentase keikutsertaan dalam promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	95%	100%	94.566.497,00	0%	-		DISPANGTAN
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi peternakan	Prov. Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat		Luar provinsi jawa barat dan online			
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi perikanan	lokal (kota Cimahi)	Provinsi Jawa Barat		Luar provinsi jawa barat dan online			
Perdagangan				**6.742.835.152,00**			**3.642.164.503,00**	
Program kerjasama peningkatan potensi sumber daya perdagangan	Cakupan Bina Kelompok pedagang	N/A	2	62.768.000,00		23.590.000		DPKUKMP
	Prosentase pedagang kaki lima dan asongan paham aturan / tata tertib	6,67%	16,67					
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar tradisional layak fungsi	20,00%	40	5.880.171.625,00		3.411.697.503		DPKUKMP
	Tertatanya sistem pergudangan di Kota Cimahi	0,00%	25					
	Meningkatnya daya saing produk UKM/IKM	4,00%	12					
	Tertatanya bangunan di 4 pasar tradisional	15,00%	60					
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah peredaran barang tidak layak konsumsi	0	0	671.888.180,00		300,019,900		DPKUKMP
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal,	23 IKM/UKM	70	141.686.075,00		1.600.000		DPKUKMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	regional dan nasional							
	Prosentase kenaikan omset pedagang selama mengikuti pameran promosi	5%	11,84					
Program Pembentukan Sentra Jasa/Perdagangan	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	0	0	56.145.000,00			900.000	DPKUKMP
Perindustrian					**5.172.848.274,00**		**2.917.420.515,00**	
Program Pengembangan Ekosistem Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	N/A	486	5.099.010.474,00			3.083.445.515	DPKUKMP
	Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	N/A	1					
Program Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	2	73.837.800,00			1.000.000	DPKUKMP
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					**15.030.914.598,00**		**5.830.323.380,00**	
Perencanaan					**2.575.063.039,00**		**1.123.186.700,00**	
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100	2.575.063.039,00			1.123.186.700	BAPPEDA
	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	49%	80					
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	100%	100					
	Persentase penyusunan dokumen	100%	100					

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		
							Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1				2	3	4	6	7	9	10	11
					perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan						
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%	100				
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%	100				
					Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100				
				Keuangan				**5.273.685.409,00**		**3.105.255.780,00**	
				Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Miliik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	70%	100	5.273.685.409,00		1,299,940,010	BPKAD
					Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	90%	100				
					Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	90%	100				
					Persentase peningkatan pajak daerah per tahun	5-10%	21,05			1,805,315,770	BAPENDA
					Realisasi target pendapatan daerah	89%	94,59				
				Kepegawaian serta				**5.640.793.250,00**		**1.519.640.400,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	pendidikan dan pelatihan							
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12 bulan	-	5.640.793.250,00		1.519.640.400	BKPSDMD
		Persentase ASN yang kompeten	75%	28				
		Penilaian kinerja pegawai (SKP)	76	26				
		Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama	0,3	0				
		persentase pelanggaran disiplin	0,1	5				
	Penelitian dan Pengembangan				**652.936.000,00**		**200.641.000,00**	
	Program Kelitbangan Utama dan Pendukung	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	NA	100	652.936.000,00		200.641.000	BAPPEDA
	Kesatuan Bangsa				**888.436.900,00**		**360.179.250,00**	
	Program Pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	100%	-	675.000,00		-	Kesbangpol
		Persentase kelompok masyarakat yang terbina dlm pendidikan politik	12%	16				
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	-	887.761.900,00		360.179.250	Kesbangpol
		Persentase kelompok	50%	100				

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		
							Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1				2	3	4	6	7	9	10	11
					masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan						
				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				**163.454.615.316,60**		**99.768.196.480,00**	
				Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75%	80	708.389.000,00		-	Kesbangpol; Kecamatan; SETDA Bag. Pemerintahan; SATPOL PP & DAMKAR
				Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	Persentase pemilu yang difasilitasi	100%	100	14.269.531.686,00		6.171.572.520	Kecamatan; SETDA-Bagian Pemerintahan
					Nilai komponen pelaporan LKIP kota	100%	100				SETDA Bag. Organisasi
					Persentase PD yang memiliki Evaluasi Jabatan yang baik	100%	100				
					Persentase PD/Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	30%	80,76				
					Persentase dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang bernilai baik	100%	100				SETDA Bag. Pemerintahan
					Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	100				
					Persentase produk hukum yang tersusun	100%	100				SETDA Bag. Hukum
					Persentase kasus hukum terfasilitasi	100%	82				
					Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan	75%	100				SETDA Bag. Admirek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
		perekonomian						
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	100%	100				SETDA Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
	Persentase pelaksanaan pekerjaan yang di Monev	100%	100				SETDA Bag. Adbang	
	Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi	100%	100				SETDA Bag. Umum & Protokoler	
	Pesentase kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial dan kepemudaan olahraga yang difasilitasi	71%	100				SETDA Bag. Adm Kesra	
	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	97%	100					
	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100%	99	57.134.612.125,00		29.447.454.445	Sekretariat DPRD
		Persentase sarana alat mass media yang digunakan	100%	100				
	Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan Dan Fasilitasi	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level 1	3,52	861.233.500,00		432.145.600	Inspektorat
		Nilai Maturitas SPIP	1.2					
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang	100%		81.615.934.292,60		59.898.676.877	Seluruh Perangkat Daerah

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		
							Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	Realisasi Kinerja	Rp. (Realisasi)	
1				2	3	4	6	7	9	10	11
					dipelihara						
					Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%					
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)		5.261.908.830,00		2.424.881.238	Seluruh Perangkat Daerah
					Persentase realisasi anggaran	85%					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%		73.595.000,00		-	Seluruh Perangkat Daerah
				Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	Persentase ASN yang dibina	100%		3.529.410.883,00		1.393.465.800	Seluruh Perangkat Daerah
								880.705.736.867,00		**536.468.163.425,02**	

Sumber : hasil analisis, 2020

Tabel 7.4.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2021-2022

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
				1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
				Program Pengelolaan Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen		102,77	50.191.800.049	103,04	34.207.108.049	103,04	84.398.908.098	Dinas Pendidikan
					2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen		96,81		97,08		97,08		
					3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen		97,46		97,73		97,73		
					4	Angka Putus Sekolah SD	Persen		0,015		0,014		0,014		
					5	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	Nilai		95,47		95,48		95,48		
					6	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	Persen		54,66		54,66		54,66		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen		97,6		97,6		97,6		
		8	Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	Persen		95,69		96,55		96,55		
		9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen		89,81		90,08		90,08		
		10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen		76,37		76,64		76,64		
		11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen		79,32		79,59		79,59		
		12	Angka Putus Sekolah SMP	Persen		0,019		0		0		
		13	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen		96,29		96,56		96,56		
		14	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	Nilai		77,8		77,81		77,81		
		15	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	Persen		78,56		78,56		78,56		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen		97,1		97,77		97,77		
		17	Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	Persen		80		86,66		86,66		
		18	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	Persen		77,08		77,35		77,35		
		19	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen		77,08		77,35		77,35		
		20	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	Nilai		52		52,1		52,1		
		21	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	Persen		51,39		51,39		51,39		
		22	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen		46,7		46,7		46,7		
		23	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Persen		53,11		62,95		62,95		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24	Angka Melek Huruf	Persen		99,99		99,99		99,99		
					25	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen		68,89		68,06		68,06		
					26	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	Nilai		100		100		100		
					27	Persentase PKBM yang Terakreditasi	Persen		62,5		66,67		66,67		
					28	Persentase LKP yang Terakreditasi	Persen		40		46,67		46,67		
					29	Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	persen				100		100		
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	Nilai			-	1:24	200.000.000	1:24	200.000.000	Dinas Pendidikan
					2	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	Nilai				1:24		1:24		
					3	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	Nilai				1:07		1:07		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4	Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai				1:07		1:07		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	325.389.715.258	BB	258.513.697.076	BB	650.779.430.516	Dinas Pendidikan
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100%	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80%	91,78		97,26		97,26		
				1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	Persen		69,23	57.494.819.124	84,62	47.161.419.374	84,62	104.656.238.498	Dinas Kesehatan
					2	Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	Persen		83		83		83		
					3	Prevalensi stunting pada balita	Persen		10,8		10,7		10,7		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC))	Persen		96		97		97		
		5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	Persen		100		100		100		
		6	Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	Persen		90		90		90		
		7	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen		86		90		90		
		8	Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	Persen		100		100		100		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Persen		95	417.400.100	97	2.542.400.100	97	2.959.800.200	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	Persen		100	92.415.000	100	125.925.000	100	218.340.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	Persen		53	4.675.472.400	54	409.816.000	54	5.085.288.400	Dinas Kesehatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		78%	64.004.946.848	78%	85.950.012.747	78%	128.009.893.696	Dinas Kesehatan
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		75	154.403.967.888	80	165.007.067.888	80	319.411.035.776	RSUD CIBABAT
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		B	44.513.530.268	B	44.863.183.334	B	89.027.060.536	RSUD CIBABAT
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
				Program Penyelenggaraan Jalan	1	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen		93,37	39.949.267.253	94,87	25.353.650.300	94,87	65.302.917.553	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen		62	1.251.560.000	62	1.729.520.000	62	2.981.080.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Gedung	1	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen		71	60.593.044.220	72,5	7.297.800.000	72,5	67.890.844.220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	Persen		6,2	192.000.000	8	192.000.000	8	384.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	9.480.476.200	BB	9.617.377.872	BB	18.960.952.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		
				Program Pengembangan Permukiman	1	Persentase Pemakaman yang tersedia	persen		7,60	525.000.000	7,60	973.352.400	7,60	1.498.352.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	Persen		0,058	5.983.341.740	0,058	10.390.085.400	0,058	16.373.427.140	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	persen		1,60		1,60		1,60		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen		76,78	8.690.648.292	77,48	4.863.439.400	77,48	13.554.087.692	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	nilai beban pencemar	ton per hari		31		31		31		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	Persen		0,057	2.373.347.500	0,004	2.412.970.000	0,004	4.786.317.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Pesentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	persen		57,14		42,86		42,86		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen		69,65	9.958.804.319	69,82	8.634.749.300	69,82	18.593.553.619	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Persentase air minum layak dan aman	Persen		24,06		24,23		24,23		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Kapasitas Sungai	m3		62,015	9.457.819.083	114,826	9.151.483.099	114,826	18.609.302.182	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	Persen		80		80		80		
				1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN											

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PERMUKIMAN											
				Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase Tingkat Hunian	Persen		100	3.746.212.671	100	3.996.440.500	100	7.742.653.171	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen		100		100		100		
				Program Kawasan Permukiman	1	Persentase rumah tidak layak huni	Persen		1,45	5.136.878.100	1,47	9.437.099.800	1,47	14.573.977.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	luas kawasan kumuh ringan	Ha		7,23		7,23		7,23		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen		10	1.085.245.000	10	1.091.254.500	10	2.176.499.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	12.595.674.900	BB	12.488.035.064	BB	25.191.349.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen		100	2.858.145.900	100	3.274.588.384	100	6.132.734.284	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Persen		100		100		100		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	Persen		100	1.600.355.600	100	2.023.390.600	100	3.623.746.200	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persen		100		100		100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70 (B)	70 (B)	18.080.451.445	75 (BB)	17.840.973.961	75 (BB)	36.160.902.890	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		
				Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	Persen		73,33	2.752.664.100	100	3.128.280.500	100	5.880.944.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen		100		100		100		
					3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen		100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	5.147.690.900	BB	5.372.074.500	BB	10.295.381.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		75		75		75		
				1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pemberdayaan Sosial		Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Persen		1 : 200	1.519.718.800	1 : 200	1.685.826.000	1 : 200	3.205.544.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen		100	1.337.894.300	100	1.919.189.000	100	3.257.083.300	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen		100		100		100		
					3	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen		100		100		100		
					4	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persen		100	3.298.713.000	100	4.199.962.100	100	7.498.675.100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen		100	773.126.300	100	1.007.983.000	100	1.781.109.300	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	8.571.485.236	BB	12.035.932.448	BB	17.142.970.472	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
				2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
				Program Hubungan Industrial		Persentase kasus yang diselesaikan	Persen		50	1.709.180.108	50	1.477.347.000	50	3.186.527.108	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	Persen		10	1.442.773.600	15	1.219.556.600	15	2.662.330.200	Dinas Tenaga Kerja
					2	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Persen		5		5		5		
				Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen		50	724.278.400	50	746.745.181	50	1.471.023.581	Dinas Tenaga Kerja
				Program Perencanaan Tenaga Kerja		Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	Persen			-	90%	93.538.000	90%	93.538.000	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	5.615.024.573	BB	6.068.037.124	BB	11.230.049.146	Dinas Tenaga Kerja
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		85		90		90		
				2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen		33	745.340.000	33	964.536.000	33	1.709.876.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan	1	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen		100	122.793.900	100	215.866.000	100	338.659.900	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Persen		100	265.269.700	100	264.785.400	100	530.055.100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persen		100	58.475.000	100	158.820.000	100	217.295.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen		87.94	233.813.800	90	233.813.800	90	467.627.600	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
				Program Peningkatan Diversifikasi dan	1	Rata-rata ketersediaan Energi	kkal/kap/hari		2400	1.038.389.500	2400	550.622.700	2400	1.589.012.200	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ketahanan Pangan Masyarakat	2	Rata-rata ketersediaan Protein	gr/kap/hari		63		63		63		
					3	Rata-rata Konsumsi Energi	kkal/kap/hari		2.100		2.100		2.100		
					4	Rata-rata Konsumsi Protein	gr/kap/hari		57		57		57		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	Persen		100	39.832.400	100	39.832.400	100	79.664.800	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	Persen		70	25.160.000	70	25.160.000	70	50.320.000	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		A	9.271.687.473	A	9.491.663.667	A	18.543.374.946	Dinas Pangan dan Pertanian
					2	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	Persen		74	25.853.670.200	73	29.204.241.782	73	55.057.911.982	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	Persen		24		26		26		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Persen		100	150.814.100	100	450.804.900	100	601.619.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	Persen		70	3.953.493.350	75	2.645.013.550	75	6.598.506.900	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	Nilai		16		15,5		15,5		
		3	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	Nilai		0,6215		0,6196		0,6196		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	Persen		1,15	2.316.976.000	1,18	2.228.976.000	1,18	4.545.952.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Persen		75	111.567.500	75	52.194.300	75	163.761.800	Dinas Lingkungan Hidup

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	Persen		50	777.788.800	55,55	933.288.800	55,55	1.711.077.600	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat perhargaan lingkungan hidup	Persen		50	129.743.000	50	129.826.300	50	259.569.300	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	Persen		100	242.922.200	100	242.416.900	100	485.339.100	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	20.685.410.950	BB	23.069.944.036	BB	41.370.821.900	Dinas Lingkungan Hidup
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
				Program Pendaftaran Penduduk	1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen		99	339.208.000	99	339.208.000	99	678.416.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen		99		99		99		
				Program Pencatatan Sipil	1	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen		50	360.000.000	55	360.000.000	55	720.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen		75		80		80		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Validitas database pelayanan kependudukan	Persen		92	727.955.600	95	727.955.600	95	1.455.911.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen		90	16.799.900	92	16.799.900	92	33.599.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	9.370.253.200	BB	8.205.314.732	BB	18.740.506.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		
				2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	Persen			-	100	-	100	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Persen			-	100	-	100	-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
				Program Pengendalian Penduduk	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak		2,3	220.805.400	2,1	266.715.400	2,1	487.520.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)			9,1		9		9		
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1	Rasio Akseptor KB	Persen		78,9	3.315.286.200	79	2.066.275.400	79	5.381.561.600	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Rasio akseptor KB mandiri	Persen		80		80		80		
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	Persen		0,65	412.853.100	0,65	412.853.100	0,65	825.706.200	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen		12,39		12,39		12,39		
					3	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen		14,46		14,46		14,46		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen		11,66		11,66		11,66		
					5	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	Persen		0,37		0,39		0,39		
					6	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	Persen		1,25		1,25		1,25		
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persen		67	13.226.754.570	67	17.548.673.335	67	30.775.427.905	Dinas Perhubungan
					2	Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persen		95		95		95		
					3	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persen		78,09		78,09		78,09		
					4	Persentase penurunan titik kemacetan	Persen		20		30		30		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	20.026.263.462	BB	20.811.382.065	BB	40.052.526.924	Dinas Perhubungan
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100		100		100		
				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
				Program Aplikasi Informatika		Cakupan pengembangan e-Government daerah	Persen		70	1.635.040.000	80	2.970.418.750	80	4.605.458.750	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Informasi dan Komunikasi Publik		Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	Persen		50	2.668.974.600	55	2.036.999.800	55	4.705.974.400	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,65)	BB (75,65)	8.294.738.317	BB (76)	10.653.306.240	BB (76)	16.589.476.634	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	63,83	63,83		63,83		63,83		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	Persen		30%	105.579.800	40%	105.579.800	40%	211.159.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen		13%	772.572.800	15%	772.572.800	15%	1.545.145.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	Persen		70%	322.707.000	75%	107.342.200	75%	430.049.200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen		38%	76.950.000	40%	76.950.000	40%	153.900.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	Persen		16.67	326.257.600	18.67	326.257.600	18.67	652.515.200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
				Program Pengembangan UMKM	1	Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	Persen		17.54	1.655.976.600	17.54	1.480.959.800	17.54	3.136.936.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
					2	Persentase peningkatan wirausaha baru	Persen		24.59		24.59		24.59		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		B	10.044.875.100	B	10.044.952.700	B	20.089.750.200	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100%		100%		100%		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		100%		100%		100%		
				2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
				Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen		60-65	1.218.458.400	65-70	1.266.577.700	65-70	2.485.036.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	Kebijakan		1	382.499.600	2	382.499.600	2	764.999.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi online penanaman modal	Persen		46,88%	752.581.000	62,50%	685.467.460	62,50%	1.438.048.460	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Perusahaan		230	462.562.000	250	90.100.000	250	552.662.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	Persen		-	-	4,76%	300.000.000	4,76%	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB (70)	35.966.361.934	BB (71)	34.557.818.174	BB (71)	71.932.723.868	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
		3 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		80		85		85		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen		60	887.616.100	70	945.000.000	70	1.832.616.100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1	Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	Persen		50	14.954.114.300	53	18.150.615.700	53	33.104.730.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		2	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	Persen		50		50		50		
	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	1	Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	Persen		10	400.000.000	12	400.000.000	12	800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	Persen		50	266.028.800	60	283.000.000	60	549.028.800	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	Persen		30	100.438.200	35	462.500.000	35	562.938.200	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen		50	624.307.300	52	683.000.000	52	1.307.307.300	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		2	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen		50		55		55		
	Program Penunjang	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		BB	5.613.241.886	BB	5.670.225.498	BB	11.226.483.772	Dinas Kebudayaan,

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		80		80		80		
				2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
				Program Pembinaan Perpustakaan	1	Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	Persen		80,27	335.844.800	80,27	709.000.000	80,27	1.044.844.800	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
					2	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	Persen		2		3		3		
				2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
				Program Pengelolaan Arsip		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen		20	162.869.600	25	575.837.867	25	738.707.467	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan Keuutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	Persen		5	19.400.000	10	225.800.000	10	245.200.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen		100	9.700.000	100	14.692.000	100	24.392.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Jumlah produksi ikan konsumsi	ton		250	699.866.800	252,5	699.866.800	252,5	1.399.733.600	Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Jumlah produksi ikan hias	ekor		1.000.000		1.020.000		1.020.000		
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumi ikan	Kg/kapita/thn		35	86.740.200	37	86.740.200	37	173.480.400	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	Persen		66,67	650.000.000	83,33	300.000.000	83,33	950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pemasaran Pariwisata	2	Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	Persen		66,67	50.000.000	83,33	275.000.000	83,33	325.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	Persen		20,86	887.578.000	25,18	150.000.000	25,18	1.037.578.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	Persen		25	55.000.000	25	55.000.000	25	110.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian		Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen		7,94	338.639.700	15,87	215.052.900	15,87	553.692.600	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen		100	791.010.200	100	791.010.200	100	1.582.020.400	Dinas Pangan dan Pertanian
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	Persen		100	297.250.000	100	297.250.000	100	594.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	Pasar		1	4.344.647.247	1	12.344.647.247	1	16.689.294.494	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	Persen		100	497.985.000	100	497.985.000	100	995.970.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Ekspor		Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	Persen		20	521.935.000	25	521.935.000	25	1.043.870.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	Persen		45	455.000.000	50	455.000.000	50	910.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	Persen		60	451.665.000	80	451.665.000	80	903.330.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	Persen		100	48.768.300	100	48.768.300	100	97.536.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen		68,8	5.584.987.200	78,8	5.584.987.200	78,8	11.169.974.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
		2	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Sentra		2		3		3		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Menengah, dan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	Persen		46,51	124.653.200	50	124.653.200	50	249.306.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kawasan transimgrasi	Persen			-	100%	-	100%	-	Dinas Tenaga Kerja
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen		100,00%	1.203.234.900	100,00%	1.565.606.900	100,00%	2.768.841.800	Sekretariat Daerah
		2 Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
		4	Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	Persen		77,00%		77,00%		77,00%		
		5	Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
		6	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
		7	Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	Persen		77		77		77		
		8	Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
		9	Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	Persen		100,00%		100,00%		100,00%		
		10	Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	Persen		79,05%		79,05%		79,05%		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen		100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		90	54.769.705.500	90	56.914.317.292	90	111.684.022.792	Sekretariat Daerah
					2	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	Kategori		B		B		B		
					3	Persetanse Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persen		100		100		100		
					4	Persetanse Perangakat Daerah yang Menerapkan SOP	Persen		100		100		100		
					5	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelaynaan	Persen		100		100		100		
					6	Persetanse Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7	Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	Persen		100		100		100		
					8	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen		100		100		100		
					9	Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	Nilai		78		80		80		
					10	Persentase Realisasi Anggaran	Persen		100		100		100		
					11	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	Persen		100		100		100		
					12	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Kategori		B		B		B		
					13	Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	Persen		100		100		100		
					14	Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	Nilai		80		81		81		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	Persen		100	4.084.178.180	100	4.634.178.000	100	8.718.356.180	Sekretariat Daerah
					2	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	Persen		100		100		100		
					4	Persetase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen		100		100		100		
					5	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	Persen		100		100		100		
					6	Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	Persen		97		97		97		
					7	Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	Persen		71		71		71		
					8	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesehajteraaan Rakyat	Nilai		84		84		84		
				4.02 SEKRETARIAT DPRD											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai		85 (B)	22.794.024.500	90 (A)	22.746.727.150	90 (A)	45.540.751.650	Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (74)	BB (74)	54.300.067.312	BB (76)	54.347.364.662	BB (76)		Sekretariat DPRD
		2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
		3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	48	48		70		70		
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan											
	5.01 PERENCANAAN											
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		100	979.269.000	100	1.608.557.300	100	2.587.826.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan	Persen		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Manusia									
		3	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen		100		100		100		
		4	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen		100		100		100		
		5	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen		100		100		100		
		6	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen		100		100		100		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen		100	986.781.967	100	1.757.516.700	100	2.744.298.667	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen		100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80 (A)	80 (A)	11.254.803.850	82 (A)	11.636.593.917	82 (A)	22.509.607.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80	80		80		80		
				5.02 KEUANGAN											
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen		100	25.805.511.690	100	28.443.422.800	100	54.248.934.490	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					2	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen		100		100		100		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	Persen		70	727.407.600	80	1.180.000.000	80	1.907.407.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program	1	Nilai SAKIP Perangkat	Nilai		BB (71)		A (81)	52.302.356.185	A (81)		Badan Pengelola

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Daerah				41.743.289.001				83.486.578.002	Keuangan dan Aset Daerah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A	50		52,63		52,63		
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen		6,4	2.646.532.600	2	2.334.732.400	2	4.981.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
					2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen		90		90		90		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		60,1	11.004.930.396	62,1	10.316.730.596	60,5	22.009.860.792	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		100%		100%		100%		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen		64,29		76,19		76,19		
				5.03 KEPEGAWAIAN											
				Program Kepegawaian Daerah	1	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	Persen		13,5	1.657.766.000	14	2.668.310.000	14	4.326.076.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	Persen		5		5		5		Manusia Daerah
					3	Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	Persen		24,5		25		25		
					4	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen		79		80		80		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75)	BB (75)	18.204.404.618	BB (76)	9.634.303.612	BB (76)	36.408.809.236	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	85	85		90		90		
				5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	Persen		15	1.061.910.200	18	2.160.800.000	18	3.222.710.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen		100	417.400.000	100	960.000.000	100	1.377.400.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen		10		10		10		
	Unsur Pengawas											
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level		3	327.003.000	3	1.250.000.000	3	1.577.003.000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Nilai Hasil Pengawasan	Persen		70	384.100.000	80	1.700.000.000	80	2.084.100.000	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (80)	A (80)	8.560.913.907	A (81)	9.702.151.910	A (81)	17.977.919.205	Inspektorat
		2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
		3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	90	90		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Kewilayahan										
	7.01 KECAMATAN										
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	2.151.944.900	100	2.151.944.900	100	4.303.889.800	Kecamatan Cimahi Utara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	3.675.657.500	100	3.613.908.300	100	7.289.565.800	Kecamatan Cimahi Tengah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	2.682.036.700	100	2.624.450.700	100	5.306.487.400	Kecamatan Cimahi Selatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100	1.281.170.400	100	1.281.170.400	100	2.562.340.800	Kecamatan Cimahi Utara

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100		100		100		
					3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		91		91		91		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100	1.388.077.200	100	1.390.240.600	100	2.778.317.800	Kecamatan Cimahi Tengah
					2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100		100		100		
					3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		82		83		83		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100	963.279.200	100	964.279.200	100	1.927.558.400	Kecamatan Cimahi Selatan
					2	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen		100		100		100		
					3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		86		86		86		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			-	75	2.968.000.000	75	2.968.000.000	Kecamatan Cimahi Utara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			-	75	4.318.000.000	75	4.318.000.000	Kecamatan Cimahi Tengah
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen			-	75	3.702.000.000	75	3.702.000.000	Kecamatan Cimahi Selatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen		85	13.656.429.400	90	13.990.029.400	90	27.646.458.800	Kecamatan Cimahi Utara
		2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen		80		80		80		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen		85	19.384.527.500	90	19.583.138.300	90	38.967.665.800	Kecamatan Cimahi Tengah
		2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen		80		80		80		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen		90	17.143.956.200	90	17.646.130.760	90	34.790.086.960	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Kelurahan	2	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen		100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	12.954.640.500	BB	13.334.573.500	BB	26.557.013.025	Kecamatan Cimahi Utara
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	16.780.499.169	BB	17.400.074.169	BB	34.400.048.669	Kecamatan Cimahi Tengah
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	15.579.159.115	BB	15.915.370.555	BB	31.937.276.185	Kecamatan Cimahi Selatan
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pemerintahan Umum										
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen		100	335.394.300	100	572.031.276	100	907.425.576	Kantor Kesatuan Bangsa
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Persen		100	2.098.694.550	100	2.146.326.450	100	4.245.021.000	Kantor Kesatuan Bangsa

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen		100	690.302.200	100	420.000.000	100	1.110.302.200	Kantor Kesatuan Bangsa
				Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	Persen		100	371.206.000	100	316.000.000	100	687.206.000	Kantor Kesatuan Bangsa
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persen		100	1.586.187.800	100	2.261.187.800	100	3.847.375.600	Kantor Kesatuan Bangsa
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68	70	3.337.515.044	70	4.903.754.368	70	6.675.030.088	Kantor Kesatuan Bangsa
					2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		
					3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100		100		100		
						JUMLAH				**1.524.593.549.263**		**1.456.603.610.506**		**2.907.363.702.997**	

Sumber : hasil analisis, 2020

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dimuat ada Bab V Perubahan RPJMD ini. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi IKU Wali Kota Cimahi merupakan kinerja tingkat dampak atau *impact*. Pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi didukung oleh capaian IKU Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Adapun IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi disajikan pada Tabel 8.1 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota. Penyajian IKK sesuai tingkatan kinerjanya, yaitu IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada Tabel 8.2 yang memuat IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan IKU seluruh Perangkat Daerah. Seluruh IKU tingkat dampak terdistribusi ke dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah. Selanjutnya, Tabel 8.3 menyajikan IKK tingkat kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan indikator kinerja program perangkat daerah sebagaimana termuat pada Bab VII Perubahan RPJMD ini. IKK tingkat kinerja hasil (*outcome*) merupakan bagian dari Aspek Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan berbagai indikator kinerja.

Pandemi COVID-19 tidak saja berdampak buruk pada aspek kesehatan, namun telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia terutama sosial dan ekonomi sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Memburuknya kondisi sosial dan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia menyebabkan Pemerintah dan seluruh pemerintah daerah melakukan penyesuaian berbagai target pembangunan termasuk target pendapatan. Indikator makro ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2020 menunjukkan belum pulihnya kondisi seperti sebelum Pandemi COVID-19. Dalam rangka merespon perkembangan yang ada, maka indikator dan target IKU maupun IKK Tahun 2020 sampai dengan 2022 juga mengalami penyesuaian.

Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tingkat *impact* (Tabel 8.2) dan tingkat *outcome* (Tabel 8.3) pada tahun 2021 dan 2022 menyebabkan ada beberapa target indikator periode tahun 2018-2020 yang kosong (N/A) sebab indikator tersebut baru digunakan pada perubahan RPJMD Tahun 2021 dan 2022. Perubahan indikator tersebut merupakan upaya penetapan indikator yang SMART dengan memperhatikan keselarasan kinerja RPJMD dan Renstra PD atau *cascading* mulai dari tingkat *impact*, *outcome* sampai dengan *output* di dokumen Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Sebelum Perubahan		Target Setelah Perubahan		Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	76,95	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	77,86	78,12	78,12
2	Indeks Pendidikan (Indeks)	74,66	74,1	74,72	74,15	74,81	74,2	74,87	74,25	74,3	74,84	74,9	74,9
3	Indeks Kesehatan (Indeks)	82,45	82,47	82,69	82,49	82,91	82,51	83,12	82,53	82,55	82,94	83,12	83,12
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07	1,15	0,48	1,1	1,05	1,02	1	1
5	Indeks reformasi birokrasi (Indeks)	- **)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	60,43 (B)	60,73 (B)	60,73 (B)
6	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	BB	B	BB	B	A	A	B	B	B
7	Nilai LPPD (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Opini BPK (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75	75	68	77	72	79	53,23	73	73	58	62	62
10	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	76	78	80,99	80	80,75	82	81,57	84	86	82,37	83,2	83,2
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	- **)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	3,18	3,19	3,19
12	PDRB per Kapita (Juta Rp)	33,12	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	- *)	36,29	37,77	37,77
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,43	5,64	5,68	5,66	6,84	5,69	-2,26	5,72	5,75	3,69	5,11	5,11
14	Indeks Gini (Indeks)	0,41	0,41	0,364	0,4	0,363	0,39	0,38	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38
15	Indeks Williamson (Indeks)	0,35	0,34	N/A	0,33	N/A	0,32	N/A	0,31	0,3	- ***)	- ***)	0,32
16	Angka Kemiskinan (%)	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39	5,45	5,11	5,1	5,00	5,07	5,02	5,02
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,43	8,26	7,93	7,52	8,08	6,78	13,3	6,05	5,31	12,64	11,37	11,37

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Sebelum Perubahan		Target Setelah Perubahan		Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
18	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS) (Predikat)	D	D	C	D	C	D	C	D	C	C	C	C
19	Persentase pengelolaan sampah (%)	87	98	95	100	96,06	100	97,61	100	100	- ***)	- ***)	97
20	Persentase cakupan layanan air limbah domestik (%)	70,27	76,75	72.70	83,41	75,98	90,06	75,83	92,81	95,56	- ***)	- ***)	69,9
21	Persentase luasan genangan terhadap luas kota (%)	0,38	0,31	0,14	0,23	0,07	0,15	0,07	0,08	0	- ***)	- ***)	0,08
22	Persentase cakupan pelayanan air bersih (%)	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	79,24	69,82	86,49	93,25	- ***)	- ***)	63,32
23	Rasio luas kawasan kumuh (%)	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	2,91	0,36	1,29	0	0,18	0,18	0,18
24	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8	34,13	38,21	34,66	35,19	34,36	36,07	36,07
26	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	80	95,1	80	100	80	95,1	80	80	81,25	82	82
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	73,38	73,63	77,21	73,75	74,14	74	N/A	74,5	75	74,5	75	75
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	92,23	92,3	92,36	92,5	92,2	92,7	92,01	92,85	93	92,4	92,6	92,6

*) Penambahan indikator pada Perubahan RPJMD dari indikator tujuan
**) Indikator baru digunakan pada Perubahan RPJMD, belum ada datanya pada tahun 2017 (kondisi awal)
***) Indikator tidak digunakan lagi sebagai IKU Pemda pada Perubahan RPJMD

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	74,07	74,1	74,66	74,15	74,81	74,2	IKU Dinas Pendidikan
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,89	11,37	10,93	10,94	10,94	11,3	IKU Dinas Pendidikan
3	Rata-Rata Nilai UN SD	Nilai	214,93	219,94	229,58	224,95	221,39	229,97	IKU Dinas Pendidikan
4	Rata-Rata Nilai UN SMP	Nilai	216,47	230,18	216,24	243,88	229,9		IKU Dinas Pendidikan
5	Persentase Siswa kelas 2 SD paham literasi	Persen	N/A	70	70	75	77,58	80	IKU Dinas Pendidikan
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pendidikan
7	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pendidikan
8	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pendidikan
9	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pendidikan
10	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang DIKMAS	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pendidikan
11	Indeks Kesehatan	Indeks	82,45	82,47	82,69	82,49	82,91	82,51	IKU Dinas Kesehatan
12	AKI PER 100.000 KH	Nilai	113,98	102	102,16	101,5	120,26	101	IKU Dinas Kesehatan
13	AKB PER 1000 KH	Nilai	7,14	7,12	4,18	7,1	5,83	7	IKU Dinas Kesehatan
14	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	N/A	0,4	0,29	0,405	0,22	0,41	IKU Dinas Kesehatan
15	Rasio Kematian Ibu (PER 100.000 KH)	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Kesehatan
16	Rasio Kematian Bayi (PER 1000 KH)	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Kesehatan
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	Indeks	73,25	74,0	74,8	74,5	78,94	74,5	IKU RSUD Cibabat
18	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	
19	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Persen	92,4	93,5	93,19	93,5	93,96	94	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	Persen	17	33	0	50	0	67	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
21	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	Persen	59	60	60	60	60	61	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
23	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Persen	59	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	23	23	98,52	42	99,53	61	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
25	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	3,48	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
26	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	Ha	7,03	7,03	61,5	6,71	12,04	5,17	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
27	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persen	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	63,32	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
28	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98	69,9	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
29	Persentase luas genangan daerah rawan	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
30	Persentase luas genangan daerah tidak rawan	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
31	Angka Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kasus	1360	1300	1397	300	271	1100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
32	Persentase penurunan titik rawan trantibumas	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
33	Indeks Resiko Kebakaran	Indeks	N/A	N/A	N/A	70	59,6	59,5	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
34	Persentase wilayah yang tanggap bencana kebakaran	Persen	N/A	2,2	5,03	4,42	8	7,9	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
35	Waktu Tanggap Bencana	Menit	15	100	50	20	20	46,66	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
36	Indeks Resiko bencana	Indeks	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
38	Persentase Respon tanggap darurat bencana	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39	Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	0	0	85	80	86	0	IKU Kantor Kesatuan Bangsa
41	Persentase organisasi kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang terbina/terfasilitasi	Persen	0	0	36	36	36	36	IKU Kantor Kesatuan Bangsa
42	Persentase potensi konflik terkait idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	Persen	0	0	50	50	100	70	IKU Kantor Kesatuan Bangsa
43	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,31	1,25	1,12	1,2	1,07	1,04	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
44	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama skor 525	Pratama skor 525	Pratama skor 550	Pratama skor 550	Pratama skor 575	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
45	Persentase Indikator Capaian Kota Layak Anak yang dipenuhi	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
46	Angka kemiskinan	Persen	5,9	5,77	4,94	5,61	4,39	4,83	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
47	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,23	92,3	92,36	92,5	92,2	92,7	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,38	73,63	77,21	73,75	n/a	78,83	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
49	Persentase Indikator Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang Dipenuhi	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	Persen	79	79	78,99	79	78,89	79	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
51	Cakupan PMKS yang meningkat taraf hidup, kualitas dan kelangsungan hidupnya	Persen	50	50	50	55	57	60	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
52	Cakupan PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
53	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Persen	N/A	13,21	13,21	13,5	16	*)	IKU Dinas Tenaga Kerja
54	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	N/A	70	70	70	79,16	50	IKU Dinas Tenaga Kerja
55	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	62.686	51.849	56.286	52.000	57.208	51.203	IKU Dinas Tenaga Kerja
56	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Persen	7	8,11	8,11	8,11	8,11	13,5	IKU Dinas Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
57	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Tenaga Kerja
58	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Tenaga Kerja
59	Nilai/skor PPH Ketersediaan	Nilai	96,2	96,4	93,4	96,6	92,9	96,8	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
60	Nilai/skor PPH Konsumsi	Nilai	82,1	82,6	79,1	83,1	83,8	*)	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
61	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	Persen	0,22	0,23	0,22	0,23	0,2	0,24	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
62	Persentase tingkat capaian ketersediaan energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	Energi : 114,1 AKE Protein: 142,2 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	Energi : 91,4 AKE Protein: 145,1 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	Energi : 97,6 AKE Protein: 2017,3 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
63	Tingkat capaian konsumsi energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	Energi : 97,6 AKE Protein: 107,8 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	Energi : 91,5 AKE Protein: 104 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	Energi : 98,8 AKE Protein: 109 AKP	Energi : 100 AKE Protein: 100 AKP	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
64	Persentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	Persen	0	0	2,62	0	2,62	1,54	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
65	Persentase peningkatan produksi susu	Persen	0	0	9,73	6,67	15,6	13,3	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
66	Persentase peningkatan produksi ikan budidaya	Persen	0	0	9,5	0	11,78	5	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
67	Persentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	Persen	0	5	43,96	5	32,43	7,5	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
68	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	87	98	95	100	96,06	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
69	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8	49,14	IKU Dinas Lingkungan Hidup
70	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	21,33	22	11,33	22,67	45,35	35	IKU Dinas Lingkungan Hidup
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	39,24	40	52,03	42	70,23	55	IKU Dinas Lingkungan Hidup
72	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	34,15	34,13	34,15	34,75	30,31	30,32	IKU Dinas Lingkungan Hidup
73	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	Persen	N/A	75	85	78	100	80	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
74	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	N/A	75	50	78	65	81	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76	78	79,72	80	84,38	82	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
76	*Level Of Service* (LOS)	Predikat	D	D	C	D	C	C	IKU Dinas Perhubungan
77	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	Predikat	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Dinas Perhubungan
78	Persentase peningkatan pemustaka aktif	Persen	N/A	0,97	1,64	0,99	62,17	1,02	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
79	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	N/A	1,8	3,2	2,6	3,16	3,3	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
80	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Indeks	N/A	55	41,63	60	72,32	65	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
81	Persentase pemustaka aktif	Persen	N/A	0,97	1,64	0,99	62,17	1,02	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
82	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Persen	N/A	25	10	50	74,07	75	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	80	n/a	80	80,9	82	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
84	Nilai realisasi investasi	Rupiah	N/A	9.061.090.000.000	9.744.433.463.274	9.061.090.000.000	24.409.960.302.066	5.785.150.000.000	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
85	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	24	33	29,63	38	45	45	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
86	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Persen	N/A	N/A	N/A	10	10	11	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
87	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Orang	546	575	392	600	899	83	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
88	Jumlah KunjunganWisatawan Nusantara (Wisnus)	Orang	3.526	3.880	5.852	4.270	43.707	4.700	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
89	*Length of Stay* (Lama kunjungan wisata)	Hari	N/A	2 hari 1 malam	N/A	2 hari 1 malam	3 hari 2 malam	2 hari 1 malam	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
90	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Persen	N/A	44,1	N/A	44,6	44,6	45,6	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
91	Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen	N/A	*)	*)	48	63,5	48	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
92	Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Persen	33	36	36	39	39	17,9	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
93	Persentase peningkatan omset UKM	Persen	N/A	393	393	592	592	14,67	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
94	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	Persen	N/A	393	393	592	592	14,86	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
95	Persentase Koperasi yang Berdaya Saing	Persen	33	36	36	39	39	17,9	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
96	Jumlah IKM yang Siap Ekspor	IKM	9	13	15	17	15	15	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
97	Persentase kasus kelangkaan bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
98	Jumlah IKM yang berdaya saing	Persen	120	320	320	*)	*)	*)	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
99	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	N/A	*)	*)	71,33	71,33	59,35	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
100	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kota	Nilai	20,79	22	22,63	22	25,6	28	IKU Bappeda
101	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	Persen	N/A	N/A	N/A	75	75	75	IKU Bappeda
102	Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Bappeda
103	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Bappeda
104	Persentase Renja selaras dengan RKPD	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Bappeda
105	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Bappeda
106	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kota yang diakomodir pada RKPD	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU Bappeda
107	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	25,91	24,06	25,45	23,37	25,18	22,86	IKU Bapenda
108	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	Persen	34,21	4,38	-12,74	5,05	7,74	-8,07	IKU Bapenda
109	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	IKU BPKAD
110	Penetapan APBD tepat Waktu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	IKU BPKAD
111	Rasio Utilisasi Aset	Persen	N/A	40	49,4	40	55,91	40	IKU BPKAD
112	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	75	68	77	72	79	IKU BKPSDM
113	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	N/A	**)	**)	**)	**)	**)	IKU BKPSDM
114	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	Persen	N/A	-	50	7	3,57	25	IKU Inspektorat
115	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
116	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	-	3	1,28	3	1,268	3	IKU Inspektorat
117	Nilai SAKIP Kota	Nilai	CC	B	B	BB	B	BB	IKU Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
118	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	IKU Sekretariat Daerah
119	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	IKU Sekretariat Daerah
120	Nilai rata-rata IKM Kota	Nilai	N/A	79	80,95	79	80,75	81,56	IKU Sekretariat Daerah
121	Tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Cimahi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	IKU Sekretariat DPRD
122	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar	Persen	N/A	14	42	100	99	100	IKU Sekretariat DPRD
123	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Selatan	Persen	78	78	81,27	85	84,75	86	IKU Kecamatan Cimahi Selatan
124	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Tengah	Persen	75,52	76	77.273	78	80,04	80	IKU Kecamatan Cimahi Tengah
125	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Utara	Persen	90.00.00	85.00.00	92,72	85.00.00	92,74	85.00.00	IKU Kecamatan Cimahi Utara
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)	Predikat	D	D	C	D	C	C	IKU Pemda
2	Persentase pengelolaan sampah	Persen	87	98	95	100	96,06	95,1	IKU Pemda
3	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98	69,9	IKU Pemda
4	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	0,38	0,31	0,14	0,23	0,07	0,08	IKU Pemda
5	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	63,32	IKU Pemda
6	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	4,39	3,96	1,88	3,78	3,16	3,48	IKU Pemda
7	Indeks Resiko bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas resiko sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	IKU Pemda
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	31,83	32,25	32,67	33,3	46,8	49,14	IKU Pemda

*) Indikator tidak digunakan sebagai IKU Perangkat Daerah
**) Indikator baru digunakan pada Perubahan RPJMD, belum ada datanya pada tahun 2017 (kondisi awal)

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2021 - 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Pendidikan	Indeks	*)	*)	*)	IKU Dinas Pendidikan
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,9	10,95	10,95	IKU Dinas Pendidikan
3	Rata-Rata Nilai UN SD	Nilai	*)	*)	*)	IKU Dinas Pendidikan
4	Rata-Rata Nilai UN SMP	Nilai	*)	*)	*)	IKU Dinas Pendidikan
5	Persentase Siswa kelas 2 SD paham literasi	Persen	79,58	81,58	81,58	IKU Dinas Pendidikan
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7	13,77	13,77	IKU Dinas Pendidikan
7	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD	Nilai	36,63	36,64	36,64	IKU Dinas Pendidikan
8	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD	Nilai	86,56	86,57	86,57	IKU Dinas Pendidikan
9	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP	Nilai	72,33	72,34	72,34	IKU Dinas Pendidikan
10	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang DIKMAS	Nilai	51,25	51,26	51,26	IKU Dinas Pendidikan
11	Indeks Kesehatan	Indeks	*)	*)	*)	IKU Dinas Kesehatan
12	AKI PER 100.000 KH	Nilai	*)	*)	*)	IKU Dinas Kesehatan
13	AKB PER 1000 KH	Nilai	*)	*)	*)	IKU Dinas Kesehatan
14	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	*)	*)	*)	IKU Dinas Kesehatan
15	Rasio Kematian Ibu (PER 100.000 KH)	Nilai	115,5	115,2	115,2	IKU Dinas Kesehatan
16	Rasio Kematian Bayi (PER 1000 KH)	Nilai	6,5	6,4	6,4	IKU Dinas Kesehatan
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	Indeks	*)	*)	*)	IKU RSUD Cibabat
18	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Paripurna (80)	Paripurna (80)	Paripurna (80)	IKU RSUD Cibabat
19	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Persen	93,37	94,87	94,87	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	Persentase bangunan pemerintahan yang memenuhi sertifikat laik fungsi	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
21	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	71	72,5	72,5	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
23	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	Persen	62	62	62	IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	80	100	100	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
25	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
26	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	Ha	5,17	5,17	5,17	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
27	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persen	69,65	69,82	69,82	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
28	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	76,78	77,48	77,48	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
29	Persentase luas genangan daerah rawan	Persen	0,057	0,004	0,004	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
30	Persentase luas genangan daerah tidak rawan	Persen	57,14	42,86	42,86	IKU Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
31	Angka Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kasus	1000	900	900	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
32	Persentase penurunan titik rawan trantibumas	Persen	*)	*)	*)	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
33	Indeks Resiko Kebakaran	Indeks	59,4	59,3	59,3	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
34	Persentase wilayah yang tanggap bencana kebakaran	Persen	8	8,1	8,1	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
35	Waktu Tanggap Bencana	Menit	15	15	15	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
36	Indeks Resiko bencana	Indeks	*)	*)	*)	IKU Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
37	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persen	73,33	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	Persentase Respon tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39	Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	Persen	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	0	80	80	IKU Kantor Kesatuan Bangsa

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
41	Persentase organisasi kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang terbina/terfasilitasi	Persen	36	36	36	IKU Kantor Kesatuan Bangsa
42	Persentase potensi konflik terkait idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	Persen	80	80	80	IKU Kantor Kesatuan Bangsa
43	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
44	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
45	Persentase Indikator Capaian Kota Layak Anak yang dipenuhi	Persen	50	50	50	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
46	Angka kemiskinan	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
47	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
49	Persentase Indikator Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang Dipenuhi	Persen	50	50	50	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	Persen	79	79	79	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
51	Cakupan PMKS yang meningkat taraf hidup, kualitas dan kelangsungan hidupnya	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
52	Cakupan PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	Persen	25	30	30	IKU Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
53	Persentase perusahaan yang menerapkan UMSK	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Tenaga Kerja
54	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	50	50	50	IKU Dinas Tenaga Kerja
55	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	*)	*)	*)	IKU Dinas Tenaga Kerja
56	Persentase Pengangguran di Kota Cimahi	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Tenaga Kerja
57	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	65	67,5	67,5	IKU Dinas Tenaga Kerja
58	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	86,7	87,36	87,36	IKU Dinas Tenaga Kerja
59	Nilai/skor PPH Ketersediaan	Nilai	93,5	94	94	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
60	Nilai/skor PPH Konsumsi	Nilai	*)	*)	*)	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
61	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	Persen	0,24	0,24	0,24	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
62	Persentase tingkat capaian ketersediaan energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
63	Tingkat capaian konsumsi energi dan protein perkapita terhadap standar ideal	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
64	Persentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	Persen	1,54	1,54	1,54	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
65	Persentase peningkatan produksi susu	Persen	20	26.67	26,67	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
66	Persentase peningkatan produksi ikan budidaya	Persen	5	5	5	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
67	Persentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	Persen	7,5	7,5	7,5	IKU Dinas Pangan Dan Pertanian
68	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	98	99	99	IKU Dinas Lingkungan Hidup
69	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Lingkungan Hidup
70	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	10,1	10,2	10,2	IKU Dinas Lingkungan Hidup
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,03	71,13	71,13	IKU Dinas Lingkungan Hidup
72	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	22,91	22,93	22,93	IKU Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
73	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan tepat waktu	Persen	83	85	85	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
74	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	82	85	85	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
75	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	86	86	IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
76	*Level Of Service* (LOS)	Predikat	C	C	C	IKU Dinas Perhubungan
77	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	Predikat	C	C	C	IKU Dinas Perhubungan
78	Persentase peningkatan pemustaka aktif	Persen	1,06	1,11	1,11	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
79	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,18	3,19	3,19	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
80	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Indeks	72,32	72,32	72,32	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
81	Persentase pemustaka aktif	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
82	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	Persen	80	85	85	IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	84	84	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
84	Nilai realisasi investasi	Rupiah	7.170.150.000.000	7.177.320.000.000	7.177.320.000.000	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
85	Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	50	55	55	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
86	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Persen	11,2	11,3	11,3	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
87	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Orang	100	200	200	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
88	Jumlah KunjunganWisatawan Nusantara (Wisnus)	Orang	5160	5680	5680	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
89	*Length of Stay* (Lama kunjungan wisata)	Hari	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
90	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Persen	45,5	45,5	45,5	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
91	Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen	48	49	49	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
92	Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
93	Persentase peningkatan omset UKM	Persen	16	18	18	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
94	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	Persen	19	24	24	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
95	Persentase Koperasi yang Berdaya Saing	Persen	5,7	7,2	7,2	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
96	Jumlah IKM yang Siap Ekspor	IKM	30	32	30	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
97	Persentase kasus kelangkaan bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
98	Jumlah IKM yang berdaya saing	Persen	*)	*)	*)	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
99	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	71,8	71,8	71,8	IKU Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
100	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kota	Nilai	*)	*)	*)	IKU Bappeda
101	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	Persen	*)	*)	*)	IKU Bappeda
102	Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	75	75	75	IKU Bappeda
103	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	Persen	100	100	100	IKU Bappeda
104	Persentase Renja selaras dengan RKPD	Persen	100	100	100	IKU Bappeda
105	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Persen	100	100	100	IKU Bappeda
106	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kota yang diakomodir pada RKPD	Persen	100	100	100	IKU Bappeda
107	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	26,61	26,72	26,72	IKU Bapenda
108	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	Persen	3,7	1,95	1,95	IKU Bapenda

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	10	11	12	13
109	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP	Persen	100	100	100	IKU BPKAD
110	Penetapan APBD tepat Waktu	Persen	100	100	100	IKU BPKAD
111	Rasio Utilisasi Aset	Persen	60	70	70	IKU BPKAD
112	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	58	62	62	IKU BKPSDM
113	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	79	80	80	IKU BKPSDM
114	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	Persen	50	100	100	IKU Inspektorat
115	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	*)	*)	*)	IKU Inspektorat
116	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	IKU Inspektorat
117	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B	B	B	IKU Sekretariat Daerah
118	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU Sekretariat Daerah
119	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B	B	IKU Sekretariat Daerah
120	Nilai rata-rata IKM Kota	Nilai	82,37	83,2	83,2	IKU Sekretariat Daerah
121	Tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Cimahi	Persen	B	A	A	IKU Sekretariat DPRD
122	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar	Persen	99	99	99	IKU Sekretariat DPRD
123	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Selatan	Persen	86	86	86	IKU Kecamatan Cimahi Selatan
124	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Tengah	Persen	82	83	83	IKU Kecamatan Cimahi Tengah
125	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cimahi Utara	Persen	85.00.00	85.00.00	85.00.00	IKU Kecamatan Cimahi Utara
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Tingkat Pelayanan Jalan / *Level of Service* (LOS)	Predikat	C	C	C	IKU Pemda
2	Persentase pengelolaan sampah	Persen	*)	*)	*)	IKU Pemda
3	Persentase cakupan layanan air limbah domestik	Persen	*)	*)	*)	IKU Pemda
4	Persentase luasan genangan terhadap luas kota	Persen	*)	*)	*)	IKU Pemda
5	Persentase cakupan pelayanan air bersih	Persen	*)	*)	*)	IKU Pemda
6	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18	0,18	0,18	IKU Pemda
7	Indeks Resiko bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	IKU Pemda
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	34,36	36,07	36,07	IKU Pemda

*) Indikator tidak digunakan sebagai IKU Perangkat Daerah

Tabel 8.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kota Cimahi Tingkat Hasil (*Outcome*) Tahun 2018-2022

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	62,66 (B)	62,66 (B)	63,28 (B)	BB	BB	BB	Dinas Pendidikan
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	94,8	95,24	96,19			96,19	Dinas Pendidikan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Pendidikan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Pendidikan
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Pendidikan
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Pendidikan
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				91,78	97,26	97,26	Dinas Pendidikan
	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	Persen	78,6	79,87					79,87	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	101,69	105,6	104,14	95,57			95,57	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	88,73		97,49	91,27			91,27	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Persen	94,1	102,6	105,58	121,75			121,75	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	95,73		98,69	90,83			90,83	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	75,29		78,9	83,03			83,03	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	96,38		102,72	93,25			93,25	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	78,24		80,01	87,53			87,53	Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	99,98		99,99	99,986			99,986	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Dan TK/RA	Persen	76	81,4	35,42	67,64			67,64	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD Terakreditasi	Persen	Akreditasi PAUD B (3,10%)		28,84	28,57			28,57	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase TK Terakreditasi	Persen	Akreditasi TK A (1,79%)		77,36	77,36			77,36	Dinas Pendidikan
	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	Persen	PKBM 28, LKP 52, yang terakrditaSI pkbm 7, lkp 1 (10%)	19,4	50	38,3			38,3	Dinas Pendidikan
	Persentase Angka Kelulusan SD	Persen	100		100	100			100	Dinas Pendidikan
	Persentase Angka Kelulusan SMP	Persen	100		100	99,94			99,94	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan TK Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	75	22	59,77	57			57	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	SD (rata-rata UKG 52)	48	52,54	67,95			67,95	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	SMP (rata-rata UKG 55,5)	60	77,78	51,29			51,29	Dinas Pendidikan
	Persentase SD Yang Terakreditasi A	Persen	SD akreditasi A (50 sekolah dari 125/ 40%)	40,8	49,6	50,86			50,86	Dinas Pendidikan
	Persentase SD Yang Terakreditasi B	Persen	SD akreditasi B (57,6%)		48	46,55			46,55	Dinas Pendidikan
	Persentase SMP Yang Terakreditasi A	Persen	SMP akreditasi A 22 dari 36 (61%)	69,44	65	57,78			57,78	Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah SMP Yang Terakreditasi B	Persen	SMP akreditasi B (27,78%)		20	17,78			17,78	Dinas Pendidikan
	Persentase Sekolah SMP Yang Terakreditasi C	Persen	SMP akreditasi C (2,78%)		2,5	2,22			2,22	Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf	Persen	N/A				99,99	99,99	99,99	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	Persen	N/A				77,08	77,35	77,35	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	N/A				102,77	103,04	103,04	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	N/A				89,81	90,08	90,08	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	N/A				96,81	97,08	97,08	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	N/A				76,37	76,64	76,64	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	N/A				97,46	97,73	97,73	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	N/A				79,32	79,59	79,59	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	N/A				77,08	77,35	77,35	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	N/A				96,29	96,56	96,56	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SD	Persen	N/A				0,015	0,014	0,014	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	N/A				0,019	0	0	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	N/A				68,89	68,06	68,06	Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	Nilai	N/A				52	52,1	52,1	Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	Nilai	N/A				95,47	95,48	95,48	Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	Nilai	N/A				77,8	77,81	77,81	Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	Nilai	N/A				100	100	100	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	Persen	N/A				51,39	51,39	51,39	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	N/A				46,7	46,7	46,7	Dinas Pendidikan
	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Persen	N/A				53,11	62,95	62,95	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	Persen	N/A				54,66	54,66	54,66	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	N/A				97,6	97,6	97,6	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	Persen	N/A				95,69	96,55	96,55	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	Persen	N/A				78,56	78,56	78,56	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	N/A				97,1	97,77	97,77	Dinas Pendidikan
	Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	Persen	N/A				80	86,66	86,66	Dinas Pendidikan
	Persentase PKBM yang Terakreditasi	Persen	N/A				62,5	66,67	66,67	Dinas Pendidikan
	Persentase LKP yang Terakreditasi	Persen	N/A				40	46,67	46,67	Dinas Pendidikan
	Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	persen	N/A					100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	rasio	N/A					01.24	01.24	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	rasio	N/A					01.24	01.24	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	rasio	N/A					01.07	01.07	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	rasio	N/A					01.07	01.07	Dinas Pendidikan
	Kesehatan									
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	64,2	64,2	78,07	78	78	78,07	Dinas Kesehatan
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	64,2	64,2	65,04	78	78	65,04	RSUD CIBABAT
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Kesehatan
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen					100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Kesehatan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	RSUD CIBABAT
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen					100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	RSUD CIBABAT
	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Kesehatan
	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100			100	RSUD CIBABAT
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	80,7	79,89	85,85			85,85	Dinas Kesehatan
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	80,7	79,89	94			94	RSUD CIBABAT
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B				B	B	B	RSUD CIBABAT

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100				100	100	100	RSUD CIBABAT
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	Persen	46,15	61,54	92,31	84,62			84,62	Dinas Kesehatan
	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	Persen	88,26	88,26	92,28	92			92	Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat	Persen	N/A	0,29	3,12	5			5	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting pada baduta	Nilai	12,04	<12,04	6,98	9,81			9,81	Dinas Kesehatan
	Cakupan ketersediaan SPA (sarana prasarana dan alat)	Persen	50	58,51					58,51	RSUD CIBABAT
	Kepuasan pelanggan	Persen	73,25	74,8	78,94	74,5			74,5	RSUD CIBABAT
	Persentase sarana/alkes kesehatan yang disediakan untuk mendukung kesehatan lingkungan	Persen	N/A		100				100	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	Persen	69,23				69,23	84,62	84,62	Dinas Kesehatan
	Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	Persen	83				83	83	83	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting pada balita	Nilai	10,89				10,8	10,7	10,7	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)	Persen	96				96	97	97	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	Persen	100				100	100	100	Dinas Kesehatan
	Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	Persen	90				90	92	92	Dinas Kesehatan
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	86				86	90	90	Dinas Kesehatan
	Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	Persen	100				100	100	100	Dinas Kesehatan
	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Persen	95				95	97	97	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	Persen	100				100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Essensial	Persen	100				100	100	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Persen	53				53	54	54	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75				75	80	80	RSUD CIBABAT

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	58,25	58,83	59,42	BB	BB	BB	Dinas Pekerjaan Umum
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	88,6	89,49	100			100	Dinas Pekerjaan Umum
	Tersedianya informasi perihal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi	Persen	100	100					100	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persen	92,4	93,91					93,91	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase jaringan jalan yang terpantau	Persen	100	100					100	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di kawasan strategis kota:									Dinas Pekerjaan Umum
	- Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	16					16	
	- Jumlah unit bangunan baru	Unit	37	3					3	
	- Jumlah unit bangunan rehab	Unit	N/A	4					4	
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	100	100					100	Dinas Pekerjaan Umum
	Tersertifikasinya pelaksana pekerja konstruksi di Kota Cimahi	Orang	300	450					450	Dinas Pekerjaan Umum
	Kapasitas jalan se-Kota Cimahi	M	105.193	105.573	105.493	108.073			108.073	Dinas Pekerjaan Umum
	Kapasitas Jembatan se-Kota Cimahi	M	2.660	3.234	2.661	3.234			3.234	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase bangunan berizin	Persen	29,6	29,84	30,5	32,7			32,7	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	Persen	17	33	27,91	8,69			8,69	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase kondisi jalan dan jembatan yang mantap	Persen	92,4		99,2	94,02			94,02	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	52,63	64,71	84,21	89,47	62	62	62	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A				71	72,5	72,5	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	N/A				93,37	94,87	94,87	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	Persen	N/A				6,2	8	8	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	52,11	52,63	53,16	BB	BB	BB	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	54,5	55,05	55,6			55,6	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Titik Longsor yang tertangani	Persen	100	8,98					8,98	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Menurunnya area genangan	Persen	N/A	0,31					0,31	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase peningkatan layanan air bersih perpipaan	Persen	1,81	2,08					2,08	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	Persen	100	100					100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	NA	30					30	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	80	88,42	83,33	80			80	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persen	1,51	0,5	3,16	0,78			0,78	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	Persen	73,53	10,4	75,88	74,44			74,44	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase luas taman terhadap luas kota	Persen	0,19	0,204	0,216	0,229			0,229	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase peningkatan kapasitas IPAL Komunal	Persen	4,03	7,88	10,66	75,83			75,83	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase kapasitas IPAL komunal yang digunakan	Persen	100		75,98	100			100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Total kapasitas SR air bersih	ltr/detik	12.136		12.136	32.536			32.536	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase SR air bersih terpasang dari total rencana	Persen	25,84		70,35	55,48			55,48	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Kapasitas Sungai terhadap kapasitas sungai yang ideal	m3	17.550		17.550	10.895			10.895	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Kapasitas Pengendali Banjir terhadap kapasitas Pengendali banjir yang ideal	Persen	7,41		76,85	86,77			86,77	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Kapasitas Sungai	m3	N/A				62.015	114.826	114.826	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	Persen	N/A				80	80	80	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	N/A				69,65	69,82	69,82	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase air minum layak dan aman	Persen	N/A				24,06	24,23	24,23	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	Persen	N/A				0,057	0,004	0,004	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan						57,14	42.86	42.86	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	N/A				76,78	77,48	77,48	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Nilai beban pencemar	ton per hari	N/A				31	31	31	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Pemakaman yang tersedia:	persen	N/A				7.60	7.60	7.60	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Tingkat Hunian	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase rumah tidak layak huni	Persen	N/A				1,45	1,47	1,47	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Luas kawasan kumuh ringan	Ha	N/A				7,23	7,23	7,23	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen	N/A				10	10	10	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU Sarana Permukiman									Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
	a. Jalan setapak	Persen	N/A				1,6	1,6	1,6	
	b. Taman	Persen	N/A				0.058	0.058	0.058	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	73	100			100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	64	100			100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A							SATPOL PP DAMKAR
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	64,66	65,31	65,96	70 (B)	75 (BB)	75 (BB)	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	86,53	94	94,94			94,94	SATPOL PP DAMKAR
	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bulan	12	12					12	SATPOL PP DAMKAR
	Menurunnya angka gangguan Trantibum	Kegiatan	7	6					6	SATPOL PP DAMKAR
	Cakupan Peraturan yang telah dikaji dan ditegakan	Persen	N/A	79,21					79,21	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	Persen	100	71,19	94	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		77	100			100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	N/A				100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persen	N/A				100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	CC (59,95)	CC (59,95)	BB (75,73)	BB	BB	BB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	77,93	92,82	93,63			93,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peresentase Korban Bencana yang di evakuasi	Persen	100	100					100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persen	79,21	33,33					33,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang di evakuasi	Persen	100	100	100	100			100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waktu tanggap bencana	Menit	15		15				15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	Persen	N/A				73,3	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	N/A				100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	N/A				100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sosial									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (64,07)	BB (75)	BB (75,75)	BB	BB	BB	DINSOSP2KBP3A
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	87,3	88,71	89,6			89,6	DINSOSP2KBP3A
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen	6,49	5,6	67,42	7,1			7,1	DINSOSP2KBP3A
	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	6,2	32	57,69	17,1			17,1	DINSOSP2KBP3A
	Persentase LKS yang terakreditasi	Persen	20	19	19,23	60			60	DINSOSP2KBP3A
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,76		37,93	29,1			29,1	DINSOSP2KBP3A
	Persentase PSKS yang tersertifikasi	Persen	4,67		90,47	43,9			43,9	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat pemberdayaan sosial	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Rasio	N/A				1:200	1:200	1:200	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	N/A				7,7	7,7	7,7	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Tenaga Kerja									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (65,86)	B (66,52)	BB (70.25)	BB	BB	BB	Dinas Tenaga kerja
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Tenaga kerja
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100				100	Dinas Tenaga kerja
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Tenaga kerja
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	85,38	86,23	96,8			96,8	Dinas Tenaga kerja
	Angka Kesempatan Kerja	Orang	273.616	273.955	272.553	254.699			254.699	Dinas Tenaga kerja
	Persentase kenaikan UMK	Persen	8,71	8,03	8,03	8,51			8,51	Dinas Tenaga kerja
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Tenaga kerja
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				85	90	90	Dinas Tenaga kerja
	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	Persen	N/A				10	15	15	Dinas Tenaga kerja
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	N/A				5	5	5	Dinas Tenaga kerja
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	N/A				50	50	50	Dinas Tenaga kerja
	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	N/A				50	50	50	Dinas Tenaga kerja
	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	Persen	N/A				50	50	50	Dinas Tenaga kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	70	79	96,43	85			85	DINSOSP2KBP3A
	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	Persen	29,3	29,82	31,11	30,65			30,65	DINSOSP2KBP3A

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	Persen	24	26	29,87	24,44			24,44	DINSOSP2KBP3A
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager profesional administrasi teknisi	Persen	45,94	49,32	49,49	45,38			45,38	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100		100	100			100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen	60	84	87,94	50	87,94	90	90	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	N/A				33	33	33	DINSOSP2KBP3A
	Jumlah Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	KK	N/A				1000	1000	1000	DINSOSP2KBP3A
	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persen	N/A				100	100	100	DINSOSP2KBP3A
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	Persen	N/A					100	100	DINSOSP2KBP3A
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Persen	N/A					100	100	DINSOSP2KBP3A
	Pangan									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	DISPANGTAN
	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	DISPANGTAN
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	75			75	DISPANGTAN
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100				100	DISPANGTAN
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				80	80	80	DISPANGTAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (60,50)	BB (70,16)	BB (70,86)	A	A	A	DISPANGTAN
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	89,17	90,06	97,95			97,95	DISPANGTAN
	Pola Pangan Harapan ketersediaan	Indeks	96,2	93,4	92,9	92,9			92,9	DISPANGTAN
	Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya :	Status	N/A		10,1	1			1	DISPANGTAN
	- Rata-rata kenaikan harga beras	Persen	N/A	3,5					3,5	

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Rata-rata kenaikan bahan pangan pokok lainnya	Persen	N/A	7,3					7,3	
	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi	Persen	60	65	60	78			78	DISPANGTAN
	Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Indeks	11	15	31,16	31			31	DISPANGTAN
	Rata-rata ketersediaan Energi dan Protein									DISPANGTAN
	- Energi	kal/kap/hari	N/A				2400	2400	2400	
	- Protein	gr/kap/hari	N/A				63	63	63	
	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein									
	- Energi	kal/kap/hari	N/A				2.100	2.100	2.100	
	- Protein	gr/kap/hari	N/A				57	57	57	
	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	Persen	N/A				100	100	100	DISPANGTAN
	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	Persen	N/A				70	70	70	DISPANGTAN
	Pertanahan									
	Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Persentase penegasan batas daerah yang telah diidentifikasi	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Cakupan Tanah Pemerintah Kota yang Bersertifikat	Kapling	203		208	213			213	Sekretariat Daerah
	Pengadaaan tanah untuk sarana olahraga	Ha	N/A	1,1143					1,1143	Disbudparpora
	Lingkungan Hidup									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	60.32 (B)	60.32 (B)	71.87 (BB)	BB	BB	BB	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	89,94	92,4	96,27			96,27	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	Persen	80	84					84	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengaduan yang ditangani	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring	Persen	44,67	31,49	68,6	52,63			52,63	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kelurahan yang sudah proklim	Persen	0	7	13,33	13			13	Dinas Lingkungan Hidup
	Luas kawasan terkonservasi	m2	N/A	208,5	3.775,46	30.000,2			30.000,2	Dinas Lingkungan Hidup
	Akses layanan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persen	100	100					100	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	1,19	0,906					0,906	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	11,15	11,65	11,16	11,13			11,13	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengurangan timbulan sampah	Persen	8		13,99%	13,19			13,19	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien	Persen	1,19		0,635	1,1			1,1	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Persen	57		17,77	47			47	Dinas Lingkungan Hidup
	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	N/A		96,06	84,43			84,43	Dinas Lingkungan Hidup
	Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	Persen	100		100	100			100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase perusahaan yang memenuhi Baku Mutu Air Limbah	Nilai	N/A				70	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
	Hasil Pengukuran Indeks-Pencemar Air	Nilai	N/A				16	15,5	15,6	Dinas Lingkungan Hidup
	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	Nilai	N/A				4,315972222	4,302777778	4,302777778	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	Persen	N/A				1,15	1,18	1,18	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Persen	N/A				75	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	Persen	N/A				50	55,55	55,55	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat perhargaan lingkungan hidup	Persen	N/A				50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengaduan yang LH ditindaklanjuti	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase sampah yang dikelola	Persen	N/A				98	99	99	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	Persen	N/A				74	73	73	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	Persen	N/A				24	26	26	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	62,87	63,5	64,13	BB	BB	BB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	96,63	97,6	98,57			98,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	Bulan	12	12					12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	Persen	90	50	92	93			93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	95,2	98,79	98,91	98,59	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	69	45,11	47,34	48,18	50	55	55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	58,1	65,24	68,71	79,99	75	80	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	95,2	90,58	85,63	76,42	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	N/A	75	91,1	81,64	92	95	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase lembaga/masyarakat yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Sekretariat Daerah
	Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM/BSMSS)	Persen	N/A		100				100	Sekretariat Daerah
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Rasio Akseptor KB	Persen	78,51	78,99	78,89	79,89	78,9	79	79	DINSOSP2KBP3A
	Rata-rata usia kawin pertama kawin	Tahun	21,5	21,5					21,5	DINSOSP2KBP3A
	Persentase tingkat keberlangsungan tingkat kontrasepsi	Persen	27,38	27					27	DINSOSP2KBP3A
	Rasio akseptor KB mandiri	Persen	80	82			80	80	80	DINSOSP2KBP3A
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	N/A				2,3	2,1	2,1	DINSOSP2KBP3A
	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Persen	N/A				9,1	9	9	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun		N/A				0,65	0,65	0,65	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen	N/A				12,39	12,39	12,39	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen	N/A				14,46	14,46	14,46	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen	N/A				11,66	11,66	11,66	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	Persen	N/A				0,37	0,39	0,39	DINSOSP2KBP3A
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M		N/A				1,25	1,25	1,25	DINSOSP2KBP3A
	Perhubungan									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Perhubungan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Dinas Perhubungan
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	67,78	68,46	69,14	BB	BB	BB	Dinas Perhubungan
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	87,89	88,77	89,66			89,66	Dinas Perhubungan
	Rasio prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun	Persen	100	100		100			100	Dinas Perhubungan
	Rasio angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Rasio pelanggaran lalu lintas	Persen	0	0					0	Dinas Perhubungan
	Rasio stadar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Rasio terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan	Km/jam	25	42,83					42,83	Dinas Perhubungan
	Rasio fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Rasio fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	Persen	100	100					100	Dinas Perhubungan
	Rasio fasilitas perlengkapan pemantauan kemacetan lalu lintas	Persen	100	40					40	Dinas Perhubungan
	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persen	65	65	32,32	76,92	67	67	67	Dinas Perhubungan
	Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persen	65	100	37	83,24	95	95	95	Dinas Perhubungan
	Persentase tersedianya halte dan terminal	Persen	64		91,3	85,22			85,22	Dinas Perhubungan
	Persentase penurunan titik kemacetan	Persen	90		20	13,33	20	30	30	Dinas Perhubungan
	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	55,5		51,58	78,09	78,09	78,09	78,09	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	89,15	100			100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	75,56	100			100	DISKOMINFOARPUS

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				63,83	63,83	63,83	DISKOMINFOARPUS
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	63,83	76	73,15	BB (75,65)	BB (76)	BB (76)	DISKOMINFOARPUS
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	91,45	89,76	90,66			90,66	DISKOMINFOARPUS
	Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	Persen	40	83	50	90,3			90,3	DISKOMINFOARPUS
	Terlaksanannya proses pengkajian bidang informasi dan komunikasi melalui pengkajian/ analisis isu pemberitaan di media massa	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS
	Terlaksananya fasilitasi pengingkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS
	Tersebarluskannya informasi pembangunan daerah melalui media massa, cetak dan elektronik	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS
	Cakupan pengembangan e-Government daerah	Persen	10	58	100	100	70	80	80	DISKOMINFOARPUS
	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	Persen	N/A				50	55	55	DISKOMINFOARPUS
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	DPKUKMP
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	DPKUKMP
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	92,74			92,74	DPKUKMP
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	DPKUKMP
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	DPKUKMP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	60,93	60,93	61,54	B	B	B	DPKUKMP
	Persentase realisasi anggaran	Persen	95	96,15	87,18	97,76			97,76	DPKUKMP
	Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	UKM	2941	2984	3039	3121			3121	DPKUKMP
	Jumlah wirausaha baru	WiUB	15	2	21	45			45	DPKUKMP
	Jumlah Koperasi aktif	Koperasi	90	95	105	105			105	DPKUKMP
	Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	Persen	N/A				30	40	40	DPKUKMP
	Persentase koperasi sehat	Persen	N/A				13	15	15	DPKUKMP
	Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	Persen	N/A				70	75	75	DPKUKMP
	Persentase koperasi aktif	Persen	N/A				38	40	40	DPKUKMP

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	Persen	N/A				16,67	18,67	18,67	DPKUKMP
	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	Persen	N/A				24,59	24,59	24,59	DPKUKMP
	Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	Persen	N/A				17,54	17,54	17,54	DPKUKMP
	Penanaman Modal									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100				100	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				80	85	85	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	64,94	65,59	70,71	BB (70)	BB (71)	BB (71)	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	93,45	90,15	91,05			91,05	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	Persen	N/A	100					100	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Jumlah kebijakan penanaman modal	Kebijakan	N/A	1			1	2	4	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	Izin	2	2	2	4	4	5	5	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	Perusahaan	125	178	141	216	230	250	250	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	Persen	N/A					4,76	4,76	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Persentase jenis izin yang dilayani secara online	Persen	N/A				46.88%	62.50%	62.50%	Dinas penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu
	Kepemudaan dan Olahraga									
	Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	Orang	200	50					50	Disbudparpora
	Cakupan pemuda/Organisasi Pemuda yang berwirausaha	Orang	100	100					100	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (atlit)	Persen	18,18	37,78	45,2	45,2	50,91	50,91	50,91	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pelatih)	Persen	49,14	27,59	68,8	78,62			78,62	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya manusia yang terbina (pembina)	Persen	3,03		21,2	36,36			36,36	Disbudparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	Persen	50		55	55			55	Disbudparpora
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik pemerintah)	Persen	0		33,33	66,67			66,67	Disbudparpora
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik swasta)	Persen	100		100	100			100	Disbudparpora
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai (lapangan olahraga milik TNI)	Persen	100		100	100			100	Disbudparpora
	Persentase Pemuda Yang Ikut Serta Dalam Pengembangan Pemuda	Persen	N/A				11	11	11	Disbudparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	N/A				60	70	70	Disbudparpora
	Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	Persen	N/A				50	53	53	Disbudparpora
	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	Persen	N/A				50	50	50	Disbudparpora
	Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	Persen	N/A				10	12	12	Disbudparpora

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Statistik									
	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	Persen	N/A	100					100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase ketersediaan data statistik daerah	Persen	N/A	40	36,77	50			50	DISKOMINFOARPUS
	Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu	Persen	N/A				50	60	60	DISKOMINFOARPUS
	Persandian									
	Persentase informasi yang aman	Persen	N/A		100	50			50	DISKOMINFOARPUS
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	N/A				30	35	35	DISKOMINFOARPUS
	Kebudayaan									
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Disbudparpora
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Disbudparpora
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Disbudparpora
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Disbudparpora
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				80	80	80	Disbudparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	59,08	59,04	76,95	BB	BB	BB	Disbudparpora
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	60,55	100	92,54	100	100	100	Disbudparpora
	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	24	29,63	45	55,56	50	55	55	Disbudparpora
	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	N/A				50	52	52	Disbudparpora
	Perpustakaan									
	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	Persen	78,6	79,87	80,27	80,32	80,27	80,27	80,27	DISKOMINFOARPUS
	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	Persen	60		68,5	68	2	3	3	DISKOMINFOARPUS
	Kearsipan									
	Terlakananya perbaikan sistem administrasi kearsipan	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS
	Tersimpannnya arsip secara aman, tertib dan	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mempermudah penemuan kembali arsip yang dibutuhkan									
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	Bulan	12	12					12	DISKOMINFOARPUS
	Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	Persen	100	100					100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	N/A		18,52	19,45	20	25	25	DISKOMINFOARPUS
	Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	N/A				100	100	100	DISKOMINFOARPUS
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	N/A				20	25	25	DISKOMINFOARPUS
	Tingkat keberadaan dan Keuutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	Persen	N/A				5	10	10	DISKOMINFOARPUS
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	Kelautan dan Perikanan									
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	300	328,57	335,35	270			270	DISPANGTAN
	Jumlah Jenis Ikan Hias yang dikembangkan	Jenis	3	0	2	5			5	DISPANGTAN
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi perikanan	Wilayah	lokal (kota Cimahi)	Lokal Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat	Luar provinsi jawa barat dan online			Luar provinsi jawa barat dan online	DISPANGTAN
	Jumlah produksi ikan konsumsi	ton	N/A				250	252,5	252,5	DISPANGTAN
	Jumlah produksi ikan hias	ekor	N/A				1.000.000	1.020.000	1.020.000	DISPANGTAN
	Angka Konsumi ikan	Kg/kapita/thn	N/A				35	37	37	DISPANGTAN
	Pariwisata									
	Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)	Orang	546	392	899	91			91	DISBUDPARPORA
	Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	Orang	3526	5852	43707	65610			65610	DISBUDPARPORA
	Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik	Destinasi	0		1	1			1	DISBUDPARPORA

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik	Persen	N/A				66,67	83,33	83,33	DISBUDPARPORA
	Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	Persen	N/A				66,67	83,33	83,33	DISBUDPARPORA
	Persentase sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki kompetensi	Persen	N/A				20,86	25,18	25,18	DISBUDPARPORA
	Pertanian									
	Persentase kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan yang terstandarisasi	Persen	N/A	15	9,43	30			30	DISPANGTAN
	Persentase keikutsertaan dalam promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	Persen	95	100	100	100			100	DISPANGTAN
	Produksi hasil tanaman padi	Ton	1674,13	1559,4	1693,2	1387,2			1387,2	DISPANGTAN
	Rasio jumlah ternak sakit yg ditangani terhadap jumlahpopulasi ternak yg terjangkit penyakit	Rasio	01.01	01.01	01.01	01.01			01.01	DISPANGTAN
	Produksi Hasil Peternakan:									DISPANGTAN
	- Daging	ton/tahun	100	1004	712,44	673,041			673,041	
	- Susu	l/tahun	750	823000	757,86	850			850	
	Wilayah cakupan pemasaran hasil produksi peternakan	Wilayah	Prov. Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Luar provinsi jawa barat dan online			Luar provinsi jawa barat dan online	DISPANGTAN
	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	Persen	N/A				25	25	25	DISPANGTAN
	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	N/A				100	100	100	DISPANGTAN
	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen	N/A				7,94	15,87	15,87	DISPANGTAN
	Perdagangan									
	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional	IKM/UKM	23	24	70	80			80	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase pasar tradisional layak fungsi	Persen	20	30	40	25			25	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Tertatanya bangunan di 4 pasar tradisional	Persen	15	50	60	70			70	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Cakupan Bina Kelompok pedagang	Kelompok	N/A	2	2	3			4	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Jumlah peredaran barang tidak layak konsumsi	Buah	0		0	0			0	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Tertatanya sistem pergudangan di Kota Cimahi	Persen	0		0	0			0	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Jumlah sentra jasa dan perdagangan	Sentra	0		0	0			0	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase kenaikan omset pedagang selama mengikuti pameran promosi	Persen	5		11,84	20			20	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Meningkatnya daya saing produk UKM/IKM	Persen	40		12	84			84	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan paham aturan / tata tertib	Persen	6,67		16,67	16,67			16,67	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	Persen	N/A				1	1	1	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	Persen	N/A				100	100	100	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	Persen	N/A				20	25	25	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	Persen	N/A				45	50	50	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Tingkat penggunaan produksi dalam negeri (pasar pemerintah dan toko modern)	Persen	N/A				60	80	80	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Perindustrian									
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu	IKM	N/A	418	486	550			1.454	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Jumlah Regulasi kebijakan pengembangan industri kota	Regulasi	N/A	1	1	0			2	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Sentra	2		2	2	2	3	3	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	58,8				68,8	78,8	78,8	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	Persen	N/A				46,51	50	50	Dinas perdagangan, koperasi UKM, dan perindustrian
	Transmigrasi									
	Angka Kesempatan Kerja	Orang	273.616	273.955					273.955	Dinas Tenaga Kerja

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (63,91)	BB (71,18)	BB (73,82)	BB	BB	BB	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina dlm pendidikan politik	Persen	12	14					14	Sekretariat Daerah
	Cakupan Bina Kelompok pedagang	Kelompok	N/A	2					2	Sekretariat Daerah
	Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah (APEKSI)	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Persentase pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Cakupan peraturan yang telah dikaji dan ditegakkan	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Tertatanya batas wilayah Kota Cimahi	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	Persen	N/A	100					100	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya sosialisasi RANHAM	Persen	100	100					100	Sekretariat Daerah
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100				100	Sekretariat Daerah
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	75		80				80	Sekretariat Daerah
	Persentase pemilu yang difasilitasi	Persen	100		100				100	Sekretariat Daerah
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	99,7	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	89,66	97,99	88,75			88,75	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100			100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	Persen	80		100	80			80	Sekretariat Daerah
	Persentase lembaga yang berdaya	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A		35	100			100	Sekretariat Daerah
	Nilai komponen pelaporan LKIP kota	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase PD yang memiliki Evaluasi Jabatan yang baik	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase PD/Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	30		80,76	81,75			81,75	Sekretariat Daerah
	Persentase dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang bernilai baik	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum yang tersusun	Persen	100		100	99,78			100	Sekretariat Daerah
	Persentase kasus hukum terfasilitasi	Persen	100		82	95,38			95,38	Sekretariat Daerah
	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perekonomian	Persen	75		100	95,47			95,47	Sekretariat Daerah
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	Persen	100		100	100			100	Sekretariat Daerah
	Persentase pelaksanaan pekerjaan yang di Monev	Persen	100		100	97			97	Sekretariat Daerah
	Pesentase kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial dan kepemudaan olahraga yang difasilitasi	Persen	71		100	71			71	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Persen	97		100	73,8			73,8	Sekretariat Daerah
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				90	90	90	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	Kategori	N/A				B	B	B	Sekretariat Daerah
	Persetanse Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persetanse Perangakat Daerah yang Menerapkan SOP	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanaan	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persetanse Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	Nilai	N/A				78	80	80	Sekretariat Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Kategori	N/A				B	B	B	Sekretariat Daerah
	Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	Nilai	N/A				80	81	81	Sekretariat Daerah
	Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	Persen	N/A				77	77	77	Sekretariat Daerah
	Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	Persen	N/A				1	1	1	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	Persen	N/A				1	1	1	Sekretariat Daerah
	Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	Persen	N/A				77	77	77	Sekretariat Daerah
	Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	Persen	N/A				79,05	79,05	79,05	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persetase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	Persen	N/A				97	97	97	Sekretariat Daerah
	Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	Persen	N/A				71	71	71	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesehajteraaan Rakyat	Nilai	N/A				84	84	84	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	51,39	51,9	70,14	BB (74)	BB (76)	BB (76)	Sekretariat DPRD
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Sekretariat DPRD
	Cakupan Kinerja DPRD sesuai dengan peran dan fungsinya	Persen	100	100					100	Sekretariat DPRD
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	90,56	91,47	100			92,38	Sekretariat DPRD
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Sekretariat DPRD
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	100		99	100			100	Sekretariat DPRD
	Persentase sarana alat mass media yang digunakan	Persen	100		100	100			100	Sekretariat DPRD
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				48	70	70	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	N/A				85 (B)	90 (A)	(90) A	Sekretariat DPRD
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Perencanaan									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	63,38	74,33	75,68	80 (A)	82 (A)	A	BAPPEDA
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	BAPPEDA
	Persentase data yang digunakan dalam perencanaan	Persen	100	100					100	BAPPEDA
	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	6,16	32					32	BAPPEDA
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	52,63	64,71					64,71	BAPPEDA
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	90				90	BAPPEDA
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	95	95			95	BAPPEDA
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	87	91,71	99,15			99,15	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100	100			100	BAPPEDA
	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencana	Persen	49	64	80	100			100	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100	100			100	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100	100			100	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor fisik sesuai dengan peraturan	Persen	100		100	100			100	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	Persen	100		100	100			100	BAPPEDA
	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	Persen	100		100	100			100	BAPPEDA
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				80	80	80	BAPPEDA
	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Keuangan									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	B (67,35)	B (68,02)	B (68,70)			B (68,70)	BPKAD
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	BPKAD
	Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100					100	BPKAD
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Badan Pengelola Pendapatan
	Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100					100	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	90,64	100			100	BPKAD
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	BPKAD
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	87,01	87,88	98,17			98,17	BPKAD

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	80	100			100	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	80	100			100	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase realisasi anggaran	Persen	93,4	92,15	93,12	94,44			94,44	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase dokumen anggaran yang tepat waktu	Persen	70		100	100			100	BPKAD
	Persentase dokumen pelaporan yang tepat waktu	Persen	90		100	100			100	BPKAD
	Persentase kelengkapan dokumen milik daerah	Persen	90		100	100			100	BPKAD
	Persentase peningkatan pajak daerah per tahun	Persen	47,59		21,05	-16,3			-16,30	Badan Pengelola Pendapatan
	Realisasi target pendapatan daerah	Persen	100,83		94,59	95,6			95,6	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A			47,37	50	52,63	52,63	BPKAD
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	BPKAD
	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	N/A				100	100	100	BPKAD
	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	N/A				100	100	100	BPKAD
	Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	Persen	N/A				70	80	80	BPKAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A				BB (71)	A (81)	A (81)	BPKAD
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				50	52,63	52,63	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen	N/A				6,4	2	2	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	N/A				90	90	90	Badan Pengelola Pendapatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A				60,1	62,1	62,1	Badan Pengelola Pendapatan
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Badan Pengelola Pendapatan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				64,29	76,19	76,19	Badan Pengelola Pendapatan
	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (65,44)	B (65,44)	B (66,09)	BB (75)	BB (76)	BB (76)	BKPSDMD
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	BKPSDMD
	Pelayanan fasilitasi purna bhakti PNS	Persen	100	100					100	BKPSDMD
	Cakupan Aparatur yang Terlatih	Persen	100	90					90	BKPSDMD
	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur	Tahun	1	1					1	BKPSDMD
	Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bulan	12	12					12	BKPSDMD
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama	Persen	100	100					100	BKPSDMD
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	98,5	100			100	BKPSDMD
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	BKPSDMD
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	Persen	N/A				13,5	14	14	BKPSDMD
	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	Persen	N/A				5	5	5	BKPSDMD
	Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	Persen	N/A				24,5	25	25	BKPSDMD
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	N/A				79	80	80	BKPSDMD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	N/A				BB (75)	BB (76)	BB (76)	BKPSDMD
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				85	90	90	BKPSDMD
	Penelitian dan Pengembangan									
	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	N/A				100	100	100	BAPPEDA
	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	N/A				10	10	10	BAPPEDA

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inspektorat									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	BB (70,77)	BB (71,48)	A (80.3)	A (80)	A (81)	A (81)	Inspektorat
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Inspektorat
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100					100	Inspektorat
	Meningkatnya profesionalisme pengawasan aparatur	Tahun	1	1					1	Inspektorat
	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100					100	Inspektorat
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100				100	Inspektorat
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	85,5	100	94,6			94,6	Inspektorat
	Level APIP sesuai standar kompetensi menuju level APIP/IACM (Internal Audit Capability Model) berkelanjutan	Level	Level 1		3,52	Level 2			Level 3	Inspektorat
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Inspektorat
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				90	100	100	Inspektorat
	Nilai Hasil Pengawasan	Persen	N/A				70	80	80	Inspektorat
	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	N/A				3	3	3	Inspektorat
	Kecamatan									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	60,29	71,18	71,89	BB	BB	BB	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	91,68	97,99	98,97			98,97	Kecamatan Cimahi Utara
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Kecamatan Cimahi Utara
	Pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	Persen	50	50					50	Kecamatan Cimahi Utara

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bulan	12	12					12	Kecamatan Cimahi Utara
	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	Bulan	12	12					12	Kecamatan Cimahi Utara
	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	Persen	N/A	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	99,7	92,86			92,86	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Utara
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	95,2	96	100	98			98	Kecamatan Cimahi Utara
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	69	73	78	82			82	Kecamatan Cimahi Utara
	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	58,1	65	7	75			75	Kecamatan Cimahi Utara
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	95,2	96	100	98			98	Kecamatan Cimahi Utara
	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	N/A	75	78	81			81	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	Persen	90	91	98,53	77,94			77,94	Kecamatan Cimahi Utara
	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	Perusahaan	125	145	165	185			185	Kecamatan Cimahi Utara
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen			100				100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	75		86,47				86,47	Kecamatan Cimahi Utara
	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	Ijin	2		3	4			4	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	Persen	80		100	80			80	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase lembaga yang berdaya	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Utara
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A		35	40			40	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Utara

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	N/A				91	91	91	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	N/A				85	90	90	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	N/A				80	80	80	Kecamatan Cimahi Utara
	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen	N/A					75	75	Kecamatan Cimahi Utara
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	62,56	100	101	BB	BB	BB	Kecamatan Cimahi Tengah
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bulan	12	12					12	Kecamatan Cimahi Tengah
	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	Bulan	12	12					12	Kecamatan Cimahi Tengah
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Kecamatan Cimahi Tengah
	Pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	Persen	50	50					50	Kecamatan Cimahi Tengah
	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Kecamatan Cimahi Tengah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen	6	6,49					6,49	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100				100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	75		85,61				85,61	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	93	100	101			101	Kecamatan Cimahi Tengah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	95,2	96	97	98			98	Kecamatan Cimahi Tengah
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	69	73	78	82			82	Kecamatan Cimahi Tengah
	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	58,1	65	7	75			75	Kecamatan Cimahi Tengah
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	95,2	96	97	98			98	Kecamatan Cimahi Tengah
	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	N/A	75	78	81			81	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	Persen	90	91	100	93			93	Kecamatan Cimahi Tengah
	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	Perusahaan	125	145	0	185			185	Kecamatan Cimahi Tengah
	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	Ijin	2		3	4			4	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	Persen	80		80	80			80	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase lembaga yang berdaya	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A		100	40			40	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen	N/A		88				88	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	N/A				82	83	83	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	N/A				85	90	90	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	N/A				80	80	80	Kecamatan Cimahi Tengah
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,68)	B (60,82)	B (60,82)	B (61,43)	BB	BB	BB	Kecamatan Cimahi Selatan
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	Persen	50	50					50	Kecamatan Cimahi Selatan
	Penyelengaraan penataan administrasi kependudukan	Bulan	12	12					12	Kecamatan Cimahi Selatan
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Kecamatan Cimahi Selatan
	Meningkatnya efisiensi, efekti fitas, akuntabilitas penyeleng garaan pemerintahan dan kepatuhan peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A	30					30	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen	6,49	6,49					6,49	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Terwujudnya Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	Persen	N/A	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100					100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	94	100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	95,2	96	97	98			98	Kecamatan Cimahi Selatan
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	69	73	78	82			82	Kecamatan Cimahi Selatan
	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	58,1	65	7	75			75	Kecamatan Cimahi Selatan
	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	95,2	96	97	98			98	Kecamatan Cimahi Selatan
	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	N/A	75	78	81			81	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan	Persen	90	91	92	93			93	Kecamatan Cimahi Selatan
	Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	Perusahaan	125	145	165	185			185	Kecamatan Cimahi Selatan
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	100	100	100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase PMKS yang diberdayakan	Persen	N/A		67				67	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	75		80				80	Kecamatan Cimahi Selatan
	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	Ijin	2		3	4			4	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan	Persen	80		100	80			80	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase lembaga yang berdaya	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Tingkat keswadayaan masyarakat	Persen	N/A		100	40			40	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase Penanganan Gangguan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		100	100			100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	NA				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	N/A				86	86	86	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	N/A				90	90	90	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	N/A				100	100	100	Kecamatan Cimahi Selatan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,68 (B)	59,01	59,6	60,2	70	70	70	Kesbangpol
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100					100	Kesbangpol
	Pengembangan wawasan kebangsaan	Persen	100	62,5					62,5	Kesbangpol
	Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, ormas dan linmas	Bulan	12	12					12	Kesbangpol
	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	Persen	100	95,71					95,71	Kesbangpol
	Persentase ASN yang dibina	Persen	100	100	9,9				9,9	Kesbangpol
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina dlm pendidikan politik	Persen	12	14	16				16	Kesbangpol
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	75	75	85				85	Kesbangpol
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	Persen	100	100	100	100			100	Kesbangpol
	Persentase realisasi anggaran	Persen	85	91,09	92	92,92			92,92	Kesbangpol
	Persentase kelompok masyarakat yang terbina wawasan kebangsaan	Persen	50	85	100	100			100	Kesbangpol
	Persentase wilayah yang terpantau	Persen	100		100	100			100	Kesbangpol
	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol
	Tingkat partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam pembangunan	Persen	80							Kesbangpol
	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol
	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dilaksanakan									
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol
	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol
	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persen	N/A				100	100	100	Kesbangpol

Sumber : hasil analisis, 2020

BAB IX
PENUTUP

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang berisi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 periode/tahap berkenaan, dan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, perlu ditetapkan beberapa kaidah sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
2. Penjabaran Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kota Cimahi setiap tahun sampai dengan RKPD Tahun 2022;
3. Evaluasi hasil pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD ini;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan RKPD Kota Cimahi dan melakukan evaluasi terhadap pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan

Renja Perangkat Daerah yang dilakukan masing-masing perangkat daerah secara periodik;

5. Wali Kota Cimahi wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022; dan
7. Apabila dalam periode pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 terjadi kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kota Cimahi, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan dengan DPRD Kota Cimahi untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 memuat realisasi pembangunan tahun 2018 dan 2019; pelaksanaan pembangunan tahun 2020; dan rencana pembangunan tahun 2021 dan 2022. Penyesuaian rencana dan target kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD pada saat yang bersamaan juga telah dilakukan pada penyusunan rencana tahunan, baik Perubahan RKPD Tahun 2020 maupun RKPD Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk merespon kondisi akibat pandemi COVID-19 dan amanat penerapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini berakhir di

tahun 2022, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2023. Bahwasanya pada tahun 2022, RPJMD tahun 2022-2027 belum tersusun, sehingga Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cimahi 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Rancangan Teknokratis RPJMD 2022-2027 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan RKPD Tahun 2023.

Keberhasilan implementasi Perubahan RPJMD sangat bergantung pada seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam menjaga konsistensi antara Perubahan RPJMD Kota Cimahi dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI